



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

#### 1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### 1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Kecukupan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)  
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. Neraca  
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)  
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan



dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;



12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

#### **Bab 1    Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab 2    Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### **Bab 3    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD

#### **Bab 4    Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya



- 4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi

**Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

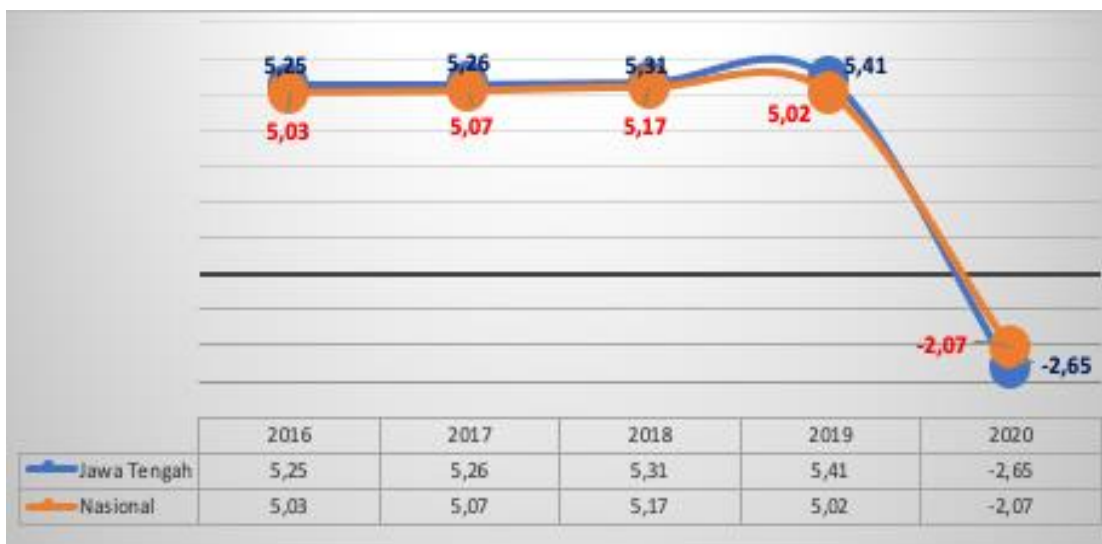
**Bab 7 Penutup**

## BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro

#### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran *online* serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.1.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi produksi selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda



motor. Meskipun angka distribusinya fluktuatif naik turun dari tahun ke tahunnya. Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,52 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,30 persen dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,49 persen.

Tabel 2.1.  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016 – 2020 (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,13	14,39	14,06	13,53	14,30
B	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,55	2,55	2,48	2,45
C	Industri Pengolahan	34,69	34,58	34,41	34,44	34,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,29	10,48	10,73	10,81	10,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,48	13,58	13,64	13,74	13,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,11	3,12	3,22	2,21
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,10	3,09	3,11	3,20	2,99
J	Informasi dan Komunikasi	3,04	3,34	3,47	3,64	4,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	2,98	2,96	2,89	2,98
L	Real Estate	1,67	1,69	1,69	1,68	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,40	0,42	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,87	2,82	2,73	2,68	2,70
P	Jasa Pendidikan	4,27	4,41	4,49	4,58	4,74
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,86	0,87	0,89	0,90	1,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,56	1,59	1,63	1,53
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan:

\*: Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi pengeluaran mencatatkan bahwa Komponen Net Ekspor Antar Daerah berkontraksi paling dalam sebesar -23,13 persen.. Komponen lainnya yang juga mengalami kontraksi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga



(PKLNPRT) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami kontraksi. Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,30 persen, -2,98 persen, dan -1,42 persen.

Tabel 2.2.  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,56	4,62	4,69	4,62	-1,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,61	4,43	7,62	10,90	-2,98
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,58	3,07	2,98	3,98	-4,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,99	7,50	7,68	4,85	-6,98
Perubahan Inventori	49,25	4,97	4,66	-5,13	-
Ekspor Luar Negeri	-3,02	13,54	12,02	4,92	-7,90
Impor Luar Negeri	-4,37	9,58	32,61	-9,33	-17,65
Net Ekspor Antar Daerah	2,80	0,60	49,00	-11,75	-23,13
<b>Total</b>	<b>5,28</b>	<b>5,26</b>	<b>5,31</b>	<b>5,41</b>	<b>-2,65</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan:

\*: Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa.

Tabel 2.3.  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	660.998,58	711.586,51	764.808,38	821.948,11	822.095,50
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12.256,98	13.168,41	14.491,86	16.443,21	16.224,64
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	87.589,15	94.261,56	98.717,17	103.209,51	98.359,80
Pembentukan Modal Tetap Bruto	333.977,42	366.766,47	413.749,15	449.486,05	417.815,40
Perubahan Inventori	7.307,46	10.618,21	17.201,59	11.362,19	12.797,37
Ekspor Luar Negeri	92.562,66	106.463,04	123.867,81	128.554,84	118.335,36
Impor Luar Negeri	134.238,54	160.854,81	234.981,44	203.947,07	157.157,39
Net Ekspor Antar Daerah	26.872,96	30.785,14	70.600,26	35.170,50	20.129,72





Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018*	2019*	2020**
<b>Total PDRB</b>	<b>1.087.316,68</b>	<b>1.172.794,52</b>	<b>1.268.454,78</b>	<b>1.362.457,38</b>	<b>1.348.600,40</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan:

\*: Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah dengan besaran 60,96 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) sebesar 30,98 persen, komponen Impor Luar Negeri sebesar 11,65 persen, komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,77 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,29 persen, komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 1,49 persen, komponen PKLNPRT sebesar 1,20 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen.

Tabel 2.4.  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016 – 2020 (%)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,79	60,67	60,29	60,33	60,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,12	1,14	1,21	1,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,06	8,04	7,78	7,59	7,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,72	31,27	32,62	32,99	30,98
Perubahan Inventori	0,67	0,91	1,36	0,83	0,95
Ekspor Luar Negeri	8,51	9,08	9,77	9,44	8,77
Impor Luar Negeri	12,35	13,72	18,53	14,97	11,65
Net Ekspor Antar Daerah	2,47	2,62	5,57	2,58	1,49
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan:

\*: Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Sampai dengan tahun 2019, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 28,57 juta rupiah.

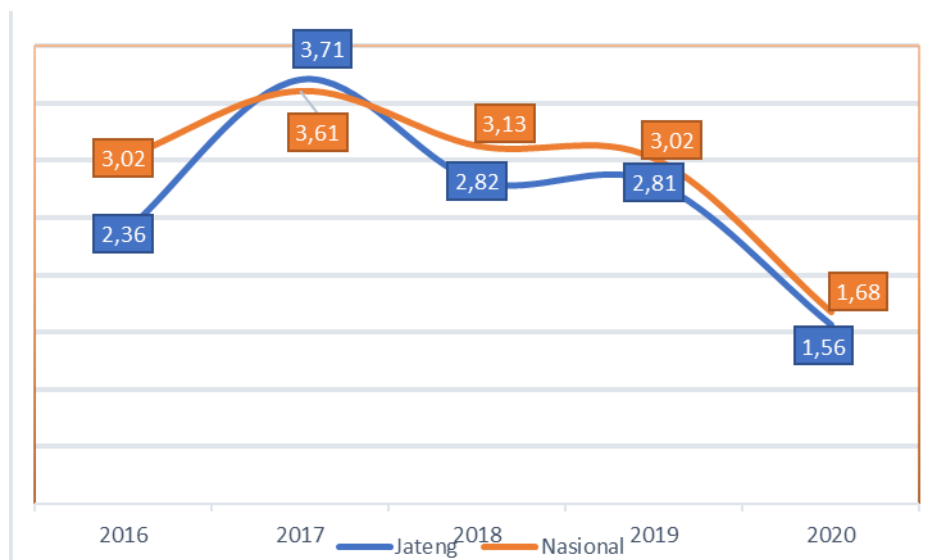
Tabel 2.5.  
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
2016	31.961.950	24.959.490
2017	34.234.310	26.088.910
2018	36.770.960	27.287.370
2019	39.217.680	28.575.950
2020	38.597.520	27.636.718

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

### 2.1.3. Inflasi

Pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,45 persen maupun bulan Desember 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 1,56 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2019 sebesar 2,81 persen maupun inflasi tahun kalender Desember 2018 sebesar 2,82 persen. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.2.

Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)

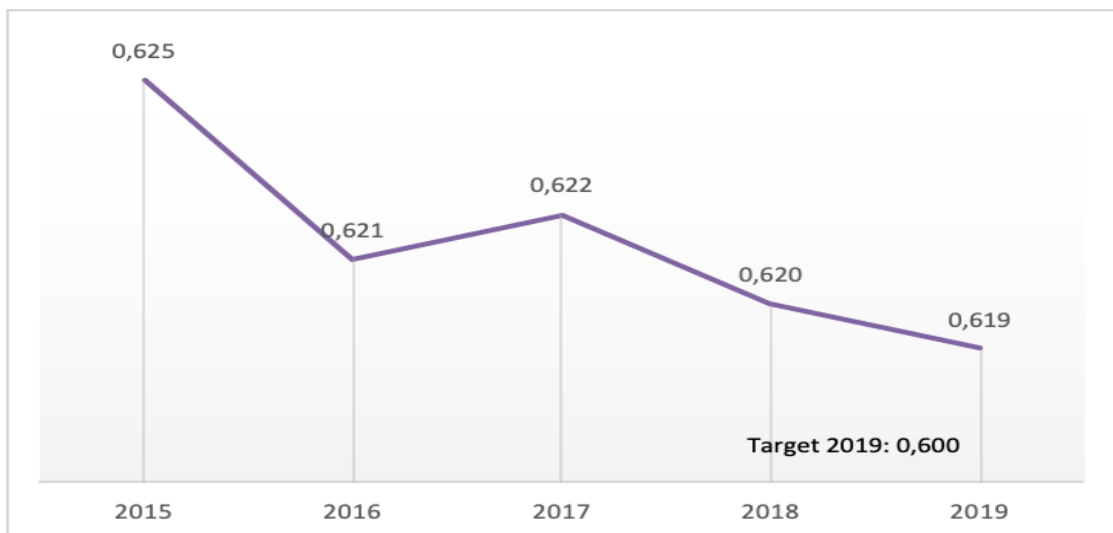
### 2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Pada September 2020, tingkat

ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,359. Angka ini turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,362, namun sedikit naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,358. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,386. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,385 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,379. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,318. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,319 dan naik sebesar 0,003 poin jika dibanding Gini Ratio September 2019.

#### 2.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,625 menjadi 0,619. Meskipun jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang sebesar 0,600 belum dapat tercapai. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.



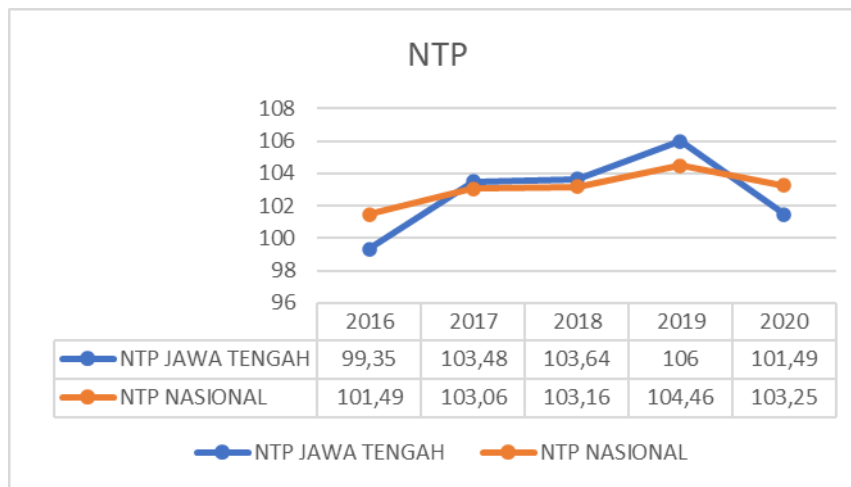
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.3.  
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

#### 2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari harga-harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Kurun waktu tahun 2016-2019, NTP per Bulan Desember cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 99,35 pada tahun 2016 menjadi 106 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan menjadi sebesar 101,49 dikarenakan pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian. Subsektor yang mengalami penurunan NTP pada Desember 2020 yaitu Subsektor Tanaman Pangan -0,82 persen, dan Subsektor Hortikultura -1,87 persen. Sedangkan NTP yang mengalami kenaikan indeks yaitu Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,43 persen, Subsektor Peternakan 0,24 persen, dan Subsektor Perikanan 0,92 persen.



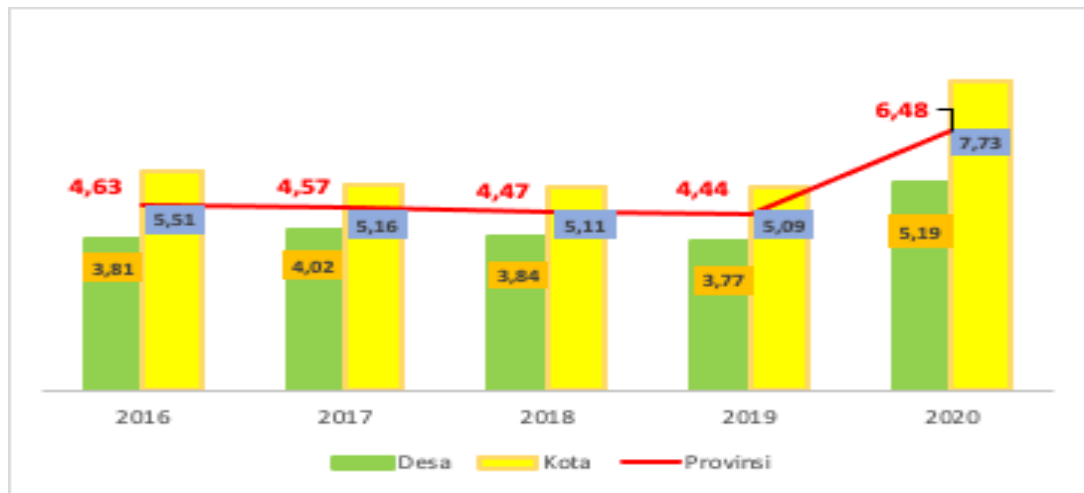
Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.4.  
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2016 – 2020

### 2.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, meningkat 2,04 persen poin atau 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 4,44 persen atau 0,82 juta orang. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,73 persen meningkat 2,64 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019 yang sebesar 5,09 persen. Sedangkan TPT di perdesaan meningkat 1,42 persen yaitu dari 3,77 persen pada Agustus 2019 menjadi 5,19 persen pada Agustus 2020.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.5.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016-2020

### 2.1.8. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016 – 2019 menurun dari 13,19 persen menjadi 10,58 persen (atau dari 4.493,75 ribu orang menjadi 3.679,40 ribu orang). Namun pada periode September 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,84 persen naik 1,26 persen dibandingkan September 2019 (bertambah 440,53 ribu orang dari 3.679,40 ribu orang menjadi 4.119,93 ribu orang). Kenaikan angka kemiskinan tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,23 juta orang (13,20%), lebih besar dibandingkan di perkotaan sebanyak 1,89 juta orang (10,57%). Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 288,23 ribu orang (dari 1,60 juta orang pada September 2019 menjadi 1,89 juta orang pada September 2020). Sedangkan di perdesaan bertambah sebanyak 152,29 ribu orang (dari 2,08 juta orang pada September 2019 menjadi 2,23 juta orang pada September 2020).

Kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan. Perkotaan lebih sensitif karena intensitas aktivitas perekonomian dan penduduk yang lebih tinggi terutama UMKM dan sektor informal, sehingga potensi penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Tabel 2.6.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016-2020

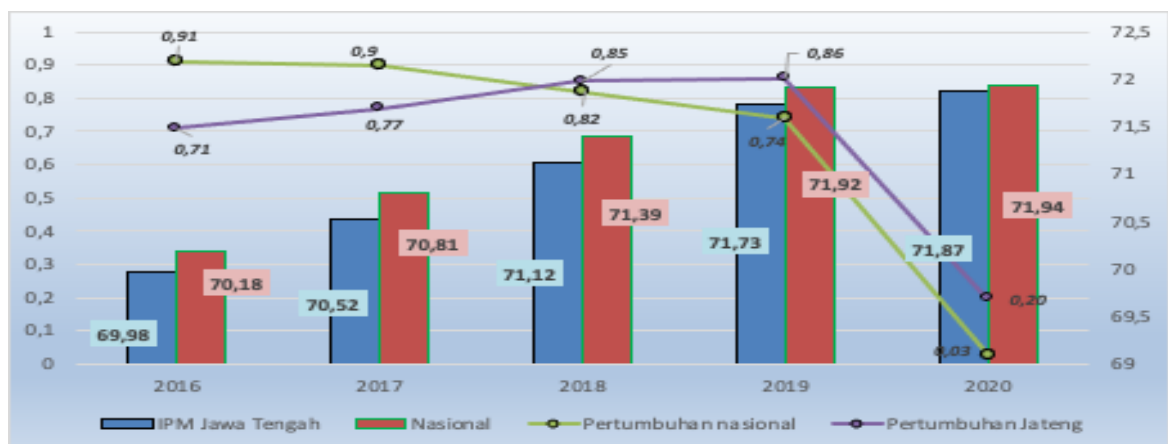
Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu orang)			(% )		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2016	Maret	1.824,08	2.682,81	4.506,89	11,44	14,89	13,27
	September	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu orang)			(% )		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2018	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020

### 2.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori “tinggi”. Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020. Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,20 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,03. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.6.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dengan kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, maka kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2020 diarahkan untuk pertolongan penanganan Covid-19 dengan



tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai di tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023.

### **2.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah**

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”. Mendasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut serta sebagai upaya pertolongan dan pemulihan kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang telah terutama pada aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
  - 1) Pengurangan Kemiskinan
    - a) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya;
    - b) Penguatan *sustainable livelihood*);
    - c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan; dan
    - d) Penguatan SDM pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta pengintegrasian penanganan kemiskinan.
  - 2) Menurunkan angka pengangguran
    - a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
    - b) Perluasan kesempatan kerja; dan
    - c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, difokuskan pada:
  - 1) Perbaiki akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas;
  - 2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
  - 3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
  - 4) Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial; dan
  - 5) Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan.
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, difokuskan pada:
  - 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,;



- 2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
  - 4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
  - 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
  - 6) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
  - 7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi;
  - 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
  - 9) Peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - 10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
- 1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik;
  - 2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (*digitalisasi tata kelola pemerintahan*) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88;
  - 3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
  - 4) Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
  - 5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini; dan
  - 6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

## 2.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

### 2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.





#### 2.2.2.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan dengan mempertimbangkan kejadian pandemi Covid-19. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan dengan asumsi penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat pandemi Covid-19, serta lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian industri besar otomotif yang turut mempengaruhi penerimaan BBNKB. Target pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan pada asumsi turunnya harga jual BBM sebesar 10,24 persen, penurunan konsumsi BBM sebesar 8 persen, serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina. Sementara itu Pajak Air Permukaan (PAP) juga diproyeksikan dengan asumsi atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah kabupaten/kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi yang dikurangi adanya kurang bayar BPJS, sehingga penerimaan Pajak Rokok tahun 2020 turun.

Dari komponen Retribusi Daerah juga diproyeksikan dengan asumsi adanya penerapan *social distancing* dan *physical distancing* yang berdampak pada penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 ditargetkan dengan asumsi penurunan BI *rate* dan pendapatan secara keseluruhan yang berakibat pada turunnya estimasi penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito; adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB di tahun 2020 sehingga estimasi penerimaan denda pajak turun; BRT Trans Jateng yang beroperasi dengan *pemberlakukan social distancing* dan *physical distancing*; penundaan pada seluruh kegiatan pelatihan, pelaksanaan penilaian kompetensi/ ujian kenaikan penyesuaian ijazah; serta penurunan pendapatan dari BLUD akibat dampak Covid-19 pada jumlah kunjungan pasien.

#### 2.2.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain:

1. Optimalisasi pungutan PAD tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, melalui:
  - a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
  - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel; dan
  - d. Mengembangkan system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis *online system* menjadi lebih mudah dan murah.



2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
5. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah; dan
6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.

### **2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kebijakan terkait: perencanaan belanja, kebijakan belanja terkait jenis belanja, kebijakan belanja terkait program pembangunan.

#### **2.2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah**

Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2020 tetap diarahkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Belanja daerah tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* yang dilakukan secara selektif, akuntabel dan transparan. Belanja Daerah terdiri dari:

- a) Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga;
- b) Belanja Langsung yang dipergunakan Program/kegiatan di tiap OPD.

#### **2.2.3.2. Kebijakan terkait belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan belanja langsung**

Dalam rangka penanganan Covid-19 di tahun 2020, kebijakan belanja daerah diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme *refocussing* belanja dengan pengalokasian belanja tidak terduga dan penyesuaian pada belanja langsung OPD untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19.

Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah tahun 2020 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:



- 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 2) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2020;
- 3) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera;
- 4) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- 5) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa termasuk didalamnya adalah stimulan untuk perbaikan Rumah Sederhana Layak Huni dan sarpras perdesaan; dan
- 6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada perubahan tahun 2020 dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga melalui refocussing anggaran untuk kegiatan penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial, dan kegiatan pendukung lainnya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung di tahun 2020 tersebut utamanya diarahkan untuk:

- 1) Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
- 2) Mendukung upaya penanganan dampak Covid-19 melalui:
  - a) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya; dan
  - b) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa serta sarpras perdesaan yang dilakukan dengan mekanisme padat karya.
- b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Komponen belanja langsung meliputi:
  - 1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
  - 2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor,



makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; dan

- 3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kebijakan Belanja Langsung tersebut di tahun 2020 utamanya diarahkan untuk:

- 1) Penanganan pandemi Covid 19;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program/kegiatan prioritas/strategis daerah dan program unggulan serta urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- 3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- 5) Memenuhi alokasi persentase belanja *mandatory* sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- 6) Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah.

### 2.2.3.3. Kebijakan terkait Penanganan Dampak Covid-19

#### 2.2.3.3.1 *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Di Jawa Tengah

##### A. TAHAP I

###### Dasar :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Jawa Tengah.

Pemenuhan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dipusatkan pada Belanja Tidak Terduga dan pergeseran pada internal SKPD yang mendukung antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19. Adapun alokasi yang ada di Belanja Tidak Terduga



bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga, Penundaan Penyertaan Modal, dan Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga Rp 19.000.000.000,-
2. Pembiayaan (Penyertaan Modal) Rp 80.000.000.000,-
3. Refocusing/Rasionalisasi Belanja SKPD Rp 1.888.003.130.000,-  
Rp 1.987.003.130.000,-

*Refocusing*/Rasionalisasi SKPD tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900/0004361 tanggal 7 April 2020 Tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Alokasi anggaran difokuskan untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.7.  
Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran dari <i>Refocusing</i>	Anggaran Pergeseran
1	Penanganan Kesehatan	426.795.679.000	29.069.683.000
2	Penanganan Dampak Ekonomi	153.916.550.000	29.609.958.000
3	Bantuan Keuangan Pembangunan Desa	68.536.560.000	77.780.000.000
4	Penyediaan <i>social safety net</i> / jaring pengaman sosial	1.337.754.341.000	3.452.976.000
	Sub Total	1.987.003.130.000	139.912.617.000
	<b>Total</b>		<b>2.126.915.747.000</b>

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004365 tanggal 22 April 2020 perihal Pemberitahuan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 serta Pengalihan DAK Fisik Dikmen dari Belanja Langsung ke Belanja Tidak Langsung untuk SMK dan SLB swasta serta penyesuaian DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya kepada DPRD.

## B. TAHAP II

Pergeseran anggaran internal SKPD dan tidak merubah postur belanja yang diusulkan oleh:

### 1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah



Pergeseran digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin di ruang pelayanan Samsat, memberikan sarung tangan, masker, dan vitamin kepada petugas front office dan kasir, serta penyediaan hand sanitizer.

**2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah**

Pergeseran digunakan untuk pengadaan alat *Video Conference* dalam pandemi Covid-19.

**3. RSUD Dr. Moewardi Surakarta**

Pergeseran digunakan untuk pemenuhan alat kesehatan yang digunakan pada ruang isolasi Covid-19.

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004370 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

**C. TAHAP III**

Penyesuaian Pendapatan dan Penyesuaian Belanja akibat Penurunan Pendapatan.

**Dasar :**

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



**Penyesuaian target Pendapatan Daerah diperoleh melalui:**

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta mempertimbangkan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.8.  
Alokasi Kurang Bayar Transfer ke Daerah

Alokasi Kurang Bayar DBH 2018 sesuai PMK 20/PMK.07/2020		41.167.711.000
DBHCHT	6.423.842.000	
PBB	12.250.200.000	
pph	17.568.170.000	
SDA	4.925.499.000	

- b. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.9.  
Alokasi Dana Transfer Ke Daerah



Dana Pertanggung-jawaban PPh di Provinsi 2020	12.214.811.794.000	11.050.989.082.000	(529.342.729.000)
Bagi Hasil Pajak	776.324.422.000	819.148.494.000	42.824.072.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	764.719.178.000	810.792.242.000	46.073.064.000
Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	445.551.825.000	541.451.681.000	95.899.856.000
Bagi Hasil dan Pajak Bumi dan Bangunan	91.663.336.000	54.501.085.000	(37.162.251.000)
Bagi Hasil Cukai/Hasil Tambak	236.434.977.000	214.784.475.000	(21.650.502.000)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12.114.944.000	2.401.242.000	(9.713.702.000)
Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Galian	4.555.678.000	2.633.896.000	(1.921.782.000)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	833.133.000	766.245.000	(66.888.000)
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	6.725.633.000	5.078.801.000	(1.646.832.000)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>3.380.691.917.000</b>	<b>3.450.071.369.000</b>	<b>(69.379.572.000)</b>
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>7.887.503.225.000</b>	<b>7.411.790.213.000</b>	<b>(475.713.012.000)</b>
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	430.715.885.000	360.880.000.000	(70.015.885.000)
DAK Bidang Infrastruktur Bangunan	13.466.644.000	-	(13.466.644.000)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	20.504.941.000	47.914.814.000	27.409.873.000
DAK Bidang Kesehatan	21.543.325.000	4.822.056.000	(16.721.269.000)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	13.024.759.000	-	(13.024.759.000)
DAK Bidang Kesehatan	63.535.802.000	63.535.602.000	-
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	33.726.379.000	-	(33.726.379.000)
DAK Bidang Pendidikan	245.375.234.000	245.039.295.000	(336.939.000)
DAK Bidang Pertanian	19.749.082.000	4.697.271.000	(15.051.811.000)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata	8.248.600.000	-	(8.248.600.000)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	7.070.536.599.000	7.045.690.147.000	(24.846.452.000)
Bantuan Operasional Kesehatan dan Catatan Sipil	538.899.000	538.899.000	-
Bantuan Operasional Kesehatan dan IKB (BO)	9.843.385.000	9.853.285.000	9.899.999.999.999
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Muis	4.252.500.000	3.890.000.000	(362.500.000)
Bantuan Operasional Sekolah	6.105.408.230.000	6.012.611.590.000	(92.796.640.000)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.626.000.000	21.325.000	(4.604.675.000)
Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan K	3.550.000.000	2.350.000.000	(1.200.000.000)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	1.043.948.646.000	1.016.584.679.000	(27.363.967.000)
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>58.473.388.000</b>	<b>61.212.453.000</b>	<b>(2.739.065.000)</b>

- c. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Alokasi Cadangan DAK sebesar Rp20.779.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.10.  
Alokasi Cadangan DAK

NO	BIDANG	SKPD	JUMLAH (Rp)
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinlutkan	5.098.699.000,00
2.	Irigasi	PSDA	9.466.644.000,00
3.	Pariwisata	Dinporapar	6.213.913.000,00

- d. Sesuai KMK Nomor 15/KMK.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Alokasi sebesar Rp17.850.000.000,00 untuk Insentif Tenaga Kesehatan.

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010372 tanggal 13 Juli





2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

#### D. TAHAP IV

Penyesuaian Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020

**Dasar :** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi sebesar Rp7.000.000.000,00, Adapun alokasi DID Tambahan sebagai berikut:

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012347 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.11.  
Alokasi Anggaran Sesuai Perubahan APBD ke-4

NO	SKPD	ALOKASI
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp3.420.000.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 500.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 565.000.000,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Rp 515.000.000,00
5	Dinas Peternakan dan Keswan	Rp2.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>		Rp7.000.000.000,00



## E. TAHAP V

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

### Dasar :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 harus digunakan untuk membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## F. TAHAP VI

Penyesuaian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (BA-BUN)

**Dasar :** Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Keputusan tersebut dan berdasarkan hasil review atas usulan revisi pergeseran anggaran pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terkait penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebesar Rp35.591.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12.  
Alokasi Pembelian Peralatan Kesehatan

NO	NAMA PENERIMA	PAGU	KETERANGAN
1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.632.300.000,00	1. Mobile X Ray system; 2. Bedside monitor; 3. Ventilator; 4. Echocardiography.
2	RSUD Dr. Moewardi	17.840.000.000,00	1. Bronchoscopy unit; 2. Syringe pump; 3. Mobile X-Ray;



			4. CT Scan 128 slice.
3	RSUD Tugurejo	12.119.000.000,00	1. Digital radiography; 2. X-Ray mobile 3. Ventilator; 4. Bedside monitor; 5. Incubator.
	P		
e	<b>TOTAL</b>	<b>35.591.300.000,00</b>	

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016332 tanggal 20 November 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## G. TAHAP VII

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan

### Dasar :

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020; dan
- Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Insentif Tenaga kesehatan, dengan kronologi sebagai berikut:

- Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp466.095.660,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020;
- Mendasarkan pada Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp15.030.000.922,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020.

Tambahan anggaran dialokasikan pada Dinas Kesehatan sehingga rincian APBD Perubahan TA. 2020 sebagai berikut:

- a. Pendapatan bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp26.255.251.903.000,00;
- b. Belanja bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp27.374.409.350.000,00

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016335 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

#### 2.2.3.3.2 Fokus Kegiatan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19

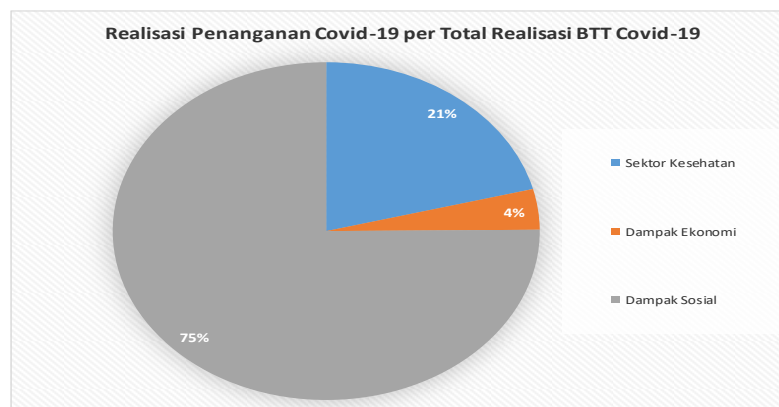
Total anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.833.243.841.000,00 dengan realisasi Rp1.782.804.978.571,00 dengan fokus sebagai berikut:

- a. Penanganan di Sektor Kesehatan dengan total anggaran Rp394.570.026.000,- terealisasi Rp374.185.167.026,00 atau 94,83% ;
- b. Penanganan Dampak Ekonomi dengan total anggaran Rp96.407.577.000,- terealisasi Rp69.250.475.945,00 atau 71,83% ;
- c. Penanganan Dampak Sosial dengan total anggaran Rp1.342.266.238.000,- terealisasi Rp1.339.369.335.600,00 atau 99,78%.

Realisasi tersebut terbagi menjadi:

Tabel 2.13.  
Anggaran Belanja Tidak Terduga

Uraian	Sektor Kesehatan	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial	Total
Belanja Pegawai	2.356.595.830,00	7.515.750.000,00	4.453.710.000,00	<b>14.326.055.830,00</b>
Belanja Barang & Jasa	336.400.523.736,00	61.734.725.945,00	1.334.855.683.200,00	<b>1.732.990.932.881,00</b>
Belanja Modal	35.428.047.460,00	-	59.942.400,00	<b>35.487.989.860,00</b>
<b>Total</b>	<b>374.185.167.026,00</b>	<b>69.250.475.945,00</b>	<b>1.339.369.335.600,00</b>	<b>1.782.804.978.571,00</b>



Gambar 2.7.  
Gambar Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19



Penjelasan atas realisasi belanja yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos LRA tentang realisasi Belanja Tidak Terduga. Atas realisasi tersebut diatas, pada akhir tanggal pelaporan terdapat Aset berupa:

Tabel 2.14.  
Aset yang Diperoleh dari Belanja Tidak Terduga

Jenis Aset	Nilai
Aset Lancar – Persediaan alat/bahan kegiatan kantor	55.883.894.441,-
Aset Lancar – Persediaan natura & pangan	69.083.000,-
Aset Lancar – Persediaan untuk berjaga-jaga	31.630.000,-
Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Berat	11.972.400,00
Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kantor & Rumah Tangga	928.135.682,00
Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kedokteran	3.755.000.054,00
Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Laboratorium	30.365.489.724,00
Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	427.392.000,00

Total Aset dari hasil Belanja Tidak Terduga pada tanggal pelaporan adalah Persediaan senilai Rp55.984.607.441,00 dan Aset Tetap senilai Rp35.487.989.860,00. Penjelasan masing-masing aset tersebut dapat juga dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos Neraca tentang persediaan SKPKD dan pada Aset Tetap dengan keterangan mutasi dari Belanja Tidak Terduga. Beban atas Realisasi Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.691.332.651.270,00 terdiri dari:

Tabel 2.15.  
Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Dampak Covid-19

Jenis Beban	Nilai
Beban Pegawai	14.326.055.830,00
Beban Persediaan	278.503.926.272,00
Beban Jasa	2.813.223.123,00
Beban Pemeliharaan	176.474.500,00
Beban Perjalanan Dinas	79.950.000,00
Beban Hibah	42.728.904.745,00
Beban Bantuan Sosial	1.352.704.116.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.691.332.651.270,00</b>

#### 2.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dilakukan penyesuaian/penundaan.

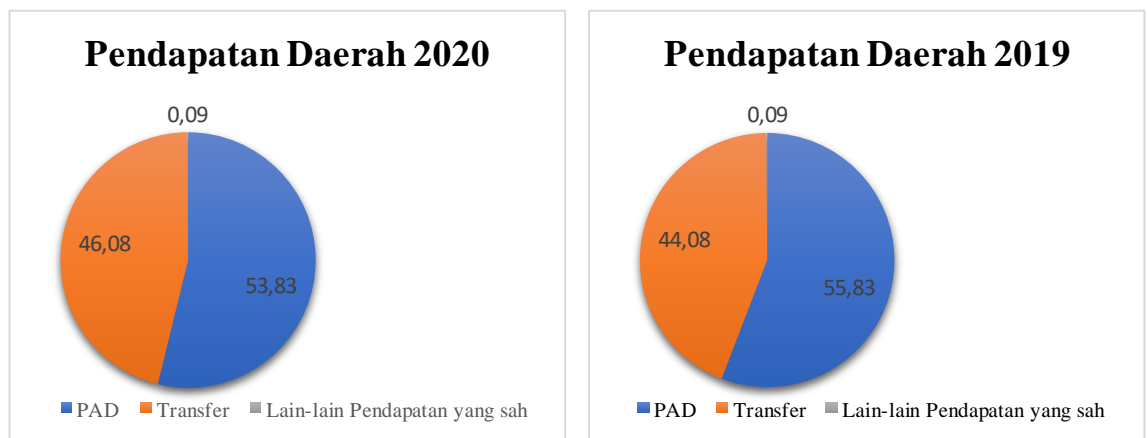
### BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

##### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.255.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.044.203.788,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan, kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%;
- Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 46,08%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 44,08%; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,09%, sama dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,09%.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

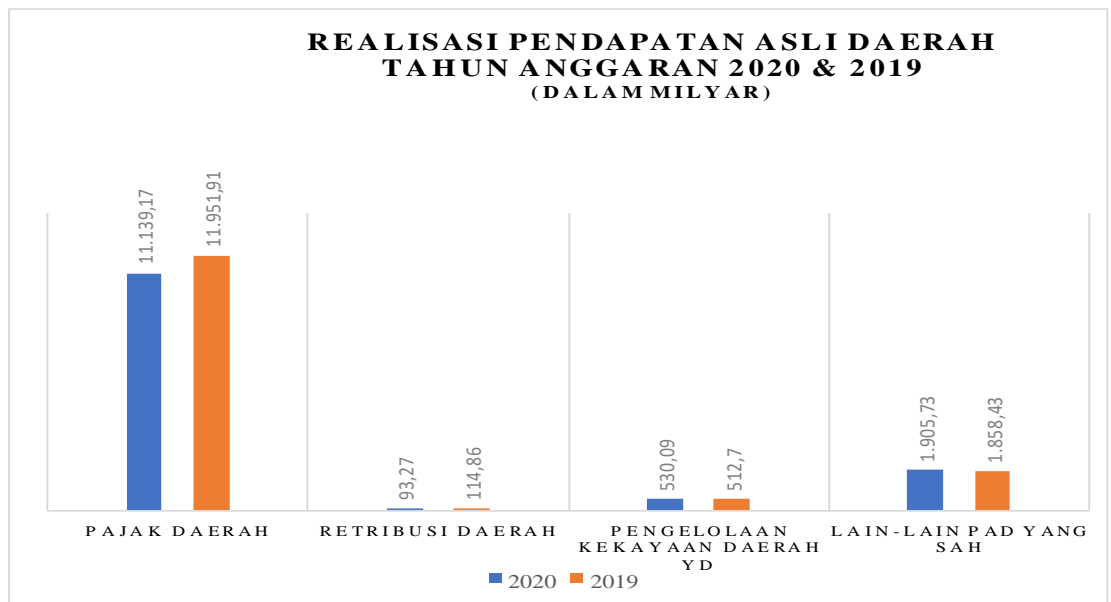
GAMBAR 3.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah TA 2020 Dan 2019 (dalam %)

Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80%, mengalami penurunan Rp769.631.957.543,00 atau 5,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:
  - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;



- Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi Rp93.279.121.699,00 atau 99,52%, mengalami penurunan Rp21.581.937.152,00 atau 18,79% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39%, mengalami kenaikan Rp47.307.170.014,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

GAMBAR 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, yang sebagian besar dikarenakan karena adanya pandemi *Covid-19*. Sumber utama PAD masih dari Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,80% dari realisasi tahun sebelumnya, namun di sisi lain terdapat peningkatan realisasi sebesar 3,39% pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 2,55% pada pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam



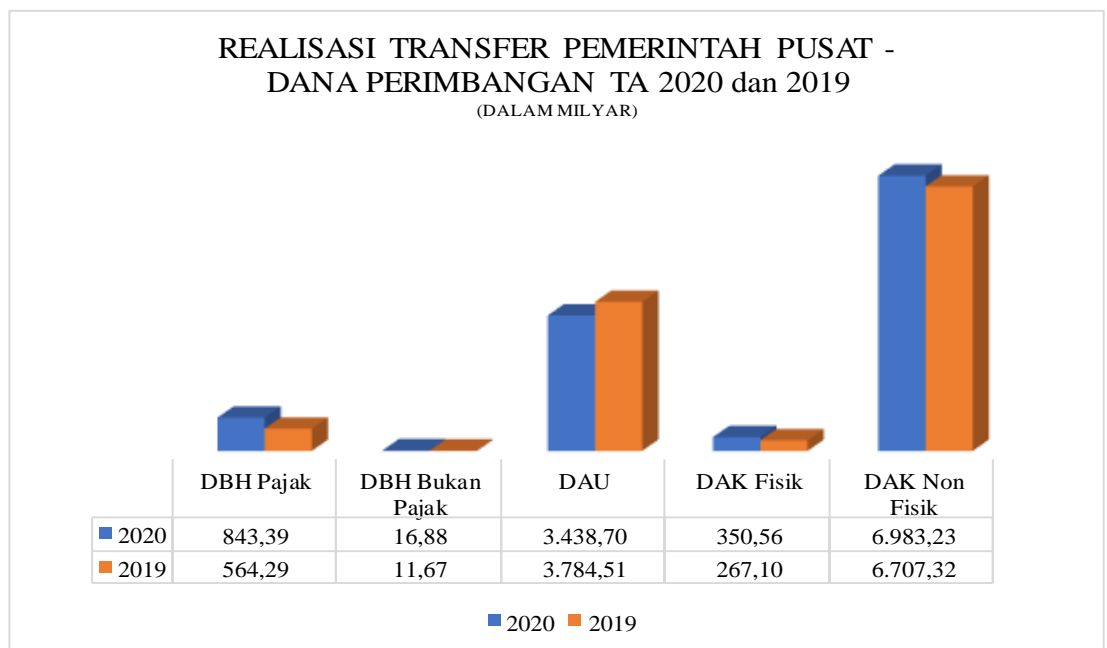
rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah di tengah kondisi pandemi *Covid-19*, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap memperhatikan protokol kesehatan, melalui:
    - a. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    - b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
    - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
    - d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system* menjadi lebih mudah dan murah.
  2. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
  3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
  4. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah;
  5. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.
- b. Tahun anggaran 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp11.964.515.081.000,00 terealisasi Rp11.702.101.655.293,00 atau 97,81%, mengalami kenaikan Rp303.419.753.755,00 atau 2,66% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:
- Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.6312.787.041.293,00 atau 97,78%, mengalami kenaikan Rp297.883.980.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang didalamnya terdapat:
    - Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sejumlah Rp957.049.948.000,00 terealisasi Rp843.392.119.954,00 atau 88,12%, mengalami kenaikan Rp279.101.736.120,00 atau 49,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
    - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp13.336.741.000,00 terealisasi Rp16.888.016.587,00 atau 126,63%, mengalami kenaikan Rp5.210.078.787,00 atau 44,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
    - Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;





- Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sejumlah Rp386.885.324.000,00 terealisasi Rp350.564.240.958,00 atau 90,61%, mengalami kenaikan Rp83.462.427.706,00 atau 31,25% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Dana Alokasi Khusus non Fisik ditargetkan sejumlah Rp7.078.966.244.000,00 terealisasi Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65%, mengalami kenaikan Rp275.912.278.007,0 atau 4,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
- Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya yaitu dari pengelolaan Ketep Pas. Tidak ada target pada Tahun 2020 dan terealisasi Rp1.102.159.000,00, mengalami penurunan Rp288.260.865,00 atau 20,73% dari realisasi tahun 2019.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

GAMBAR 3.3 Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terbesar dari Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 60,03% dari total Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari: Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.918.126.510.000,00 (84,75%); Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.016.605.974.000,00 (14,56%); Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp42.095.670.378,00 (0,6%); Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar



Rp2.294.735.812,00 (0,03%); Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp363.705.104,00 (0,01%); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.746.095.500,00 (0,05%).

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Hibah yang ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Masa pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, selama masa pandemi kegiatan penagihan langsung (*door to door*) dan Razia gabungan Bersama Kepolisian tidak memungkinkan untuk dilakukan,
2. Masa pandemi *Covid-19* mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan baru sehingga mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama. Sesuai Surat Gaikindo dan AISI, bahwa terjadi penurunan target penjualan kendaraan sebesar 40%,
3. Dengan banyak pembatasan mobilitas masyarakat, menyebabkan konsumsi BBM menurun dan mengakibatkan penurunan penerimaan PBBKB,
4. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu,
5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain:

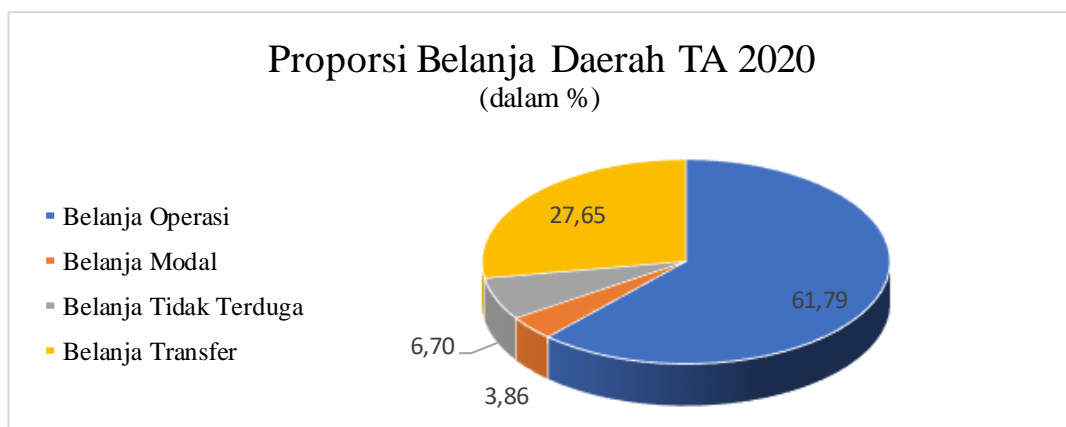
1. Pendataan dan koordinasi kendaraan milik Pemerintah Daerah (plat merah); Pendataan perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja untuk dilakukan pelayanan di tempat; Pendataan Badan Usaha/Wajib Pajak pemilik banyak Armada Angkutan Barang maupun Orang; Mendatangi wajib pajak yang nilai PKB nya besar untuk dilakukan penagihan, SAMSAT tetap buka pada saat cuti Bersama; membuka Layanan Samsat saat libur Bersama bulan Desember (tanggal 28 dan 29).
2. Melakukan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jateng dan Pembebasan Sanksi yang berlaku 5 bulan (17 Pebruari - 16 Juli 2020). Berkoordinasi dengan para dealer dan kepolisian untuk mempercepat pendaftaran kendaraan baru agar dapat didaftarkan sebelum tahun 2020 berakhir.
3. Melakukan pendataan ke Badan Usaha Niaga Minyak untuk menjadi wajib pungut, serta rekonsiliasi data dengan para wajib pungut.

4. Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan keringanan pajak, melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jateng, yang berlaku tanggal 19 Oktober - 19 Desember 2020.
5. Melakukan perbaikan, pengamanan fisik dan administrasi, promosi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan aset daerah.

### 3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi *Covid-19* di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19*.

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.374.409.350.000,00 realisasinya mencapai 93,71% atau sebesar Rp25.651.740.349.991,00. Proporsi terbesar anggaran belanja daerah adalah Belanja Operasi sebesar Rp16.913.391.556.000,00 atau 61,79%, disusul Belanja Transfer sebesar Rp7.569.240.201.000,00 atau 27,65%, lalu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.834.243.841.000,00 atau 6,70% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.057.533.752,00 atau 3,86%.



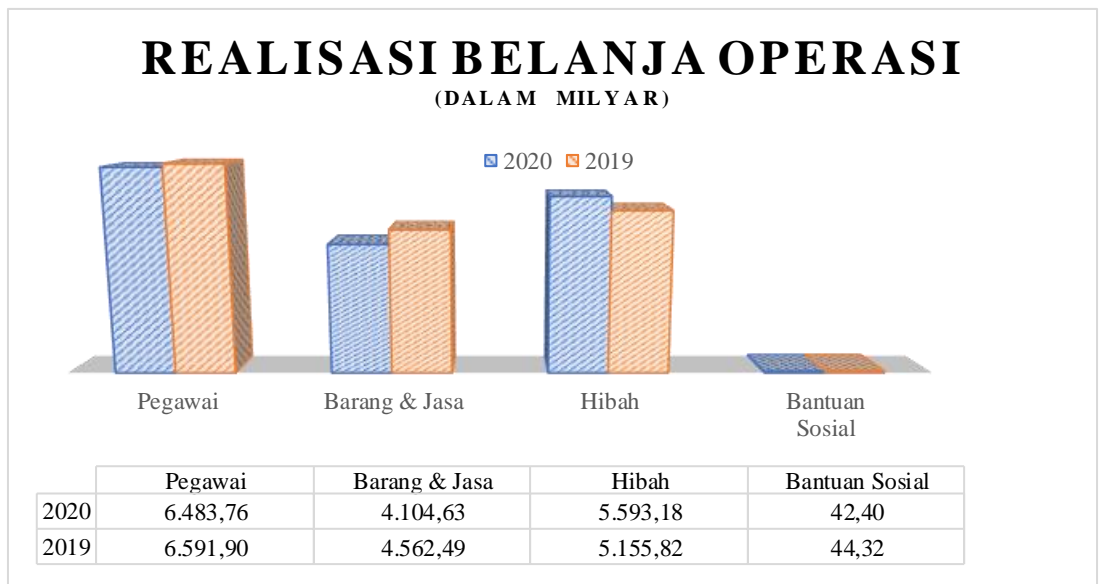
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

GAMBAR 3.4 Proporsi Belanja Daerah TA 2020



Anggaran belanja operasi pada tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.698.262.058.000,00 atau 39,60%, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.405.766.353.000,00 atau 26,05%, belanja hibah Rp5.761.071.145.000,00 atau 34,06%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp48.292.000.000,00 atau 0,29%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 dan 2019 yaitu:

- Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.141.517.784,00 atau 1,64%;
- Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 atau 93,17% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.562.499.451.144,00 mengalami penurunan sebesar Rp457.861.662.916,00 atau 10,04%;
- Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 atau 97,09% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp417.588.142.759,00 atau 8,07%;
- Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 atau 87,81% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.918.500.000,00 atau 4,33%.



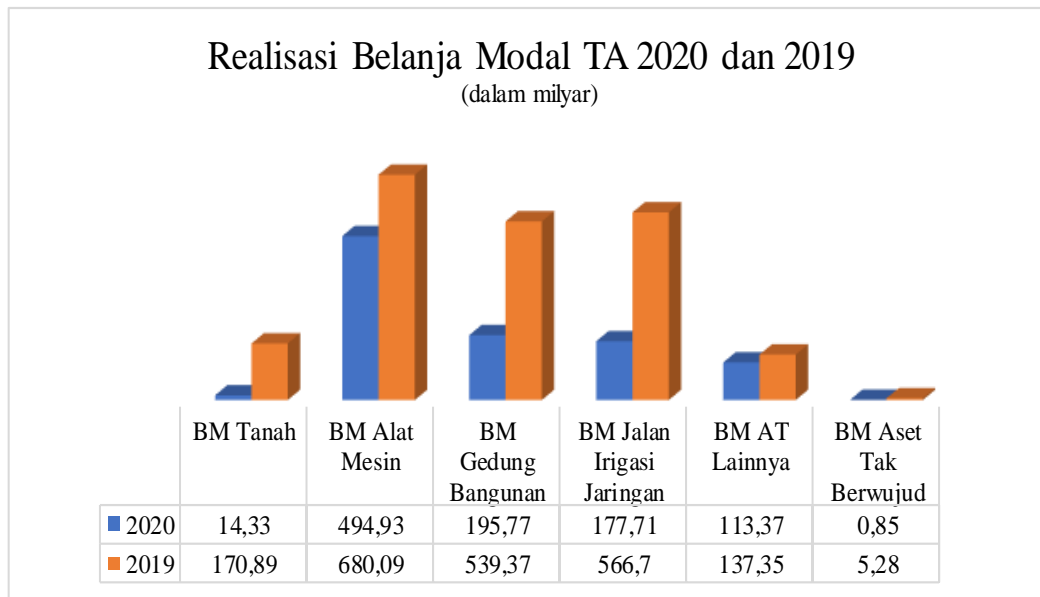
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

GAMBAR 3.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019



Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp14.703.769.000,00 atau 1,39%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp509.897.318.000,00 atau 48,22%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp216.372.410.000,00 atau 20,46%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp193.270.690.000,00 atau 18,28%; belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp122.200.465.000,00 atau 11,56% dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp1.089.100.000,00 atau 0,10%. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.724.619.700,00 atau 52,52%; realisasi tahun 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.099.719.124.860,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 yaitu:

- a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.559.917.246,00 atau 91,61%.
- b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 atau 97,07% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp680.097.965.905,00 mengalami penurunan sebesar Rp185.164.594.709,00 atau 27,23%;
- c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.597.283.598,00 atau 63,70%;
- d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp388.992.646.904,00 atau 68,64%;
- e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.981.775.243,00 atau 17,46%;
- f. Realisasi belanja modal aset tak berwujud tahun anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.287.521.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.428.402.000,00 atau 83,75%.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

GAMBAR 3.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Anggaran belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.834.243.841.000,00 dan terealisasi sebesar 97,25% atau Rp1.783.884.978.571,00. Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme *refocussing* belanja untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak *Covid-19*. Kebijakan belanja daerah untuk penanganan *Covid-19* tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penanganan di sektor kesehatan diarahkan antara lain untuk pengadaan APD, Jogo Tonggo Kit, rapid tes, penyediaan alat kesehatan, bahan-bahan laboratorium, obat-obatan, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi di 7 RSUD, biaya karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov, insentif tenaga kesehatan, revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina, serta rekrutmen relawan kesehatan;
2. Penyediaan Jaring Pengaman Ekonomi diarahkan antara lain untuk peningkatan kapabilitas IKM dan bantuan *raw material*, peningkatan kapabilitas IKM Non Agro dan bantuan raw material, bantuan biaya distribusi pangan, tambahan cadangan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, penguatan BUMDes, lumbung desa, kawasan perdesaan, pasar murah sembako murah, penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan, pendampingan bagi pencari kerja terdampak *Covid-19*, bintek LPK pendukung kartu pra kerja, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendampingan dan pelatihan online, bantuan BBM untuk nelayan, dan dukungan pemasaran produk



UMKM (*marketing online*).

3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial diarahkan antara lain bantuan pangan non tunai, bantuan pangan masyarakat terdampak *Covid-19* (non DTKS), perluasan sasaran penerima KJS, pemberian tambahan bantuan vitamin bagi kelompok rentan di dalam panti, bantuan operasional bagi TKSK, logistik permukiman/posko logistik, bantuan kepada keluarga terdampak *Covid-19* (ODP, PDP, terkonfirmasi) berupa logistik makanan dan vitamin, dukungan operasional Taruna Siaga Bencana, serta bantuan sembako bagi masyarakat terdampak *Covid-19* yang berdomisili di sekitar Jabodetabek.

Anggaran belanja transfer/bagi hasil kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.569.240.201.000,00 dan terealisasi sebesar 87,81% atau Rp6.646.872.581.129,00. Kebijakan belanja transfer/bagi hasil Kabupaten/Kota selain belanja bagi hasil pajak daerah juga untuk pelaksanaan bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa. Realisasi belanja transfer tahun 2020 dijabarkan menjadi:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, dianggarkan Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi 85,81% atau Rp4.633.245.749.888,00;
2. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp981.881.906.000,00 terealisasi 86,11% atau Rp845.543.195.241,00;
3. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.187.687.636.000,00 terealisasi 98,35% atau Rp1.168.083.636.000,00.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan belanja daerah masih terdapat kendala dan permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya pada UPT/Balai terhadap sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya penggunaan *Cash Management System* (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker terutama pada layanan antar bank dan pembayaran pajak serta sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok;
3. Adanya gagal lelang dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kabupaten/ kota;
4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan barang khususnya pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;



5. Adanya regulasi baru Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai di tingkat UPT/Balai dan PPK-SKPD serta melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi;
2. Melakukan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi *Cash Management System* dan aplikasi pajak serta mendorong Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan ke daerah pelosok;
3. Melakukan monitoring untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota;
4. Menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah dan Bimbingan Teknis pelaporan keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;
5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pengelola keuangan di SKPD dan Kabupaten/Kota, serta melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah

### **3.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui penggunaan SILPA sebesar Rp1.119.157.447.000,00 dan terealisasi 99,99% atau Rp1.119.095.687.470,00 dan realisasi penerimaan pokok pinjaman dana bergulir sebesar Rp252.540.900,00. Pada tahun anggaran 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak *Covid-19*.





### 3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

#### 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN

##### 1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

##### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp.2,500,492,821,000.00 realisasi sebesar Rp 2,428,612,934,592.00 atau 97,13% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42.453.868.000.00</b>	<b>40.597.683.662.00</b>	<b>95.63</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	4.296.525.000.00	4.017.525.000.00	93.51	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	81.734.000.00	79.909.400.00	97.77	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	6.104.668.000.00	4.930.615.682.00	80.77	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	355.593.000.00	327.167.966.00	92.01	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	17.111.966.000.00	17.020.015.741.00	99.46	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.973.004.000.00	1.967.054.722.00	99.70	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	696.717.000.00	684.622.715.00	98.26	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	64.094.000.00	63.806.000.00	99.55	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	4.667.124.000.00	4.619.285.482.00	98.97	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1.473.488.000.00	1.450.425.290.00	98.43	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.981.630.000.00	2.903.075.600.00	97.37	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	469.569.000.00	468.750.000.00	99.83	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	122.000.000.00	121.950.000.00	99.96	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	663.372.000.00	582.740.000.00	87.85	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	869.101.000.00	860.420.658.00	99.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	523.283.000.00	500.319.406.00	95.61	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.110.886.000.00</b>	<b>1.074.394.250.00</b>	<b>96.72</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	749.952.000.00	734.096.950.00	97.89	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.934.000.00	340.297.300.00	94.28	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>3</b>	<b>Pembinaan Pendidikan Khusus</b>	<b>31.925.151.000.00</b>	<b>29,252,507, 287.00</b>	<b>91.63</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB	70.149.000.00	65.158.000.00	92.89	100.00
	Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB	1.996.412.000.00	1.852.572.167.00	92.80	100.00
	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB	29.234.663.000.00	26,790,930,548.00	91.64	100.00
	Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB	529.827.000.00	449.984.572.00	84.93	100.00
	Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB	94.100.000.00	93.862.000.00	99.75	100.00
<b>4</b>	<b>Pembinaan SMK</b>	<b>1.029.633.899.000.00</b>	<b>975,543,910,802.00</b>	<b>94.75</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK	82.182.000.00	61.994.500.00	75.44	100.00
	Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK	196.315.325.000.00	183.788.564.013.00	93.62	100.00
	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK	829.554.884.000.00	788,191,569,815.00	95.01	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK	1.759.354.000.00	1.706.236.500.00	96.98	100.00
	Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK	1.490.544.000.00	1.365.047.974.00	91.58	100.00
	Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK	224.714.000.00	224.265.000.00	99.80	100.00
	Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK	206.896.000.00	206.233.000.00	99.68	100.00
<b>5</b>	<b>Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>531.714.390.000.00</b>	<b>529.790.592.800.00</b>	<b>99.64</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru . Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan	3.870.000.00	3.870.000.00	100.00	100.00
	Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan	23.601.621.000.00	23.532.561.806.00	99.71	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA	252.162.000.00	155.101.000.00	61.51	100.00
	"Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma"	251.998.895.000.00	251.221.015.014.00	99.69	100.00
	"Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK"	798.488.000.00	748.995.000.00	93.80	100.00
	"Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk"	255.059.354.000.00	254.129.049.980.00	99.64	100.00
<b>6</b>	<b>Pembinaan SMA</b>	<b>852.781.783.000.00</b>	<b>842,013,402,869.00</b>	<b>98.74</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA	53.000.000.00	48.730.000.00	91.94	100.00
	Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA	34.361.227.000.00	33.376.011.004.00	97.13	100.00
	Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA	814.450.688.000.00	804,742,576,975.00	98.81	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA	142.590.000.00	142.153.800.00	99.69	100.00
	Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA	3.599.259.000.00	3.528.912.090.00	98.05	100.00
	Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA	175.019.000.00	175.019.000.00	100.00	100.00
<b>7</b>	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>2.486.105.000.00</b>	<b>2.273.598.400.00</b>	<b>91.45</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan	390.530.000.00	374.410.000.00	95.87	100.00
	Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan	1.421.151.000.00	1.233.469.400.00	86.79	100.00
	Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan	674.424.000.00	665.719.000.00	98.71	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
8	<b>Pembinaan Kebudayaan</b>	<b>8.386.739.000.00</b>	<b>8.066.844.522.00</b>	<b>96.19</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	287.916.000.00	259.948.000.00	90.29	100.00
	Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT	1.950.384.000.00	1.926.603.621.00	98.78	100.00
	Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT	300.270.000.00	300.138.000.00	99.96	100.00
	Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita	2.381.505.000.00	2.338.029.648.00	98.17	100.00
	Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita	194.902.000.00	191.112.150.00	98.06	100.00
	Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah	2.441.061.000.00	2.371.201.500.00	97.14	100.00
	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Pemuseuman	398.932.000.00	324.761.200.00	81.41	100.00
	Kegiatan Penguatan Nilai Kesenjaraan dan Tradisi	431.769.000.00	355.050.403.00	82.23	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.500.492.821.000.00</b>	<b>2,428,612,934,592.00</b>	<b>97.13</b>	<b>100.00</b>

## 2. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebesar Rp 2.123.365.695.000.00 realisasi sebesar Rp 1.950.749.961.595.00 atau 91.87% yang dilaksanakan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 2.1 DINAS KESEHATAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.419.558.613.000.00 realisasi sebesar Rp 379.987.211.623.00 atau 90.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30.934.360.000.00</b>	<b>28.482.175.713.00</b>	<b>92.07</b>	<b>99.81</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	354.738.000.00	322.445.000.00	90.90	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	130.971.000.00	86.036.600.00	65.69	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	5.387.500.000.00	4.625.168.238.00	85.85	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	512.000.000.00	506.025.398.00	98.83	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	10.060.373.000.00	9.474.470.514.00	94.18	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.447.155.000.00	1.157.505.972.00	79.98	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	1.095.130.000.00	1.066.814.157.00	97.41	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	38.230.000.00	35.244.650.00	92.19	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	3.096.882.000.00	2.905.002.811.00	93.80	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2.850.196.000.00	2.648.041.861.00	92.91	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.566.992.000.00	2.478.320.114.00	96.55	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	238.005.000.00	237.629.350.00	99.84	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	154.600.000.00	130.514.712.00	84.42	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	515.310.000.00	418.172.156.00	81.15	97.22
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	2.486.278.000.00	2.390.784.180.00	96.16	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.955.838.000.00</b>	<b>998.959.022.00</b>	<b>51.08</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	265.843.000.00	241.421.600.00	90.81	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	302.110.000.00	226.626.400.00	75.01	100.00
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1.387.885.000.00	530.911.022.00	38.25	100.00
<b>3</b>	<b>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>	<b>4.838.302.000.00</b>	<b>3.487.452.496.00</b>	<b>72.08</b>	<b>100.00</b>
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.843.444.000.00	1.448.984.702.00	78.60	100.00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	900.000.000.00	643.857.638.00	71.54	100.00
	Suirveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB	1.159.675.000.00	497.337.500.00	42.89	100.00
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM	300.870.000.00	292.703.406.00	97.29	100.00
	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas	634.313.000.00	604.569.250.00	95.31	100.00
<b>4</b>	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>274.723.220.000.00</b>	<b>260.354.092.876.00</b>	<b>94.77</b>	<b>100.00</b>
	Standarisasi Yankes dan Jamkes	237.594.344.000.00	230.000.397.500.00	96.80	100.00
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.914.318.000.00	1.165.577.680.00	60.89	100.00
	Upaya Kesehatan Primer dan Kestrada	318.500.000.00	153.845.000.00	48.30	100.00
	Pelayanan Labkes	950.642.000.00	927.932.508.00	97.61	100.00
	Pengujian Alkes	1.102.800.000.00	1.074.432.320.00	97.43	100.00
	Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK	3.513.790.000.00	3.468.159.897.00	98.70	100.00
	Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT	7.195.000.000.00	6.484.655.677.00	90.13	100.00
	Peningkatan Yankes di UPT	7.418.579.000.00	6.489.584.292.00	87.48	100.00
	Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT	14.715.247.000.00	10.589.508.002.00	71.96	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
5	<b>Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>44.529.084.000.00</b>	<b>42.342.902.429.00</b>	<b>95.09</b>	<b>100.00</b>
	Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan	4.601.345.000.00	4.263.678.733.00	92.66	100.00
	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	33.724.953.000.00	32.198.886.930.00	95.47	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng	1.344.004.000.00	1.074.829.679.00	79.97	100.00
	Manajemen Infromasi Kesehatan	250.342.000.00	225.357.500.00	90.02	100.00
	Penyediaan obat, reagen dan logistik di UPT	3.403.440.000.00	3.389.699.075.00	99.60	100.00
	Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi	1.205.000.000.00	1.190.450.512.00	98.79	100.00
6	<b>Kesehatan Masyarakat</b>	<b>62.577.809.000.00</b>	<b>44.321.629.087.00</b>	<b>70.83</b>	<b>100.00</b>
	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	47.158.340.000.00	33.468.851.340.00	70.97	100.00
	Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	2.552.596.000.00	1.466.918.199.00	57.47	100.00
	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	10.940.992.000.00	7.573.250.530.00	69.22	100.00
	Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT	1.662.241.000.00	1.554.598.418.00	93.52	100.00
	Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	263.640.000.00	258.010.600.00	97.86	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>419.558.613.000.00</b>	<b>379.987.211.623.00</b>	<b>90.57</b>	<b>99.97</b>

## 2.2. RSUD DR. MOEWARDI

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Moewardi sebesar Rp.813.415.040.000.00 realisasi sebesar Rp 772.363.843.459.00 atau 94.95% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>84.652.184.000.00</b>	<b>82.858.429.748.00</b>	<b>97.88</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	81.300.000.000.00	79.565.959.565.00	97.87	100.00
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	3.352.184.000.00	3.292.470.183.00	98.22	100.00
2	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>728.762.856.000.00</b>	<b>689.505.413.711.00</b>	<b>94.61</b>	<b>95.90</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	728.762.856.000.00	689.505.413.711.00	94.61	95.90
	<b>JUMLAH</b>	<b>813.415.040.000.00</b>	<b>772.363.843.459.00</b>	<b>94.95</b>	<b>97.95</b>



### 2.3. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp.502.345.242.000.00 realisasi sebesar Rp 440.649.146.342.00 atau 87.72% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>5.742.184.000.00</b>	<b>5.728.619.548.00</b>	<b>99.76</b>	<b>100.00</b>
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	5.742.184.000.00	5.728.619.548.00	99.76	100.00
2	<b>Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1.000.000.000.00</b>	<b>999.747.598.00</b>	<b>99.97</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan penyediaan logistik kantor	1.000.000.000.00	999.747.598.00	99.97	100.00
3	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>495.603.058.000.00</b>	<b>433.920.779.196.00</b>	<b>87.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	495.603.058.000.00	433.920.779.196.00	87.55	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>502.345.242.000.00</b>	<b>440.649.146.342.00</b>	<b>87.72</b>	<b>100.00</b>

### 2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp.174.772.530.000.00 realisasi sebesar Rp 164.340.443.697.00 atau 94.03% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>15.059.832.000.00</b>	<b>14.942.492.221.00</b>	<b>99.22</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	10.000.000.000.00	9.976.673.605.00	99.77	100.00
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	2.694.832.000.00	2.674.465.825.00	99.24	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan	200.000.000.00	199.923.246.00	99.96	100.00
	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	765.000.000.00	756.270.000.00	98.86	100.00
	Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan	1.400.000.000.00	1.335.159.545.00	95.37	100.00
2	<b>Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>135.000.000.00</b>	<b>105.748.040.00</b>	<b>78.33</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	135.000.000.00	105.748.040.00	78.33	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
3	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>159.577.698.000.00</b>	<b>149.292.203.436.00</b>	<b>93.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	159.577.698.000.00	149.292.203.436.00	93.55	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>174.772.530.000.00</b>	<b>164.340.443.697.00</b>	<b>94.03</b>	<b>100.00</b>

## 2.5. RSUD KELET DONOREJO

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Kelet Donorejo sebesar Rp.52.539.607.000.00 realisasi sebesar Rp 48.545.102.804.00 atau 92.4% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>11.526.109.000.00</b>	<b>11.108.930.687.00</b>	<b>96.38</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	8.982.131.000.00	8.625.851.209.00	96.03	100.00
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	1.641.578.000.00	1.627.833.078.00	99.16	100.00
	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	902.400.000.00	855.246.400.00	94.77	100.00
2	<b>Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1.597.600.000.00</b>	<b>1.597.533.788.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan penyediaan logistik kantor	1.597.600.000.00	1.597.533.788.00	100.00	100.00
3	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>39.415.898.000.00</b>	<b>35.838.638.329.00</b>	<b>90.92</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	39.415.898.000.00	35.838.638.329.00	90.92	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>52.539.607.000.00</b>	<b>48.545.102.804.00</b>	<b>92.40</b>	<b>100.00</b>

## 2.6. RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp.72.830.593.000.00 realisasi sebesar Rp 63,865,868,875.00 atau 87.69% yang terdiri dari 3 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>9.161.242.000.00</b>	<b>8.764.996.630.00</b>	<b>95.67</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	3.000.000.000.00	2.999.845.096.00	99.99	100.00
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	5.827.042.000.00	5.436.587.918.00	93.30	100.00
	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	334.200.000.00	328.563.616.00	98.31	100.00
<b>2</b>	<b>Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>665.800.000.00</b>	<b>559.656.800.00</b>	<b>84.06</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	665.800.000.00	559.656.800.00	84.06	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>63.003.551.000.00</b>	<b>54,541,215,445.00</b>	<b>86.57</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	63.003.551.000.00	54,541,215,445.00	86.57	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>72.830.593.000.00</b>	<b>63,865,868,875.00</b>	<b>87.69</b>	<b>100.00</b>

## 2.7. RSJD SURAKARTA

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Surakarta sebesar Rp.41.720.682.000.00 realisasi sebesar Rp 35.992.704.835.00 atau 86.27% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>7.982.388.000.00</b>	<b>7.276.370.489.00</b>	<b>91.16</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	6.000.000.000.00	5.631.253.248.00	93.85	100.00
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	1.082.388.000.00	934.623.750.00	86.35	100.00
	Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	150.000.000.00	149.345.082.00	99.56	100.00
	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	750.000.000.00	561.148.409.00	74.82	100.00
<b>2</b>	<b>Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>600.000.000.00</b>	<b>399.298.760.00</b>	<b>66.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	600.000.000.00	399.298.760.00	66.55	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>33.138.294.000.00</b>	<b>28.317.035.586.00</b>	<b>85.45</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	33.138.294.000.00	28.317.035.586.00	85.45	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.720.682.000.00</b>	<b>35.992.704.835.00</b>	<b>86.27</b>	<b>100.00</b>





## 2.8 RSJD DR. RM SOEDJARWADI

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp.46.183.388.000.00 realisasi sebesar Rp 45.005.639.960.00 atau 97.45% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Pelayanan Kesehatan</b>	<b>4.589.472.000.00</b>	<b>4.405.191.664.00</b>	<b>95.98</b>	<b>100.00</b>
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	1.143.936.000.00	1.143.369.093.00	99.95	100.00
	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	445.536.000.00	445.536.000.00	100.00	100.00
	Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan	3.000.000.000.00	2.816.286.571.00	93.88	100.00
2	<b>Farmasi dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1.054.464.000.00</b>	<b>1.053.713.067.00</b>	<b>99.93</b>	<b>100.00</b>
	kegiatan penyediaan logistik kantor	1.054.464.000.00	1.053.713.067.00	99.93	100.00
3	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD</b>	<b>40.539.452.000.00</b>	<b>39.546.735.229.00</b>	<b>97.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	40.539.452.000.00	39.546.735.229.00	97.55	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.183.388.000.00</b>	<b>45.005.639.960.00</b>	<b>97.45</b>	<b>100.00</b>

## 3. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp 366.308.304.000.00 realisasi sebesar Rp 347.907.000.281.00 atau 94.98% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp.290.756.612.000.00 realisasi sebesar Rp.283.604.512.490.00 atau 97.54% yang terdiri dari 8 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.512.467.000.00</b>	<b>14.425.766.243.00</b>	<b>92.99</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	172.737.000.00	166.679.021.00	96.49	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	571.996.000.00	503.227.850.00	87.98	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.614.180.000.00	1.327.370.819.00	82.23	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	120.000.000.00	111.713.123.00	93.09	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	6.653.272.000.00	6.362.327.152.00	95.63	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.106.748.000.00	916.593.674.00	82.82	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	287.970.000.00	256.053.710.00	88.92	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	43.794.000.00	32.624.000.00	74.49	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	3.101.908.000.00	3.013.803.673.00	97.16	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	564.104.000.00	553.218.950.00	98.07	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.040.758.000.00	975.157.900.00	93.70	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	165.000.000.00	163.500.000.00	99.09	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000.00	3.096.371.00	30.96	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	60.000.000.00	40.400.000.00	67.33	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>315.467.000.00</b>	<b>270.390.619.00</b>	<b>85.71</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.067.000.00	110.014.788.00	97.30	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.400.000.00	160.375.831.00	79.24	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan. dan Penggantian Jembatan</b>	<b>153.757.772.000.00</b>	<b>150.611.174.804.00</b>	<b>97.95</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1	71.284.912.000.00	71.261.346.692.00	99.97	100.00
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2	29.747.301.000.00	29.671.126.803.00	99.74	100.00
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1	29.091.612.000.00	26.196.430.255.00	90.05	100.00
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2	23.633.947.000.00	23.482.271.054.00	99.36	100.00
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi</b>	<b>63.822.447.000.00</b>	<b>62.751.015.307.00</b>	<b>98.32</b>	<b>100.00</b>
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1	3.450.328.000.00	3.401.792.500.00	98.59	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1	1.514.728.000.00	1.513.078.000.00	99.89	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2	2.416.284.000.00	2.383.598.000.00	98.65	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2	19.780.000.00	5.392.000.00	27.26	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1	2.826.200.000.00	2.748.906.300.00	97.27	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2	2.721.515.000.00	2.649.850.300.00	97.37	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2	4.280.000.00	3.972.000.00	92.80	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1	3.982.657.000.00	3.932.595.748.00	98.74	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1	595.663.000.00	584.453.000.00	98.12	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2	4.612.397.000.00	4.513.283.929.00	97.85	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2	10.710.000.00	9.210.000.00	85.99	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1	2.899.705.000.00	2.860.671.500.00	98.65	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1	205.325.000.00	201.456.500.00	98.12	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2	3.761.868.000.00	3.698.580.820.00	98.32	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2	420.000.00	414.750.00	98.75	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1	4.457.150.000.00	4.387.170.000.00	98.43	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1	2.140.000.00	2.140.000.00	100.00	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2	3.097.249.000.00	3.061.837.500.00	98.86	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2	13.097.000.00	12.912.500.00	98.59	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1	4.401.851.000.00	4.344.186.000.00	98.69	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1	199.000.000.00	188.998.000.00	94.97	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2	6.275.980.000.00	6.166.083.000.00	98.25	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1	2.243.394.000.00	2.216.468.100.00	98.80	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1	4.988.000.00	4.880.500.00	97.84	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2	2.134.151.000.00	2.031.766.460.00	95.20	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2	3.023.000.00	3.023.000.00	100.00	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1	2.171.658.000.00	2.158.489.600.00	99.39	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1	4.295.000.00	4.292.600.00	99.94	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2	2.468.499.000.00	2.417.453.750.00	97.93	100.00
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2	1.923.000.00	1.922.100.00	99.95	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1	4.434.611.000.00	4.409.861.000.00	99.44	100.00
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2	2.887.578.000.00	2.832.275.850.00	98.08	100.00
<b>5</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>	<b>3.936.943.000.00</b>	<b>3.761.989.867.00</b>	<b>95.56</b>	<b>100.00</b>
	Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat	1.540.127.000.00	1.494.753.714.00	97.05	100.00
	Pengadaan . Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	1.019.718.000.00	979.643.153.00	96.07	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium. Sertifikasi dan Advis Teknik	1.377.098.000.00	1.287.593.000.00	93.50	100.00
<b>6</b>	<b>Perencanaan. dan Pengawasan Teknis Jalan. Jembatan dan Keciaptakarya</b>	<b>24.430.252.000.00</b>	<b>23.881.339.846.00</b>	<b>97.75</b>	<b>100.00</b>
	Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan. Keciaptakarya	634.428.000.00	634.355.000.00	99.99	100.00
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi	2.292.889.000.00	2.283.976.892.00	99.61	100.00
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi	7.226.546.000.00	7.035.739.591.00	97.36	100.00
	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah	14.276.389.000.00	13.927.268.363.00	97.55	100.00
<b>7</b>	<b>Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi</b>	<b>13.152.877.000.00</b>	<b>12.756.433.095.00</b>	<b>96.99</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan Sarana Prasarana air minum	12.192.390.000.00	12.032.762.719.00	98.69	100.00
	Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS	381.561.000.00	282.996.523.00	74.17	100.00
	Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan	578.926.000.00	440.673.853.00	76.12	100.00
<b>8</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>15.828.387.000.00</b>	<b>15.146.402.709.00</b>	<b>95.69</b>	<b>99.17</b>
	Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah	15.315.129.000.00	14.667.272.057.00	95.77	97.51
	Pembinaan Jasa Konstruksi	412.490.000.00	410.304.130.00	99.47	100.00
	Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi	100.768.000.00	68.826.522.00	68.30	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>290.756.612.000.00</b>	<b>283.604.512.490.00</b>	<b>97.54</b>	<b>99.89</b>

### 3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp.75.551.692.000.00 realisasi sebesar Rp 64.302.487.791.00 atau 85.11% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.945.525.000.00</b>	<b>7.409.465.716.00</b>	<b>93.25</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.206.640.000.00	1.119.470.348.00	92.78	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	163.951.000.00	161.031.472.00	98.22	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.537.288.000.00	1.216.624.260.00	79.14	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	194.700.000.00	184.569.000.00	94.80	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	2.153.268.000.00	2.140.993.108.00	99.43	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	252.820.000.00	242.805.549.00	96.04	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	43.180.000.00	42.745.000.00	98.99	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	10.056.000.00	9.784.000.00	97.30	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.036.727.000.00	1.016.253.525.00	98.03	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	517.814.000.00	507.979.200.00	98.10	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	185.000.000.00	184.049.000.00	99.49	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	72.240.000.00	71.107.000.00	98.43	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	543.326.000.00	486.916.550.00	89.62	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	28.515.000.00	25.137.704.00	88.16	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>358.609.000.00</b>	<b>350.961.980.00</b>	<b>97.87</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.854.000.00	161.971.632.00	95.92	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.755.000.00	188.990.348.00	99.60	100.00
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku</b>	<b>42.908.546.000.00</b>	<b>32.898.961.282.00</b>	<b>76.67</b>	<b>100.00</b>
	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	11.277.796.000.00	1.809.532.700.00	16.05	100.00
	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	439.961.000.00	439.488.755.00	99.89	100.00
	Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi	178.913.000.00	173.144.346.00	96.78	100.00
	Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku	65.337.000.00	65.157.325.00	99.73	100.00
	Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA	715.367.000.00	713.876.350.00	99.79	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal	6.816.182.000.00	6.755.071.850.00	99.10	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto	5.167.528.000.00	5.132.647.550.00	99.33	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna	4.351.184.000.00	4.347.054.550.00	99.91	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo	6.686.629.000.00	6.351.155.300.00	94.98	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo	3.086.796.000.00	3.033.758.281.00	98.28	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy	4.122.853.000.00	4.078.074.275.00	98.91	100.00
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir</b>	<b>17.891.757.000.00</b>	<b>17.668.646.543.00</b>	<b>98.75</b>	<b>100.00</b>
	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai	1.438.145.000.00	1.407.556.900.00	97.87	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai	422.296.000.00	418.238.100.00	99.04	100.00
	Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan	3.366.400.000.00	3.312.487.290.00	98.40	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	1.444.435.000.00	1.438.105.800.00	99.56	100.00
	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto	1.475.177.000.00	1.454.384.200.00	98.59	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna	547.870.000.00	546.764.050.00	99.80	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo	504.468.000.00	481.501.800.00	95.45	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo	571.137.000.00	570.233.000.00	99.84	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy	257.793.000.00	255.014.300.00	98.92	100.00
	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal	852.389.000.00	850.339.800.00	99.76	100.00
	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto	711.465.000.00	702.984.900.00	98.81	100.00
	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna	585.621.000.00	585.104.750.00	99.91	100.00
	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna	611.782.000.00	610.318.400.00	99.76	100.00
	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo	581.862.000.00	579.840.950.00	99.65	100.00
	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo	447.989.000.00	428.521.800.00	95.65	100.00
	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo	590.873.000.00	590.156.949.00	99.88	100.00
	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo	487.656.000.00	480.853.795.00	98.61	100.00
	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy	705.672.000.00	699.327.900.00	99.10	100.00
	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy	663.531.000.00	650.322.250.00	98.01	100.00
	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal	859.070.000.00	857.166.600.00	99.78	100.00
	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto	766.126.000.00	749.423.009.00	97.82	100.00
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA</b>	<b>4.378.544.000.00</b>	<b>4.229.445.984.00</b>	<b>96.59</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA	1.238.089.000.00	1.224.017.395.00	98.86	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA	491.482.000.00	490.001.200.00	99.70	100.00
	Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA	2.648.973.000.00	2.515.427.389.00	94.96	100.00
<b>6</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>2.068.711.000.00</b>	<b>1.745.006.286.00</b>	<b>84.35</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	308.200.000.00	166.938.780.00	54.17	100.00
	Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota	287.140.000.00	234.283.530.00	81.59	100.00
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	510.852.000.00	410.208.034.00	80.30	100.00
	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	78.468.000.00	77.824.750.00	99.18	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	92.791.000.00	92.552.050.00	99.74	100.00
	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna	52.524.000.00	52.151.800.00	99.29	100.00
	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	49.764.000.00	49.608.650.00	99.69	100.00
	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo	51.369.000.00	51.138.497.00	99.55	100.00
	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	51.390.000.00	50.658.400.00	98.58	100.00
	Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	586.213.000.00	559.641.795.00	95.47	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>75.551.692.000.00</b>	<b>64.302.487.791.00</b>	<b>85.11</b>	<b>100.00</b>

#### 4. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

##### 4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

###### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.22.311.773.000.00 realisasi sebesar Rp 18.873.390.760.00 atau 84.59% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.898.556.000.00</b>	<b>4.298.429.824.00</b>	<b>87.75</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	27.660.000.00	24.982.600.00	90.32	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	160.000.000.00	159.999.900.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	600.000.000.00	387.605.269.00	64.60	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000.00	136.363.522.00	97.40	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.190.375.000.00	1.137.210.684.00	95.53	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	479.998.000.00	406.688.590.00	84.73	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	105.000.000.00	105.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	40.000.000.00	38.914.500.00	97.29	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	647.175.000.00	623.004.950.00	96.27	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	148.108.000.00	145.258.600.00	98.08	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	470.960.000.00	451.062.000.00	95.78	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	500.000.000.00	482.226.910.00	96.45	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	75.000.000.00	74.635.000.00	99.51	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	84.800.000.00	64.227.299.00	75.74	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	229.480.000.00	61.250.000.00	26.69	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>520.977.000.00</b>	<b>513.167.044.00</b>	<b>98.50</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	301.441.000.00	296.239.963.00	98.27	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.536.000.00	216.927.081.00	98.81	100.00
<b>3</b>	<b>Pembangunan Perumahan</b>	<b>13.886.258.000.00</b>	<b>11.154.102.305.00</b>	<b>80.32</b>	<b>100.00</b>
	Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	9.630.782.000.00	7.188.255.005.00	74.64	100.00
	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	1.128.234.000.00	1.096.629.200.00	97.20	100.00
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana. Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya	3.127.242.000.00	2.869.218.100.00	91.75	100.00
<b>4</b>	<b>Penanganan Kawasan Permukiman</b>	<b>739.557.000.00</b>	<b>670.117.236.00</b>	<b>90.61</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	164.746.000.00	146.323.200.00	88.82	100.00
	Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman	375.147.000.00	356.235.536.00	94.96	100.00
	Perencanaan dan Pengebdalian Kawasan Permukiman	199.664.000.00	167.558.500.00	83.92	100.00
<b>5</b>	<b>Keterpaduan Perumahan . Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	<b>1.094.598.000.00</b>	<b>1.084.571.051.00</b>	<b>99.08</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan. Pengelolaan. dan Pengembangan Data Bidang Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	505.296.000.00	501.243.539.00	99.20	100.00
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	333.502.000.00	332.290.822.00	99.64	100.00
	Pembinaan. monitoring dan evaluasi bidang perumahan. kawasan permukiman dan pertanahan	255.800.000.00	251.036.690.00	98.14	100.00
<b>6</b>	<b>Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan. dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>1.171.827.000.00</b>	<b>1.153.003.300.00</b>	<b>98.39</b>	<b>100.00</b>
	Penanganan Permasalahan Pertanahan	381.663.000.00	371.754.200.00	97.40	100.00
	Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	377.702.000.00	371.997.100.00	98.49	100.00
	Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan	412.462.000.00	409.252.000.00	99.22	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.311.773.000.00</b>	<b>18.873.390.760.00</b>	<b>84.59</b>	<b>100.00</b>

#### 5. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN.KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman. ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.47.480.630.000.00 realisasi sebesar Rp 44.342.320.540.00 atau 93.39% yang dilaksanakan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :





## 5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.14.328.286.000.00 realisasi sebesar Rp.13.280.704.580.00 atau 92.69% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.494.693.000.00</b>	<b>4.393.352.975.00</b>	<b>97.75</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	248.729.000.00	244.222.950.00	98.19	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	7.493.000.00	7.253.500.00	96.80	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	612.000.000.00	557.798.750.00	91.14	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	195.000.000.00	177.771.618.00	91.16	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	2.304.324.000.00	2.286.781.300.00	99.24	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	180.740.000.00	180.554.809.00	99.90	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	91.018.000.00	91.000.900.00	99.98	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	5.799.000.00	5.750.000.00	99.16	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	462.259.000.00	455.074.998.00	98.45	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	50.841.000.00	50.659.150.00	99.64	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	245.865.000.00	245.860.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	22.500.000.00	22.500.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	64.125.000.00	64.125.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	4.000.000.00	4.000.000.00	100.00	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>380.365.000.00</b>	<b>379.524.440.00</b>	<b>99.78</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.340.000.00	119.903.540.00	99.64	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.025.000.00	259.620.900.00	99.84	100.00
3	<b>Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah</b>	<b>2.427.757.000.00</b>	<b>2.420.931.015.00</b>	<b>99.72</b>	<b>100.00</b>
	Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah	793.477.000.00	792.523.300.00	99.88	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda	1.034.280.000.00	1.033.850.500.00	99.96	100.00
	Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	600.000.000.00	594.557.215.00	99.09	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
4	<b>Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>1.784.076.000.00</b>	<b>1.768.018.250.00</b>	<b>99.10</b>	<b>100.00</b>
	Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah	1.209.158.000.00	1.194.041.100.00	98.75	100.00
	Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	574.918.000.00	573.977.150.00	99.84	100.00
5	<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1.024.507.000.00</b>	<b>1.017.359.700.00</b>	<b>99.30</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibusmtranmas	842.580.000.00	837.819.400.00	99.43	100.00
	Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib	92.715.000.00	90.348.300.00	97.45	100.00
	Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM	89.212.000.00	89.192.000.00	99.98	100.00
6	<b>Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih</b>	<b>4.216.888.000.00</b>	<b>3.301.518.200.00</b>	<b>78.29</b>	<b>98.09</b>
	Peningkatan Keterampilan Satlinmas	2.117.934.000.00	2.117.708.300.00	99.99	100.00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas	2.098.954.000.00	1.183.809.900.00	56.40	96.19
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.328.286.000.00</b>	<b>13.280.704.580.00</b>	<b>92.69</b>	<b>99.68</b>

## 5.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp.17.035.293.000.00 realisasi sebesar Rp.16.374.081.539.00 atau 96.12% yang terdiri dari 5 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kpegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.181.416.000.00</b>	<b>4.038.739.099.00</b>	<b>96.59</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	187.900.000.00	187.400.000.00	99.73	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	3.515.000.00	3.412.500.00	97.08	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	340.000.000.00	313.804.754.00	92.30	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	77.500.000.00	77.108.321.00	99.49	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.648.464.000.00	1.627.944.592.00	98.76	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	200.000.000.00	199.833.028.00	99.92	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	82.140.000.00	81.989.800.00	99.82	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	15.424.000.00	13.606.500.00	88.22	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	728.983.000.00	704.156.120.00	96.59	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	166.139.000.00	156.868.679.00	94.42	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	350.000.000.00	347.045.000.00	99.16	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	35.000.000.00	34.375.000.00	98.21	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	76.421.000.00	56.303.705.00	73.68	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	47.990.000.00	47.630.000.00	99.25	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	221.940.000.00	187.261.100.00	84.37	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.493.971.000.00</b>	<b>2.419.275.740.00</b>	<b>97.00</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	365.165.000.00	361.342.319.00	98.95	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321.221.000.00	299.514.709.00	93.24	100.00
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.807.585.000.00	1.758.418.712.00	97.28	100.00
<b>3</b>	<b>Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan</b>	<b>4.424.536.000.00</b>	<b>4.086.302.000.00</b>	<b>92.36</b>	<b>100.00</b>
	Penanganan Konflik Sosial	1.686.185.000.00	1.667.812.000.00	98.91	100.00
	Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	1.802.550.000.00	1.488.484.000.00	82.58	100.00
	Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	935.801.000.00	930.006.000.00	99.38	100.00
<b>4</b>	<b>Program Penguatan Ketahanan Bangsa</b>	<b>2.044.470.000.00</b>	<b>1.957.585.000.00</b>	<b>95.75</b>	<b>100.00</b>
	Penguatan Ketahanan Ekonomi	890.275.000.00	835.500.000.00	93.85	100.00
	Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas	646.160.000.00	636.610.000.00	98.52	100.00
	Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.	508.035.000.00	485.475.000.00	95.56	100.00
<b>5</b>	<b>Program Penguatan Politik Dalam Negeri</b>	<b>3.890.900.000.00</b>	<b>3.872.179.700.00</b>	<b>99.52</b>	<b>100.00</b>
	Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik	1.109.885.000.00	1.099.913.200.00	99.10	100.00
	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik	2.781.015.000.00	2.772.266.500.00	99.69	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.035.293.000.00</b>	<b>16.374.081.539.00</b>	<b>96.12</b>	<b>100.00</b>

### 5.3. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.16.117.051.000.00 realisasi sebesar Rp 14.687.534.421.00 atau 91.13% yang terdiri dari 3 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.479.919.000.00</b>	<b>6.863.034.446.00</b>	<b>91.75</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.764.660.000.00	1.722.824.600.00	97.63	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	145.404.000.00	140.523.255.00	96.64	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	631.000.000.00	613.682.832.00	97.26	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	250.000.000.00	246.165.050.00	98.47	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	488.165.000.00	488.154.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.675.544.000.00	1.160.303.845.00	69.25	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	162.155.000.00	161.893.284.00	99.84	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.626.000.00	12.626.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	216.000.000.00	215.917.670.00	99.96	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	283.910.000.00	283.592.200.00	99.89	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.204.000.000.00	1.204.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	30.904.000.00	30.380.000.00	98.30	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	48.600.000.00	43.188.896.00	88.87	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	113.855.000.00	89.027.835.00	78.19	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	61.818.000.00	59.481.150.00	96.22	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	391.278.000.00	391.273.829.00	100.00	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>368.680.000.00</b>	<b>317.226.803.00</b>	<b>86.04</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	321.510.000.00	283.208.555.00	88.09	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.170.000.00	34.018.248.00	72.12	100.00
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.268.452.000.00</b>	<b>7.507.273.172.00</b>	<b>90.79</b>	<b>96.83</b>
	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	330.436.000.00	315.027.674.00	95.34	100.00
	Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana	2.007.787.000.00	1.938.040.319.00	96.53	100.00
	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jtg	198.703.000.00	195.194.500.00	98.23	100.00
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana	380.811.000.00	280.269.779.00	73.60	100.00
	Peningkatan. Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda	233.140.000.00	199.095.200.00	85.40	100.00
	Pengembangan Pusdalops Jateng	636.860.000.00	623.504.700.00	97.90	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Evaluasi, Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana	493.850.000.00	202.418.500.00	40.99	76.77
	Bintek SAR, Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	139.578.000.00	136.011.500.00	97.44	100.00
	Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana di Jateng	496.840.000.00	481.648.335.00	96.94	100.00
	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	109.759.000.00	78.762.400.00	71.76	82.07
	Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng	347.020.000.00	316.463.800.00	91.19	100.00
	Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	1.869.232.000.00	1.730.098.000.00	92.56	100.00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng	1.024.436.000.00	1.010.738.465.00	98.66	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.117.051.000.00</b>	<b>14.687.534.421.00</b>	<b>91.13</b>	<b>98.94</b>

## 6. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

### 6.1. DINAS SOSIAL

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp.110.091.084.000.00 realisasi sebesar Rp 105.760.346.802.00 atau 96.07% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30.550.187.000.00</b>	<b>29.555.337.028.00</b>	<b>96.74</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	603.649.000.00	602.865.847.00	99.87	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1.062.857.000.00	1.059.779.600.00	99.71	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	3.244.691.000.00	2.902.056.248.00	89.44	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	180.000.000.00	172.128.400.00	95.63	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	14.124.280.000.00	13.808.329.662.00	97.76	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.016.308.000.00	954.063.650.00	93.88	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	421.460.000.00	416.268.000.00	98.77	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	120.585.000.00	120.329.344.00	99.79	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	5.376.800.000.00	5.172.521.901.00	96.20	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	3.574.208.000.00	3.551.550.376.00	99.37	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	671.200.000.00	654.209.000.00	97.47	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.492.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	54.087.000.00	54.085.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	88.570.000.00	87.150.000.00	98.40	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>500.497.000.00</b>	<b>451.109.382.00</b>	<b>90.13</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.100.000.00	202.408.382.00	85.37	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.397.000.00	248.701.000.00	94.42	100.00
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial</b>	<b>63.819.983.000.00</b>	<b>62.122.045.810.00</b>	<b>97.34</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	3.095.670.000.00	3.031.618.800.00	97.93	100.00
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO	466.257.000.00	455.880.310.00	97.77	100.00
	Kegiatan Rehabilitasi PMKS	5.300.028.000.00	4.869.456.600.00	91.88	100.00
	Kegiatan penyantunan PMKS	51.738.398.000.00	50.559.371.640.00	97.72	100.00
	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	3.219.630.000.00	3.205.718.460.00	99.57	100.00
<b>4</b>	<b>Penanganan Fakir Miskin</b>	<b>5.747.828.000.00</b>	<b>4.383.476.320.00</b>	<b>76.26</b>	<b>100.00</b>
	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	306.230.000.00	290.120.370.00	94.74	100.00
	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan	299.202.000.00	290.503.300.00	97.09	100.00
	Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya	5.142.396.000.00	3.802.852.650.00	73.95	100.00
<b>5</b>	<b>Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>2.623.386.000.00</b>	<b>2.500.646.000.00</b>	<b>95.32</b>	<b>100.00</b>
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1.235.963.000.00	1.183.088.000.00	95.72	100.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	603.782.000.00	537.967.000.00	89.10	100.00
	Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga	783.641.000.00	779.591.000.00	99.48	100.00
<b>6</b>	<b>Pemberdayaan Sosial</b>	<b>6.849.203.000.00</b>	<b>6.747.732.262.00</b>	<b>98.52</b>	<b>100.00</b>
	Penguatan Kapasitas PSKS	6.104.931.000.00	6.066.918.626.00	99.38	100.00
	Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial	307.705.000.00	293.347.836.00	95.33	100.00
	Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial	436.567.000.00	387.465.800.00	88.75	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>110.091.084.000.00</b>	<b>105.760.346.802.00</b>	<b>96.07</b>	<b>100.00</b>

## 7. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA

### 7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp.27.836.841.000.00 realisasi sebesar Rp 26.103.524.299.00 atau 93.77% yang terdiri dari 7 program. yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.522.745.000.00</b>	<b>13.345.757.172.00</b>	<b>91.90</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.500.888.000.00	1.428.403.650.00	95.17	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	318.163.000.00	314.163.200.00	98.74	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	2.780.446.000.00	1.876.087.008.00	67.47	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	142.000.000.00	132.625.786.00	93.40	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	4.907.457.000.00	4.834.996.102.00	98.52	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	769.021.000.00	766.984.533.00	99.74	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	172.218.000.00	170.473.500.00	98.99	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	27.700.000.00	27.697.000.00	99.99	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.194.964.000.00	1.167.123.793.00	97.67	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1.016.187.000.00	1.005.754.150.00	98.97	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	900.526.000.00	887.262.250.00	98.53	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	350.000.000.00	346.440.700.00	98.98	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	26.237.000.00	12.227.000.00	46.60	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	416.938.000.00	375.518.500.00	90.07	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>271.078.000.00</b>	<b>270.014.450.00</b>	<b>99.61</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.931.000.00	200.004.950.00	99.54	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.147.000.00	70.009.500.00	99.80	100.00
3	<b>Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>6.368.664.000.00</b>	<b>6.128.226.572.00</b>	<b>96.22</b>	<b>100.00</b>
	Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT	340.705.000.00	330.315.000.00	96.95	100.00
	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan	286.988.000.00	281.785.800.00	98.19	100.00
	Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri	199.643.000.00	188.339.000.00	94.34	100.00
	Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri	86.005.000.00	85.792.600.00	99.75	100.00
	Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	1.523.000.000.00	1.450.949.000.00	95.27	100.00
	Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa pra magang dan pekerja migran	466.934.000.00	461.387.340.00	98.81	100.00
	Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa pra magang dan pekerja migran	65.423.000.00	55.222.000.00	84.41	100.00
	Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN	253.580.000.00	250.761.650.00	98.89	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL . AKAD dan AKAN	49.684.000.00	49.676.500.00	99.98	100.00
	Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL. AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )	1.531.369.000.00	1.464.879.482.00	95.66	100.00
	Penyebaran dan kajian produktivitas	110.643.000.00	110.346.200.00	99.73	100.00
	Pemasaran alat. teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas	89.687.000.00	89.685.000.00	100.00	100.00
	Pelatihan . pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha	241.828.000.00	241.828.000.00	100.00	100.00
	Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau)	1.123.175.000.00	1.067.259.000.00	95.02	100.00
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>1.731.907.000.00</b>	<b>1.688.936.918.00</b>	<b>97.52</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan masyarakat penganggur dan perluasan kesempatan kerja	771.666.000.00	741.674.518.00	96.11	100.00
	Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	878.779.000.00	875.414.400.00	99.62	100.00
	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	81.462.000.00	71.848.000.00	88.20	100.00
<b>5</b>	<b>Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>1.683.680.000.00</b>	<b>1.660.420.400.00</b>	<b>98.62</b>	<b>100.00</b>
	Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan	498.957.000.00	486.149.200.00	97.43	100.00
	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja. Hubungan Industrial dan Jamsos	172.058.000.00	170.965.200.00	99.36	100.00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit	551.763.000.00	543.563.000.00	98.51	100.00
	Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan	256.299.000.00	255.284.000.00	99.60	100.00
	Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja	204.603.000.00	204.459.000.00	99.93	100.00
<b>6</b>	<b>Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>3.085.048.000.00</b>	<b>2.852.242.487.00</b>	<b>92.45</b>	<b>100.00</b>
	Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja	360.904.000.00	358.913.098.00	99.45	100.00
	Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3	76.402.000.00	76.352.000.00	99.93	100.00
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	99.095.000.00	99.053.000.00	99.96	100.00
	Pengujian Higiene perusahaan. kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian	1.670.848.000.00	1.477.249.549.00	88.41	100.00
	Pengujian keselamatan kerja. ergonomi. psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3	460.000.000.00	423.444.840.00	92.05	100.00
	Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	417.799.000.00	417.230.000.00	99.86	100.00
<b>7</b>	<b>Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi</b>	<b>173.719.000.00</b>	<b>157.926.300.00</b>	<b>90.91</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyiapan. Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi	173.719.000.00	157.926.300.00	90.91	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.836.841.000.00</b>	<b>26.103.524.299.00</b>	<b>93.77</b>	<b>100.00</b>





## 8. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp.12.401.286.000.00 realisasi sebesar Rp 12.168.191.819.00 atau 98.12% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.715.200.000.00</b>	<b>2.606.285.347.00</b>	<b>95.99</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	252.219.000.00	229.157.000.00	90.86	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	9.600.000.00	9.600.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	425.640.000.00	385.125.577.00	90.48	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	57.959.000.00	57.948.000.00	99.98	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	923.282.000.00	921.568.824.00	99.81	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	88.492.000.00	87.890.000.00	99.32	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	87.062.000.00	86.757.000.00	99.65	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	2.520.000.00	2.508.500.00	99.54	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	379.013.000.00	344.986.638.00	91.02	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	244.235.000.00	241.315.308.00	98.80	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	45.000.000.00	43.035.000.00	95.63	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	0.00	0.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	10.200.000.00	10.200.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.120.000.00	5.079.500.00	99.21	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	50.480.000.00	49.568.500.00	98.19	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	134.378.000.00	131.545.500.00	97.89	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>314.460.000.00</b>	<b>305.969.500.00</b>	<b>97.30</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	257.173.000.00	248.682.500.00	96.70	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.287.000.00	57.287.000.00	100.00	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak</b>	<b>3.258.326.000.00</b>	<b>3.164.976.100.00</b>	<b>97.14</b>	<b>100.00</b>
	Pemberdayaan Perempuan	1.644.580.000.00	1.579.066.000.00	96.02	100.00
	Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	329.790.000.00	313.185.500.00	94.97	100.00
	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	323.481.000.00	323.480.900.00	100.00	100.00
	Peningkatan Partisipasi Anak	91.587.000.00	91.587.000.00	100.00	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	508.082.000.00	504.715.400.00	99.34	100.00
	Penyusunan data dan informasi PPA	360.806.000.00	352.941.300.00	97.82	100.00
<b>4</b>	<b>Perlindungan Perempuan Dan Anak</b>	<b>1.343.989.000.00</b>	<b>1.329.899.054.00</b>	<b>98.95</b>	<b>100.00</b>
	Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	379.093.000.00	379.011.722.00	99.98	100.00
	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak	238.208.000.00	233.320.500.00	97.95	100.00
	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	194.512.000.00	190.225.532.00	97.80	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	239.232.000.00	238.708.000.00	99.78	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	33.228.000.00	33.228.000.00	100.00	100.00
	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)	259.716.000.00	255.405.300.00	98.34	100.00
<b>5</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana</b>	<b>4.221.809.000.00</b>	<b>4.214.395.868.00</b>	<b>99.82</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan kesertaan KB MKJP	3.150.095.000.00	3.148.867.000.00	99.96	100.00
	Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan	252.006.000.00	251.396.000.00	99.76	100.00
	Pemetaan Pengendalian Penduduk	32.418.000.00	32.058.868.00	98.89	100.00
	Penyediaan profil kependudukan dan KB	6.150.000.00	6.150.000.00	100.00	100.00
	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	744.760.000.00	739.544.000.00	99.30	100.00
	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB	36.380.000.00	36.380.000.00	100.00	100.00
<b>6</b>	<b>Keluarga Sejahtera</b>	<b>547.502.000.00</b>	<b>546.665.950.00</b>	<b>99.85</b>	<b>100.00</b>
	Advokasi Ketahanan Keluarga	378.679.000.00	377.998.450.00	99.82	100.00
	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	44.120.000.00	44.120.000.00	100.00	100.00
	Advokasi Kesejahteraan Keluarga	124.703.000.00	124.547.500.00	99.88	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.401.286.000.00</b>	<b>12.168.191.819.00</b>	<b>98.12</b>	<b>100.00</b>



## 9. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN

### 9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.20.976.088.000.00 realisasi sebesar Rp 19.690.501.991.00 atau 93.87% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.171.449.000.00</b>	<b>4.028.797.196.00</b>	<b>96.58</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	40.810.000.00	40.757.000.00	99.87	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	53.064.000.00	52.114.000.00	98.21	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	412.000.000.00	318.164.671.00	77.22	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000.00	139.372.759.00	99.55	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.441.500.000.00	1.433.047.200.00	99.41	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	385.068.000.00	384.106.857.00	99.75	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60.100.000.00	59.960.000.00	99.77	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	38.600.000.00	34.990.000.00	90.65	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	444.430.000.00	420.416.925.00	94.60	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	238.278.000.00	236.443.500.00	99.23	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	164.000.000.00	163.755.000.00	99.85	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	577.000.000.00	572.169.532.00	99.16	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.133.000.00	59.133.000.00	98.34	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	33.029.000.00	31.616.000.00	95.72	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	42.337.000.00	42.337.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	41.100.000.00	40.413.752.00	98.33	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>245.781.000.00</b>	<b>226.601.000.00</b>	<b>92.20</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.238.000.00	158.502.000.00	95.35	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.543.000.00	68.099.000.00	85.61	100.00
3	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>16.558.858.000.00</b>	<b>15.435.103.795.00</b>	<b>93.21</b>	<b>100.00</b>
	Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan	763.011.000.00	703.353.000.00	92.18	100.00
	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA	1.457.724.000.00	1.238.263.900.00	84.95	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	328.920.000.00	310.420.000.00	94.38	100.00
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	714.451.000.00	709.381.000.00	99.29	100.00
	Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	510.000.000.00	510.000.000.00	100.00	100.00
	Pengawasan Keamanan Pangan	549.800.000.00	549.209.000.00	99.89	100.00
	Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan	262.135.000.00	261.635.000.00	99.81	100.00
	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	3.333.275.000.00	2.865.866.000.00	85.98	100.00
	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	2.634.339.000.00	2.631.038.750.00	99.87	100.00
	Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan	1.740.200.000.00	1.612.796.400.00	92.68	100.00
	Pengujian Mutu Pangan	897.530.000.00	788.153.336.00	87.81	100.00
	Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan	142.225.000.00	141.525.000.00	99.51	100.00
	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan	287.698.000.00	278.463.000.00	96.79	100.00
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan. Jaringan Distribusi. Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)	2.937.550.000.00	2.834.999.409.00	96.51	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.976.088.000.00</b>	<b>19.690.501.991.00</b>	<b>93.87</b>	<b>100.00</b>

## 10. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

### 10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp.37.735.899.000.00 realisasi sebesar Rp 33.519.489.334.00 atau 88.83% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.683.731.000.00</b>	<b>13.114.848.898.00</b>	<b>95.84</b>	<b>89.41</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	48.200.000.00	47.707.508.00	98.98	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	61.087.000.00	60.827.150.00	99.57	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.465.305.000.00	1.228.403.860.00	83.83	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	303.392.000.00	291.257.776.00	96.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	4.336.229.000.00	4.249.842.298.00	98.01	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.139.417.000.00	1.132.400.801.00	99.38	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	254.185.000.00	250.221.804.00	98.44	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	55.305.000.00	54.352.100.00	98.28	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	2.033.166.000.00	1.962.855.591.00	96.54	99.47
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	566.883.000.00	543.270.350.00	95.83	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.342.662.000.00	1.334.934.400.00	99.42	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	1.030.707.000.00	1.022.137.000.00	99.17	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.001.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	1.001.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	90.120.000.00	60.423.000.00	67.05	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	91.900.000.00	27.942.000.00	30.40	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	767.109.000.00	754.643.820.00	98.38	99.36
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	94.062.000.00	93.629.440.00	99.54	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>512.994.000.00</b>	<b>506.170.461.00</b>	<b>98.67</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	274.806.000.00	268.754.400.00	97.80	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.188.000.00	237.416.061.00	99.68	100.00
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan</b>	<b>6.368.247.000.00</b>	<b>6.149.319.992.00</b>	<b>96.56</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	788.000.000.00	787.545.280.00	99.94	100.00
	Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun	942.140.000.00	838.782.350.00	89.03	100.00
	Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup	572.205.000.00	570.627.384.00	99.72	100.00
	Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya	2.500.000.000.00	2.402.428.600.00	96.10	100.00
	Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara	942.933.000.00	941.891.750.00	99.89	100.00
	Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup	622.969.000.00	608.044.628.00	97.60	100.00
<b>4</b>	<b>Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas</b>	<b>1.097.940.000.00</b>	<b>1.093.240.176.00</b>	<b>99.57</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekofisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	512.734.000.00	510.025.196.00	99.47	100.00
	Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup	367.792.000.00	367.039.880.00	99.80	100.00
	Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL	217.414.000.00	216.175.100.00	99.43	100.00
<b>5</b>	<b>Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>	<b>11.455.021.000.00</b>	<b>8.333.936.937.00</b>	<b>72.75</b>	<b>98.02</b>
	Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	8.402.421.000.00	5.286.164.960.00	62.91	86.15



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan	62.741.000.00	62.736.000.00	99.99	100.00
	Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen	1.437.711.000.00	1.436.600.000.00	99.92	100.00
	Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I	577.493.000.00	577.086.600.00	99.93	100.00
	Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I	125.980.000.00	125.249.377.00	99.42	100.00
	Pengembangan Kebun Raya Baturaden	614.961.000.00	612.386.000.00	99.58	100.00
	Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden	233.714.000.00	233.714.000.00	100.00	100.00
<b>6</b>	<b>Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	<b>3.647.334.000.00</b>	<b>3.356.985.060.00</b>	<b>92.04</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	392.000.000.00	391.941.760.00	99.99	100.00
	Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan	3.255.334.000.00	2.965.043.300.00	91.08	100.00
<b>7</b>	<b>Pemanfaatan Hutan</b>	<b>970.632.000.00</b>	<b>964.987.810.00</b>	<b>99.42</b>	<b>100.00</b>
	Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan	970.632.000.00	964.987.810.00	99.42	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.735.899.000.00</b>	<b>33.519.489.334.00</b>	<b>88.83</b>	<b>98.20</b>

## 11. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

### 11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp.12.351.380.000.00 realisasi sebesar Rp 11.475.810.116.00 atau 92.91% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.544.023.000.00</b>	<b>4.342.018.697.00</b>	<b>95.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	352.655.000.00	323.604.000.00	91.76	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	23.000.000.00	22.808.000.00	99.17	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	825.000.000.00	663.724.295.00	80.45	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	94.410.000.00	93.414.000.00	98.95	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.486.241.000.00	1.479.246.800.00	99.53	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	276.770.000.00	276.531.081.00	99.91	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	85.740.000.00	85.736.980.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	5.540.000.00	5.540.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	852.075.000.00	850.638.416.00	99.83	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	85.000.000.00	84.970.525.00	99.97	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	403.570.000.00	403.567.100.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	1.510.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000.00	29.745.000.00	99.15	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	22.512.000.00	22.492.500.00	99.91	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>213.275.000.00</b>	<b>209.933.194.00</b>	<b>98.43</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.085.000.00	108.317.499.00	99.30	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.190.000.00	101.615.695.00	97.53	100.00
<b>3</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>976.528.000.00</b>	<b>942.352.075.00</b>	<b>96.50</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.228.000.00	309.378.415.00	92.84	100.00
	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	292.280.000.00	288.632.300.00	98.75	100.00
	Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	351.020.000.00	344.341.360.00	98.10	100.00
<b>4</b>	<b>Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1.709.796.000.00</b>	<b>1.701.047.822.00</b>	<b>99.49</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah	317.299.000.00	313.903.400.00	98.93	100.00
	Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa	244.440.000.00	241.489.500.00	98.79	100.00
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah	284.198.000.00	283.947.622.00	99.91	100.00
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah	213.002.000.00	212.974.300.00	99.99	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan	650.857.000.00	648.733.000.00	99.67	100.00
<b>5</b>	<b>Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>	<b>815.726.000.00</b>	<b>814.517.738.00</b>	<b>99.85</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah	239.746.000.00	239.602.529.00	99.94	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan	575.980.000.00	574.915.209.00	99.82	100.00
<b>6</b>	<b>Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>4.092.032.000.00</b>	<b>3.465.940.590.00</b>	<b>84.70</b>	<b>100.00</b>



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah	2.902.961.000.00	2.417.943.073.00	83.29	100.00
	Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Jawa Tengah	692.181.000.00	676.243.200.00	97.70	100.00
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah	496.890.000.00	371.754.317.00	74.82	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.351.380.000.00</b>	<b>11.475.810.116.00</b>	<b>92.91</b>	<b>100.00</b>

## 12. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN

### 12.1. DINAS PERHUBUNGAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.94.761.827.000.00 realisasi sebesar Rp 90.868.290.953.00 atau 95.89% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.743.767.000.00</b>	<b>15.531.369.105.00</b>	<b>92.76</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	81.417.000.00	70.444.600.00	86.52	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	393.916.000.00	370.226.150.00	93.99	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.708.736.000.00	1.398.613.957.00	81.85	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	165.000.000.00	164.022.000.00	99.41	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	10.652.639.000.00	10.038.107.599.00	94.23	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	921.132.000.00	905.857.800.00	98.34	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	57.300.000.00	57.017.000.00	99.51	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.657.000.00	12.599.000.00	99.54	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	687.951.000.00	607.705.117.00	88.34	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	277.988.000.00	262.492.500.00	94.43	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	198.472.000.00	191.141.550.00	96.31	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	253.912.000.00	252.813.000.00	99.57	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	90.796.000.00	89.988.000.00	99.11	100.00





NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	49.010.000.00	20.697.700.00	42.23	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	25.979.000.00	23.340.000.00	89.84	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	1.154.914.000.00	1.056.136.632.00	91.45	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	11.948.000.00	10.166.500.00	85.09	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>239.363.000.00</b>	<b>230.886.200.00</b>	<b>96.46</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.003.000.00	171.131.200.00	95.60	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.360.000.00	59.755.000.00	99.00	100.00
<b>3</b>	<b>Pengembangan Perhubungan Darat</b>	<b>76.255.434.000.00</b>	<b>73.629.276.000.00</b>	<b>96.56</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan Terminal Angkutan Jalan	77.270.000.00	75.005.000.00	97.07	100.00
	Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek	1.834.466.000.00	1.599.047.151.00	87.17	100.00
	Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek	55.438.000.00	52.508.800.00	94.72	100.00
	Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan	51.067.000.00	50.361.800.00	98.62	100.00
	Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan	87.177.000.00	81.813.000.00	93.85	100.00
	Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan	3.257.289.000.00	3.208.116.000.00	98.49	100.00
	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	78.248.000.00	47.233.000.00	60.36	100.00
	Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah	1.257.713.000.00	1.217.181.180.00	96.78	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng	62.282.583.000.00	60.322.671.578.00	96.85	100.00
	Kegiatan peningkatan Sarana Prasarana transportasi Jawa Tengah	1.828.739.000.00	1.800.165.965.00	98.44	100.00
	Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah	1.706.272.000.00	1.660.509.900.00	97.32	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	36.524.000.00	35.568.500.00	97.38	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	32.247.000.00	31.760.400.00	98.49	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	73.690.000.00	72.648.000.00	98.59	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	47.205.000.00	45.545.000.00	96.48	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	78.202.000.00	70.448.500.00	90.09	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	49.690.000.00	49.690.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	574.908.000.00	506.294.000.00	88.07	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	449.556.000.00	415.816.220.00	92.49	100.00
	Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	696.313.000.00	668.890.160.00	96.06	100.00
	Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	240.032.000.00	211.231.200.00	88.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	805.705.000.00	771.584.646.00	95.77	100.00
	Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	655.100.000.00	635.186.000.00	96.96	100.00
<b>4</b>	<b>Pengembangan Perhubungan Laut</b>	<b>1.523.263.000.00</b>	<b>1.476.759.648.00</b>	<b>96.95</b>	<b>100.00</b>
	Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng	99.813.000.00	96.699.000.00	96.88	100.00
	Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I	1.110.039.000.00	1.074.368.348.00	96.79	100.00
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut	203.792.000.00	196.919.000.00	96.63	100.00
	Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng	109.619.000.00	108.773.300.00	99.23	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>94.761.827.000.00</b>	<b>90.868.290.953.00</b>	<b>95.89</b>	<b>100.00</b>

### 13. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

##### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp.63.394.690.000.00 realisasi sebesar Rp.61.626.459.073.00 atau 97.21% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.216.772.000.00</b>	<b>6.895.943.573.00</b>	<b>95.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	455.000.000.00	410.460.000.00	90.21	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	18.850.000.00	10.936.800.00	58.02	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	559.004.000.00	504.163.533.00	90.19	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	142.500.000.00	134.508.000.00	94.39	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.994.610.000.00	1.873.471.140.00	93.93	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	367.195.000.00	366.130.600.00	99.71	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	113.360.000.00	104.366.000.00	92.07	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.800.000.00	12.098.200.00	94.52	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.854.837.000.00	1.824.574.300.00	98.37	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	231.500.000.00	224.663.000.00	97.05	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	961.341.000.00	932.102.000.00	96.96	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	71.826.000.00	69.310.000.00	96.50	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	433.949.000.00	429.160.000.00	98.90	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>419.383.000.00</b>	<b>401.295.400.00</b>	<b>95.69</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	366.263.000.00	354.713.400.00	96.85	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.120.000.00	46.582.000.00	87.69	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>16.275.081.000.00</b>	<b>15.695.983.772.00</b>	<b>96.44</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan pengelolaan informasi publik	13.827.356.000.00	13.279.863.927.00	96.04	100.00
	Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik	276.944.000.00	271.643.000.00	98.09	100.00
	Analisis berita dan pendapat publik	2.170.781.000.00	2.144.476.845.00	98.79	100.00
<b>4</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>26.642.388.000.00</b>	<b>25.930.354.700.00</b>	<b>97.33</b>	<b>100.00</b>
	Pengelolaan Jaringan dan Data Center	19.278.181.000.00	18.585.468.250.00	96.41	100.00
	Pengelolaan internet dan intranet	7.075.038.000.00	7.061.054.350.00	99.80	100.00
	Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur	289.169.000.00	283.832.100.00	98.15	100.00
<b>5</b>	<b>Pengembangan E-Government</b>	<b>9.045.012.000.00</b>	<b>8.970.554.637.00</b>	<b>99.18</b>	<b>100.00</b>
	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	6.928.886.000.00	6.893.833.196.00	99.49	100.00
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government	489.499.000.00	489.492.500.00	100.00	100.00
	Peningkatan Tata Kelola E-Government	1.626.627.000.00	1.587.228.941.00	97.58	100.00
<b>6</b>	<b>Pengembangan Data Statistik Sektorial Dan Keterbukaan Informasi</b>	<b>1.991.277.000.00</b>	<b>1.965.545.841.00</b>	<b>98.71</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur	110.655.000.00	106.609.534.00	96.34	100.00
	Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	151.426.000.00	150.986.417.00	99.71	100.00
	Peningkatan pelayanan data dan informasi publik	181.243.000.00	180.960.690.00	99.84	100.00
	Peningkatan keterbukaan informasi publik	1.547.953.000.00	1.526.989.200.00	98.65	100.00
<b>7</b>	<b>Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah</b>	<b>1.804.777.000.00</b>	<b>1.766.781.150.00</b>	<b>97.89</b>	<b>100.00</b>
	Pengamanan persandian dan informasi	691.971.000.00	674.747.150.00	97.51	100.00
	Tata kelola persandian	299.178.000.00	292.026.500.00	97.61	100.00
	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	813.628.000.00	800.007.500.00	98.33	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>63.394.690.000.00</b>	<b>61.626.459.073.00</b>	<b>97.21</b>	<b>100.00</b>



#### 14. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI DAN UKM

##### 14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

###### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Dan Ukm yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.44.594.284.000.00 realisasi sebesar Rp 43.011.492.463.00 atau 96.45% yang terdiri dari 10 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.367.434.000.00</b>	<b>6.183.921.241.00</b>	<b>97.12</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.142.049.000.00	1.114.700.202.00	97.61	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	21.161.000.00	18.634.200.00	88.06	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.173.292.000.00	1.086.805.701.00	92.63	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	95.000.000.00	94.486.549.00	99.46	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.066.900.000.00	1.030.426.498.00	96.58	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	635.295.000.00	625.471.024.00	98.45	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	107.400.000.00	106.700.000.00	99.35	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.513.000.00	12.440.000.00	99.42	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	729.298.000.00	718.736.537.00	98.55	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	207.862.000.00	206.580.560.00	99.38	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	280.500.000.00	278.270.000.00	99.20	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	75.000.000.00	73.418.400.00	97.89	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	17.000.000.00	16.990.000.00	99.94	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	482.720.000.00	482.401.400.00	99.93	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	242.904.000.00	240.590.170.00	99.05	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	78.540.000.00	77.270.000.00	98.38	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.084.424.000.00</b>	<b>1.062.312.830.00</b>	<b>97.96</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	872.759.000.00	851.516.370.00	97.57	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.665.000.00	210.796.460.00	99.59	100.00
3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Koperasi</b>	<b>2.235.523.000.00</b>	<b>2.220.917.545.00</b>	<b>99.35</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.148.325.000.00	1.143.516.545.00	99.58	100.00
	Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS	1.087.198.000.00	1.077.401.000.00	99.10	100.00
4	<b>Pemasyarakatan Perkoperasian</b>	<b>1.315.927.000.00</b>	<b>1.248.095.873.00</b>	<b>94.85</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	921.404.000.00	858.093.033.00	93.13	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi	394.523.000.00	390.002.840.00	98.85	100.00
<b>5</b>	<b>Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>1.256.534.000.00</b>	<b>1.191.825.000.00</b>	<b>94.85</b>	<b>100.00</b>
	Pemeringkatan Koperasi	492.435.000.00	457.162.000.00	92.84	100.00
	Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi	764.099.000.00	734.663.000.00	96.15	100.00
<b>6</b>	<b>Pendidikan Perkoperasian dan UKM</b>	<b>10.321.820.000.00</b>	<b>10.111.975.350.00</b>	<b>97.97</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	5.650.000.000.00	5.565.164.808.00	98.50	100.00
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	2.000.000.000.00	1.901.369.264.00	95.07	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM	2.671.820.000.00	2.645.441.278.00	99.01	100.00
<b>7</b>	<b>Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM</b>	<b>854.791.000.00</b>	<b>821.805.540.00</b>	<b>96.14</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM	276.893.000.00	268.987.290.00	97.14	100.00
	Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM	577.898.000.00	552.818.250.00	95.66	100.00
<b>8</b>	<b>Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM</b>	<b>17.220.569.000.00</b>	<b>16.441.713.700.00</b>	<b>95.48</b>	<b>100.00</b>
	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	13.000.000.000.00	12.248.761.154.00	94.22	100.00
	Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM	266.000.000.00	259.529.600.00	97.57	100.00
	Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM	3.954.569.000.00	3.933.422.946.00	99.47	100.00
<b>9</b>	<b>Peningkatan Produktivitas KUKM</b>	<b>1.332.592.000.00</b>	<b>1.264.633.800.00</b>	<b>94.90</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM	1.260.592.000.00	1.192.635.800.00	94.61	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM	72.000.000.00	71.998.000.00	100.00	100.00
<b>10</b>	<b>Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM</b>	<b>2.604.670.000.00</b>	<b>2.464.291.584.00</b>	<b>94.61</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM	2.526.392.000.00	2.386.013.584.00	94.44	100.00
	Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM	78.278.000.00	78.278.000.00	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.594.284.000.00</b>	<b>43.011.492.463.00</b>	<b>96.45</b>	<b>100.00</b>

## 15. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL

### 15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.8.265.314.000.00 realisasi sebesar Rp7.848.084.887.00 atau 94.95% yang terdiri dari 8 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.653.358.000.00</b>	<b>4.303.176.198.00</b>	<b>92.47</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	367.050.000.00	302.750.000.00	82.48	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	58.188.000.00	55.937.350.00	96.13	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	667.500.000.00	625.355.054.00	93.69	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	101.000.000.00	100.269.309.00	99.28	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.340.472.000.00	1.136.925.310.00	84.82	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	295.547.000.00	282.670.411.00	95.64	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	113.513.000.00	113.452.450.00	99.95	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	13.926.000.00	13.903.000.00	99.83	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	565.803.000.00	556.676.622.00	98.39	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	117.824.000.00	116.939.742.00	99.25	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	210.866.000.00	210.865.700.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	368.600.000.00	368.600.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	42.544.000.00	40.680.000.00	95.62	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.000.000.00	13.000.000.00	56.52	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	6.000.000.00	6.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	292.725.000.00	290.391.250.00	99.20	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	68.800.000.00	68.760.000.00	99.94	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>164.980.000.00</b>	<b>163.893.085.00</b>	<b>99.34</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.101.000.00	116.514.085.00	99.50	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.879.000.00	47.379.000.00	98.96	100.00
<b>3</b>	<b>Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</b>	<b>237.515.000.00</b>	<b>237.088.050.00</b>	<b>99.82</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal	137.154.000.00	136.753.350.00	99.71	100.00
	Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal	100.361.000.00	100.334.700.00	99.97	100.00
<b>4</b>	<b>Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal</b>	<b>689.116.000.00</b>	<b>642.311.170.00</b>	<b>93.21</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri	423.833.000.00	381.645.800.00	90.05	100.00
	Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal	122.704.000.00	122.572.870.00	99.89	100.00
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal	142.579.000.00	138.092.500.00	96.85	100.00
<b>5</b>	<b>Pelayanan Perijinan</b>	<b>1.065.754.000.00</b>	<b>1.061.668.000.00</b>	<b>99.62</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian	232.324.000.00	232.323.100.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan	366.992.000.00	366.550.900.00	99.88	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan	466.438.000.00	462.794.000.00	99.22	100.00
<b>6</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal</b>	<b>433.654.000.00</b>	<b>433.161.600.00</b>	<b>99.89</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	126.539.000.00	126.367.400.00	99.86	100.00
	Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	192.780.000.00	192.459.900.00	99.83	100.00
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	114.335.000.00	114.334.300.00	100.00	100.00
<b>7</b>	<b>Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan</b>	<b>488.461.000.00</b>	<b>476.793.384.00</b>	<b>97.61</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penanganan Pengaduan	166.949.000.00	164.891.924.00	98.77	100.00
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	321.512.000.00	311.901.460.00	97.01	100.00
<b>8</b>	<b>Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan</b>	<b>532.476.000.00</b>	<b>529.993.400.00</b>	<b>99.53</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal	278.948.000.00	277.217.500.00	99.38	100.00
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	253.528.000.00	252.775.900.00	99.70	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.265.314.000.00</b>	<b>7.848.084.887.00</b>	<b>94.95</b>	<b>100.00</b>

## 16. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

### 16.1. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp.74.088.366.000.00 realisasi sebesar Rp.64.997.276.037.00 atau 87.73% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kpegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.959.008.000.00</b>	<b>15.190.292.119.00</b>	<b>84.58</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	4.291.333.000.00	3.774.073.298.00	87.95	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	26.512.000.00	20.284.100.00	76.51	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	3.366.000.000.00	1.986.961.983.00	59.03	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	378.000.000.00	312.464.312.00	82.66	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	4.874.973.000.00	4.579.831.194.00	93.95	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	434.154.000.00	406.999.407.00	93.75	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	197.193.000.00	145.406.525.00	73.74	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perustakaan Perangkat Daerah	22.678.000.00	20.210.000.00	89.12	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	970.744.000.00	783.406.139.00	80.70	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	399.876.000.00	270.451.115.00	67.63	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.092.560.000.00	2.076.827.500.00	99.25	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	433.862.000.00	362.601.550.00	83.58	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	471.123.000.00	450.774.996.00	95.68	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>525.636.000.00</b>	<b>456.015.600.00</b>	<b>86.76</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	414.164.000.00	360.049.000.00	86.93	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.472.000.00	95.966.600.00	86.09	100.00
<b>3</b>	<b>(X)-Program (X)-Kegiatan Uang Harian Peserta Kegiatan</b>	<b>9.662.511.000.00</b>	<b>9.261.776.894.00</b>	<b>95.85</b>	<b>100.00</b>
	Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	1.253.000.000.00	1.033.479.794.00	82.48	100.00
	Pengembangan Kepemudaan	7.871.897.000.00	7.693.583.500.00	97.73	100.00
	Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	537.614.000.00	534.713.600.00	99.46	100.00
<b>4</b>	<b>(X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan</b>	<b>22.485.822.000.00</b>	<b>17.894.870.071.00</b>	<b>79.58</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi	5.266.249.000.00	4.533.255.276.00	86.08	100.00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	5.980.656.000.00	5.305.679.174.00	88.71	100.00
	Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga	2.054.937.000.00	1.984.352.450.00	96.57	100.00
	Pelatihan dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP	1.061.691.000.00	247.830.000.00	23.34	100.00
	Pembinaan dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP	7.316.004.000.00	5.218.268.691.00	71.33	100.00
	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	806.285.000.00	605.484.480.00	75.10	100.00
<b>5</b>	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>16.037.001.000.00</b>	<b>15.442.955.203.00</b>	<b>96.30</b>	<b>99.65</b>
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata	11.780.394.000.00	11.263.303.767.00	95.61	98.94
	Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata	3.654.924.000.00	3.603.381.501.00	98.59	100.00
	Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata	601.683.000.00	576.269.935.00	95.78	100.00
<b>6</b>	<b>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>3.648.305.000.00</b>	<b>3.193.425.364.00</b>	<b>87.53</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata	1.197.003.000.00	903.828.819.00	75.51	100.00
	Promosi Dan Informasi Pariwisata	1.000.000.000.00	850.892.545.00	85.09	100.00
	Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah	1.451.302.000.00	1.438.704.000.00	99.13	100.00
<b>7</b>	<b>(X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan</b>	<b>3.770.083.000.00</b>	<b>3.557.940.786.00</b>	<b>94.37</b>	<b>99.16</b>
	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata	1.260.536.000.00	1.115.933.000.00	88.53	100.00
	Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif	1.912.941.000.00	1.852.034.612.00	96.82	100.00
	Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	596.606.000.00	589.973.174.00	98.89	97.49
	<b>JUMLAH</b>	<b>74.088.366.000.00</b>	<b>64.997.276.037.00</b>	<b>87.73</b>	<b>99.83</b>





## 17. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEARSIPAN

### 17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp.9.484.932.000.00 realisasi sebesar Rp 8.986.226.593.00 atau 94.74% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kpegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.739.207.000.00</b>	<b>5.267.276.633.00</b>	<b>91.78</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	280.000.000.00	268.300.000.00	95.82	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	20.000.000.00	19.812.500.00	99.06	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.650.000.000.00	1.320.789.207.00	80.05	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000.00	133.112.434.00	95.08	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.833.000.000.00	1.819.502.703.00	99.26	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	200.000.000.00	165.336.100.00	82.67	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	85.000.000.00	62.511.000.00	73.54	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	32.700.000.00	32.700.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	500.000.000.00	468.712.175.00	93.74	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	450.000.000.00	444.523.500.00	98.78	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	115.000.000.00	111.555.000.00	97.00	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	23.500.000.00	21.998.500.00	93.61	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	375.007.000.00	366.821.614.00	97.82	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	35.000.000.00	31.601.900.00	90.29	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>239.012.000.00</b>	<b>234.413.700.00</b>	<b>98.08</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230.000.000.00	225.401.700.00	98.00	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.012.000.00	9.012.000.00	100.00	100.00
3	<b>Pengembangan Perpustakaan</b>	<b>230.122.000.00</b>	<b>223.792.000.00</b>	<b>97.25</b>	<b>100.00</b>
	Pengembangan SDM Perpustakaan	53.382.000.00	47.602.000.00	89.17	100.00
	Pengembangan dan kerjasama perpustakaan	47.465.000.00	47.150.000.00	99.34	100.00
	Promosi Perpustakaan	129.275.000.00	129.040.000.00	99.82	100.00
4	<b>Pengelolaan Perpustakaan</b>	<b>1.749.206.000.00</b>	<b>1.743.806.960.00</b>	<b>99.69</b>	<b>100.00</b>
	Pelestarian Bahan Pustaka	136.016.000.00	135.035.300.00	99.28	100.00
	Pengolahan Bahan Pustaka	121.783.000.00	120.976.160.00	99.34	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pengembangan Layanan Perpustakaan	1.491.407.000.00	1.487.795.500.00	99.76	100.00
<b>5</b>	<b>Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan</b>	<b>503.579.000.00</b>	<b>500.631.600.00</b>	<b>99.41</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan dan pengembangan kearsipan	384.671.000.00	382.084.000.00	99.33	100.00
	Pengawasan Kearsipan	118.908.000.00	118.547.600.00	99.70	100.00
<b>6</b>	<b>Pengelolaan dan Pelestarian Arsip</b>	<b>735.145.000.00</b>	<b>728.704.700.00</b>	<b>99.12</b>	<b>100.00</b>
	Pengolahan arsip	176.363.000.00	176.153.300.00	99.88	100.00
	Pelestarian arsip	274.094.000.00	269.956.600.00	98.49	100.00
	Akuisisi dan Penilaian Arsip	284.688.000.00	282.594.800.00	99.26	100.00
<b>7</b>	<b>Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan</b>	<b>288.661.000.00</b>	<b>287.601.000.00</b>	<b>99.63</b>	<b>100.00</b>
	Pelayanan Kearsipan	101.584.000.00	100.524.000.00	98.96	100.00
	Publikasi Kearsipan	187.077.000.00	187.077.000.00	100.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.484.932.000.00</b>	<b>8.986.226.593.00</b>	<b>94.74</b>	<b>100.00</b>

## 18. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

### 18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp.43.322.147.000.00 realisasi sebesar Rp 39.307.560.873.00 atau 90.73% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.473.763.000.00</b>	<b>6.932.857.073.00</b>	<b>92.76</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.030.000.000.00	942.750.000.00	91.53	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	46.254.000.00	40.645.400.00	87.87	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	2.097.892.000.00	1.748.184.157.00	83.33	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	100.000.000.00	99.915.120.00	99.92	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	499.400.000.00	471.296.867.00	94.37	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	513.242.000.00	513.208.160.00	99.99	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	88.050.000.00	88.049.857.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	15.234.000.00	15.200.000.00	99.78	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	594.800.000.00	567.923.730.00	95.48	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	201.956.000.00	201.779.500.00	99.91	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	440.717.000.00	440.430.000.00	99.93	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	575.100.000.00	563.672.800.00	98.01	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	594.600.000.00	594.600.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	150.000.00	0.00	0.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	21.500.000.00	1.800.000.00	8.37	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	25.500.000.00	15.000.000.00	58.82	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	564.368.000.00	563.532.982.00	99.85	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	65.000.000.00	64.868.500.00	99.80	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>255.590.000.00</b>	<b>253.798.491.00</b>	<b>99.30</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.785.000.00	153.254.700.00	99.01	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.805.000.00	100.543.791.00	99.74	100.00
<b>3</b>	<b>Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>19.845.665.000.00</b>	<b>16.761.782.927.00</b>	<b>84.46</b>	<b>97.74</b>
	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	1.045.520.000.00	975.353.676.00	93.29	100.00
	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B	346.088.000.00	343.879.000.00	99.36	100.00
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B	734.143.000.00	708.711.500.00	96.54	100.00
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B	269.259.000.00	269.243.400.00	99.99	100.00
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemtoyong Kelas B	317.909.000.00	317.779.150.00	99.96	100.00
	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B	423.182.000.00	422.197.070.00	99.77	100.00
	Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan	13.093.560.000.00	10.129.381.771.00	77.36	79.70
	Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	2.161.365.000.00	2.152.482.647.00	99.59	100.00
	Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan	1.454.639.000.00	1.442.754.713.00	99.18	100.00
<b>4</b>	<b>Program Usaha dan Pengembangan Komoditas</b>	<b>8.876.463.000.00</b>	<b>8.762.549.640.00</b>	<b>98.72</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Komoditas	2.704.918.000.00	2.686.613.476.00	99.32	100.00
	Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan	995.951.000.00	983.039.441.00	98.70	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	2.677.016.000.00	2.649.678.100.00	98.98	100.00
	Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi	1.582.441.000.00	1.547.155.023.00	97.77	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa	916.137.000.00	896.063.600.00	97.81	100.00
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut</b>	<b>1.642.183.000.00</b>	<b>1.622.808.361.00</b>	<b>98.82</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	414.993.000.00	403.913.000.00	97.33	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut	270.180.000.00	270.179.100.00	100.00	100.00
	Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Barat	484.057.000.00	477.858.111.00	98.72	100.00
	Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur	206.425.000.00	206.075.750.00	99.83	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan	266.528.000.00	264.782.400.00	99.35	100.00
<b>6</b>	<b>Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.195.216.000.00</b>	<b>2.170.803.998.00</b>	<b>98.89</b>	<b>99.80</b>
	Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP	676.856.000.00	676.206.500.00	99.90	99.19
	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat	507.126.000.00	489.416.548.00	96.51	100.00
	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur	632.867.000.00	628.572.750.00	99.32	100.00
	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	378.367.000.00	376.608.200.00	99.54	100.00
<b>7</b>	<b>Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.033.267.000.00</b>	<b>2.802.960.383.00</b>	<b>92.41</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk	1.619.144.000.00	1.456.711.300.00	89.97	100.00
	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	689.161.000.00	630.475.222.00	91.48	100.00
	Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	724.962.000.00	715.773.861.00	98.73	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.322.147.000.00</b>	<b>39.307.560.873.00</b>	<b>90.73</b>	<b>99.65</b>

## 19. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp 190.998.739.000.00 realisasi sebesar Rp 169.047.447.753.00 atau 88.51% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

### 19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp.142.559.469.000.00 realisasi sebesar Rp 122.737.155.545.00 atau 86.1% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>22.771.864.000.00</b>	<b>17.897.717.011.00</b>	<b>78.60</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	5.709.100.000.00	5.475.854.092.00	95.91	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	106.200.000.00	97.548.328.00	91.85	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	3.085.000.000.00	1.960.052.093.00	63.53	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	490.000.000.00	454.493.205.00	92.75	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.484.000.000.00	1.483.174.200.00	99.94	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	866.322.000.00	692.666.715.00	79.95	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	148.384.000.00	105.406.800.00	71.04	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	90.000.000.00	73.475.450.00	81.64	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.357.683.000.00	1.182.315.585.00	87.08	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	674.100.000.00	669.106.829.00	99.26	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.162.115.000.00	4.007.987.832.00	96.30	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	4.226.877.000.00	1.347.582.032.00	31.88	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	30.758.000.00	8.250.000.00	26.82	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	341.325.000.00	339.803.850.00	99.55	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>860.981.000.00</b>	<b>573.438.409.00</b>	<b>66.60</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	656.576.000.00	435.281.940.00	66.30	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.405.000.00	138.156.469.00	67.59	100.00
<b>3</b>	<b>Pengembangan Agribisnis</b>	<b>112.806.290.000.00</b>	<b>98.173.073.473.00</b>	<b>87.03</b>	<b>99.29</b>
	Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau	19.017.553.000.00	11.685.461.000.00	61.45	95.94
	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau	8.000.000.000.00	7.227.998.989.00	90.35	100.00
	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku	17.790.000.000.00	16.913.543.763.00	95.07	99.05
	Penerapan inovasi teknis	1.000.000.000.00	820.710.500.00	82.07	100.00
	Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian	972.417.000.00	820.262.671.00	84.35	99.04
	Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau	3.810.000.000.00	3.253.882.955.00	85.40	100.00
	Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA)	49.700.000.00	49.700.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Produksi Padi	7.943.275.000.00	7.473.858.694.00	94.09	100.00
	Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Sereal Lainya	8.775.851.000.00	8.250.275.075.00	94.01	98.98
	Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	1.600.231.000.00	1.017.105.525.00	63.56	87.04
	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah	835.216.000.00	787.235.500.00	94.26	100.00
	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran	5.966.190.000.00	5.019.900.300.00	84.14	96.99
	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat	1.230.118.000.00	1.093.510.200.00	88.89	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	215.131.000.00	201.484.200.00	93.66	100.00
	Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan	749.479.000.00	623.419.613.00	83.18	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida	7.629.020.000.00	7.576.253.863.00	99.31	100.00
	Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim	293.463.000.00	231.916.500.00	79.03	100.00
	Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan	409.730.000.00	330.266.900.00	80.61	99.62
	Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar	169.040.000.00	154.903.000.00	91.64	100.00
	Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	937.743.000.00	870.394.146.00	92.82	100.00
	Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	459.070.000.00	425.302.299.00	92.64	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pembenuhan Tanaman Pangan Wilayah Semarang	3.694.590.000.00	3.664.744.275.00	99.19	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pembenuhan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang	653.388.000.00	642.037.562.00	98.26	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pembenuhan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta	3.065.505.000.00	2.451.658.413.00	79.98	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pembenuhan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta	2.202.432.000.00	1.971.396.992.00	89.51	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pembenuhan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas	2.446.977.000.00	2.309.285.590.00	94.37	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pembenuhan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas	1.171.127.000.00	1.142.099.250.00	97.52	100.00
	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	2.558.691.000.00	2.289.765.473.00	89.49	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan	2.032.040.000.00	1.989.796.792.00	97.92	100.00
	Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan	2.006.770.000.00	1.997.796.091.00	99.55	100.00
	Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	1.791.955.000.00	1.779.967.466.00	99.33	100.00
	Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan	1.014.668.000.00	941.768.276.00	92.82	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan	2.314.920.000.00	2.165.371.600.00	93.54	100.00
<b>4</b>	<b>Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>6.120.334.000.00</b>	<b>6.092.926.652.00</b>	<b>99.55</b>	<b>99.98</b>
	Kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluhan	69.102.000.00	68.975.842.00	99.82	100.00
	Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan	632.950.000.00	632.390.650.00	99.91	100.00
	Peningkatan SDM Penyuluhan	3.951.445.000.00	3.945.141.160.00	99.84	99.86
	Kegiatan Pelatihan Pertanian	750.000.000.00	749.799.000.00	99.97	100.00
	Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian	165.000.000.00	164.817.700.00	99.89	100.00
	Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan	551.837.000.00	531.802.300.00	96.37	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>142.559.469.000.00</b>	<b>122.737.155.545.00</b>	<b>86.10</b>	<b>99.82</b>



## 19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.48.439.270.000.00 realisasi sebesar Rp 46.310.292.208.00 atau 95.6% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.896.694.000.00</b>	<b>13.463.161.448.00</b>	<b>96.88</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	5.220.000.00	5.172.000.00	99.08	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.582.000.000.00	1.284.365.205.00	81.19	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	133.100.000.00	131.968.000.00	99.15	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	2.528.854.000.00	2.455.469.922.00	97.10	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	435.330.000.00	434.781.022.00	99.87	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	138.000.000.00	137.925.000.00	99.95	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	1.712.000.00	1.712.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	418.897.000.00	390.620.025.00	93.25	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	101.470.000.00	95.988.500.00	94.60	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.245.075.000.00	8.220.158.524.00	99.70	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	0.00	0.00	0.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.800.000.00	8.600.000.00	97.73	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	298.236.000.00	296.401.250.00	99.38	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>364.005.000.00</b>	<b>363.260.807.00</b>	<b>99.80</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.605.000.00	153.195.000.00	99.73	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.400.000.00	210.065.807.00	99.84	100.00
3	<b>Pengembangan Agribisnis Peternakan</b>	<b>34.178.571.000.00</b>	<b>32.483.869.953.00</b>	<b>95.04</b>	<b>99.10</b>
	Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas	566.254.000.00	560.087.371.00	98.91	97.06
	Peningkatan budidaya ternak	2.219.615.000.00	2.085.085.083.00	93.94	100.00
	Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas	147.983.000.00	144.048.406.00	97.34	93.52
	Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur	7.111.225.000.00	6.270.333.605.00	88.18	100.00
	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran	572.780.000.00	534.706.911.00	93.35	100.00
	Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan	2.739.347.000.00	2.614.260.785.00	95.43	100.00
	Pengembangan Kesehatan Hewan	476.998.000.00	475.273.073.00	99.64	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan	464.018.000.00	457.207.600.00	98.53	100.00
	Pengawasan obat dan Keamanan Produk Hewan	392.545.000.00	384.654.160.00	97.99	100.00
	Peningkatan produksi dan distribusi semen beku	1.564.460.000.00	1.499.229.326.00	95.83	100.00
	Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi	2.701.986.000.00	2.542.040.907.00	94.08	100.00
	Pemeliharaan Ternak ruminansia	5.878.791.000.00	5.799.824.906.00	98.66	100.00
	Pemeliharaan unggas dan aneka ternak	2.778.721.000.00	2.680.258.993.00	96.46	100.00
	Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara	3.341.282.000.00	3.252.880.620.00	97.35	100.00
	Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng selatan	3.222.566.000.00	3.183.978.207.00	98.80	95.93
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.439.270.000.00</b>	<b>46.310.292.208.00</b>	<b>95.60</b>	<b>99.7</b>

## 20. URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### 20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.41.845.676.000.00 realisasi sebesar Rp 39.573.385.515.00 atau 94.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.590.228.000.00</b>	<b>15.069.267.425.00</b>	<b>96.66</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	21.316.000.00	20.736.000.00	97.28	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	136.857.000.00	136.356.500.00	99.63	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.598.900.000.00	1.197.501.584.00	74.90	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	48.650.000.00	47.446.270.00	97.53	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	4.579.488.000.00	4.521.185.071.00	98.73	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	891.000.000.00	889.589.328.00	99.84	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	357.183.000.00	356.714.000.00	99.87	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	193.982.000.00	193.296.500.00	99.65	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan	1.206.192.000.00	1.187.885.875.00	98.48	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	515.186.000.00	513.453.500.00	99.66	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.711.394.000.00	3.677.563.270.00	99.09	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	391.670.000.00	389.859.715.00	99.54	100.00





NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.487.000.000.00	1.487.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	55.485.000.00	55.129.812.00	99.36	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	317.045.000.00	316.870.000.00	99.94	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	78.880.000.00	78.680.000.00	99.75	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>504.971.000.00</b>	<b>498.503.094.00</b>	<b>98.72</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	326.584.000.00	321.047.594.00	98.30	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.387.000.00	177.455.500.00	99.48	100.00
<b>3</b>	<b>Pengembangan Ketenagalistrikan</b>	<b>13.484.852.000.00</b>	<b>11.914.208.486.00</b>	<b>88.35</b>	<b>87.86</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan	319.620.000.00	319.620.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo	686.323.000.00	658.888.545.00	96.00	88.33
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria	962.629.000.00	929.998.610.00	96.61	80.90
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	657.722.000.00	657.357.000.00	99.94	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	1.403.579.000.00	1.308.477.070.00	93.22	77.47
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	1.710.255.000.00	1.266.167.660.00	74.03	83.83
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	1.743.527.000.00	1.349.662.500.00	77.41	75.27
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo	575.478.000.00	552.786.300.00	96.06	85.87
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu	693.514.000.00	638.660.886.00	92.09	86.41
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	1.696.660.000.00	1.630.704.140.00	96.11	68.35
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak	754.560.000.00	567.908.360.00	75.26	96.53
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	1.345.251.000.00	1.280.495.090.00	95.19	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah	935.734.000.00	753.482.325.00	80.52	99.18
<b>4</b>	<b>Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>	<b>3.925.377.000.00</b>	<b>3.849.657.846.00</b>	<b>98.07</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan	709.180.000.00	694.593.356.00	97.94	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pengembang Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo	240.390.000.00	240.190.000.00	99.92	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria	138.622.000.00	137.862.000.00	99.45	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara	201.466.000.00	196.640.000.00	97.60	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan	614.377.000.00	572.792.215.00	93.23	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara	288.015.000.00	287.075.000.00	99.67	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan	466.274.000.00	464.568.500.00	99.63	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo	256.656.000.00	256.652.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu	139.958.000.00	139.958.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan	130.803.000.00	130.803.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak	37.250.000.00	30.280.000.00	81.29	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi	566.670.000.00	563.582.275.00	99.46	100.00
	Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah	135.716.000.00	134.661.500.00	99.22	100.00
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Pertambangan Minerba</b>	<b>2.686.375.000.00</b>	<b>2.672.226.500.00</b>	<b>99.47</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara	1.107.688.000.00	1.106.354.000.00	99.88	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo	114.590.000.00	114.590.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria	90.259.000.00	87.199.000.00	96.61	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara	100.551.000.00	100.551.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan	88.853.000.00	88.853.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara	166.689.000.00	165.189.000.00	99.10	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan	153.125.000.00	152.825.000.00	99.80	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	70.320.000.00	70.320.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu	121.466.000.00	120.236.000.00	98.99	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan	101.135.000.00	96.135.000.00	95.06	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak	76.390.000.00	76.390.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi	106.800.000.00	105.910.000.00	99.17	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah	77.474.000.00	77.474.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral	311.035.000.00	310.200.500.00	99.73	100.00
<b>6</b>	<b>Pengembangan Kegeologian</b>	<b>5.653.873.000.00</b>	<b>5.569.522.164.00</b>	<b>98.51</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah	1.052.374.000.00	1.052.369.200.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo	309.699.000.00	309.098.834.00	99.81	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria	343.161.000.00	341.161.000.00	99.42	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara	281.521.000.00	271.459.000.00	96.43	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan	286.988.000.00	285.788.000.00	99.58	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara	338.000.000.00	331.960.000.00	98.21	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan	259.474.000.00	257.724.000.00	99.33	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo	292.710.000.00	292.409.121.00	99.90	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu	330.734.000.00	330.594.000.00	99.96	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan	525.769.000.00	467.939.000.00	89.00	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak	317.036.000.00	316.286.000.00	99.76	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi	279.506.000.00	278.011.000.00	99.47	100.00
	Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah	264.514.000.00	264.514.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air	772.387.000.00	770.209.009.00	99.72	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.845.676.000.00</b>	<b>39.573.385.515.00</b>	<b>94.57</b>	<b>97.98</b>



**21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN**  
**21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp.44.867.565.000.00 realisasi sebesar Rp 41.221.048.526.00 atau 91.87% yang terdiri dari 11 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kependidikan dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.823.069.000.00</b>	<b>13.269.830.400.00</b>	<b>96.00</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	2.122.274.000.00	2.026.351.510.00	95.48	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	27.282.000.00	24.787.400.00	90.86	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	2.656.990.000.00	2.350.882.617.00	88.48	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	232.000.000.00	215.544.122.00	92.91	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	3.814.515.000.00	3.747.059.857.00	98.23	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	748.251.000.00	732.457.650.00	97.89	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	191.740.000.00	190.413.900.00	99.31	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	38.810.000.00	38.256.000.00	98.57	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.191.097.000.00	1.173.111.209.00	98.49	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	879.939.000.00	861.460.727.00	97.90	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	719.509.000.00	713.889.400.00	99.22	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	61.037.000.00	61.037.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	434.250.000.00	434.250.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	0.00	0.00	0.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.000.000.00	2.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	35.590.000.00	35.298.600.00	99.18	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	642.785.000.00	638.685.720.00	99.36	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA	25.000.000.00	24.344.688.00	97.38	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>278.748.000.00</b>	<b>269.450.170.00</b>	<b>96.66</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.140.000.00	73.129.150.00	94.80	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.608.000.00	196.321.020.00	97.38	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor</b>	<b>899.777.000.00</b>	<b>871.786.042.00</b>	<b>96.89</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas	548.845.000.00	545.017.201.00	99.30	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Peningkatan efisiensi impor non migas	73.445.000.00	73.409.385.00	99.95	100.00
	Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor	135.930.000.00	130.941.276.00	96.33	100.00
	Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor	141.557.000.00	122.418.180.00	86.48	100.00
<b>4</b>	<b>Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>9.109.082.000.00</b>	<b>8.317.326.260.00</b>	<b>91.31</b>	<b>100.00</b>
	Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya.	496.248.000.00	455.388.280.00	91.77	100.00
	Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri.	8.028.981.000.00	7.328.162.520.00	91.27	100.00
	Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.	583.853.000.00	533.775.460.00	91.42	100.00
<b>5</b>	<b>Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>2.955.204.000.00</b>	<b>2.564.423.191.00</b>	<b>86.78</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan perlindungan konsumen.	21.999.000.00	21.580.000.00	98.10	100.00
	Peningkatan tertib niaga	86.115.000.00	84.994.480.00	98.70	100.00
	Peningkatan standarisasi industri.	107.090.000.00	106.320.580.00	99.28	100.00
	Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal	1.740.000.000.00	1.484.080.301.00	85.29	100.00
	Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT	1.000.000.000.00	867.447.830.00	86.74	100.00
<b>6</b>	<b>Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>	<b>4.974.354.000.00</b>	<b>4.641.618.909.00</b>	<b>93.31</b>	<b>100.00</b>
	Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A	125.527.000.00	125.216.980.00	99.75	100.00
	Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A	156.021.000.00	155.241.000.00	99.50	100.00
	Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta Kelas A	68.010.000.00	58.918.938.00	86.63	100.00
	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A)	1.500.000.000.00	1.361.466.877.00	90.76	100.00
	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A)	3.000.000.000.00	2.818.850.750.00	93.96	100.00
	Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta	71.166.000.00	69.045.748.00	97.02	100.00
	Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang	53.630.000.00	52.878.616.00	98.60	100.00
<b>7</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Industri Agro</b>	<b>4.645.442.000.00</b>	<b>4.138.381.592.00</b>	<b>89.08</b>	<b>100.00</b>
	Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro.	54.282.000.00	52.717.100.00	97.12	100.00
	Pengembangan SDM. inovasi dan kreativitas industri agro.	287.060.000.00	253.736.744.00	88.39	100.00
	Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.	160.148.000.00	160.099.980.00	99.97	100.00
	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT	3.930.000.000.00	3.463.765.938.00	88.14	100.00
	Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro.	4.265.000.00	4.095.000.00	96.01	100.00
	Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan	139.687.000.00	137.076.400.00	98.13	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pembinaan Usaha industri hasil tembakau	70.000.000.00	66.890.430.00	95.56	100.00
<b>8</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro</b>	<b>2.557.190.000.00</b>	<b>1.773.869.790.00</b>	<b>69.37</b>	<b>100.00</b>
	Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro.	118.118.000.00	108.084.530.00	91.51	100.00
	Pengemb SDM. inovasi & kreativitas industri non agro.	251.395.000.00	234.710.780.00	93.36	100.00
	Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.	37.677.000.00	37.636.080.00	99.89	100.00
	Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT	2.150.000.000.00	1.393.438.400.00	64.81	100.00
<b>9</b>	<b>Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif</b>	<b>819.127.000.00</b>	<b>818.758.292.00</b>	<b>99.95</b>	<b>100.00</b>
	Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.	643.533.000.00	643.251.632.00	99.96	100.00
	Pengembangan industri kreatif.	168.351.000.00	168.266.160.00	99.95	100.00
	Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce	7.243.000.00	7.240.500.00	99.97	100.00
<b>10</b>	<b>Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu</b>	<b>1.080.569.000.00</b>	<b>1.067.206.600.00</b>	<b>98.76</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan layanan jasa keteknikan.	1.077.730.000.00	1.064.367.600.00	98.76	100.00
	Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu	2.839.000.00	2.839.000.00	100.00	100.00
<b>11</b>	<b>Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki</b>	<b>3.725.003.000.00</b>	<b>3.488.397.280.00</b>	<b>93.65</b>	<b>100.00</b>
	Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki	1.282.647.000.00	1.210.894.460.00	94.41	100.00
	Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki	192.356.000.00	192.102.320.00	99.87	100.00
	Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT	2.250.000.000.00	2.085.400.500.00	92.68	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.867.565.000.00</b>	<b>41.221.048.526.00</b>	<b>91.87</b>	<b>100.00</b>

## 22. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN

### 22.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.23.428.008.000.00 realisasi sebesar Rp.22.840.243.230.00 atau 97.49% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
<b>1</b>	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.937.809.000.00</b>	<b>7.544.321.221.00</b>	<b>95.04</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	635.333.000.00	597.404.406.00	94.03	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	139.498.000.00	139.145.475.00	99.75	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.054.500.000.00	980.119.943.00	92.95	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	190.000.000.00	188.333.000.00	99.12	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.550.000.000.00	1.406.845.104.00	90.76	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	373.212.000.00	333.869.634.00	89.46	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	226.000.000.00	200.776.000.00	88.84	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	24.421.000.00	24.421.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.193.740.000.00	1.177.781.776.00	98.66	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	286.300.000.00	284.896.245.00	99.51	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.373.586.000.00	1.364.831.800.00	99.36	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	56.800.000.00	48.725.000.00	85.78	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	65.600.000.00	65.220.000.00	99.42	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	226.000.000.00	210.383.257.00	93.09	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	542.819.000.00	521.568.581.00	96.09	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>375.490.000.00</b>	<b>372.981.308.00</b>	<b>99.33</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	282.896.000.00	280.783.596.00	99.25	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.594.000.00	92.197.712.00	99.57	100.00
<b>3</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1.454.745.000.00</b>	<b>1.392.397.920.00</b>	<b>95.71</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan	213.006.000.00	206.515.900.00	96.95	100.00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan	586.629.000.00	551.819.600.00	94.07	100.00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi	655.110.000.00	634.062.420.00	96.79	100.00
<b>4</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya</b>	<b>1.696.509.000.00</b>	<b>1.674.994.137.00</b>	<b>98.73</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	566.049.000.00	548.758.751.00	96.95	100.00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual	591.673.000.00	587.481.255.00	99.29	100.00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial	538.787.000.00	538.754.131.00	99.99	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
5	<b>Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.261.387.000.00</b>	<b>1.257.664.913.00</b>	<b>99.70</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan	453.572.000.00	453.083.574.00	99.89	100.00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan	344.815.000.00	342.440.340.00	99.31	100.00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH	463.000.000.00	462.140.999.00	99.81	100.00
6	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>4.663.075.000.00</b>	<b>4.618.609.677.00</b>	<b>99.05</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	3.270.675.000.00	3.233.577.490.00	98.87	100.00
	Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	927.830.000.00	924.050.200.00	99.59	100.00
	Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah	464.570.000.00	460.981.987.00	99.23	100.00
7	<b>Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah</b>	<b>6.038.993.000.00</b>	<b>5.979.274.054.00</b>	<b>99.01</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi	883.568.000.00	867.742.160.00	98.21	100.00
	Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.018.442.000.00	1.013.612.500.00	99.53	100.00
	Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	1.005.915.000.00	985.565.400.00	97.98	100.00
	Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi	1.091.949.000.00	1.087.083.660.00	99.55	100.00
	Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi	1.096.566.000.00	1.095.170.000.00	99.87	100.00
	Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi	942.553.000.00	930.100.334.00	98.68	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.428.008.000.00</b>	<b>22.840.243.230.00</b>	<b>97.49</b>	<b>100.00</b>

## 23. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebesar Rp 157.007.410.000.00 realisasi sebesar Rp.150.505.876.281.00 atau 95.86% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 23.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp.125.925.857.000.00 realisasi sebesar Rp 120.769.652.998.00 atau 95.91% yang terdiri dari 3 program. yaitu :





NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>98.936.172.000.00</b>	<b>94.706.372.033.00</b>	<b>95.72</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	3.154.404.000.00	2.804.666.540.00	88.91	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	421.391.000.00	397.936.589.00	94.43	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	9.960.090.000.00	9.027.677.836.00	90.64	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	1.052.018.000.00	960.030.731.00	91.26	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	36.850.226.000.00	35.353.921.728.00	95.94	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	5.373.602.000.00	5.308.293.933.00	98.78	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	1.726.902.000.00	1.678.958.605.00	97.22	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	349.916.000.00	344.920.000.00	98.57	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	16.077.493.000.00	15.472.275.784.00	96.24	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	5.587.251.000.00	5.372.149.749.00	96.15	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.700.919.000.00	15.394.484.863.00	98.05	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	404.250.000.00	329.123.550.00	81.42	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.106.000.000.00	2.105.500.000.00	99.98	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	65.900.000.00	62.880.000.00	95.42	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	16.370.000.00	16.029.000.00	97.92	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	89.340.000.00	77.523.125.00	86.77	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>569.000.000.00</b>	<b>566.475.600.00</b>	<b>99.56</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.550.000.00	215.152.100.00	99.35	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	352.450.000.00	351.323.500.00	99.68	100.00
3	<b>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>26.420.685.000.00</b>	<b>25.496.805.365.00</b>	<b>96.50</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB	1.666.155.000.00	1.661.126.700.00	99.70	100.00
	Penyusunan pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB	1.965.889.000.00	1.949.521.003.00	99.17	100.00
	Pendataan dan penagihan piutang PKB	1.383.185.000.00	1.382.617.450.00	99.96	100.00
	Penyusunan perencanaan pajak lain-lain	271.516.000.00	239.986.051.00	88.39	100.00
	Penyusunan perencanaan retribusi daerah	174.290.000.00	166.586.000.00	95.58	100.00
	Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain	235.796.000.00	229.115.917.00	97.17	100.00
	Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan	8.118.416.000.00	7.898.453.800.00	97.29	100.00
	Pengembangan potensi pendapatan daerah	339.875.000.00	302.952.950.00	89.14	100.00
	Pengolahan data pendapatan	151.236.000.00	150.512.314.00	99.52	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Evaluasi Sumber Daya	284.888.000.00	236.221.500.00	82.92	100.00
	Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM	184.505.000.00	147.647.500.00	80.02	100.00
	Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain	153.275.000.00	145.641.500.00	95.02	100.00
	Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB	6.612.515.000.00	6.334.524.470.00	95.80	100.00
	Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain	4.879.144.000.00	4.651.898.210.00	95.34	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>125.925.857.000.00</b>	<b>120.769.652.998.00</b>	<b>95.91</b>	<b>100.00</b>

## 23.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp.31.081.553.000.00 realisasi sebesar Rp 29.736.223.283.00 atau 95.67% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12,562,331,000.00</b>	<b>11,790,447,232.00</b>	<b>95.72</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	4.792.018.000.00	4.505.497.697.00	94.02	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	34.218.000.00	32.603.300.00	95.28	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.157.880.000.00	889.605.882.00	76.83	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	227.422.000.00	220.016.807.00	96.74	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.356.227.000.00	1.284.323.648.00	94.70	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	409.261.000.00	402.665.644.00	98.39	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	182.080.000.00	178.480.315.00	98.02	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	23.804.000.00	23.010.000.00	96.66	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	2.604.320.000.00	2.578.462.739.00	99.01	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	717.555.000.00	706.861.200.00	98.51	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.000.146.000.00	920.032.000.00	91.99	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	1.800.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	46.600.000.00	45.000.000.00	96.57	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4.000.000.00	3.888.000.00	97.20	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>112.208.000.00</b>	<b>100.925.360.00</b>	<b>89.94</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.063.000.00	81.107.460.00	96.48	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.145.000.00	19.817.900.00	70.41	100.00
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>14.212.207.000.00</b>	<b>13.722.110.525.00</b>	<b>96.55</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah	1.306.615.000.00	1.243.667.400.00	95.18	100.00
	Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan	1.380.972.000.00	1.292.284.750.00	93.58	100.00
	Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4.693.000.000.00	4.666.000.000.00	99.42	100.00
	Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra	947.082.000.00	947.040.875.00	100.00	100.00
	Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan	992.126.000.00	969.223.750.00	97.69	100.00
	Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.161.150.000.00	1.138.749.000.00	98.07	100.00
	Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan Kesra	2.448.072.000.00	2.390.097.500.00	97.63	100.00
	Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra	390.981.000.00	340.124.000.00	86.99	100.00
	Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	248.448.000.00	171.162.750.00	68.89	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah	643.761.000.00	563.760.500.00	87.57	100.00
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>4.194.807.000.00</b>	<b>4.122.740.166.00</b>	<b>98.28</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	848.774.000.00	844.500.900.00	99.50	100.00
	Penatausahaan BMD	863.046.000.00	856.489.900.00	99.24	100.00
	Pengamanan Aset Daerah	2.387.178.000.00	2.329.208.366.00	97.57	100.00
	Penyelesaian Kasus Sengketa Aset	95.809.000.00	92.541.000.00	96.59	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>31.081.553.000.00</b>	<b>29.736.223.283.00</b>	<b>95.67</b>	<b>100.00</b>

**24. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan sebesar Rp 48.588.656.000.00 realisasi sebesar Rp 43.404.035.922.00 atau 89.33% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

**24.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.24.527.496.000.00 realisasi sebesar Rp 22.147.836.317.00 atau 90.3% yang terdiri dari 3 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.638.328.000.00</b>	<b>7.721.045.311.00</b>	<b>89.38</b>	<b>98.16</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.110.800.000.00	1.005.310.100.00	90.50	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1.154.407.000.00	962.997.091.00	83.42	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	798.000.000.00	589.247.283.00	73.84	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	110.000.000.00	102.684.795.00	93.35	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	736.000.000.00	703.902.571.00	95.64	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	678.034.000.00	639.670.764.00	94.34	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	208.250.000.00	208.237.747.00	99.99	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	6.416.000.00	6.416.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.014.700.000.00	886.084.305.00	87.32	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	405.895.000.00	382.502.200.00	94.24	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.208.347.000.00	1.119.590.180.00	92.65	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	960.500.000.00	937.861.000.00	97.64	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	105.028.000.00	105.028.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	64.551.000.00	51.448.275.00	79.70	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	77.400.000.00	20.065.000.00	25.92	72.40
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>138.422.000.00</b>	<b>136.664.970.00</b>	<b>98.73</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.629.000.00	42.684.500.00	97.84	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.793.000.00	93.980.470.00	99.14	100.00
3	<b>Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah</b>	<b>15.750.746.000.00</b>	<b>14.290.126.036.00</b>	<b>90.73</b>	<b>100.00</b>
	Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng	678.177.000.00	570.251.262.00	84.09	100.00
	Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	378.142.000.00	369.719.084.00	97.77	100.00
	Penilaian Kompetensi ASN Pemprov, Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota	217.654.000.00	207.113.800.00	95.16	100.00
	Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	88.928.000.00	82.722.500.00	93.02	100.00
	Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	8.563.073.000.00	7.537.357.853.00	88.02	100.00
	Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	149.534.000.00	144.871.817.00	96.88	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional	58.715.000.00	58.512.038.00	99.65	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	51.521.000.00	51.521.000.00	100.00	100.00
	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2.630.222.000.00	2.447.148.490.00	93.04	100.00
	Kenaikan Pangkat PNS	406.187.000.00	397.720.051.00	97.92	100.00
	Layanan Administrasi Kegawaian	95.462.000.00	95.134.472.00	99.66	100.00
	Mutasi dan Pensiun PNS	441.611.000.00	438.256.830.00	99.24	100.00
	Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	311.840.000.00	239.649.019.00	76.85	100.00
	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	307.746.000.00	306.827.900.00	99.70	100.00
	Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan	38.332.000.00	38.331.750.00	100.00	100.00
	Pembinaan Korps Profesi ASN	135.000.000.00	118.460.000.00	87.75	100.00
	Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS	71.178.000.00	71.169.022.00	99.99	100.00
	Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	220.865.000.00	219.237.445.00	99.26	100.00
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah	267.527.000.00	263.576.080.00	98.52	100.00
	Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	48.870.000.00	47.502.000.00	97.20	100.00
	Dokumentasi Kepegawaian PNS	136.448.000.00	136.442.899.00	100.00	100.00
	Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi	453.714.000.00	448.600.724.00	98.87	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.527.496.000.00</b>	<b>22.147.836.317.00</b>	<b>90.30</b>	<b>99.39</b>

## 24.2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp.24.061.160.000.00 realisasi sebesar Rp 21.256.199.605.00 atau 88.34% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.820.684.000.00</b>	<b>15.012.733.924.00</b>	<b>94.89</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	30.311.000.00	30.255.500.00	99.82	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	20.432.000.00	19.987.500.00	97.82	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.592.600.000.00	1.359.287.180.00	85.35	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	195.000.000.00	192.306.754.00	98.62	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	9.495.191.000.00	8.980.471.428.00	94.58	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	251.240.000.00	249.534.623.00	99.32	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	78.750.000.00	78.250.000.00	99.37	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	34.040.000.00	34.040.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	2.074.505.000.00	2.069.653.762.00	99.77	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	902.810.000.00	897.225.785.00	99.38	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.026.133.000.00	985.801.899.00	96.07	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	61.690.000.00	59.297.493.00	96.12	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	57.982.000.00	56.622.000.00	97.65	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>198.778.000.00</b>	<b>193.421.653.00</b>	<b>97.31</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.905.000.00	121.744.153.00	99.06	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.873.000.00	71.677.500.00	94.47	100.00
<b>3</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi</b>	<b>422.903.000.00</b>	<b>314.629.709.00</b>	<b>74.40</b>	<b>100.00</b>
	Perencanaan Pengembangan Kompetensi	182.200.000.00	154.995.400.00	85.07	100.00
	Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	240.703.000.00	159.634.309.00	66.32	100.00
<b>4</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>7.576.649.000.00</b>	<b>5.699.391.419.00</b>	<b>75.22</b>	<b>100.00</b>
	Pelatihan Dasar CPNS	3.953.252.000.00	3.322.642.455.00	84.05	100.00
	Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	95.663.000.00	82.321.600.00	86.05	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	359.916.000.00	288.406.764.00	80.13	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	355.065.000.00	324.250.275.00	91.32	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	227.413.000.00	203.156.425.00	89.33	100.00
	Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	434.824.000.00	429.075.000.00	98.68	100.00
	Kegiatan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional	158.900.000.00	112.724.400.00	70.94	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	10.040.000.00	10.015.400.00	99.75	100.00
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	567.053.000.00	155.987.200.00	27.51	100.00
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	557.392.000.00	153.730.100.00	27.58	100.00
	Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	785.851.000.00	553.374.800.00	70.42	100.00
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial	71.280.000.00	63.707.000.00	89.38	100.00
<b>5</b>	<b>Sertifikasi Kompetensi ASN</b>	<b>42.146.000.00</b>	<b>36.022.900.00</b>	<b>85.47</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi	37.146.000.00	35.422.900.00	95.36	100.00
	Kegiatan Uji Kompetensi	5.000.000.00	600.000.00	12.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.061.160.000.00</b>	<b>21.256.199.605.00</b>	<b>88.34</b>	<b>100.00</b>



## 25. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN

### 25.1. INSPEKTORAT

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp.13.194.773.000.00 realisasi sebesar Rp 12.941.193.590.00 atau 98.08% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.427.622.000.00</b>	<b>7.203.764.423.00</b>	<b>96,99</b>	<b>100,00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	237.620.000.00	234.600.000.00	98.73	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	29.332.000.00	28.168.600.00	96.03	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah	882.400.000.00	708.100.588.00	80.25	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	185.000.000.00	176.466.930.00	95.39	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.644.346.000.00	1.627.489.924.00	98.97	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	284.078.000.00	282.597.152.00	99.48	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	189.076.000.00	189.022.200.00	99.97	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	13.548.000.00	13.547.200.00	99.99	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.130.683.000.00	1.119.396.340.00	99.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	163.971.000.00	161.103.279.00	98.25	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	797.847.000.00	793.920.000.00	99.51	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	197.010.000.00	197.010.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.400.000.000.00	1.400.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	272.711.000.00	272.342.210.00	99.86	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>109.029.000.00</b>	<b>108.479.066.00</b>	<b>99,50</b>	<b>100,00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.468.000.00	69.019.100.00	99.35	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.561.000.00	39.459.966.00	99.74	100.00
3	<b>Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat</b>	<b>3.356.948.000.00</b>	<b>3.348.639.181.00</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>
	Audit Kinerja	1.188.266.000.00	1.181.167.600.00	99.40	100.00
	Evaluasi Kinerja	191.890.000.00	191.840.000.00	99.97	100.00
	Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	479.181.000.00	479.138.000.00	99.99	100.00
	Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan	324.366.000.00	323.421.908.00	99.71	100.00
	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1.045.435.000.00	1.045.397.600.00	100.00	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pengawasan Lainnya	127.810.000.00	127.674.073.00	99.89	100.00
4	<b>Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP</b>	<b>280.000.000.00</b>	<b>279.877.500.00</b>	<b>99.96</b>	<b>100.00</b>
	Sertifikasi APIP	280.000.000.00	279.877.500.00	99.96	100.00
5	<b>Pembangunan Budaya Integritas</b>	<b>839.046.000.00</b>	<b>838.949.900.00</b>	<b>99.99</b>	<b>100.00</b>
	Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	839.046.000.00	838.949.900.00	99.99	100.00
6	<b>Peningkatan Manajemen Mutu</b>	<b>287.206.000.00</b>	<b>281.949.100.00</b>	<b>98.17</b>	<b>100.00</b>
	PPKT Berbasis Risiko	251.980.000.00	251.823.100.00	99.94	100.00
	Surveillance ISO	35.226.000.00	30.126.000.00	85.52	100.00
7	<b>Program Manajemen Resiko</b>	<b>894.922.000.00</b>	<b>879.534.420.00</b>	<b>98.28</b>	<b>100.00</b>
	Pemetaan Risiko	401.372.000.00	401.206.280.00	99.96	100.00
	Sapu bersih pungutan liar	493.550.000.00	478.328.140.00	96.92	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.194.773.000.00</b>	<b>12.941.193.590.00</b>	<b>98.08</b>	<b>100.00</b>

## 26. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG FUNGSI LAINNYA

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya sebesar Rp 335.813.229.000.00 realisasi sebesar Rp.273.128.219.882.00 atau 81.33% yang dilaksanakan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 26.1. SEKRETARIAT DAERAH

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.79.060.387.000.00 realisasi sebesar Rp 77.043.048.118.00 atau 97.45% yang terdiri dari 9 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>41.538.803.000.00</b>	<b>40.509.676.819.00</b>	<b>97.52</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.025.431.000.00	1.002.079.200.00	97.72	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	318.765.000.00	311.613.329.00	97.76	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	6.000.000.000.00	5.537.500.520.00	92.29	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	821.443.000.00	749.682.057.00	91.26	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	13.404.668.000.00	13.207.848.212.00	98.53	100.00





NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.920.428.000.00	1.883.296.938.00	98.07	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	4.335.268.000.00	4.332.371.533.00	99.93	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	65.890.000.00	53.920.000.00	81.83	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2.243.270.000.00	2.159.925.150.00	96.28	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.350.375.000.00	2.341.707.220.00	99.63	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.923.395.000.00	2.921.912.400.00	99.95	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	84.836.000.00	84.780.000.00	99.93	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	33.972.000.00	33.437.600.00	98.43	100.00
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	47.529.000.00	45.976.500.00	96.73	100.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	513.179.000.00	508.166.000.00	99.02	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah	3.313.122.000.00	3.232.271.391.00	97.56	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah	1.912.702.000.00	1.881.908.569.00	98.39	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	224.530.000.00	221.280.200.00	98.55	100.00
<b>2</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>172.203.000.00</b>	<b>171.612.000.00</b>	<b>99.66</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.738.000.00	128.584.500.00	99.88	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.465.000.00	43.027.500.00	98.99	100.00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.368.850.000.00</b>	<b>2.316.040.358.00</b>	<b>97.77</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	13.830.000.00	13.569.000.00	98.11	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	32.322.000.00	30.011.200.00	92.85	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM	189.422.000.00	188.202.000.00	99.36	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan	180.420.000.00	180.247.617.00	99.90	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	78.950.000.00	78.500.300.00	99.43	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan	59.392.000.00	56.229.000.00	94.67	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata	73.730.000.00	73.704.300.00	99.97	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	7.500.000.00	7.273.000.00	96.97	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	31.982.000.00	31.456.936.00	98.36	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan	34.400.000.00	23.160.000.00	67.33	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan	4.240.000.00	4.240.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.226.000.00	23.010.950.00	67.23	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000.00	1.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil	28.260.000.00	28.260.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang	193.366.000.00	185.132.930.00	95.74	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	111.415.000.00	110.503.200.00	99.18	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.483.000.00	54.412.023.00	99.87	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	28.623.000.00	28.511.390.00	99.61	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	104.607.000.00	103.569.700.00	99.01	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	22.131.000.00	21.871.563.00	98.83	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	80.749.000.00	79.819.700.00	98.85	100.00
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	17.738.000.00	11.288.000.00	63.64	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	692.855.000.00	691.453.300.00	99.80	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri	293.209.000.00	290.614.249.00	99.12	100.00
<b>4</b>	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>1.343.445.000.00</b>	<b>1.341.579.900.00</b>	<b>99.86</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah	1.094.345.000.00	1.093.041.400.00	99.88	100.00
	Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	249.100.000.00	248.538.500.00	99.77	100.00
<b>5</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>	<b>11.890.150.000.00</b>	<b>11.273.478.735.00</b>	<b>94.81</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	315.096.000.00	307.412.550.00	97.56	100.00
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah	199.363.000.00	195.845.000.00	98.24	100.00
	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	210.591.000.00	204.258.250.00	96.99	100.00
	Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	602.341.000.00	588.644.600.00	97.73	100.00
	Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah	1.119.195.000.00	1.035.265.500.00	92.50	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan	187.252.000.00	146.350.717.00	78.16	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT	1.000.000.000.00	654.414.645.00	65.44	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM	200.423.000.00	199.276.500.00	99.43	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan	66.031.000.00	65.796.000.00	99.64	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi	60.000.000.00	59.598.250.00	99.33	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan	34.838.000.00	31.870.000.00	91.48	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata	27.655.000.00	22.388.500.00	80.96	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	142.415.000.00	120.416.504.00	84.55	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga	92.357.000.00	91.069.474.00	98.61	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan	350.940.000.00	344.684.452.00	98.22	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	307.218.000.00	300.933.117.00	97.95	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	105.335.000.00	100.332.115.00	95.25	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	251.095.000.00	244.024.749.00	97.18	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil	278.540.000.00	278.540.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.945.000.00	66.449.200.00	99.26	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	95.019.000.00	94.527.770.00	99.48	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	72.809.000.00	66.261.000.00	91.01	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan	73.320.000.00	65.303.000.00	89.07	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	152.039.000.00	151.817.000.00	99.85	100.00
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	185.921.000.00	185.442.350.00	99.74	100.00
	Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	182.877.000.00	182.049.800.00	99.55	100.00
	Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan	162.789.000.00	162.606.300.00	99.89	100.00
	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	403.581.000.00	402.612.100.00	99.76	100.00
	Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan	174.277.000.00	171.602.144.00	98.47	100.00
	Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas	163.585.000.00	161.338.280.00	98.63	100.00
	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi	80.669.000.00	76.803.383.00	95.21	100.00
	Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	668.513.000.00	667.934.700.00	99.91	100.00
	Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum	292.547.000.00	292.484.700.00	99.98	100.00
	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	820.039.000.00	819.996.300.00	99.99	100.00
	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK	161.320.000.00	161.120.500.00	99.88	100.00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.680.000.00	43.922.200.00	98.30	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45.468.000.00	45.408.000.00	99.87	100.00
	Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan	404.183.000.00	403.181.982.00	99.75	100.00
	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	269.411.000.00	256.764.269.00	95.31	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	145.006.000.00	144.909.349.00	99.93	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	505.689.000.00	501.615.564.00	99.19	100.00
	Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	191.589.000.00	190.412.847.00	99.39	100.00
	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	319.750.000.00	313.394.177.00	98.01	100.00
	Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota	54.637.000.00	53.256.954.00	97.47	100.00
	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	602.802.000.00	601.143.943.00	99.72	100.00
<b>6</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>1.075.111.000.00</b>	<b>1.026.164.150.00</b>	<b>95.45</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran	9.362.000.00	9.265.000.00	98.96	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	27.392.000.00	25.799.278.00	94.19	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM	249.234.000.00	248.074.000.00	99.53	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan	125.935.000.00	124.729.672.00	99.04	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	62.321.000.00	62.054.000.00	99.57	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan	30.365.000.00	30.096.000.00	99.11	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata	26.821.000.00	23.325.000.00	86.97	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	155.190.000.00	125.577.700.00	80.92	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	33.922.000.00	33.586.377.00	99.01	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	20.012.000.00	15.667.402.00	78.29	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.081.000.00	25.775.439.00	91.79	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	24.230.000.00	23.700.982.00	97.82	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	35.770.000.00	35.770.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum	13.499.000.00	13.324.000.00	98.70	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.031.000.00	29.819.000.00	99.29	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	30.330.000.00	30.245.000.00	99.72	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.300.000.00	28.919.700.00	98.70	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	42.014.000.00	41.777.500.00	99.44	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	23.532.000.00	21.220.500.00	90.18	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	36.037.000.00	35.997.100.00	99.89	100.00
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	41.733.000.00	41.440.500.00	99.30	100.00
<b>7</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>758.597.000.00</b>	<b>754.085.304.00</b>	<b>99.41</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan administrasi penataan wilayah	240.199.000.00	238.612.925.00	99.34	100.00
	Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	84.643.000.00	82.818.179.00	97.84	100.00
	Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu	172.114.000.00	171.813.300.00	99.83	100.00
	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	261.641.000.00	260.840.900.00	99.69	100.00
<b>8</b>	<b>Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>1.110.494.000.00</b>	<b>1.105.934.440.00</b>	<b>99.59</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah	706.070.000.00	703.364.240.00	99.62	100.00
	Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD	404.424.000.00	402.570.200.00	99.54	100.00
<b>9</b>	<b>Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan</b>	<b>18.802.734.000.00</b>	<b>18.544.476.412.00</b>	<b>98.63</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah	171.494.000.00	162.736.500.00	94.89	100.00
	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	187.423.000.00	187.096.500.00	99.83	100.00
	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	2.242.785.000.00	2.204.622.128.00	98.30	100.00
	Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum	53.750.000.00	41.092.500.00	76.45	100.00
	Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah	2.113.842.000.00	2.112.812.266.00	99.95	100.00
	Kegiatan Keprotokolan	1.241.005.000.00	1.208.865.775.00	97.41	100.00
	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	239.538.000.00	231.886.718.00	96.81	100.00
	Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	1.191.005.000.00	1.110.804.191.00	93.27	100.00
	Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	11.361.892.000.00	11.284.559.834.00	99.32	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.060.387.000.00</b>	<b>77.043.048.118.00</b>	<b>97.45</b>	<b>100.00</b>



## 26.2. SEKRETARIAT DPRD

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.247.427.445.000.00 realisasi sebesar Rp 187.900.807.782.00 atau 75.94% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>52.106.569.000.00</b>	<b>41.417.559.281.00</b>	<b>79.49</b>	<b>99.17</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	699.155.000.00	678.060.700.00	96.98	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	392.336.000.00	385.207.290.00	98.18	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.864.250.000.00	1.367.751.831.00	73.37	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	801.203.000.00	636.597.102.00	79.46	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	5.304.483.000.00	5.151.255.710.00	97.11	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	11.218.582.000.00	4.188.370.060.00	37.33	85.11
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	1.975.131.000.00	1.113.768.000.00	56.39	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	468.795.000.00	440.645.798.00	94.00	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2.120.772.000.00	2.015.508.740.00	95.04	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.518.195.000.00	7.742.099.180.00	90.89	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	2.662.305.000.00	2.492.003.000.00	93.60	100.00
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.708.068.000.00	7.592.000.000.00	98.49	100.00
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	1.892.178.000.00	1.831.672.000.00	96.80	100.00
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.560.000.00	46.590.000.00	46.80	100.00
	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD	778.084.000.00	724.010.050.00	93.05	100.00
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.350.393.000.00	959.849.764.00	71.08	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekretariat DPRD	1.440.710.000.00	1.390.610.698.00	96.52	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	2.812.369.000.00	2.661.559.358.00	94.64	100.00
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>779.435.000.00</b>	<b>772.215.500.00</b>	<b>99.07</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	575.814.000.00	570.240.100.00	99.03	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.621.000.00	201.975.400.00	99.19	100.00
3	<b>Peningkatan Layanan Kedewanan</b>	<b>194.541.441.000.00</b>	<b>145.711.033.001.00</b>	<b>74.90</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah	24.102.635.000.00	15.863.150.866.00	65.82	100.00



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan	92.403.633.000.00	63.288.636.196.00	68.49	100.00
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah	64.912.852.000.00	55.117.221.426.00	84.91	100.00
	Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan	4.409.546.000.00	3.752.623.037.00	85.10	100.00
	Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	7.093.720.000.00	6.592.792.726.00	92.94	100.00
	Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	1.619.055.000.00	1.096.608.750.00	67.73	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>247.427.445.000.00</b>	<b>187.900.807.782.00</b>	<b>75.94</b>	<b>99.72</b>

### 26.3. BADAN PENGHUBUNG

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp.9.325.397.000.00 realisasi sebesar Rp 8.184.363.982.00 atau 87.76% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.867.169.000.00</b>	<b>8.004.845.809.00</b>	<b>90.28</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	36.826.000.00	36.642.794.00	99.50	100.00
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	40.080.000.00	28.736.300.00	71.70	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	723.200.000.00	610.981.259.00	84.48	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	220.000.000.00	170.625.286.00	77.56	100.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	4.240.903.000.00	3.974.599.452.00	93.72	100.00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	810.376.000.00	790.415.153.00	97.54	100.00
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	412.724.000.00	253.477.419.00	61.42	100.00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	11.592.000.00	10.596.000.00	91.41	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.550.570.000.00	1.309.265.146.00	84.44	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	464.338.000.00	462.947.000.00	99.70	100.00
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	337.000.000.00	337.000.000.00	100.00	100.00
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	19.560.000.00	19.560.000.00	100.00	100.00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
2	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.669.000.00</b>	<b>18.509.671.00</b>	<b>99.15</b>	<b>100.00</b>
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.130.000.00	13.032.071.00	99.25	100.00
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.539.000.00	5.477.600.00	98.89	100.00
3	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat</b>	<b>86.447.000.00</b>	<b>61.586.094.00</b>	<b>71.24</b>	<b>100.00</b>
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta	86.447.000.00	61.586.094.00	71.24	100.00
4	<b>Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</b>	<b>353.112.000.00</b>	<b>99.422.408.00</b>	<b>28.16</b>	<b>28.36</b>
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah .	353.112.000.00	99.422.408.00	28.16	28.36
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.325.397.000.00</b>	<b>8.184.363.982.00</b>	<b>87.76</b>	<b>82.09</b>





## **BAB 4**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrua. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

#### **4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

##### **4.2.1 Pendapatan – LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.2.2 Pendapatan - LRA**

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.



- b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### 4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

##### 4.3.1 Beban Operasi

###### a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

###### b. Beban Barang dan Jasa

###### 1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

###### 2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

###### 3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

###### 4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.



5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

(1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

#### 4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.



#### 4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

#### 4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.



3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
  - a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)
    - 1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
    - 2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
  - b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

#### **4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang**

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan



- Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat keputusan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
  7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
  8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
  9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
  10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
  11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
    - a. telah diterbitkan surat keputusan; dan/atau
    - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
    - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
  12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
  13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat keputusan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajib pajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
17. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
18. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
19. Penyisihan piutang tidak tertagih  
Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1	Lancar	0,5%



Lama menunggak tahun	Kategori	% diragukan Tertagih
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

20. Penghentian pengakuan piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

21. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

22. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

#### 4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.





6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

#### 4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

##### 1. Investasi Jangka Pendek :

- a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
- c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
- e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
- f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
- g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

##### 2. Investasi Jangka Panjang :

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
- b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
- c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
- d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO

##### 3. Metode penilaian investasi pemerintah :

- a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
- b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah



akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode ekuitas diterapkan untuk :

- 1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
  - 2) Kepemilikan lebih dari 50%.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

#### 4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
    1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
    2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  - e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
  - a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
    1. Barang habis pakai;
    2. Barang tak habis pakai; dan



3. Barang bekas pakai.
- b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
  1. Barang konsumsi;
  2. Amunisi;
  3. Bahan untuk pemeliharaan;
  4. Suku cadang;
  5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  6. Bahan baku;
  7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
  8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
6. Persediaan diakui pada saat :
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).  
Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.  
Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pengukuran persediaan melalui :
  - a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
    - 1) harga pembelian;
    - 2) biaya pengangkutan;
    - 3) biaya penanganan; dan
    - 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
    - 1) potongan harga; dan
    - 2) rabat, dan lainnya yang serupa.
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok



- produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
- c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.
9. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
  10. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
    - a. harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
    - b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
  11. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
  12. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
  13. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
  14. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan.
  15. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
  16. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
  17. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
    - a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

#### 4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas *substance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
  - a. Berwujud
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
  - a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
  - b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
  - c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
  - d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
  - b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
  - c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
  - d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan



- barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
  11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
  12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
  13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
  14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
  16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
  18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
  20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabledan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtabletidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
  21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).



22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
23. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
24. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
25. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
26. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02			<b>Peralatan dan Mesin</b>			
1	3	02	01		<b>Alat Besar</b>			
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	02	01	03	Alat Bantu	8	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	02	02		<b>Alat Angkutan</b>			
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	4
1	3	02	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1





Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	Alat Angkut Bermotor Udara	20	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	3
							50% ≤ sd < 75%	6
							≥ 75%	9
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>03</b>		<b>Alat Bengkel dan Ukur</b>			
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	5
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>04</b>		<b>Alat Bengkel dan Ukur</b>			
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>05</b>		<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>06</b>		<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>			
1	3	02	06	01	Alat Studio	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>07</b>		<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>			
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50% ≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum	5	<25%	0
								25% ≤ sd <50%	1
								50% ≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08			<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>			
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium	8	<25%	0
								25% ≤ sd <50%	1
								50% ≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
								25% ≤ sd <50%	3
								50% ≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	03		Alat Praktek Sekolah	5	<25%	0
								25% ≤ sd <50%	1
								50% ≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
								25% ≤ sd <50%	3
								50% ≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
								25% ≤ sd <50%	2
								50% ≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	06		Radiation Aplication and Non Destructive Testing	10	<25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
					Laboratory			
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	4
							≥ 75%	5
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	3
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	3
							50% ≤ sd < 75%	5
							≥ 75%	7
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	4
							≥ 75%	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>09</b>		<b>Alat Persenjataan</b>			
1	3	02	09	01	Senjata Api	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	4
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	0
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	1
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	0
							50% ≤ sd < 75%	0
							≥ 75%	2



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	0
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	1
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>10</b>		<b>Komputer</b>			
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>11</b>		<b>Alat Eksplorasi</b>			
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	2
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>12</b>		<b>Alat Pengeboran</b>			
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	2
							50% ≤ sd <75%	4
							≥75%	5
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>13</b>			<b>Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian</b>			
1	3	02	13	01		Sumur	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	02		Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	6
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>14</b>			<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>			
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>15</b>			<b>Alat Keselamatan Kerja</b>			
1	3	02	15	01		Alat Deteksi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	0
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	15	03	Alat SAR	2	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	1
1	3	02	15	04	Alat kerja Penerbangan	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>16</b>		<b>Alat Peraga</b>			
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	2
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>17</b>		<b>Peralatan Proses/Produksi</b>			
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>18</b>		<b>Rambu-Rambu</b>			
1	3	02	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	2
1	3	02	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	3
							50% ≤ sd < 75%	4
							≥ 75%	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>19</b>		<b>Peralatan Olahraga</b>			
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	4	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	2
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Gedung dan Bangunan</b>			
1	3	03	01		<b>Bangunan Gedung</b>			
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
					Permanen	50	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
					Semi Permanen	25	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	7
					Darurat	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	2
							≥ 75%	5
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
					Permanen	50	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15





Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
					Semi Permanen	25	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	7
					Darurat	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>02</b>		<b>Monumen</b>			
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>03</b>		<b>Menara</b>			
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>04</b>		<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>			
1	3	03	04	01	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>04</b>			<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>			
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>04</b>	<b>01</b>		<b>Jalan dan Jembatan</b>			
1	3	04	01	01	Jalan	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	5



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	01	02	Jembatan	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>04</b>	<b>02</b>		<b>Bangunan Air</b>			
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	5
							50% ≤ sd <75%	10
							≥75%	15
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	3
							≥75%	5
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
							25% ≤ sd <50%	1
							50% ≤ sd <75%	2
							≥75%	3
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>04</b>	<b>03</b>		<b>Instalasi</b>			
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Baku	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	7
							≥ 75%	10
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	7
							≥ 75%	10
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	< 25%	0



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	3
							≥ 75%	5
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	3
1	3	04	03	10	Instalasi Lainnya	5	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	1
							50% ≤ sd < 75%	1
							≥ 75%	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>04</b>	<b>04</b>		<b>Jaringan</b>			
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	7
							≥ 75%	10
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik dan Komputer	40	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	5
							50% ≤ sd < 75%	10
							≥ 75%	15
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	30	< 25%	0
							25% ≤ sd < 50%	2
							50% ≤ sd < 75%	5



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
							≥75%	10	
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30	<25%	0	
							25%≤ sd <50%	2	
							50%≤ sd <75%	7	
							≥75%	10	
1	3	04	05		<b>Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian</b>				
1	3	04	05	01	Alat Musik Modern/Band	5	<25%	0	
							25%≤ sd <50%	1	
							50%≤ sd <75%	1	
							≥75%	2	

28. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
29. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
30. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
31. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
32. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
33. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.



34. Aset *ekstrakomtable* dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapusbukukan.
35. Prosedur pemusnahan aset *ekstrakomtable* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset *ekstrakomtable* yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset *ekstrakomtable* belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.

#### 4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

#### 4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
  1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah



- Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.  
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
  3. Pengakuan Beban  
Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
  7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
  8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
  9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
  10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
    - a. Tanah
    - b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
    - c. BMD selain tanah dan bangunan
    - d. Aset tak berwujud
  11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
  12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
  13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
  14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir



- kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
- Perangkat lunak *Software* computer
  - Hak paten, Hak cipta
  - Lisensi dan Waralaba (*Franchise*)
  - Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
  - Goodwill*
  - Royalti
  - Aset tak berwujud lainnya
  - Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
- Pembelian
  - Pengembangan internal
  - Pertukaran
  - Kerjasama
  - Donasi/hibah; dan
  - Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
- ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
  - ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.





21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru.
22. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.
23. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a. masa manfaat dan metode amortisasi;
  - b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
  - c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
24. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
25. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
26. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

#### **4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

1. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :



- a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

##### a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

- a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

##### (1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- (a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

- (b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

##### (2) Belanja dan Beban



- (a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
  - (b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- (3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
  - (4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
  - (5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
  - (6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembedulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

**b. Kesalahan berulang dan sistematis**

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



## BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020. Anggaran dan realisasi APBD TA 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5=(4/3)	4
1	Pendapatan	26.255.251.903.000,00	25.393.735.934.148,00	96,72	25.859.780.137.936,00
2	Belanja dan transfer	27.374.409.350.000,00	25.651.740.349.991,00	93,71	26.151.062.842.457,00
3	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(1.119.157.447.000,00)</b>	<b>(258.004.415.843,00)</b>	-	<b>(291.282.704.521,00)</b>
4	Pembiayaan				
	- Penerimaan	1.119.157.447.000,00	1.119.348.228.370,00	100,02	1.630.776.601.765,00
	- Pengeluaran	-	-	-	220.336.450.544,00
	<b>Pembiayaan netto</b>	<b>1.119.157.447.000,00</b>	<b>1.119.348.228.370,00</b>		<b>1.410.440.151.221,00</b>
5	SILPA	-	861.343.812.527,00	-	1.119.157.446.700,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

##### 5.1.1.1 Pendapatan Daerah

**Rp25.393.735.934.148,00**

Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72% dari target Rp26.255.251.903.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.859.780.137.936,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Asli daerah	14.267.084.822.000,00	13.668.282.278.855,00	95,80	14.437.914.236.398,00
2	Pendapatan Transfer	11.964.515.081.000,00	11.702.101.655.293,00	97,81	11.398.681.901.538,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	23.652.000.000,00	23.352.000.000,00	98,73	23.184.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.255.251.903.000,00</b>	<b>25.393.735.934.148,00</b>	<b>96.72</b>	<b>25.859.780.137.936,00</b>



#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Rp13.668.282.278.855,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80% dari target Rp14.267.084.822.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.437.914.236.398,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.007.135.432.000,00	11.139.173.309.780,00	92,77	11.951.919.535.383,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	93.728.474.000,00	93.279.121.699,00	99,52	114.861.058.851,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	528.788.165.000,00	530.091.029.137,00	100,25	512.701.993.939,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.637.432.751.000,00	1.905.738.818.239,00	116,39	1.858.431.648.225,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.267.084.822.000,00</b>	<b>13.668.282.278.855,00</b>	<b>95,80</b>	<b>14.437.914.236.398,00</b>

#### 5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

**Rp11.139.173.309.780,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77% dari target Rp12.007.135.432.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	4.714.000.000.000,00	4.579.535.646.300,00	97,15	4.618.496.197.625,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.150.000.000.000,00	2.228.465.305.800,00	70,74	3.414.320.120.325,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.855.000.000.000,00	1.719.403.821.612,00	92,69	1.925.488.927.109,00
4	Pajak Air Permukaan	13.268.000.000,00	16.056.164.261,00	121,01	14.320.954.591,00
5	Pajak Rokok	2.274.867.432.000,00	2.595.712.371.807,00	114,10	1.979.293.335.733,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.007.135.432.000,00</b>	<b>11.139.173.309.780,00</b>	<b>92,77</b>	<b>11.951.919.535.383,00</b>

#### 5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

**Rp93.279.121.699,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 atau 99,52% dari target Rp93.728.474.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	23.526.995.000,00	19.729.864.367,00	83,86	22.968.887.951,00
2	Retribusi Jasa Usaha	65.550.599.000,00	66.292.537.932,00	101,13	87.297.533.840,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.650.880.000,00	7.256.719.400,00	156,03	4.594.637.060,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	Jumlah	93.728.474.000,00	93.279.121.699,00	99,52	114.861.058.851,00

#### 5.1.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

**Rp19.729.864.367,00**

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.729.864.367,00 atau 83,86% dari target Rp23.526.995.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.968.887.951,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.949.795.000,00	19.119.314.367,00	83,31	21.679.487.951,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	328.200.000,00	296.950.000,00	90,48	423.150.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	249.000.000,00	313.600.000,00	125,94	866.250.000,00
	Jumlah	23.526.995.000,00	19.729.864.367,00	83,86	22.968.887.951,00

#### 5.1.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan

**Rp19.119.314.367,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.119.314.367,00 atau 83,31% dari target Rp22.949.795.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.679.487.951,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan.

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kesehatan	22.949.795.000,00	19.119.314.367,00	83,31	21.679.487.951,00
	Jumlah	22.949.795.000,00	19.119.314.367,00	83,31	21.679.487.951,00

Realisasi pendapatan retribusi jasa kesehatan yang tidak melampaui target (83,31%) disebabkan antara lain: Selama pandemi *Covid-19* terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien karena terdapat himbuan untuk pembatasan berkunjung ke fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan darurat, yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera; ditutupnya pelayanan rawat inap dan beberapa tindakan pada Balkesmas Wilayah Magelang sebagai langkah pencegahan penularan *Covid-19*; penghentian sementara kerjasama penyediaan dokter spesialis paru di Balkesmas Wilayah Pati dengan UNS sehingga tidak ada pelayanan BPJS di Balkesmas Wilayah Pati.

#### 5.1.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

**Rp296.950.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp296.950.000,00 atau 90,48% dari target Rp328.200.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 423.150.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.



(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas LH & Kehutanan	2.500.000,00	4.750.000,00	190,00	2.850.000,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	325.700.000,00	292.200.000,00	89,71	420.300.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>328.200.000,00</b>	<b>296.950.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>423.150.000,00</b>

#### 5.1.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp313.600.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp313.600.000,00 atau 125,94% dari target Rp249.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp866.250.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	169.000.000,00	299.100.000,00	176,98	679.050.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	100.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.000.000,00	14.500.000,00	18,13	87.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>249.000.000,00</b>	<b>313.600.000,00</b>	<b>125,94</b>	<b>866.250.000,00</b>

Realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target (18,13%) disebabkan banyak perusahaan yang berhenti operasional dan melakukan PHK dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga tidak sanggup untuk membayar retribusi penempatan peserta.

#### 5.1.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp66.292.537.932,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.292.537.932,00 atau 101,13% dari target Rp65.550.599.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.297.533.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	37.017.450.000,00	36.956.100.234,00	99,83	57.551.866.516,00
2	Retribusi Terminal	2.228.823.000,00	731.126.000,00	32,80	1.420.464.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	6.481.726.000,00	1.679.542.500,00	25,91	8.193.290.120,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	3.375.000.000,00	5.827.626.900,00	172,67	1.635.834.473,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.075.192.000,00	20.618.354.198,00	128,26	18.251.427.606,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	372.408.000,00	479.788.100,00	128,83	244.651.125,00
	<b>Jumlah</b>	<b>65.550.599.000,00</b>	<b>66.292.537.932,00</b>	<b>101,13</b>	<b>87.297.533.840,00</b>

#### 5.1.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp36.956.100.234,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.956.100.234,00 atau 99,83% dari target Rp37.017.450.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57.551.866.516,00 dengan rincian



sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.104.331.000,00	1.693.859.500,00	33,18	4.329.994.500,00
2	Dinas Kesehatan	740.958.000,00	201.581.000,00	27,21	573.965.000,00
3	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	3.864.832.000,00	5.383.581.330,00	139,30	5.240.937.939,00
4	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	3.631.421.000,00	3.147.018.360,00	86,66	4.283.617.818,00
5	Satpol PP	422.365.000,00	465.853.554,00	110,30	543.159.660,00
6	Dinas Sosial	51.100.000,00	90.260.000,00	176,63	67.327.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.523.640.000,00	2.002.570.000,00	131,43	4.195.312.728,00
8	Dinas LH & Kehutanan	3.395.025.000,00	4.048.056.755,00	119,23	4.977.674.448,00
9	Dinas Perhubungan	1.040.262.000,00	1.465.444.340,00	140,87	2.204.424.250,00
10	Dinas Koperasi dan UKM	479.413.000,00	504.673.750,00	105,27	332.467.000,00
11	Dinas Penanaman Modal & PTSP	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	22.500.000,00
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	711.285.000,00	559.553.565,00	78,67	1.543.610.934,00
13	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	67.049.000,00	17.042.600,00	25,42	92.139.100,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.125.000.000,00	2.899.228.949,00	136,43	6.115.023.161,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	985.815.000,00	1.225.068.867,00	124,27	1.090.066.831,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	977.693.000,00	1.188.139.375,00	121,52	1.639.023.625,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.739.142.000,00	1.789.019.000,00	102,87	1.707.089.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.560.653.000,00	2.452.439.539,00	95,77	2.774.849.375,00
19	Sekretariat Daerah	311.000.000,00	413.906.000,00	133,09	1.778.274.800,00
20	Sekretariat DPRD	552.600.000,00	552.600.000,00	100,00	527.100.000,00
21	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	25.200.000,00
22	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.037.249.000,00	3.903.556.472,00	96,69	4.029.533.109,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.406.578.000,00	1.835.427.278,00	130,49	2.785.691.488,00
24	Badan Pengembangan SDM	972.589.000,00	902.770.000,00	92,82	6.377.884.750,00
25	Badan Penghubung	267.500.000,00	164.500.000,00	61,50	295.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.017.450.000,00</b>	<b>36.956.100.234,00</b>	<b>99,83</b>	<b>57.551.866.516,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (33,18%) dikarenakan adanya larangan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak yang berimplikasi pada pembatalan sewa aula dan asrama selama masa tanggap darurat *Covid-19*, serta banyaknya kantin sekolah yang ditutup karena sekolah tidak melakukan tatap muka.
2. Dinas Kesehatan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (27,21%) dikarenakan target Retribusi Jasa Usaha terbesar terdapat pada Sewa Ruang/Aula/Asrama untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Prov. Jateng yang bersumber dana dari Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten/Kota. Di Tahun 2020 sebagian besar dana yang semula digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan *refocussing* untuk pengendalian *Covid-19*. Selain itu di masa pandemi, untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dipersyaratkan dilakukan dengan





metode *blended learning* (perpaduan daring dan tatap muka) sehingga PAD dari sewa ruangan/aula/kelas/asrama berkurang

3. Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (25,42%) dikarenakan layanan perpustakaan tutup dimasa pandemi.

Realisasi tahun 2020 pada Dinas Perhubungan, melebihi target sebesar Rp1.465.444.340,00 atau 140,87% dikarenakan adanya penambahan penyewa kios/los diterminal-terminal dan adanya kenaikan tarif sewa kios/los yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

#### 5.1.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal

**Rp731.126.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80% dari target Rp2.228.823.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Perhubungan	2.228.823.000,00	731.126.000,00	32,80	1.420.464.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.228.823.000,00</b>	<b>731.126.000,00</b>	<b>32,80</b>	<b>1.420.464.000,00</b>

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80 % dari target dikarenakan retribusi terminal fasilitas lainnya di lingkungan terminal mulai tanggal 27 Maret 2020 berhenti beroperasi dikarenakan pandemi *Covid-19* dan tidak beroperasinya kapal Cepat Kartini di tahun 2020.

#### 5.1.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/

**Pesangrahan/Villa**

**Rp1.679.542.500,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.679.542.500,00 atau 25,91% dari target Rp6.481.726.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.193.290.120,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Sosial	8.900.000,00	13.000.000,00	146,07	19.200.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	144.450.000,00	146.200.000,00	101,21	186.700.000,00
3	Dinas Koperasi & UKM	-	2.880.000,00	-	465.360.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	856.626.000,00	413.387.500,00	48,26	1.083.641.000,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.300.000,00	14.200.000,00	115,45	164.100.000,00
6	Sekretariat Daerah	15.000.000,00	26.200.000,00	174,67	113.500.000,00
7	Sekretariat DPRD	133.950.000,00	131.150.000,00	97,91	781.275.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.777.500.000,00	680.110.000,00	14,24	4.614.239.120,00
9	Badan Penghubung	533.000.000,00	252.415.000,00	47,36	765.275.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.481.726.000,00</b>	<b>1.679.542.500,00</b>	<b>25,91</b>	<b>8.193.290.120,00</b>



Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya mencapai 14,24% dikarenakan tidak ada pelaksanaan ibadah haji di Tahun 2020.
2. Badan Penghubung hanya mencapai 47,36% dikarenakan dampak Pandemi *Covid-19* sehingga tidak ada tamu yang menginap di Wisma Jawa Tengah dan berkurangnya pendapatan dari sewa tempat.

**5.1.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp5.827.626.900,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.827.626.900,00 atau 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.635.834.473,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.375.000.000,00	5.827.626.900,00	172,67	1.635.834.473,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.375.000.000,00</b>	<b>5.827.626.900,00</b>	<b>172,67</b>	<b>1.635.834.473,00</b>

Pelampauan capaian pendapatan hingga sebesar 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif tambat dan labuh mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019.

**5.1.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp20.618.354.198,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.618.354.198,00 atau 128,26% dari target Rp16.075.192.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.251.427.606,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.100.000.000,00	1.286.995.290,00	117,00	1.484.634.641,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.852.885.000,00	12.088.607.108,00	153,94	10.879.581.865,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.122.307.000,00	7.242.751.800,00	101,69	5.887.211.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.075.192.000,00</b>	<b>20.618.354.198,00</b>	<b>128,26</b>	<b>18.251.427.606,00</b>

Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp12.088.607.108,00 atau 153,94% dikarenakan stock Benih Tebu tahun 2019 dapat terjual habis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Pemerintah Pusat untuk pembangunan KBD Tebu.



**5.1.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan** **Rp479.788.100,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83% dari target Rp372.408.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp244.651.125,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	372.408.000,00	479.788.100,00	128,83	244.651.125,00
	<b>Jumlah</b>	<b>372.408.000,00</b>	<b>479.788.100,00</b>	<b>128,83</b>	<b>244.651.125,00</b>

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83 % dari target dikarenakan tahun 2020 kayu yang kualitasnya baik dijual secara *offline*, dari yang sebelumnya *online*, sehingga terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya peminat.

**5.1.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu** **Rp7.256.719.400,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.256.719.400,00 atau 156,03% dari target Rp4.650.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.594.637.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Ijin Trayek	550.000.000,00	900.425.000,00	163,71	400.950.000,00
2	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	3.300.000.000,00	4.467.909.900,00	135,39	3.359.574.260,00
3	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	800.880.000,00	1.888.384.500,00	235,79	834.112.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.650.880.000,00</b>	<b>7.256.719.400,00</b>	<b>156,03</b>	<b>4.594.637.060,00</b>

**5.1.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek** **Rp900.425.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400.950.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Perhubungan	550.000.000,00	900.425.000,00	163,71	400.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>900.425.000,00</b>	<b>163,71</b>	<b>400.950.000,00</b>

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00 dikarenakan Sebagian besar perusahaan melakukan peremajaan armadanya yang sudah berumur lebih dari 25 tahun.



**5.1.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan** **Rp4.467.909.900,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.467.909.900,00 atau 135,39% dari target Rp3.300.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.359.574.260,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.300.000.000,00	4.467.909.900,00	135,39	3.359.574.260,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>4.467.909.900,00</b>	<b>135,39</b>	<b>3.359.574.260,00</b>

Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.467.909.900,00 atau 135,39% dikarenakan sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan sehingga para wajib retribusi meningkat kesadarannya dan kemudahan prosedur perizinan yang semakin mudah serta pelayanan prima dari semua loket perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

**5.1.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi IMTA** **Rp1.888.384.500,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.888.384.500,00 atau 235,79% dari target Rp800.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp834.112.800,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	800.880.000,00	1.888.384.500,00	235,79	834.112.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>800.880.000,00</b>	<b>1.888.384.500,00</b>	<b>235,79</b>	<b>834.112.800,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi IMTA pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melebihi mencapai target atau (235,79%) disebabkan selama Pandemi Covid-19 banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang stay dan memperpanjang ijin kerjanya, serta nilai tukar rupiah yang tinggi

**5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** **Rp530.091.029.137,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 atau 100,25% dari target Rp528.788.165.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00	6.900.000.000,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	375.700.000.000,00	375.777.399.480,00	100,02	375.785.087.827,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	69.747.165.000,00	70.890.351.223,00	101,64	64.720.183.641,00
4	Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)	5.450.000.000,00	5.450.000.000,00	100,00	5.165.089.945,00
5	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	4.500.000.000,00	-	0,00	4.369.395.306,00
6	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	2.300.000.000,00	3.003.617.427,00	130,59	6.724.559.080,00
7	Deviden PT. PRPP	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	-
8	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	27.850.000.000,00	30.069.580.225,00	107,97	25.532.244.618,00
9	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	30.000.000.000,00	31.658.604.782,00	105,53	18.887.993.402,00
10	Deviden PT. Jamkrida	6.561.000.000,00	6.561.476.000,00	100,01	4.617.440.120,00
	<b>Jumlah</b>	<b>528.788.165.000,00</b>	<b>530.091.029.137,00</b>	<b>100,25</b>	<b>512.701.993.939,00</b>

PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma pada tahun 2020 tidak melakukan pembagian deviden kepada para Pemegang Saham, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagian tersebut digunakan untuk mendukung PT. Kawasan Industri Terpadu Batang.

#### 5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.905.738.818.239,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39% dari target Rp1.637.432.751.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.858.431.648.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	541.500.000,00	1.005.694.120,00	185,72	1.525.672.065,00
2	Penerimaan Jasa Giro	30.000.000.000,00	43.049.831.808,00	143,50	45.579.010.561,00
3	Penerimaan Bunga	65.000.000.000,00	76.236.609.714,00	117,29	209.219.800.205,00
4	Pendapatan Denda Keterlambatan	-	1.453.371.334,00	-	2.570.086.629,00
5	Pendapatan Denda Pajak	106.786.000.000,00	58.794.221.327,00	55,06	156.599.380.154,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	75.233.000,00	257.926.732,00	342,84	231.877.837,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	7.070.704.654,00	-	4.639.173.684,00
8	Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4.751.394.000,00	8.722.194.000,00	183,57	11.792.597.000,00
9	Penerimaan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4.927.885.000,00	5.018.870.000,00	101,85	75.144.785.050,00
10	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.415.000,00	5.543.000,00	58,87	-
11	Penerimaan dari BLUD	1.388.277.824.000,00	1.696.912.608.091,00	122,23	1.345.947.127.745,00
12	Penerimaan Lain-Lain Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah	63.500.000,00	6.989.661.459,00	11007,34	5.182.137.295,00
13	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	37.000.000.000,00	221.582.000,00	0,60	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.637.432.751.000,00</b>	<b>1.905.738.818.239,00</b>	<b>116,39</b>	<b>1.858.431.648.225,00</b>



#### 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp1.005.694.120,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.005.694.120,00 atau 185,72% dari target Rp541.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.525.672.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp614.477.520,00

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai	140.000.000,00	238.835.520,00	170,60	405.717.643,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	63.500.000,00	-	0,00	-
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	202.000.000,00	-	0,00	119.431.468,00
4	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	126.000.000,00	375.642.000,00	298,13	596.216.324,00
	<b>Jumlah</b>	<b>531.500.000,00</b>	<b>614.477.520,00</b>	<b>115,61</b>	<b>1.121.365.435,00</b>

##### 2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya sebesar Rp381.206.600,00

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penjualan Drum Bekas	-	12.653.600,00	-	40.974.500,00
2	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	-	368.553.000,00	-	351.932.130,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>381.206.600,00</b>	<b>-</b>	<b>392.906.630,00</b>

##### 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.010.000,00

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penjualan Hasil Peternakan	-	-	-	8.200.000,00
2	Penjualan Hasil Perikanan	-	-	-	3.200.000,00
3	Penjualan Hasil Pertanian	10.000.000,00	10.010.000,00	100,10	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.010.000,00</b>	<b>100,10</b>	<b>11.400.000,00</b>

#### 5.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro Rp43.049.831.808,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.049.831.808,00 atau 143,50% dari target Rp 30.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.579.010.561,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan rekening bendahara pengeluaran seluruh SKPD.

#### 5.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Rp76.236.609.714,00

Penerimaan bunga Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp76.236.609.714,00 atau 117,29% dari target Rp65.000.000.000,00 yang merupakan bunga deposito bank, dan untuk Tahun Anggaran 2019



sebesar Rp209.219.800.205,00. Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Jasa Dana Bergulir tidak dianggarkan.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bank Jateng	65.000.000.000,00	68.951.198.553,00	-	187.084.931.393,00
2	Bank BTN	-	-	-	3.768.356.152,00
3	Bank BRI	-	6.442.363.216,00	-	17.786.717.979,00
4	Bank BNI	-	843.047.945,00	-	579.794.681,00
		<b>65.000.000.000,00</b>	<b>76.236.609.714,00</b>	<b>117,29</b>	<b>209.219.800.205,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Keterlambatan

**Rp1.453.371.334,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.453.371.334,00 menurun bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.570.086.629,00, Pendapatan Denda Keterlambatan merupakan penerimaan SKPKD yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

#### 5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak

**Rp58.794.221.327,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.794.221.327,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp54.789.996.133,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 3.997.164.375,00, dan Pajak Air Permukaan Rp 7.060.819,00, pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

#### Badan Pengelola Pendapatan Daerah

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	106.786.000.000,00	54.789.996.133,00	51,31	151.025.130.753,00
2	Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	3.997.164.375,00	-	5.573.861.850,00
3	Denda Pajak Air Permukaan	-	7.060.819,00	-	387.551,00
<b>Jumlah</b>		<b>106.786.000.000,00</b>	<b>58.794.221.327,00</b>	<b>55,06</b>	<b>156.599.380.154,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi

**Rp257.926.732,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp257.926.732,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 231.877.837,00 dengan rician sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kesehatan	75.233.000,00	100.756.131,00	133,93	145.476.973,00
2	Satpol PP	-	859.069,00	-	1.829.572,00
3	Dinas Perhubungan	-	42.448.140,00	-	16.428.185,00



4	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	110.088.342,00	-	67.012.607,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	3.775.050,00	-	1.130.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>75.233.000,00</b>	<b>257.926.732,00</b>	<b>342,84</b>	<b>231.877.837,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian

**Rp7.070.704.654,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.070.704.654,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.639.173.684,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	988.813.475,00	-	564.540.614,00
2	Pengembalian Belanja Tahun Lalu	-	1.677.736.535,00	-	3.474.740.776,00
3	Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas	-	3.820.189.368,00	-	599.892.294,00
4	Pengembalian Belanja Hibah BOS Tahun Lalu	-	583.965.276,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>7.070.704.654,00</b>	<b>-</b>	<b>4.639.173.684,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4.8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum

**Rp8.722.194.000,00**

Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.722.194.000,00 dari target sebesar Rp4.751.394.000,00 atau 183,57% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.792.597.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Perhubungan	4.751.394.000,00	8.722.194.000,00	183,57	11.668.957.000,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	123.640.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.751.394.000,00</b>	<b>8.722.194.000,00</b>	<b>183,57</b>	<b>11.792.597.000,00</b>

Realisasi pada Dinas Perhubungan berupa penambahan fasilitas trayek layanan umum *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng pada Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta dengan adanya perubahan aturan selama Pandemi *Covid-19* yang semula memberlakukan maksimal 10 penumpang dalam satu Bus menjadi 25 penumpang, serta jadwal operasional yang semula mulai November menjadi Bulan September 2020.

#### 5.1.1.1.1.4.9 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

**Rp5.018.870.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.018.870.000,00 dari target sebesar Rp4.927.885.000,00 atau 101,85% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp75.144.785.050,00 dengan rincian sebagai berikut:





(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Badan Kepegawaian Daerah	334.000.000,00	250.000.000,00	74,85	896.200.000,00
2	Badan Pengembangan SDM	4.593.885.000,00	4.768.870.000,00	103,81	74.248.585.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.927.885.000,00</b>	<b>5.018.870.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>75.144.785.050,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4.10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

**Rp5.543.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp5.543.000,00 merupakan penerimaan dari Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan yang berasal dari kerjasama dengan PURA Group terhadap pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, dimana dalam prosesnya tersebut menghasilkan bahan pokok yang dapat didaur ulang.

#### 5.1.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

**Rp1.696.912.608.091,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.696.912.608.091,00 atau 122,23% dari target Rp1.388.277.824.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.345.947.127.745,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	723.840.000.000,00	932.632.010.637,00	128,85	682.447.684.996,00
2	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	375.632.300.000,00	428.494.231.557,00	114,07	382.565.627.755,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	145.119.000.000,00	170.706.555.450,00	117,63	132.599.502.326,00
4	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	34.586.524.000,00	34.802.451.480,00	100,62	33.408.631.911,00
5	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	47.600.000.000,00	53.363.009.574,00	112,11	48.910.953.719,00
6	RSJD Surakarta	28.500.000.000,00	34.540.247.747,00	121,19	29.473.995.288,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	33.000.000.000,00	42.374.101.646,00	128,41	36.540.731.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.388.277.824.000,00</b>	<b>1.696.912.608.091,00</b>	<b>122,23</b>	<b>1.345.947.127.745,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4.12 Penerimaan Lain-Lain

**Rp6.989.661.459,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.989.661.459,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.182.137.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Lain-Lain SKPD	-	6.954.029.044,00	-	5.140.784.685,00
2	Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan	63.500.000,00	35.632.415,00	56,11	41.352.610,00
	<b>Jumlah</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>6.989.661.459,00</b>	<b>11007,34</b>	<b>5.182.137.295,00</b>



Adapun penerimaan lain-lain SKPD dapat dirinci sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	30.456.464.00	-	51.230.132.00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	2.795.900,00
3	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	-	162.732.000.00	-	16.200.000,00
4	Satpol PP	-	1.000.00	-	-
5	Dinas Sosial	-	-	-	5.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	32.328.002.00	-	9.056.572,00
7	Dinas LH & Kehutanan	-	393.958.540.00	-	-
8	Dinas Perhubungan	-	2.169.720.00	-	-
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	63.450.000.00	-	9.865.000,00
10	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	41.189.000.00	-	3.066.000,00
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	1.172.713.985,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1.011.000.00	-	2.355.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	750.000.000.00	-	-
14	SKPKD	-	5.404.182.073.00	-	3.871.341.575,00
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	2.351.245.00	-	2.155.521,00
16	Badan Pengembangan SDM	-	70.200.000.00	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>6.954.029.044.00</b>	-	<b>5.140.784.685,00</b>

#### 5.1.1.1.4.13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah

**Rp221.582.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah adalah sebesar Rp221.582.000,00 merupakan penerimaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berasal dari ganti rugi pembangunan jaringan SUTT 150 KV Weleri-Batang/Tapak Tower T.81.SUTT 150 KV Weleri-Batang yang berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu: Desa Tulis Kecamatan Tulis, Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman, dan Desa Bakalan Kecamatan Kandeman yang melewati kebun dinas yang merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

**Rp11.702.101.655.293,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.702.101.655.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	11.896.302.626.000,00	11.632.787.041.293,00	97,78	11.334.903.060.673,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68.212.455.000,00	68.212.455.000,00	100,00	62.388.421.000,00



3	Pendapatan Transfer Pemda - Lainnya	-	1.102.159.000,00	-	1.390.419.865,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.964.515.081.000,00</b>	<b>11.702.101.655.293,00</b>	<b>97,81</b>	<b>11.398.681.901.538,00</b>

**5.1.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp11.632.787.041.293,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.632.787.041.293,00 atau 97,78% dari target Rp11.896.302.626.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.334.903.060.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dana Bagi Hasil Pajak	957.049.948.000,00	843.392.119.954,00	88,12	564.290.383.834,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	13.336.741.000,00	16.888.016.587,00	126,63	11.677.937.800,00
3	Dana Alokasi Umum	3.460.064.369.000,00	3.438.709.973.000,00	99,38	3.784.512.513.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (fisik)	386.885.324.000,00	350.564.240.958,00	90,61	267.101.813.252,00
5	Dana Alokasi Khusus (non fisik)	7.078.966.244.000,00	6.983.232.690.794,00	98,65	6.707.320.412.787,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.896.302.626.000,00</b>	<b>11.632.787.041.293,00</b>	<b>97,78</b>	<b>11.334.903.060.673,00</b>

**5.1.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak Rp843.392.119.954,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 atau 88,12% dari target Rp957.049.948.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	66.751.285.000,00	50.209.290.661,00	75,22	40.987.300.000,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPND dan PPh Pasal 21	669.090.345.000,00	589.959.276.398,00	88,17	309.094.940.713,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	221.208.318.000,00	203.223.552.895,00	91,87	214.208.143.121,00
<b>Jumlah</b>		<b>957.049.948.000,00</b>	<b>843.392.119.954,00</b>	<b>88,12</b>	<b>564.290.383.834,00</b>

**5.1.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Rp16.888.016.587,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.888.016.587,00 atau 126,63% dari target Rp13.336.741.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.677.937.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	5.203.113.000,00	3.171.078.354,00	60,95	2.391.839.400,00
2	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	985.746.000,00	953.548.771,00	96,73	-
3	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	6.266.516.000,00	12.093.116.943,00	192,98	-
4	Bagi Hasil dari Panas Bumi	850.053.000,00	648.100.727,00	76,24	506.160.200,00



5	Bagi Hasil dari Minerba	31.313.000,00	22.171.792,00	70,81	25.163.600,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	8.754.774.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.336.741.000,00</b>	<b>16.888.016.587,00</b>	<b>126,63</b>	<b>11.677.937.800,00</b>

**5.1.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum Rp3.438.709.973.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38% dari target Rp3.460.064.369.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.784.512.513.000,00.

**5.1.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (Fisik) Rp350.564.240.958,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 350.564.240.958,00 atau 90,61% dari target Rp386.885.324.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp267.101.813.252,00

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bidang Pendidikan	245.068.295.000,00	238.525.644.192,00	97,33	98.160.224.730,00
2	Bidang Kesehatan	63.555.602.000,00	53.547.136.929,00	84,25	81.960.809.728,00
3	Bidang Infrastruktur Jalan	17.225.628.000,00	47.924.844.000,00	278,22	38.169.617.700,00
4	Bidang Infrastruktur Irigasi	9.466.644.000,00	-	0,00	4.289.012.000,00
5	Bidang Kelautan Dan Perikanan	5.098.699.000,00	2.374.367.000,00	46,57	8.600.614.000,00
6	Bidang Pertanian	4.697.271.000,00	1.180.833.087,00	25,14	13.965.000.000,00
7	Bidang Kehutanan	4.860.056.000,00	1.202.707.750,00	24,75	16.046.291.094,00
8	Bidang Keselamatan Transportasi Darat	30.699.216.000,00	-	0,00	-
9	Bidang Pariwisata	6.213.913.000,00	5.808.708.000,00	93,48	3.221.409.000,00
10	Bidang Pasar	-	-	-	2.688.835.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>386.885.324.000,00</b>	<b>350.564.240.958,00</b>	<b>90,61</b>	<b>267.101.813.252,00</b>

**5.1.1.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) Rp6.983.232.690.794,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65% dari target Rp7.078.966.244.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.707.320.412.787,00.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bantuan Operasional Sekolah	6.012.411.990.000,00	5.918.126.510.000,00	98,43	5.610.770.120.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru - PNSD	1.016.584.649.000,00	1.016.584.649.000,00	100,00	-
3	Dana Tambahan Penghasilan Guru - PNSD	21.325.000,00	21.325.000,00	100,00	1.080.883.679.486,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB)	43.209.382.000,00	42.095.670.378,00	97,42	3.609.582.619,00
5	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	2.350.000.000,00	2.294.735.812,00	97,65	5.424.122.750,00
6	Bantuan Kependudukan & Catatan Sipil	538.898.000,00	363.705.104,00	67,49	4.032.907.932,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	3.850.000.000,00	3.746.095.500,00	97,30	2.500.000.000,00
8	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataaan	-	-	-	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.078.966.244.000,00</b>	<b>6.983.232.690.794,00</b>	<b>98,65</b>	<b>6.707.320.412.787,00</b>



Pada realisasi DAK Non Fisik terdapat pengembalian BOS SD/SMP Negeri sebesar Rp1.421.053.341,00 dengan rincian: Rp668.553.341,00 (Reguler), Rp312.500.000,00 (Kinerja), dan Rp440.000.000,00 (Afirmasi).

#### 5.1.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya **Rp68.212.455.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.212.455.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp62.388.421.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dana Insentif Daerah	68.212.455.000,00	68.212.455.000,00	100,00	62.388.421.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>68.212.455.000,00</b>	<b>68.212.455.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62.388.421.000,00</b>

#### 5.1.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya **Rp 1.102.159.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.102.159.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.390.419.865,00.

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Ketep Pas	-	1.102.159.000,00	-	1.390.419.865,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.102.159.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.390.419.865,00</b>

#### 5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah **Rp23.352.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% dari target Rp23.652.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.184.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Hibah	23.652.000.000,00	23.352.000.000,00	98,73	23.184.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.652.000.000,00</b>	<b>23.352.000.000,00</b>	<b>98,73</b>	<b>23.184.000.000,00</b>

#### 5.1.1.1.3.1. Pendapatan Hibah **Rp23.352.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.184.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hibah dari pemerintah	300.000.000,00	-	0,00	300.000.000,00
2	Penerimaan dari pihak ketiga jasa raharja	23.352.000.000,00	23.352.000.000,00	100,00	22.884.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.652.000.000,00</b>	<b>23.352.000.000,00</b>	<b>98,73</b>	<b>23.184.000.000,00</b>



### 5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.651.740.349.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	16.913.391.556.000,00	16.223.988.285.131,00	95,92	16.374.321.823.072,00
2	Belanja Modal	1.057.533.752.000,00	996.994.505.160,00	94,28	2.099.719.124.860,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.834.243.841.000,00	1.783.884.978.571,00	97,25	2.662.431.206,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	7.569.240.201.000,00	6.646.872.581.129,00	87,81	7.674.359.463.319,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.374.409.350.000,00</b>	<b>25.651.740.349.991,00</b>	<b>93,71</b>	<b>26.151.062.842.457,00</b>

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

**Rp16.223.988.285.131,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.223.988.285.131,00 atau 95,92% dari anggaran Rp16.913.391.556.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.354.554.423.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	6.698.242.058.000,00	6.483.761.623.794,00	96,80	6.591.903.141.578,00
2	Belanja Barang & Jasa	4.405.786.353.000,00	4.104.637.788.228,00	93,16	4.562.499.451.144,00
3	Belanja Hibah	5.761.071.145.000,00	5.593.181.623.109,00	97,09	5.155.826.080.751,00
4	Belanja Bantuan Sosial	48.292.000.000,00	42.407.250.000,00	87,81	44.325.750.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.913.391.556.000,00</b>	<b>16.223.988.285.131,00</b>	<b>95,92</b>	<b>16.354.554.423.473,00</b>

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Rp6.483.761.623.794,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% dari anggaran Rp6.698.242.058.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	3.001.421.263.000,00	2.920.786.609.394,00	97,31	2.893.324.369.714,00
2	Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya	2.581.546.243.000,00	2.510.167.192.539,00	97,24	2.882.286.181.648,00
3	Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	51.587.240.000,00	51.502.500.000,00	99,84	47.846.500.000,00
4	Belanja insentif Pemungut Pajak	52.000.000.000,00	34.427.301.542,00	66,21	46.205.548.890,00
5	Honorarium PNS	51.952.034.000,00	48.179.131.555,00	92,74	52.519.423.500,00
6	Honorarium Non PNS	741.464.145.000,00	729.791.422.301,00	98,43	549.394.004.414,00
7	Belanja Pegawai BLUD	150.049.565.000,00	135.915.872.910,00	90,58	118.528.213.412,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

8	Belanja Pegawai BOS	68.221.568.000,00	52.991.593.553,00	77,68	1.798.900.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.698.242.058.000,00</b>	<b>6.483.761.623.794,00</b>	<b>96,80</b>	<b>6.591.903.141.578,00</b>

Adapun perincian belanja pegawai dimaksud dapat digambarkan per-SKPD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.322.379.425.000,00	4.197.136.353.898,00	97,10	4.146.645.695.204,00
2	Dinas Kesehatan	96.042.904.000,00	93.054.731.702,00	96,89	103.924.463.310,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	202.932.279.000,00	198.753.997.195,00	97,94	176.913.790.872,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	154.394.668.000,00	144.857.395.684,00	93,82	127.633.399.466,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	104.470.741.000,00	103.873.622.448,00	99,43	94.269.580.493,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	41.350.854.000,00	41.071.902.630,00	99,33	33.228.890.251,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	62.883.569.000,00	61.312.345.219,00	97,50	57.298.596.202,00
8	RSJD Surakarta	66.549.313.000,00	64.215.376.185,00	96,49	61.676.790.958,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	44.464.290.000,00	43.246.580.782,00	97,26	36.647.373.113,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	95.251.450.000,00	92.501.080.633,00	97,11	103.835.959.898,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	95.072.966.000,00	93.394.790.928,00	98,23	100.445.823.086,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.711.099.000,00	15.027.723.231,00	89,93	15.178.775.926,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	14.068.350.000,00	13.735.365.863,00	97,63	16.120.816.810,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.998.270.000,00	15.196.109.648,00	94,99	18.641.216.703,00
15	Dinas Sosial	121.755.972.000,00	118.193.752.633,00	97,07	126.099.240.051,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.240.987.000,00	8.570.436.000,00	92,74	11.069.829.882,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71.406.908.000,00	69.876.112.797,00	97,86	79.113.954.465,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	13.042.388.000,00	12.819.925.696,00	98,29	16.112.090.364,00
19	Dinas LH & Kehutanan	129.546.863.000,00	125.667.134.123,00	97,01	146.584.914.129,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	16.221.862.000,00	16.035.216.964,00	98,85	17.173.637.740,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	15.983.183.000,00	15.478.934.119,00	96,85	17.665.445.149,00
22	Dinas Perhubungan	45.637.498.000,00	44.552.802.208,00	97,62	49.131.151.321,00
23	Dinas Kominfo	19.120.850.000,00	18.608.437.388,00	97,32	20.080.718.751,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	21.235.432.000,00	20.937.495.829,00	98,60	22.802.646.136,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	13.475.628.000,00	12.843.146.899,00	95,31	13.112.199.378,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	38.919.076.000,00	36.145.946.340,00	92,87	44.972.139.938,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	24.922.530.000,00	24.639.503.286,00	98,86	27.245.097.654,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.071.859.000,00	45.931.232.862,00	97,58	52.248.843.497,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	122.830.309.000,00	117.497.914.891,00	95,66	141.114.317.229,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36.634.394.000,00	35.453.116.186,00	96,78	38.832.324.554,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.250.755.000,00	29.695.300.959,00	98,16	29.862.410.722,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.432.724.000,00	37.960.729.374,00	96,27	44.287.240.399,00
33	KDH dan Wakil KDH	23.358.071.000,00	21.553.175.590,00	92,27	21.746.715.361,00
34	DPRD	98.522.015.000,00	97.720.954.647,00	99,19	82.489.271.182,00
35	Sekretariat Daerah	93.102.759.000,00	89.710.867.139,00	96,36	99.140.223.631,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
36	Sekretariat DPRD	22.402.400.000,00	21.752.638.229,00	97,10	23.626.580.300,00
37	Inspektorat	20.478.377.000,00	20.149.622.172,00	98,39	20.841.544.304,00
38	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	28.522.556.000,00	27.850.921.611,00	97,65	31.435.462.391,00
39	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	166.239.038.000,00	143.336.186.878,00	86,22	171.741.777.082,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.113.620.000,00	31.095.020.825,00	96,83	32.640.475.375,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	24.267.779.000,00	23.323.784.511,00	96,11	74.900.608.040,00
42	Badan Pengembangan SDM	30.588.542.000,00	30.041.255.997,00	98,21	33.215.567.101,00
43	Badan Penghubung	9.347.505.000,00	8.942.681.595,00	95,67	10.155.543.160,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.698.242.058.000,00</b>	<b>6.483.761.623.794,00</b>	<b>96,80</b>	<b>6.591.903.141.578,00</b>

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**Rp4.104.637.788.228,00**

Realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.562.499.451.144.00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	102.163.308.000,00	97.469.990.484,00	95,41	173.497.215.452,00
2	Belanja Bahan/Material	123.886.363.000,00	111.442.615.155,00	89,96	128.277.738.594,00
3	Belanja Jasa Kantor	358.839.586.000,00	330.200.223.676,00	92,02	365.647.167.115,00
4	Belanja Premi Asuransi	257.366.040.000,00	248.551.857.828,00	96,58	249.812.247.825,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.542.518.000,00	19.386.857.339,00	94,37	34.335.897.780,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.546.875.000,00	30.119.612.738,00	95,48	55.396.538.139,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.620.263.000,00	32.432.192.739,00	83,98	100.082.658.105,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	53.469.054.000,00	48.881.397.904,00	91,42	45.658.907.546,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	215.700.000,00	210.980.000,00	97,81	434.624.200,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.260.384.000,00	14.407.274.032,00	88,60	22.833.404.848,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	112.854.863.000,00	101.952.478.673,00	90,34	204.612.137.152,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.364.814.000,00	8.778.967.375,00	77,25	3.178.984.525,00
13	Belanja Pakaian Kerja	2.449.618.000,00	2.344.593.100,00	95,71	4.603.885.700,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Terentu	5.241.000.000,00	5.125.814.000,00	97,80	8.773.493.200,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	322.151.935.000,00	261.109.220.167,00	81,05	438.706.262.078,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.291.500.000,00	2.153.152.900,00	93,96	2.088.150.000,00
17	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.350.956.000,00	3.585.399.130,00	82,40	7.637.790.226,00
18	Belanja Pemeliharaan	156.190.189.000,00	150.699.330.438,00	96,48	289.505.686.013,00
19	Belanja Jasa Konsultansi	20.437.252.000,00	19.260.506.254,00	94,24	51.473.037.035,00
20	Belanja Barang Dana BOS	706.170.281.000,00	698.958.957.751,00	98,98	677.328.308.072,00
21	Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	2.127.885.000,00	2.071.459.142,00	97,35	21.430.039.000,00
22	Belanja Hadiah Barang	1.414.574.000,00	1.308.545.725,00	92,50	5.696.082.342,00
23	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	224.484.413.000,00	202.601.691.526,00	90,25	114.753.866.786,00





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
24	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.756.305.000,00	38.543.706.180,00	84,24	34.127.957.645,00
25	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy	7.461.524.000,00	7.006.150.000,00	93,90	21.343.665.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.271.224.565.000,00	1.172.899.048.894,00	92,27	1.087.424.774.564,00
27	Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	2.646.006.000,00	2.435.695.000,00	92,05	9.622.949.000,00
28	Belanja Barang Dana BOP	504.258.582.000,00	490.700.070.078,00	97,31	404.215.983.202,00
	Jumlah	<b>4.405.786.353.000,00</b>	<b>4.104.637.788.228,00</b>	<b>93,16</b>	<b>4.562.499.451.144,00</b>

Adapun perincian belanja barang dan jasa dimaksud dapat digambarkan per-SKPD sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.419.128.836.000,00	1.385.296.867.397,00	97,62	1.229.585.514.904,00
2	Dinas Kesehatan	396.267.267.000,00	359.882.819.114,00	90,82	331.607.665.194,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	653.360.256.000,00	619.164.339.553,00	94,77	601.557.914.321,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	374.452.536.000,00	331.144.917.603,00	88,43	287.662.072.643,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	122.490.488.000,00	113.263.534.598,00	92,47	111.108.856.842,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	33.740.877.000,00	30.777.801.221,00	91,22	41.443.232.949,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	47.779.471.000,00	42.215.142.137,00	88,35	43.629.268.078,00
8	RSJD Surakarta	32.509.494.000,00	29.071.189.248,00	89,42	34.960.912.017,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	31.285.052.000,00	30.860.041.319,00	98,64	32.095.588.251,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	93.492.169.000,00	90.636.948.094,00	96,95	153.382.999.348,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	34.820.718.000,00	33.667.634.988,00	96,69	76.899.234.266,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.535.943.000,00	14.522.522.746,00	87,82	16.884.016.802,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	11.197.021.000,00	10.201.044.580,00	91,10	18.200.132.400,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.090.043.000,00	9.821.240.139,00	97,34	42.393.508.789,00
15	Dinas Sosial	82.712.864.000,00	80.043.275.302,00	96,77	85.311.924.788,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.768.655.000,00	10.448.039.421,00	88,78	20.981.173.175,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.843.489.000,00	21.234.343.874,00	92,96	39.769.250.583,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.488.768.000,00	7.291.114.935,00	97,36	16.095.423.772,00
19	Dinas LH & Kehutanan	29.094.764.000,00	25.020.761.834,00	86,00	72.846.094.224,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	17.269.413.000,00	16.156.696.967,00	93,56	20.027.540.589,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	9.735.008.000,00	8.904.691.016,00	91,47	22.428.007.154,00
22	Dinas Perhubungan	85.053.484.000,00	81.667.914.723,00	96,02	78.557.640.816,00
23	Dinas Kominfo	39.149.806.000,00	38.177.981.973,00	97,52	36.210.693.295,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	36.017.666.000,00	34.592.971.799,00	96,04	57.237.179.863,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	5.526.898.000,00	5.186.469.187,00	93,84	15.980.092.858,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	53.165.201.000,00	45.746.939.237,00	86,05	120.494.199.412,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	7.975.771.000,00	7.496.068.038,00	93,99	13.602.371.383,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.566.752.000,00	24.440.872.873,00	95,60	42.897.901.042,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	116.192.656.000,00	97.331.032.264,00	83,77	124.039.183.688,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.018.249.000,00	29.168.444.683,00	94,04	59.204.046.120,00



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	32.706.527.000,00	30.523.231.300,00	93,32	46.644.473.864,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.898.840.000,00	26.805.150.298,00	89,65	35.750.448.461,00
33	Sekretariat Daerah	66.441.789.000,00	64.569.025.498,00	97,18	124.618.017.286,00
34	Sekretariat DPRD	228.390.188.000,00	169.723.026.202,00	74,31	136.930.226.512,00
35	Inspektorat	8.747.345.000,00	8.520.293.636,00	97,40	22.580.721.993,00
36	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	16.135.487.000,00	15.628.101.430,00	96,86	31.829.816.816,00
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	100.684.048.000,00	96.715.828.765,00	96,06	156.687.058.690,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.159.441.000,00	16.358.493.411,00	95,33	33.601.699.110,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	20.597.539.000,00	18.613.570.137,00	90,37	19.637.601.237,00
40	Badan Pengembangan SDM	19.049.477.000,00	16.487.802.706,00	86,55	93.980.434.691,00
41	Badan Penghubung	8.246.057.000,00	7.259.603.982,00	88,04	13.145.312.918,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.405.786.353.000,00</b>	<b>4.104.637.788.228,00</b>	<b>93,16</b>	<b>4.562.499.451.144,00</b>

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 hanya terserap sebesar 93,16%, disebabkan adanya efisiensi dan realisasi mendasarkan kebutuhan riil.

### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

**Rp5.593.181.623.109,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	294.369.256.000,00	292.795.420.000,00	99,47	218.591.416.000,00
2	Belanja Hibah Kepada kelompok/Anggota Masyarakat	358.979.809.000,00	300.572.788.309,00	83,73	307.759.605.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	5.087.352.190.000,00	4.979.443.530.000,00	97,88	4.629.475.059.751,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	20.369.890.000,00	20.369.884.800,00	100,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.761.071.145.000,00</b>	<b>5.593.181.623.109,00</b>	<b>97,09</b>	<b>5.155.826.080.751,00</b>

### 5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah

**Rp292.795.420.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp292.795.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng	2.456.876.000,00	2.456.876.000,00	100,00	2.456.876.000,00
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	370.280.000,00	364.244.000,00	98,37	621.640.000,00
4	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
5	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	280.000.000,00
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00



7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal	264.000.000,00	264.000.000,00	100,00	264.000.000,00
8	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	535.000.000,00	535.000.000,00	100,00	535.000.000,00
9	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
10	Kanwil Dirjen Bea & Cukai Jateng DIY	-	-	-	1.500.000.000,00
11	Satuan Radar 214/Tegal	150.000.000,00	-	0,00	-
12	Kanwil Kemenag Prov. Jateng	281.113.100.000,00	279.695.300.000,00	99,50	203.733.900.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>294.369.256.000,00</b>	<b>292.795.420.000,00</b>	<b>99,47</b>	<b>218.591.416.000,00</b>

#### 5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

**Rp300.572.788.309,00**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp300.572.788.309,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hibah Bidang Perekonomian	4.727.200.000,00	2.760.000.000,00	58,39	746.504.000,00
2	Hibah Bidang Pendidikan	273.832.665.000,00	222.182.810.000,00	81,14	193.278.073.000,00
3	Hibah Bidang Kesehatan	-	-	-	2.000.000.000,00
4	Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	55.214.944.000,00	55.139.944.000,00	99,86	87.665.028.000,00
5	Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan	2.675.000.000,00	2.500.000.000,00	93,46	2.540.000.000,00
6	Hibah Bidang Keagamaan	13.255.000.000,00	11.565.034.309,00	87,25	17.610.000.000,00
7	Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan	9.200.000.000,00	6.350.000.000,00	69,02	3.920.000.000,00
8	Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>358.979.809.000,00</b>	<b>300.572.788.309,00</b>	<b>83,73</b>	<b>307.759.605.000,00</b>

Belanja hibah bidang perekonomian sebesar 58,39%, disebabkan tidak adanya pengajuan pencairan dikarenakan SKPD tidak merekomendasikan pencairan.

#### 5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Dana BOS

**Rp4.979.443.530.000,00**

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.979.443.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>BOS Reguler</b>					
1	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Semarang	125.656.629.000,00	123.757.310.000,00	98,49	112.528.920.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kendal	144.399.451.000,00	141.842.510.000,00	98,23	129.509.901.134,00
3	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Demak	137.362.823.000,00	135.030.770.000,00	98,30	122.430.040.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Grobogan	196.994.367.000,00	193.081.980.000,00	98,01	177.731.785.101,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
5	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Pati	149.942.478.000,00	146.821.620.000,00	97,92	136.141.800.000,00
6	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kudus	102.711.920.000,00	100.441.340.000,00	97,79	93.348.880.000,00
7	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara	134.018.182.000,00	131.445.310.000,00	98,08	120.996.240.000,00
8	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang	76.845.889.000,00	75.316.300.000,00	98,01	68.996.000.000,00
9	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora	121.610.364.000,00	118.972.730.000,00	97,83	112.266.179.182,00
10	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan	121.508.282.000,00	119.642.320.000,00	98,46	109.795.880.000,00
11	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang	96.122.679.000,00	94.769.120.000,00	98,59	85.925.640.000,00
12	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang	218.297.298.000,00	214.078.320.000,00	98,07	196.802.200.000,00
13	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal	212.230.909.000,00	208.115.770.000,00	98,06	190.653.820.000,00
14	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes	253.390.286.000,00	248.718.940.000,00	98,16	228.989.796.156,00
15	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas	259.075.983.000,00	253.860.820.000,00	97,99	234.545.880.000,00
16	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap	267.781.005.000,00	262.720.320.000,00	98,11	243.215.720.000,00
17	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga	117.988.540.000,00	115.587.440.000,00	97,96	106.166.120.000,00
18	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara	118.352.099.000,00	116.001.600.000,00	98,01	106.979.240.000,00
19	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang	157.867.352.000,00	154.706.320.000,00	98,00	143.058.340.000,00
20	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung	95.342.225.000,00	93.677.330.000,00	98,25	84.937.640.000,00
21	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo	111.717.273.000,00	109.486.210.000,00	98,00	99.886.120.000,00
22	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo	111.184.325.000,00	108.337.390.000,00	97,44	101.486.200.000,00
23	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen	193.517.457.000,00	188.227.080.000,00	97,27	176.563.240.000,00
24	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten	165.343.718.000,00	161.789.930.000,00	97,85	149.771.600.000,00
25	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali	117.989.152.000,00	115.419.630.000,00	97,82	107.121.649.260,00
26	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen	130.852.617.000,00	128.097.740.000,00	97,89	118.939.520.000,00
27	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo	114.313.789.000,00	112.092.360.000,00	98,06	103.476.080.000,00
28	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar	119.382.404.000,00	116.974.100.000,00	97,98	108.580.680.000,00
29	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri	129.706.361.000,00	126.863.660.000,00	97,81	118.563.200.000,00
30	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang	249.022.766.000,00	238.937.910.000,00	95,95	223.200.160.000,00
31	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan	40.157.116.000,00	39.607.950.000,00	98,63	36.870.130.480,00
32	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta	120.708.554.000,00	117.670.640.000,00	97,48	110.035.520.000,00
33	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga	36.270.144.000,00	35.425.110.000,00	97,67	33.247.000.000,00
34	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal	47.440.026.000,00	46.242.420.000,00	97,48	43.468.458.438,00
35	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang	31.562.437.000,00	30.863.230.000,00	97,78	29.108.480.000,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	<b>BOS Afirmasi</b>	128.915.000.000,00	128.880.000.000,00	99,97	172.858.000.000,00
	<b>BOS Kinerja</b>	131.770.290.000,00	125.940.000.000,00	95,58	91.279.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.087.352.190.000,00</b>	<b>4.979.443.530.000,00</b>	<b>97,88</b>	<b>4.629.475.059.751,00</b>

#### 5.1.2.1.3.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik **Rp20.369.884.800,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 20.369.884.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.131.087.000,00	7.131.086.400,00	100,00	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.244.256.000,00	3.244.255.200,00	100,00	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.947.298.000,00	1.947.297.600,00	100,00	
4	Partai Keadilan Sejahtera	1.484.352.000,00	1.484.352.000,00	100,00	
5	Partai Golongan Karya	2.046.065.000,00	2.046.064.800,00	100,00	
6	Partai Demokrat	1.145.102.000,00	1.145.101.200,00	100,00	
7	Partai Amanat Nasional	1.037.600.000,00	1.037.599.200,00	100,00	
8	Partai Persatuan Pembangunan	1.329.836.000,00	1.329.835.200,00	100,00	
9	Partai Nasional Demokrat	1.004.294.000,00	1.004.293.200,00	100,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>20.369.890.000,00</b>	<b>20.369.884.800,00</b>	<b>100,00</b>	

#### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial **Rp42.407.250.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 42.407.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Pendidikan	-	-	-	9.870.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Perlindungan Sosial	-	-	-	34.455.750.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga Dan Masyarakat	48.292.000.000,00	42.407.250.000,00	87,81	-
	<b>Jumlah</b>	<b>48.292.000.000,00</b>	<b>42.407.250.000,00</b>	<b>87,81</b>	<b>44.325.750.000,00</b>

#### 5.1.2.2 Belanja Modal **Rp996.994.505.160,00**

Realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Tanah	14.703.769.000,00	14.338.900.293,00	97,52	170.898.817.539,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	509.897.318.000,00	494.933.371.196,00	97,07	680.097.965.905,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	216.372.410.000,00	195.773.603.473,00	90,48	539.370.887.071,00
4	Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	193.270.690.000,00	177.713.123.124,00	91,95	566.705.770.028,00



5	Belanja Aset Tetap Lainnya	122.200.465.000,00	113.376.388.074,00	92,78	137.358.163.317,00
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	1.089.100.000,00	859.119.000,00	78,88	5.287.521.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.057.533.752.000,00</b>	<b>996.994.505.160,00</b>	<b>94,28</b>	<b>2.099.719.124.860,00</b>

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

**Rp 14.338.900.293,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% dari anggaran Rp14.703.769.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-	-	1.636.539.000,00
2	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	14.276.389.000,00	13.927.268.363,00	97,55	130.554.330.279,00
3	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	87.880.000,00	87.705.000,00	99,80	154.526.460,00
4	Dinas Sosial	-	-	-	184.638.000,00
5	Dinas Perhubungan	339.500.000,00	323.926.930,00	95,41	38.368.783.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.703.769.000,00</b>	<b>14.338.900.293,00</b>	<b>97,52</b>	<b>170.898.817.539,00</b>

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Rp494.933.371.196,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Alat-alat Besar	252.852.052.000,00	249.042.671.559,00	98,49	269.263.109.739,00
2	Belanja Alat-alat Angkut	26.663.856.000,00	26.237.144.490,00	98,40	29.577.043.046,00
3	Belanja Alat-alat Bengkel	25.355.061.000,00	24.518.009.758,00	96,70	42.045.856.416,00
4	Belanja Alat-alat Pertanian	3.469.414.000,00	3.335.448.922,00	96,14	9.505.592.019,00
5	Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	31.093.261.000,00	29.430.612.954,00	94,65	58.223.283.296,00
6	Belanja Alat-alat Studio	8.091.959.000,00	7.398.865.500,00	91,43	13.441.808.919,00
7	Belanja Alat-alat Kedokteran	116.065.861.000,00	110.404.849.738,00	95,12	123.234.585.580,00
8	Belanja Alat-alat Laboratorium	8.456.500.000,00	8.031.608.371,00	94,98	18.367.778.434,00
9	Belanja Alat-alat Keamanan	67.770.000,00	67.720.000,00	99,93	646.777.285,00
10	Alat-alat Komputer	37.278.284.000,00	35.963.139.904,00	96,47	91.841.529.286,00
11	Alat-alat Peraga	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	23.839.722.285,00
12	Peralatan Proses / Produksi	-	-	-	95.000.000,00
13	Peralatan Olah Raga	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	15.879.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>509.897.318.000,00</b>	<b>494.933.371.196,00</b>	<b>97,07</b>	<b>680.097.965.905,00</b>

#### 5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat-Alat Besar

**Rp249.042.671.559,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp249.042.671.559,00 atau 98,49% dari anggaran Rp252.852.052.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 269.263.109.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	252.382.973.000,00	248.589.046.439,00	98,50	247.827.149.690,00
2	Dinas Kesehatan	21.000.000,00	20.700.000,00	98,57	313.340.400,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	189.014.400,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	2.257.530.000,00
5	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	-	-	-	10.647.505.000,00
6	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	2.627.768.000,00
7	Dinas Sosial	-	-	-	68.989.298,00
8	Dinas LH & Kehutanan	-	-	-	55.899.768,00
9	Dinas Perhubungan	276.000.000,00	266.513.000,00	96,56	143.186.000,00
10	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	-	-	-	621.842.250,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.333.344.900,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	1.825.349.000,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.000.000,00	7.700.000,00	96,25	-
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	375.868.000,00
15	Sekretariat Daerah	-	-	-	839.863.033,00
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	128.555.000,00	125.437.670,00	97,58	20.910.000,00
17	Badan Pengembangan SDM	35.524.000,00	33.274.450,00	93,67	113.550.000,00
18	Badan Penghubung	-	-	-	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>252.852.052.000,00</b>	<b>249.042.671.559,00</b>	<b>98,49</b>	<b>269.263.109.739,00</b>

**5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan**

**Rp26.237.144.490,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp26.237.144.490,00 atau 98,40% dari anggaran Rp26.663.856.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp29.577.043.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	69.765.900,00
2	Dinas Kesehatan	1.675.000.000,00	1.429.989.000,00	85,37	3.281.574.399,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	399.000.000,00	388.960.000,00	97,48	-
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	540.274.000,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	44.102.000,00	44.101.750,00	100,00	37.961.000,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	15.000.000,00	8.918.600,00	59,46	549.491.309,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	685.750.000,00
8	RSJD Surakarta	-	-	-	1.664.290.450,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.106.773.000,00	1.077.596.740,00	97,36	731.036.456,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	165.000.000,00	163.500.000,00	99,09	2.067.078.000,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	838.360.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	420.500.000,00
13	Dinas Sosial	-	-	-	1.466.000.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.398.676.000,00	1.398.650.000,00	100,00	747.331.860,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
15	Dinas LH & Kehutanan	1.000,00	-	-	1.487.878.500,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	659.486.000,00
17	Dinas Kominfo	80.000.000,00	68.740.000,00	85,93	-
18	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	368.600.000,00	368.600.000,00	100,00	38.238.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	1.402.250.000,00	1.402.250.000,00	100,00	-
20	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	174.500.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	594.600.000,00	594.600.000,00	100,00	4.422.892.000,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	60.000.000,00	54.000.000,00	90,00	353.621.800,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.218.250.000,00	3.218.250.000,00	100,00	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.487.000.000,00	1.487.000.000,00	100,00	1.356.862.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	507.250.000,00	507.226.000,00	100,00	-
26	Sekretariat Daerah	2.923.395.000,00	2.921.912.400,00	99,95	2.372.974.622,00
27	Sekretariat DPRD	7.708.068.000,00	7.592.000.000,00	98,49	2.454.193.750,00
28	Inspektorat	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	-
29	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	-	-	-	463.500.000,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.056.000.000,00	2.056.000.000,00	100,00	2.496.483.000,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	197.000.000,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	4.891.000,00	4.850.000,00	99,16	-
	<b>Jumlah</b>	<b>26.663.856.000,00</b>	<b>26.237.144.490,00</b>	<b>98,40</b>	<b>29.577.043.046,00</b>

Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Kelet/Donorojo Jepara hanya terserap sebesar 59,46% dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

#### 5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat-Alat Bengkel dan Ukur Rp24.518.009.758,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.518.009.758,00 atau 96,70% dari anggaran Rp25.355.061.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 42.045.856.416,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	22.009.315.000,00	21.284.978.783,00	96,71	39.541.474.056,00
2	Dinas Kesehatan	1.698.265.000,00	1.670.027.500,00	98,34	176.587.700,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	198.825.000,00	197.946.000,00	99,56	39.819.060,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	220.614.100,00
5	RSJD Surakarta	-	-	-	500.800.000,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	731.750.000,00	682.566.375,00	93,28	7.282.000,00
7	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	455.730.000,00
8	Dinas Sosial	7.615.000,00	7.615.000,00	100,00	-
9	Dinas Perhubungan	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	204.275.000,00
10	Dinas Kominfo	-	-	-	5.000.000,00
11	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	519.250.000,00





NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	34.650.000,00
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	196.950.000,00	169.812.500,00	86,22	64.740.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.850.000,00	20.586.500,00	98,74	29.120.000,00
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	371.404.000,00	364.746.100,00	98,21	54.474.500,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	64.000.000,00	63.644.000,00	99,44	-
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	192.040.000,00
18	Badan Pengembangan SDM	35.987.000,00	35.987.000,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>25.355.061.000,00</b>	<b>24.518.009.758,00</b>	<b>96,70</b>	<b>42.045.856.416,00</b>

#### 5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat-Alat Pertanian

**Rp3.335.448.922,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.335.448.922,00 atau 96,14% dari anggaran Rp3.469.414.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.505.592.019,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	10.400.000,00
2	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	1.500.000,00	715.000,00	47,67	-
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-	-	2.882.060,00
4	Dinas LH & Kehutanan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	86.750.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	171.484.000,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.520.589.000,00	1.416.376.292,00	93,15	2.714.731.829,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	716.967.000,00	695.383.500,00	96,99	6.515.594.130,00
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.193.358.000,00	1.185.974.130,00	99,38	3.750.000,00
9	Badan Penghubung	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.469.414.000,00</b>	<b>3.335.448.922,00</b>	<b>96,14</b>	<b>9.505.592.019,00</b>

Belanja Modal Alat-Alat Pertanian Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Kelet/Donorojo Jepara hanya terserap sebesar 47,67% dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

#### 5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

**Rp29.430.612.954,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.430.612.954,00 atau 94,65% dari anggaran Rp31.093.261.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 58.223.283.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.479.946.000,00	1.458.714.800,00	98,57	3.005.835.360,00
2	Dinas Kesehatan	1.364.622.000,00	1.310.197.964,00	96,01	1.873.475.705,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
3	RSUD Moewardi Surakarta	2.481.000.000,00	2.351.356.000,00	94,77	2.603.247.200,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	3.963.566.000,00	3.571.889.578,00	90,12	2.882.699.708,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	623.898.000,00	606.426.923,00	97,20	532.944.080,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	500.000.000,00	309.169.020,00	61,83	335.386.962,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.873.228.000,00	1.558.738.050,00	83,21	1.006.073.450,00
8	RSJD Surakarta	353.120.000,00	191.179.604,00	54,14	5.984.669.330,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.554.821.000,00	1.534.105.596,00	98,67	931.077.100,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	464.108.000,00	413.367.500,00	89,07	558.398.000,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	676.595.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	158.600.000,00	144.015.000,00	90,80	692.980.900,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	110.665.000,00	110.660.000,00	100,00	869.056.500,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	148.000.000,00	145.545.000,00	98,34	123.250.000,00
15	Dinas Sosial	684.625.000,00	674.904.000,00	98,58	3.829.002.620,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	508.556.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	429.290.000,00	428.855.300,00	99,90	791.037.429,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.560.000,00	3.964.000,00	86,93	298.001.000,00
19	Dinas LH & Kehutanan	572.749.000,00	571.061.200,00	99,71	1.744.584.755,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	111.500.000,00	111.345.000,00	99,86	52.564.500,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Cakil	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	168.650.000,00
22	Dinas Perhubungan	1.242.774.000,00	1.215.839.000,00	97,83	583.347.800,00
23	Dinas Kominfo	37.600.000,00	36.560.000,00	97,23	57.970.000,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	695.100.000,00	688.934.000,00	99,11	1.024.106.541,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	122.600.000,00	122.600.000,00	100,00	255.227.400,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	615.360.000,00	593.307.000,00	96,42	688.298.787,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	308.061.000,00	304.616.000,00	98,88	428.481.900,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	246.317.000,00	246.052.000,00	99,89	1.032.897.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.621.644.000,00	1.576.706.540,00	97,23	440.124.600,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	190.400.000,00	190.200.000,00	99,89	1.329.149.750,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.130.095.750,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	490.965.000,00	476.320.750,00	97,02	560.106.500,00
33	Sekretariat Daerah	347.985.000,00	347.976.000,00	100,00	2.612.737.050,00
34	Sekretariat DPRD	4.906.272.000,00	4.834.147.580,00	98,53	2.979.135.000,00
35	Inspektorat	347.135.000,00	347.125.000,00	100,00	325.815.000,00
36	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	881.000.000,00	872.486.000,00	99,03	1.165.868.000,00
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.180.904.000,00	1.146.195.000,00	97,06	10.530.304.864,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	1.501.488.700,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	308.056.000,00	263.264.900,00	85,46	702.182.408,00
40	Badan Pengembangan SDM	270.990.000,00	270.988.649,00	100,00	950.318.647,00
41	Badan Penghubung	337.000.000,00	337.000.000,00	100,00	457.542.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.093.261.000,00</b>	<b>29.430.612.954,00</b>	<b>94,65</b>	<b>58.223.283.296,00</b>

Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 pada RSUD



Kelet/Donorojo Jepara hanya terserap sebesar 61,83% dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

#### 5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi Rp7.398.865.500,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.398.865.500,00 atau 91,43% dari anggaran Rp8.091.959.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.441.808.919,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	292.360.000,00	248.769.100,00	85,09	401.780.000,00
2	Dinas Kesehatan	299.065.000,00	285.371.800,00	95,42	727.523.900,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	2.026.592.900,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	473.500.000,00	473.407.050,00	99,98	51.702.000,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	6.000.000,00	3.800.000,00	63,33	12.773.650,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	20.000.000,00
7	RSJD Surakarta	50.000.000,00	19.609.500,00	39,22	14.996.000,00
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	16.500.000,00	16.294.000,00	98,75	-
9	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	73.250.000,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	144.300.000,00	140.309.000,00	97,23	12.000.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	135.200.000,00	135.200.000,00	100,00	114.500.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	103.500.000,00	103.500.000,00	100,00	161.000.000,00
13	Dinas Sosial	-	-	-	119.205.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	118.425.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	142.660.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	40.000.000,00	38.631.000,00	96,58	-
17	Dinas LH & Kehutanan	176.516.000,00	175.834.200,00	99,61	106.031.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	20.900.000,00	20.870.000,00	99,86	40.870.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	59.599.000,00	59.599.000,00	100,00	92.598.400,00
20	Dinas Perhubungan	27.250.000,00	26.822.550,00	98,43	266.207.000,00
21	Dinas Kominfo	3.170.947.000,00	3.117.984.500,00	98,33	1.127.481.500,00
22	Dinas Koperasi dan UKM	95.000.000,00	92.851.000,00	97,74	16.938.500,00
23	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	-	-	-	111.639.175,00
24	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	-	-	1.191.829.994,00
25	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	91.437.600,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	208.000.000,00	207.978.000,00	99,99	799.890.000,00
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	111.000.000,00	109.794.000,00	98,91	259.812.000,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	86.502.000,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.042.888.000,00	1.042.888.000,00	100,00	245.544.000,00
30	Sekretariat Daerah	189.050.000,00	189.050.000,00	100,00	3.984.804.300,00
31	Sekretariat DPRD	743.634.000,00	253.152.000,00	34,04	613.000.000,00
32	Inspektorat	-	-	-	59.475.000,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	29.865.000,00	99,55	135.740.000,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	55.900.000,00	44.516.000,00	79,64	-



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
35	Badan Pengembangan SDM	561.250.000,00	523.169.800,00	93,22	175.450.000,00
36	Badan Penghubung	-	-	-	40.150.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.091.959.000,00</b>	<b>7.398.865.500,00</b>	<b>91,43</b>	<b>13.441.808.919,00</b>

Realisasi tahun 2020 yang tidak mencapai target antara lain:

1. RSJD Surakarta hanya terserap sebesar Rp19.609.500,00 atau 39,22% dikarenakan adanya *refocussing* Pendapatan BLUD yang turun hingga sebesar 43% karena terjadi Pandemi *Covid-19* sehingga dilakukan penyesuaian Anggaran Belanja BLUD.
2. Sekretariat DPRD hanya terserap sebesar Rp253.152.000,00 atau 34,04% dikarenakan terdapat gagal lelang yang disebabkan peserta lelang hanya 1 (satu) vendor, serta pelaksanaannya pekerjaan mendekati akhir tahun anggaran 2020.

#### 5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran

**Rp110.404.849.738,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp110.404.849.738,00 atau 95,12% dari anggaran Rp116.065.861.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp123.234.585.580,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kesehatan	3.656.499.000,00	3.541.853.439,00	96,86	7.806.502.069,00
2	RSUD Moewardi Surakarta	39.589.037.000,00	38.387.444.252,00	96,96	30.537.286.636,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	30.072.559.000,00	28.473.421.797,00	94,68	34.752.584.472,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	24.490.832.000,00	24.255.301.376,00	99,04	15.025.428.826,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	5.060.000.000,00	4.560.971.657,00	90,14	9.709.451.657,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	10.353.042.000,00	8.728.861.888,00	84,31	11.607.600.838,00
7	RSJD Surakarta	1.388.868.000,00	1.136.079.719,00	81,80	11.390.020.836,00
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.288.378.000,00	1.155.078.610,00	89,65	2.181.752.568,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	12.000.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	31.300.000,00
11	Dinas Sosial	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	-
12	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	98.984.000,00	98.175.000,00	99,18	2.799.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51.862.000,00	51.862.000,00	100,00	-
15	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	177.858.678,00
	<b>Jumlah</b>	<b>116.065.861.000,00</b>	<b>110.404.849.738,00</b>	<b>95,12</b>	<b>123.234.585.580,00</b>



#### 5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium

**Rp8.031.608.371,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.031.608.371,00 atau 94,98% dari anggaran Rp8.456.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.367.778.434,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kesehatan	2.461.003.000,00	2.422.669.997,00	98,44	1.422.827.000,00
2	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	420.000.000,00	375.000.000,00	89,29	50.538.798,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	1.140.268.897,00
4	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	70.000.000,00	39.875.000,00	56,96	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	257.650.000,00	257.174.800,00	99,82	-
6	RSJD Surakarta	-	-	-	3.382.048.800,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	1.060.892.239,00
8	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	-	-	-	199.430.000,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	1.750.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	429.799.000,00	429.165.000,00	99,85	422.400.000,00
11	Dinas LH & Kehutanan	-	-	-	1.990.441.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	247.500.000,00	196.122.324,00	79,24	192.500.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	249.282.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	77.500.000,00	74.250.000,00	95,81	21.881.800,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	517.270.000,00	515.652.500,00	99,69	1.393.986.500,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	220.048.000,00	218.539.500,00	99,31	65.311.400,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.712.380.000,00	3.459.809.250,00	93,20	6.750.470.000,00
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	23.750.000,00
19	Badan Pengembangan SDM	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.456.500.000,00</b>	<b>8.031.608.371,00</b>	<b>94,98</b>	<b>18.367.778.434,00</b>

Realisasi pada RSUD Kelet/Donorojo Jepara hanya sebesar Rp39.875.000,00 atau 56,96% dikarenakan keterlambatan klaim BPJS.

#### 5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat Keamanan

**Rp67.720.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp67.720.000,00 atau 99,93% dari anggaran Rp67.770.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp646.777.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
2	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	-	-	-	45.429.500,00
3	Dinas Perhubungan	38.770.000,00	38.770.000,00	100,00	598.147.785,00
4	Dinas Kominfo	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	-



5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	3.200.000,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>67.770.000,00</b>	<b>67.720.000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>646.777.285,00</b>

#### 5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Komputer

**Rp35.963.139.904,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35.963.139.904,00 atau 96,47% dari anggaran Rp37.278.284.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	2.966.211.000,00	2.929.863.300,00	98,77	32.589.604.280,00
2	Dinas Kesehatan	1.278.327.000,00	1.236.110.840,00	96,70	648.761.110,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	1.296.147.000,00	1.159.008.000,00	89,42	1.327.477.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	2.237.756.000,00	2.190.643.700,00	97,89	4.780.346.051,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	272.000.000,00	271.935.000,00	99,98	317.725.000,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	20.000.000,00	13.078.560,00	65,39	35.694.040,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	582.777.000,00	434.200.000,00	74,51	481.050.000,00
8	RSJD Surakarta	220.000.000,00	121.416.764,00	55,19	78.149.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	117.164.000,00	115.612.820,00	98,68	697.980.000,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	496.900.000,00	487.030.000,00	98,01	804.637.000,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	474.892.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	168.060.000,00	166.738.000,00	99,21	173.150.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	248.050.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.500.000,00	98.000.000,00	99,49	150.350.000,00
15	Dinas Sosial	137.600.000,00	130.130.000,00	94,57	1.852.911.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	681.596.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.150.000,00	106.150.000,00	100,00	392.570.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	150.315.000,00
19	Dinas LH & Kehutanan	452.772.000,00	450.641.700,00	99,53	994.507.750,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	675.300.000,00	624.642.700,00	92,50	55.900.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	225.800.000,00	225.799.000,00	100,00	360.598.500,00
22	Dinas Perhubungan	75.000.000,00	71.930.000,00	95,91	206.955.000,00
23	Dinas Kominfo	18.284.163.000,00	17.684.767.600,00	96,72	18.450.848.500,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	163.150.000,00	160.470.000,00	98,36	255.950.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	-	-	-	379.825.000,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	-	-	1.358.209.160,00
27	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	578.770.650,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	348.919.515,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	801.171.000,00	799.838.000,00	99,83	201.233.000,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	496.250.000,00	491.885.000,00	99,12	270.238.650,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.026.192.000,00	1.006.471.120,00	98,08	1.074.748.100,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	254.982.000,00	250.842.000,00	98,38	438.745.500,00
33	Sekretariat Daerah	1.813.340.000,00	1.804.681.220,00	99,52	4.449.942.520,00
34	Sekretariat DPRD	427.142.000,00	424.487.000,00	99,38	2.153.300.000,00
35	Inspektorat	150.712.000,00	150.425.000,00	99,81	197.725.000,00
36	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	492.586.000,00	492.345.800,00	99,95	421.451.360,00
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	409.850.000,00	379.550.000,00	92,61	10.591.026.600,00
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	603.000.000,00	587.705.500,00	97,46	2.446.781.000,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	839.500.000,00	806.959.280,00	96,12	276.164.000,00
40	Badan Pengembangan SDM	82.782.000,00	82.782.000,00	100,00	347.715.000,00
41	Badan Penghubung	-	-	-	96.717.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.278.284.000,00</b>	<b>35.963.139.904,00</b>	<b>96,47</b>	<b>91.841.529.286,00</b>

Realisasi Tahun 2020 pada RSJD Surakarta hanya tercapai sebesar Rp121.416.764,00 atau 55,19% dikarenakan untuk dana dari APBD kebutuhan sudah terpenuhi, namun untuk dana BLUD terdapat penyesuaian Anggaran Belanja sebesar 43% karena terjadi *refocussing* pendapatan.

#### 5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Peraga

**Rp500.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	23.839.722.285,00
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.839.722.285,00</b>

#### 5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Peralatan Olah Raga

**Rp3.300.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.300.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp3.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.879.600,00</b>



### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**Rp195.773.603.473,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% dari anggaran Rp216.372.410.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	64.517.285.000,00	57.881.343.156,00	89,71	56.295.173.243,00
2	Dinas Kesehatan	2.965.505.000,00	2.176.521.212,00	73,39	8.056.978.307,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	73.967.000.000,00	70.765.420.754,00	95,67	16.331.682.600,00
4	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	42.000.000.000,00	34.316.996.000,00	81,71	6.344.613.442,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.195.000.000,00	389.605.000,00	32,60	6.540.182.000,00
6	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	800.000.000,00	775.430.000,00	96,93	485.570.200,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	500.000.000,00	494.784.000,00	98,96	1.629.633.053,00
8	RSJD Surakarta	-	-	-	10.749.541.820,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.619.500.000,00	1.467.594.500,00	90,62	607.228.946,00
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	8.863.614.000,00	8.491.434.487,00	95,80	98.191.000,00
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	185.000.000,00	184.049.000,00	99,49	1.183.115.000,00
12	Dinas Sosial	-	-	-	11.083.309.150,00
13	Dinas LH & Kehutanan	496.101.000,00	483.968.400,00	97,55	2.903.279.500,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	119.942.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.933.264.000,00	1.910.707.750,00	98,83	16.900.372.912,00
16	Dinas Koperasi dan UKM	1.220.000.000,00	1.131.325.264,00	92,73	1.908.069.632,00
17	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	-	-	-	227.374.600,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	7.297.031.000,00	6.684.778.000,00	91,61	359.908.106.250,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	847.521.000,00	816.419.800,00	96,33	6.875.927.873,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.176.289.000,00	1.148.189.532,00	97,61	5.164.249.100,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.382.110.000,00	4.357.945.775,00	99,45	13.119.754.944,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	294.148.000,00	293.757.415,00	99,87	7.530.566.009,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	344.249.000,00	343.482.228,00	99,78	1.227.201.303,00
24	Sekretariat DPRD	1.083.501.000,00	1.007.855.000,00	93,02	942.658.200,00
25	Inspektorat	197.010.000,00	197.010.000,00	100,00	-
26	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	23.925.000,00	95,70	403.587.887,00
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	257.460.000,00	229.451.200,00	89,12	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	86.262.000,00	85.745.000,00	99,40	954.496.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	100.000.000,00	96.305.000,00	96,31	1.108.673.202,00
30	Badan Penghubung	19.560.000,00	19.560.000,00	100,00	671.408.898,00
	<b>Jumlah</b>	<b>216.372.410.000,00</b>	<b>195.773.603.473,00</b>	<b>90,48</b>	<b>539.370.887.071,00</b>

### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Rp177.713.123.124,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% dari anggaran Rp193.270.690.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 Rp566.705.770.028,00 dengan rincian sebagai berikut :





(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Jalan dan Jembatan	160.044.083.000,00	156.056.067.646,00	97,51	415.390.167.999,00
2	Belanja Bangunan Air (Irigasi)	15.908.122.000,00	4.586.358.828,00	28,83	115.738.207.924,00
3	Belanja Instalansi dan Jaringan	17.318.485.000,00	17.070.696.650,00	98,57	35.577.394.105,00
	<b>Jumlah</b>	<b>193.270.690.000,00</b>	<b>177.713.123.124,00</b>	<b>91,95</b>	<b>566.705.770.028,00</b>

#### 5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

**Rp 156.056.067.646,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp156.056.067.646,00 atau 97,51% dari anggaran Rp160.044.083.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 415.390.167.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	156.949.783.000,00	153.809.996.646,00	98,00	413.836.255.699,00
2	Dinas LH & Kehutanan	-	-	-	264.380.000,00
3	Dinas Perhubungan	-	-	-	198.191.300,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.094.300.000,00	2.246.071.000,00	72,59	777.161.000,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	314.180.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>160.044.083.000,00</b>	<b>156.056.067.646,00</b>	<b>97,51</b>	<b>415.390.167.999,00</b>

#### 5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

**Rp4.586.358.828,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.586.358.828,00 atau 28,83% dari anggaran Rp15.908.122.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp115.738.207.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	12.657.132.000,00	3.174.244.803,00	25,08	105.825.086.124,00
2	Dinas LH & Kehutanan	-	-	-	385.377.000,00
3	Dinas Perhubungan	45.680.000,00	45.680.000,00	100,00	-
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	-	-	727.971.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.944.807.000,00	107.717.200,00	5,54	6.023.855.000,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	268.255.000,00	266.494.375,00	99,34	1.389.400.000,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.000.000,00	14.979.250,00	99,86	139.299.000,00
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	977.248.000,00	977.243.200,00	100,00	1.247.219.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.908.122.000,00</b>	<b>4.586.358.828,00</b>	<b>28,83</b>	<b>115.738.207.924,00</b>

Realisasi tahun 2020 yang tidak mencapai target antara lain:

1. Dinas PSDA dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp3.174.244.803,00 atau 25,98% dikarenakan *refocussing* karena Pandemi *Covid-19* dan anggaran DAK yang tidak dilaksanakan karena waktunya mendekati akhir tahun anggaran.



2. Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp107.717.200,00 atau 5,54% untuk perencanaan dan dikarenakan pengadaan DAK yang tidak terlaksana waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak mencukupi.

#### 5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan

**Rp 17.070.696.650,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp Rp 17.070.696.650,00 atau 98,57% dari anggaran Rp17.318.485.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.577.394.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kesehatan	58.750.000,00	56.735.000,00	96,57	-
2	RSUD Moewardi Surakarta	3.000.000.000,00	2.831.788.400,00	94,39	1.334.237.500,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	50.000.000,00	38.500.000,00	77,00	38.500.000,00
4	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-	-	1.359.458.669,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	1.855.722.000,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-	-	802.845.620,00
7	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	10.939.639.000,00	10.909.557.400,00	99,73	16.850.368.963,00
8	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	-	-	37.108.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	48.623.000,00	48.621.100,00	100,00	-
10	Dinas Perhubungan	2.856.700.000,00	2.823.487.000,00	98,84	11.494.428.003,00
11	Dinas Kominfo	13.344.000,00	12.000.000,00	89,93	-
12	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	72.916.000,00	72.915.700,00	100,00	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	126.281.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	42.000.000,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	343.145.000,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	278.513.000,00	277.092.050,00	99,49	975.049.350,00
17	Badan Pengembangan SDM	-	-	-	318.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.318.485.000,00</b>	<b>17.070.696.650,00</b>	<b>98,57</b>	<b>35.577.394.105,00</b>

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

**Rp113.376.388.074,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% dari anggaran Rp122.200.465.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Buku Perpustakaan	120.972.505.000,00	112.305.997.964,00	92,84	132.649.631.317,00
2	Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	654.000.000,00	514.303.200,00	78,64	1.162.431.000,00
3	Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00	2.316.679.500,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	549.160.000,00	531.286.910,00	96,75	1.229.421.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>122.200.465.000,00</b>	<b>113.376.388.074,00</b>	<b>92,78</b>	<b>137.358.163.317,00</b>



#### 5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Buku Perpustakaan

**Rp112.305.997.964,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp112.305.997.964,00 atau 92,84% dari anggaran Rp120.972.505.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.649.631.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	120.825.885.000,00	112.162.032.314,00	92,83	131.383.591.603,00
2	RSUD Moewardi Surakarta	10.000.000,00	9.884.000,00	98,84	9.828.000,00
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	19.917.534,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	5.000.000,00	2.575.000,00	51,50	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.820.000,00	22.754.500,00	99,71	22.700.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1.800.000,00
7	Dinas Sosial	33.700.000,00	33.700.000,00	100,00	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.551.000,00	5.551.000,00	100,00	25.621.240,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	1.786.000,00
10	Dinas LH & Kehutanan	5.440.000,00	5.429.000,00	99,80	21.619.400,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	-	-	-	2.460.000,00
12	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	26.522.340,00
13	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	916.873.600,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.780.000,00	11.743.450,00	99,69	34.400.500,00
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	9.830.000,00
17	Sekretariat Daerah	9.903.000,00	9.903.000,00	100,00	44.875.000,00
18	Sekretariat DPRD	-	-	-	67.750.000,00
19	Inspektorat	1.941.000,00	1.940.700,00	99,98	4.976.100,00
20	Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah	6.985.000,00	6.985.000,00	100,00	30.800.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	3.080.000,00
22	Badan Pengembangan SDM	-	-	-	21.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>120.972.505.000,00</b>	<b>112.305.997.964,00</b>	<b>92,84</b>	<b>132.649.631.317,00</b>

#### 5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Budaya

**Rp514.303.200,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp514.303.200,00 atau 78,64% dari anggaran Rp654.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.162.431.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	600.000.000,00	460.803.200,00	76,80	791.939.000,00
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
3	Dinas Sosial	-	-	-	23.630.000,00



4	Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata	-	-	-	49.100.000,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	26.000.000,00	25.500.000,00	98,08	-
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	297.762.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>654.000.000,00</b>	<b>514.303.200,00</b>	<b>78,64</b>	<b>1.162.431.000,00</b>

#### 5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan, Ternak dan Tanaman **Rp24.800.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.800.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp24.800.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.316.679.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas LH & Kehutanan	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00	-
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	2.316.679.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.800.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.316.679.500,00</b>

#### 5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi **Rp531.286.910,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp531.286.910,00 atau 96,75% dari anggaran Rp549.160.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	500.000.000,00	482.226.910,00	96,45	-
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	211.902.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	8.330.000,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	49.160.000,00	49.060.000,00	99,80	1.009.189.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>549.160.000,00</b>	<b>531.286.910,00</b>	<b>96,75</b>	<b>1.229.421.500,00</b>

#### 5.1.2.2.6. Belanja Aset Tak Berwujud **Rp859.119.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% dari anggaran Rp1.089.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dinas Kesehatan	295.000.000,00	288.690.000,00	97,86	139.140.000,00
2	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	-	-	-	199.600.000,00
3	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	267.500.000,00	49.500.000,00	18,50	234.200.000,00
4	RSJD Surakarta	-	-	-	3.739.201.500,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	189.500.000,00
6	Dinas Sosial	25.000.000,00	24.880.000,00	99,52	20.000.000,00
7	Dinas Kominfo	54.850.000,00	52.645.000,00	95,98	402.891.000,00
8	Dinas Koperasi dan UKM	96.750.000,00	95.559.000,00	98,77	76.835.000,00
9	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	176.500.000,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	109.653.500,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	350.000.000,00	347.845.000,00	99,38	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.089.100.000,00</b>	<b>859.119.000,00</b>	<b>78,88</b>	<b>5.287.521.000,00</b>

#### 5.1.2.2.7. Belanja Modal BLUD

**Rp235.898.511.383,00**

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp996.994.505.160,00 termasuk didalamnya adalah belanja modal dari sumber dana BLUD sebesar Rp235.898.511.383,00 atau 92,30% dari anggaran Rp255.587.343.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>1</b>	<b>RSUD Moewardi</b>				
1	Alat-alat Angkutan	399.000.000,00	388.960.000,00	97,48	-
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.481.000.000,00	2.351.356.000,00	94,77	2.603.247.200,00
3	Alat-alat Kedokteran	39.589.037.000,00	38.387.444.252,00	96,96	9.055.319.112,00
4	Alat-alat Komputer	1.296.147.000,00	1.159.008.000,00	89,42	1.327.477.000,00
5	Bangunan Gedung	73.967.000.000,00	70.765.420.754,00	95,67	7.908.737.600,00
6	Instalasi	695.486.000,00	695.486.000,00	100,00	1.079.882.500,00
7	Jaringan	2.304.514.000,00	2.136.302.400,00	92,70	254.355.000,00
8	Buku Perpustakaan	10.000.000,00	9.884.000,00	98,84	9.828.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>120.742.184.000,00</b>	<b>115.893.861.406,00</b>	<b>95,98</b>	<b>22.238.846.412,00</b>
<b>2</b>	<b>RSUD Margono Soekardjo</b>				
1	Alat-alat Besar	-	-	-	189.014.400,00
2	Alat-alat Angkutan	-	-	-	8.085.000,00
3	Alat-alat Bengkel	198.825.000,00	197.946.000,00	99,56	39.819.060,00
4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	-	10.400.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3.963.566.000,00	3.571.889.578,00	90,12	2.882.699.708,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	2.026.592.900,00
7	Alat-alat Kedokteran	30.072.559.000,00	28.473.421.797,00	94,68	19.146.196.760,00
8	Alat-alat Laboratorium	420.000.000,00	375.000.000,00	89,29	50.538.798,00
9	Alat-alat Komputer	2.237.756.000,00	2.190.643.700,00	97,89	4.780.346.051,00
10	Rambu-rambu	-	-	-	95.000.000,00
11	Peralatan Olah Raga	-	-	-	15.879.600,00
12	Bangunan Gedung	42.000.000.000,00	34.316.996.000,00	81,71	6.344.613.442,00
13	Buku Perpustakaan	-	-	-	19.917.534,00
14	Aset Tak Berwujud	-	-	-	199.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.892.706.000,00</b>	<b>69.125.897.075,00</b>	<b>87,62</b>	<b>35.808.703.253,00</b>
<b>3</b>	<b>RSUD Tugurejo</b>				



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Alat-alat Angkutan	44.102.000,00	44.101.750,00	100,00	37.961.000,00
2	Alat-alat Bengkel	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	17.334.400,00
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	623.898.000,00	606.426.923,00	97,20	532.944.080,00
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	473.500.000,00	473.407.050,00	99,98	51.702.000,00
5	Alat-alat Kedokteran	24.490.832.000,00	24.255.301.376,00	99,04	436.862.400,00
6	Alat-alat Komputer	272.000.000,00	271.935.000,00	99,98	317.725.000,00
7	Bangunan Gedung	1.195.000.000,00	389.605.000,00	32,60	798.852.000,00
8	Instalasi	50.000.000,00	38.500.000,00	77,00	38.500.000,00
9	Buku Perpustakaan	5.000.000,00	2.575.000,00	51,50	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27.163.832.000,00</b>	<b>26.091.352.099,00</b>	<b>96,05</b>	<b>2.231.880.880,00</b>
<b>4</b>	<b>RSUD Kelet</b>				
1	Alat-alat Angkutan	15.000.000	8.918.600	59,46	-
2	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.500.000	715.000	47,67	-
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000.000	309.169.020	61,83	335.386.962,00
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	6.000.000	3.800.000	63,33	12.773.650,00
5	Alat-alat Kedokteran	5.060.000.000	4.560.971.657	90,14	44.201.000,00
6	Alat-alat Laboratorium	70.000.000	39.875.000	56,96	35.694.040,00
7	Alat-alat Komputer	20.000.000	13.078.560	65,39	-
8	Bangunan Gedung	800.000.000	775.430.000	96,93	485.570.200,00
9	Instalasi	-	-	-	246.620.000,00
10	Jaringan	-	-	-	1.112.838.669,00
11	Aset Tak Berwujud	267.500.000	49.500.000	18,50	234.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.740.000.000,00</b>	<b>5.761.457.837,00</b>	<b>85,48</b>	<b>2.507.284.521,00</b>
<b>5</b>	<b>RSJ Amino</b>				
1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.873.228.000	1.558.738.050	83,21	914.754.350,00
2	Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	20.000.000,00
3	Alat-alat Kedokteran	10.353.042.000	8.728.861.888	84,31	2.819.805.258,00
4	Alat-alat Laboratorium	257.650.000	257.174.800	99,82	-
5	Alat-alat Komputer	582.777.000	434.200.000	74,51	572.369.100,00
6	Bangunan Gedung	500.000.000	494.784.000	98,96	1.182.113.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.566.697.000,00</b>	<b>11.473.758.738,00</b>	<b>84,57</b>	<b>5.509.041.708,00</b>
<b>6</b>	<b>RSJ Surakarta</b>				
1	Alat-alat Angkutan	-	-	-	407.500.000,00
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	353.120.000	191.179.604	54,14	112.523.326,00
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	50.000.000	19.609.500	39,22	14.996.000,00
4	Alat-alat Kedokteran	1.388.868.000	1.136.079.719	81,80	4.245.000,00
5	Alat-alat Komputer	220.000.000	121.416.764	55,19	78.149.000,00
6	Bangunan Gedung	-	-	-	298.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.011.988.000,00</b>	<b>1.468.285.587,00</b>	<b>72,98</b>	<b>915.413.326,00</b>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<b>7</b>	<b>RSJ Soedjarwadi Klaten</b>				
1	Alat-alat Angkutan	1.106.773.000	1.077.596.740	97,36	1.600.000,00
2	Alat-alat Bengkel	731.750.000	682.566.375	93,28	7.282.000,00
3	Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	-	2.882.060,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.554.821.000	1.534.105.596	98,67	559.107.100,00
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	16.500.000	16.294.000	98,75	-
6	Alat-alat Kedokteran	1.288.378.000	1.155.078.610	89,65	1.800.181.040,00
7	Alat-alat Laboratorium	3.750.000	3.750.000	100,00	-
8	Alat-alat Komputer	117.164.000	115.612.820	98,68	225.080.000,00
9	Peralatan Olah Raga	3.300.000	3.300.000	100,00	-
10	Bangunan Gedung	1.483.900.000	1.341.604.500	90,41	607.228.946,00
11	Tugu Titik Kontrol / Pasti	135.600.000	125.990.000	92,91	-
12	Instalasi	-	-	-	802.845.620,00
13	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	28.000.000	28.000.000	100,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.469.936.000,00</b>	<b>6.083.898.641,00</b>	<b>94,03</b>	<b>4.006.206.766,00</b>
<b>TOTAL BLUD</b>					
1	Alat-alat Angkutan	1.564.875.000,00	1.519.577.090,00	97,11	455.146.000,00
2	Alat-alat Bengkel	940.075.000,00	890.012.375,00	94,67	64.435.460,00
3	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.500.000,00	715.000,00	47,67	13.282.060,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	11.349.633.000,00	10.122.864.771,00	89,19	7.940.662.726,00
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	546.000.000,00	513.110.550,00	93,98	2.126.064.550,00
6	Alat-alat Kedokteran	112.242.716.000,00	106.697.159.299,00	95,06	33.306.810.570,00
7	Alat-alat Laboratorium	751.400.000,00	675.799.800,00	89,94	86.232.838,00
8	Alat-alat Komputer	4.745.844.000,00	4.305.894.844,00	90,73	7.301.146.151,00
9	Peralatan Olah Raga	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	15.879.600,00
10	Bangunan Gedung	119.945.900.000,00	108.083.840.254,00	90,11	17.625.115.188,00
11	Tugu Titik Kontrol / Pasti	135.600.000,00	125.990.000,00	92,91	-
12	Instalasi	745.486.000,00	733.986.000,00	98,46	2.167.848.120,00
13	Jaringan	2.304.514.000,00	2.136.302.400,00	92,70	1.367.193.669,00
14	Buku Perpustakaan	15.000.000,00	12.459.000,00	83,06	29.745.534,00
15	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-
16	Aset Tak Berwujud	267.500.000,00	49.500.000,00	18,50	433.800.000,00
	<b>JUMLAH BM BLUD</b>	<b>255.587.343.000,00</b>	<b>235.898.511.383,00</b>	<b>92,30</b>	<b>73.217.376.866,00</b>

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

**Rp1.783.884.978.571,00**

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan



sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. Secara keseluruhan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp1.783.884.978.571,00 atau 97,25%.

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Tak Terduga	1.834.243.841.000,00	1.783.884.978.571,00	97,25	2.662.431.206,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.834.243.841.000,00</b>	<b>1.783.884.978.571,00</b>	<b>97,25</b>	<b>2.662.431.206,00</b>

Dalam Belanja Tidak Terduga tersebut, terdiri dari realisasi untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yaitu sejumlah Rp1.080.000.000,00, serta realisasi BTT guna penanganan dampak Pandemi *Covid-19* di Jawa Tengah yang terealisasi sebesar Rp1.782.804.978.571,00 (97,25%). Realisasi BTT penanganan *Covid-19* untuk Penanganan Kesehatan terealisasi sebesar Rp374.185.167.026 (94,83%) diampu 8 SKPD, dalam Penanganan Dampak Ekonomi terealisasi sebesar Rp69.250.475.945 (71,83%) diampu 5 SKPD, dan guna Penyediaan *Social Safety Net/Jaring* Pengamanan Sosial terealisasi sebesar Rp1.339.369.335.600 (99,78%) diampu 3 SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>Penanganan Kesehatan</b>			
1	Dinas Kesehatan	383.944.445.000,00	368.716.154.270,00	96,03
2	RSUD Moewardi Surakarta	980.581.000,00	911.133.536,00	92,92
3	RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto	1.000.000.000,00	905.088.000,00	90,51
4	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	1.000.000.000,00	941.627.273,00	94,16
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.000.000.000,00	722.274.729,00	72,23
6	RSJD Surakarta	1.000.000.000,00	996.306.005,00	99,63
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.000.000.000,00	988.670.713,00	98,87
8	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya	4.645.000.000,00	3.912.500,00	0,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>394.570.026.000,00</b>	<b>374.185.167.026,00</b>	<b>94,83</b>
<b>B</b>	<b>Penanganan Dampak Ekonomi</b>			
1	Dinas Koperasi dan UKM	52.251.565.000,00	26.044.678.000,00	49,84
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.213.137.000,00	2.120.746.300,00	95,83
3	Dinas Ketahanan Pangan	8.750.000.000,00	8.729.858.245,00	99,77
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	25.677.125.000,00	24.839.443.400,00	96,74
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil	7.515.750.000,00	7.515.750.000,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>96.407.577.000,00</b>	<b>69.250.475.945,00</b>	<b>71,83</b>
<b>C</b>	<b>Penyediaan <i>Social Safety Net/Jaring</i></b>			





NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>Pengamanan Sosial</b>			
1	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.215.200.000,00	1.213.378.000	99,85
2	Dinas Sosial	1.325.664.858.000,00	1.323.474.058.800,00	99,83
3	Badan Penghubung	15.386.180.000,00	14.681.898.800,00	95,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.342.266.238.000,00</b>	<b>1.339.369.335.600,00</b>	<b>99,78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.833.243.841.000,00</b>	<b>1.782.804.978.571</b>	<b>97,25</b>

Adapun dalam penanganan dampak Covid-19 sesuai tupoksinya, SKPD melaksanakan kegiatan prioritas berdasarkan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

PRIORITAS / SKPD / URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PENANGANAN KESEHATAN</b>		<b>394.570.026.000,00</b>	<b>374.185.167.026,00</b>	<b>94.83</b>
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>383.944.445.000,00</b>	<b>368.716.154.270,00</b>	<b>96.03</b>
1	Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Laboratorium	375.353.976.400,00	363.398.262.640,00	96.81
2	Kebutuhan karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov	4.759.393.600,00	2.573.535.800,00	54.07
3	Revitalisasi Rumah sakit Rujukan PDP perbatasan Jateng - Jatim	400.000.000,00	387.760.000,00	96.94
4	Insentif Tenaga Kesehatan	1.793.075.000,00	892.895.830,00	49.8
5	Open Recruitment relawan kesehatan	1.638.000.000,00	1.463.700.000,00	89.36
<b>RSUD Dr. Moewardi</b>		<b>980.581.000,00</b>	<b>911.133.536,00</b>	<b>92.92</b>
1	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	980.581.000,00	911.133.536,00	92.92
<b>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>905.088.000,00</b>	<b>90.51</b>
1	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	1.000.000.000,00	905.088.000,00	90.51
<b>RSUD Kelet Donorejo</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>941.627.273,00</b>	<b>94.16</b>
1	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	1.000.000.000,00	941.627.273,00	94.16
<b>RSJD Dr. Amino Gondohutomo</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>722.274.729,00</b>	<b>72.23</b>
1	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	1.000.000.000,00	722.274.729,00	72.23
<b>RSJD Surakarta</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>996.306.005,00</b>	<b>99.63</b>
1	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	1.000.000.000	996.306.005,00	99.63
<b>RSJD Dr. RM. Soedjarwadi</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>988.670.713,00</b>	<b>98.87</b>
1	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	1.000.000.000,00	988.670.713,00	98.87
<b>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya</b>		<b>4.645.000.000,00</b>	<b>3.912.500,00</b>	<b>0.08</b>
1	Revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina	4.645.000.000,00	3.912.500,00	0.08
<b>PENANGANAN DAMPAK EKONOMI</b>		<b>96.407.577.000,00</b>	<b>69.250.475.945,00</b>	<b>71.83</b>
<b>Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>		<b>52.251.565.000,00</b>	<b>26.044.678.000,00</b>	<b>49.84</b>



PRIORITAS / SKPD / URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Subsidi bagi KUMKM terdampak	38.568.750.000,00	15.359.842.000,00	39.82
2	Pembuatan 3 juta masker	13.682.815.000,00	10.684.836.000,00	78.09
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil</b>		<b>7.515.750.000,00</b>	<b>7.515.750.000,00</b>	<b>100</b>
1	Dukungan operasional petugas pendamping desa	7.515.750.000,00	7.515.750.000,00	100
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>		<b>25.677.125.000,00</b>	<b>24.839.443.400,00</b>	<b>96.74</b>
1	Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan kepala keluarga	25.677.125.000,00	24.839.443.400,00	96.74
<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>		<b>8.750.000.000,00</b>	<b>8.729.858.245,00</b>	<b>99.77</b>
1	Bantuan biaya Distribusi pangan strategis antar waktu dan antara wilayah (dari daerah produsen ke konsumen)	450.000.000,00	449.899.850,00	99.98
2	Tambahan Cadangan pangan pemerintah provinsi Jateng	4.800.000.000,00	4.797.044.870,00	99.94
3	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (OPP) untuk penyediaan bibit dan sarpras pangan mandiri bagi Rumah tangga secara berkelanjutan (3-4 bulan panen)	3.500.000.000,00	3.482.913.525,00	99.51
<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>		<b>2.213.137.000,00</b>	<b>2.120.746.300,00</b>	<b>95.83</b>
1	Pembuatan Baju Alat Pelindung Diri dan Perakitan Masker	126.750.000,00	125.850.000,00	99.29
2	Peningkatan kapabilitas IKM Agro - Peningkatan kemampuan industri	306.387.000,00	305.080.000,00	99.57
3	Peningkatan kapabilitas IKM Non Agro - Bimtek industri tekstil	680.000.000,00	599.749.000,00	88.2
4	Peningkatan kapabilitas IKM Agro - Bantuan row material	700.000.000,00	697.780.000,00	99.68
5	Peningkatan kapabilitas IKM Non Agro - Fasilitas material industri logam	400.000.000,00	392.287.300,00	98.07
<b>PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/JARING PENGAMANAN SOSIAL</b>		<b>1.342.266.238.000,00</b>	<b>1.339.369.335.600,00</b>	<b>99.78</b>
<b>Dinas Sosial</b>		<b>1.325.664.858.000,00</b>	<b>1.323.474.058.800,00</b>	<b>99.83</b>
1	Bantuan pangan masyarakat terdampak Covid 19	1.313.533.199.000,00	1.311.353.400.000,00	99.83
2	Penanganan kelompok rentan dalam panti Pemprov	824.357.000,00	824.356.800,00	100
3	Penanganan kelompok rentan di panti swasta	1.754.836.000,00	1.754.836.000,00	100
4	Pencegahan penyebaran COVID 19 di panti milik Pemprov	739.368.000,00	739.368.000,00	100
5	Pencegahan penyebaran COVID 19 di panti milik swasta	4.662.848.000,00	4.662.848.000,00	100
6	Bantuan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	3.452.000.000,00	3.441.000.000,00	99.68
7	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	698.250.000,00	698.250.000,00	100
<b>Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana</b>		<b>1.215.200.000,00</b>	<b>1.213.378.000,00</b>	<b>99.85</b>



PRIORITAS / SKPD / URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Daerah				
1	Logistik Permakanan/Posko Logistik	1.215.200.000,00	1.213.378.000,00	99.85
<b>Badan Penghubung</b>		<b>15.386.180.000,00</b>	<b>14.681.898.800,00</b>	<b>95.42</b>
1	Bantuan bagi warga Jawa Tengah terdampak Covid di Jabodetabek	15.386.180.000,00	14.681.898.800,00	95.42
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>1.833.243.841.000,00</b>	<b>1.782.804.978.571,00</b>	<b>97.25</b>

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan kepada Kab/Kota **Rp6.646.872.581.129,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.646.872.581.129,00 atau 87,81% dari anggaran Rp7.569.240.201.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.694.126.862.918,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	5.399.670.659.000,00	4.633.245.749.888,00	85.81	5.248.472.302.270,00
2	Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	981.881.906.000,00	845.543.195.241,00	86.11	1.050.456.112.049,00
3	Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	1.187.687.636.000,00	1.168.083.636.000,00	98.35	1.361.431.049.000,00
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	19.767.399.599,00
5	Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya	-	-	-	14.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.569.240.201.000,00</b>	<b>6.646.872.581.129,00</b>	<b>87.81</b>	<b>7.694.126.862.918,00</b>

#### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota **Rp 4.633.245.749.888,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.633.245.749.888,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.248.472.302.270,00 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Bagi Hasil PKB	1.191.618.866.991,00	1.398.659.320.759,00
2	Bagi Hasil BBNKB	610.764.467.821,00	1.026.959.259.108,00
3	Bagi Hasil PBBKB	1.001.413.676.213,00	1.457.178.571.387,00
4	Bagi Hasil PAP	6.967.561.815,00	7.232.918.912,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	1.822.481.177.048,00	1.358.409.102.104,00
6	Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat	-	33.130.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.633.245.749.888,00</b>	<b>5.248.472.302.270,00</b>

#### 5.1.2.4.1.1 Bagi Hasil PKB **Rp1.191.618.866.991,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.191.618.866.991,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.398.659.320.759,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- **LRA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Kabupaten Semarang	39.876.628.576,00	48.028.582.771,00
2	Kabupaten Kendal	29.014.406.937,00	34.183.462.661,00
3	Kabupaten Demak	34.079.110.387,00	36.151.727.700,00
4	Kabupaten Grobogan	35.746.594.488,00	40.790.218.515,00
5	Kabupaten Pati	45.170.524.580,00	50.978.511.146,00
6	Kabupaten Kudus	36.000.107.960,00	41.715.306.227,00
7	Kabupaten Jepara	34.076.743.588,00	38.741.106.973,00
8	Kabupaten Rembang	20.363.619.272,00	23.957.232.931,00
9	Kabupaten Blora	24.531.467.300,00	27.962.584.629,00
10	Kabupaten Pekalongan	20.352.825.235,00	24.187.724.877,00
11	Kabupaten Batang	18.577.750.640,00	22.635.461.416,00
12	Kabupaten Pemalang	30.544.515.640,00	36.149.062.712,00
13	Kabupaten Tegal	28.356.323.471,00	34.639.814.050,00
14	Kabupaten Brebes	36.873.320.879,00	44.691.001.460,00
15	Kabupaten Banyumas	48.392.433.896,00	58.301.509.984,00
16	Kabupaten Cilacap	48.958.862.318,00	57.705.015.670,00
17	Kabupaten Purbalingga	24.589.643.223,00	29.529.105.058,00
18	Kabupaten Banjarnegara	21.268.521.936,00	25.277.805.961,00
19	Kabupaten Magelang	33.198.302.424,00	39.305.491.181,00
20	Kabupaten Temanggung	19.524.494.421,00	23.115.045.760,00
21	Kabupaten Wonosobo	21.063.560.702,00	24.918.499.835,00
22	Kabupaten Purworejo	22.377.572.157,00	26.237.251.561,00
23	Kabupaten Kebumen	30.088.085.262,00	34.990.646.828,00
24	Kabupaten Klaten	44.059.970.189,00	51.558.423.653,00
25	Kabupaten Boyolali	30.448.188.253,00	34.038.573.070,00
26	Kabupaten Sragen	34.995.324.248,00	39.995.939.032,00
27	Kabupaten Sukoharjo	33.731.254.299,00	39.184.801.961,00
28	Kabupaten Karanganyar	33.408.309.494,00	38.688.378.502,00
29	Kabupaten Wonogiri	29.854.465.414,00	34.294.560.718,00
30	Kota Semarang	163.869.788.472,00	198.465.517.962,00
31	Kota Pekalongan	17.730.566.441,00	21.423.169.984,00
32	Kota Surakarta	51.298.779.797,00	62.604.750.572,00
33	Kota Salatiga	13.866.900.976,00	15.921.461.921,00
34	Kota Tegal	17.408.283.212,00	18.074.741.763,00
35	Kota Magelang	17.921.620.904,00	20.216.831.715,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.191.618.866.991,00</b>	<b>1.398.659.320.759,00</b>

**5.1.2.4.1.2 Bagi Hasil BBNKB**

**Rp610.764.467.821,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp610.764.467.821,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.026.959.259.108,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Kabupaten Semarang	18.941.503.589,00	33.144.633.560,00
2	Kabupaten Kendal	17.201.832.417,00	29.061.627.034,00
3	Kabupaten Demak	22.772.331.677,00	37.835.876.141,00
4	Kabupaten Grobogan	20.481.086.717,00	33.431.401.162,00
5	Kabupaten Pati	24.924.100.491,00	39.412.679.236,00
6	Kabupaten Kudus	18.679.485.831,00	30.674.441.807,00
7	Kabupaten Jepara	21.797.842.955,00	34.574.528.496,00
8	Kabupaten Rembang	10.799.442.923,00	18.389.347.264,00
9	Kabupaten Blora	12.069.869.794,00	18.197.130.254,00
10	Kabupaten Pekalongan	12.824.286.804,00	21.545.413.209,00
11	Kabupaten Batang	11.699.068.234,00	19.405.373.659,00
12	Kabupaten Pemalang	18.337.026.324,00	29.782.242.235,00
13	Kabupaten Tegal	19.871.660.877,00	33.511.777.595,00
14	Kabupaten Brebes	22.304.298.656,00	34.731.506.108,00
15	Kabupaten Banyumas	23.497.774.416,00	40.474.093.858,00
16	Kabupaten Cilacap	26.253.861.143,00	43.123.568.302,00
17	Kabupaten Purbalingga	10.806.909.375,00	19.018.701.352,00
18	Kabupaten Banjarnegara	11.282.396.705,00	18.422.694.882,00
19	Kabupaten Magelang	17.663.939.474,00	28.510.922.534,00
20	Kabupaten Temanggung	9.356.651.123,00	15.441.835.221,00
21	Kabupaten Wonosobo	10.690.933.349,00	17.090.130.860,00
22	Kabupaten Purworejo	9.974.985.095,00	16.436.647.565,00
23	Kabupaten Kebumen	14.730.085.880,00	24.353.225.229,00
24	Kabupaten Klaten	21.969.308.458,00	37.015.150.923,00
25	Kabupaten Boyolali	15.530.327.579,00	27.585.011.761,00
26	Kabupaten Sragen	16.431.598.860,00	28.503.954.487,00
27	Kabupaten Sukoharjo	17.758.549.871,00	30.668.787.130,00
28	Kabupaten Karanganyar	16.561.410.937,00	28.479.505.041,00
29	Kabupaten Wonogiri	12.107.204.410,00	20.229.417.894,00
30	Kota Semarang	81.851.993.245,00	144.196.941.545,00
31	Kota Pekalongan	6.013.245.666,00	10.626.802.998,00
32	Kota Surakarta	19.810.801.051,00	36.125.956.721,00
33	Kota Salatiga	5.769.517.420,00	10.037.275.850,00
34	Kota Tegal	6.249.881.064,00	10.568.983.217,00
35	Kota Magelang	3.749.255.411,00	6.351.673.978,00
	<b>Jumlah</b>	<b>610.764.467.821,00</b>	<b>1.026.959.259.108,00</b>

**5.1.2.4.1.3 Bagi Hasil PBBKB**

**Rp1.001.413.676.213,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.001.413.676.213,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.457.178.571.387,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Kabupaten Semarang	41.324.931.657,00	52.328.236.135,00
2	Kabupaten Kendal	31.759.801.418,00	46.443.870.240,00
3	Kabupaten Demak	35.699.035.249,00	47.144.702.096,00
4	Kabupaten Grobogan	33.070.152.390,00	44.315.826.251,00
5	Kabupaten Pati	40.547.109.544,00	64.891.722.701,00
6	Kabupaten Kudus	30.016.825.692,00	44.127.066.495,00
7	Kabupaten Jepara	32.260.659.961,00	46.127.934.017,00
8	Kabupaten Rembang	26.060.328.723,00	34.884.456.904,00
9	Kabupaten Blora	19.784.781.100,00	27.547.006.447,00
10	Kabupaten Pekalongan	17.751.709.737,00	25.856.853.013,00
11	Kabupaten Batang	24.311.251.712,00	32.018.190.457,00
12	Kabupaten Pemalang	28.539.167.001,00	39.350.413.169,00
13	Kabupaten Tegal	36.232.667.786,00	52.739.643.196,00
14	Kabupaten Brebes	38.167.696.357,00	52.005.225.017,00
15	Kabupaten Banyumas	43.284.456.582,00	65.732.504.727,00
16	Kabupaten Cilacap	41.261.488.816,00	59.341.756.913,00
17	Kabupaten Purbalingga	18.563.275.603,00	26.971.974.639,00
18	Kabupaten Banjarnegara	18.364.258.405,00	25.647.171.706,00
19	Kabupaten Magelang	32.680.054.062,00	50.752.610.199,00
20	Kabupaten Temanggung	20.418.972.727,00	28.628.520.946,00
21	Kabupaten Wonosobo	15.261.182.531,00	22.933.647.795,00
22	Kabupaten Purworejo	18.118.804.477,00	27.156.981.187,00
23	Kabupaten Kebumen	24.879.147.338,00	35.624.880.513,00
24	Kabupaten Klaten	37.387.503.844,00	55.808.554.800,00
25	Kabupaten Boyolali	24.059.800.321,00	35.035.995.747,00
26	Kabupaten Sragen	33.466.316.485,00	48.645.820.270,00
27	Kabupaten Sukoharjo	33.078.763.190,00	52.514.745.087,00
28	Kabupaten Karanganyar	30.043.293.990,00	44.710.479.107,00
29	Kabupaten Wonogiri	22.556.913.746,00	33.189.910.508,00
30	Kota Semarang	90.584.370.258,00	141.088.924.534,00
31	Kota Pekalongan	12.254.753.070,00	18.684.042.078,00
32	Kota Surakarta	25.474.494.222,00	40.027.246.322,00
33	Kota Salatiga	10.666.984.512,00	16.204.731.048,00
34	Kota Tegal	7.717.992.173,00	11.574.446.043,00
35	Kota Magelang	5.764.731.534,00	7.122.481.080,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.001.413.676.213,00</b>	<b>1.457.178.571.387,00</b>

**5.1.2.4.1.4 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tanah**

**Rp6.967.561.815,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.967.561.815,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.232.918.912,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LRA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Kabupaten Semarang	513.486.664,00	571.592.097,00
2	Kabupaten Kendal	35.509.438,00	42.259.555,00
3	Kabupaten Demak	102.232.331,00	101.835.529,00
4	Kabupaten Grobogan	316.943.805,00	359.980.133,00
5	Kabupaten Pati	48.835.390,00	52.978.683,00
6	Kabupaten Kudus	12.820.453,00	14.418.924,00
7	Kabupaten Jepara	17.588.592,00	12.525.005,00
8	Kabupaten Rembang	40.942.640,00	43.772.182,00
9	Kabupaten Blora	50.412.827,00	46.936.982,00
10	Kabupaten Pekalongan	142.233.394,00	112.048.404,00
11	Kabupaten Batang	136.099.243,00	129.050.916,00
12	Kabupaten Pemalang	105.292.015,00	101.841.994,00
13	Kabupaten Tegal	156.366.718,00	154.669.937,00
14	Kabupaten Brebes	102.472.194,00	116.636.836,00
15	Kabupaten Banyumas	322.021.430,00	351.456.805,00
16	Kabupaten Cilacap	1.383.235.039,00	1.207.623.638,00
17	Kabupaten Purbalingga	111.209.932,00	115.216.688,00
18	Kabupaten Banjarnegara	1.016.897.047,00	1.187.634.586,00
19	Kabupaten Magelang	285.300.007,00	267.824.987,00
20	Kabupaten Temanggung	128.491.579,00	137.457.633,00
21	Kabupaten Wonosobo	275.127.793,00	293.971.319,00
22	Kabupaten Purworejo	63.167.894,00	63.507.150,00
23	Kabupaten Kebumen	230.823.370,00	322.719.905,00
24	Kabupaten Klaten	245.970.114,00	258.648.622,00
25	Kabupaten Boyolali	93.873.143,00	117.257.225,00
26	Kabupaten Sragen	21.436.722,00	23.084.791,00
27	Kabupaten Sukoharjo	167.164.421,00	170.623.607,00
28	Kabupaten Karanganyar	212.175.581,00	215.734.629,00
29	Kabupaten Wonogiri	157.319.342,00	155.726.751,00
30	Kota Semarang	357.209.469,00	370.769.399,00
31	Kota Pekalongan	3.219.639,00	3.360.123,00
32	Kota Surakarta	29.987.512,00	33.426.478,00
33	Kota Salatiga	39.200.330,00	42.119.551,00
34	Kota Tegal	3.511.055,00	3.978.513,00
35	Kota Magelang	38.984.692,00	30.229.335,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.967.561.815,00</b>	<b>7.232.918.912,00</b>

**5.1.2.4.1.5 Bagi Hasil Pajak Rokok**

**Rp1.822.481.177.048,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.822.481.177.048,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.358.409.102.104,00 dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Kabupaten Semarang	55.009.266.966,00	42.836.154.695,00
2	Kabupaten Kendal	50.484.878.074,00	30.062.427.425,00
3	Kabupaten Demak	59.249.732.046,00	45.339.687.833,00
4	Kabupaten Grobogan	67.648.836.116,00	53.761.306.487,00
5	Kabupaten Pati	63.174.585.262,00	45.055.468.085,00
6	Kabupaten Kudus	48.295.370.548,00	37.665.615.141,00
7	Kabupaten Jepara	62.490.810.853,00	48.572.549.475,00
8	Kabupaten Rembang	39.779.539.758,00	30.086.526.164,00
9	Kabupaten Blora	48.447.951.944,00	37.523.211.623,00
10	Kabupaten Pekalongan	49.524.145.153,00	38.820.977.743,00
11	Kabupaten Batang	37.288.929.053,00	34.481.079.634,00
12	Kabupaten Pemalang	53.668.216.735,00	49.750.232.014,00
13	Kabupaten Tegal	66.569.132.642,00	52.522.348.802,00
14	Kabupaten Brebes	83.572.875.445,00	47.064.392.123,00
15	Kabupaten Banyumas	73.711.900.419,00	50.988.213.228,00
16	Kabupaten Cilacap	79.606.404.262,00	61.103.520.803,00
17	Kabupaten Purbalingga	50.727.525.929,00	36.377.680.287,00
18	Kabupaten Banjarnegara	50.528.971.930,00	36.748.269.531,00
19	Kabupaten Magelang	64.082.833.078,00	48.419.312.917,00
20	Kabupaten Temanggung	44.736.509.121,00	35.000.706.478,00
21	Kabupaten Wonosobo	45.622.066.708,00	28.565.503.501,00
22	Kabupaten Purworejo	41.443.823.785,00	28.604.542.633,00
23	Kabupaten Kebumen	61.038.382.752,00	40.955.102.434,00
24	Kabupaten Klaten	60.126.911.275,00	43.588.087.441,00
25	Kabupaten Boyolali	52.860.519.666,00	37.398.520.614,00
26	Kabupaten Sragen	49.429.671.252,00	35.401.708.228,00
27	Kabupaten Sukoharjo	49.252.332.659,00	38.560.804.098,00
28	Kabupaten Karanganyar	48.829.693.129,00	36.897.389.224,00
29	Kabupaten Wonogiri	50.603.488.087,00	39.202.133.221,00
30	Kota Semarang	82.905.906.948,00	64.239.254.383,00
31	Kota Pekalongan	27.376.127.629,00	21.430.061.062,00
32	Kota Surakarta	35.459.704.234,00	27.865.541.532,00
33	Kota Salatiga	23.108.181.014,00	18.052.893.363,00
34	Kota Tegal	25.311.489.447,00	19.591.203.069,00
35	Kota Magelang	20.514.463.129,00	15.876.676.813,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.822.481.177.048,00</b>	<b>1.358.409.102.104,00</b>

#### 5.1.2.4.1.6 Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat Kartini

Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp33.130.000,00 dengan rincian sebagai berikut:





(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Kabupaten Jepara	-	33.130.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>33.130.000,00</b>

#### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota

**Rp 845.543.195.241,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp845.543.195.241,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.050.456.112.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Kabupaten Semarang	49.794.317.000,00	39.687.577.274,00	79,70	46.187.036.000,00
2	Kabupaten Kendal	21.313.000.000,00	18.389.680.226,00	86,28	12.942.204.000,00
3	Kabupaten Demak	66.022.000.000,00	65.766.933.900,00	99,61	71.051.531.100,00
4	Kabupaten Grobogan	62.843.000.000,00	50.916.105.131,00	81,02	28.130.189.473,00
5	Kabupaten Pati	39.207.000.000,00	28.783.114.000,00	73,41	63.776.040.738,00
6	Kabupaten Kudus	10.586.000.000,00	8.673.235.000,00	81,93	31.178.849.000,00
7	Kabupaten Jepara	64.257.000.000,00	61.135.817.829,00	95,14	91.401.103.900,00
8	Kabupaten Rembang	19.087.000.000,00	14.285.856.288,00	74,85	28.908.827.095,00
9	Kabupaten Blora	59.777.000.000,00	54.343.529.000,00	90,91	44.342.849.000,00
10	Kabupaten Pekalongan	11.009.372.000,00	10.107.366.681,00	91,81	23.006.993.098,00
11	Kabupaten Batang	15.257.000.000,00	14.226.398.000,00	93,25	28.117.174.000,00
12	Kabupaten Pemaslang	11.974.000.000,00	10.360.575.818,00	86,53	30.554.342.948,00
13	Kabupaten Tegal	6.112.000.000,00	4.563.209.000,00	74,66	32.790.052.264,00
14	Kabupaten Brebes	40.754.000.000,00	39.252.138.336,00	96,31	51.426.768.105,00
15	Kabupaten Banyumas	24.614.000.000,00	18.221.591.230,00	74,03	18.908.016.315,00
16	Kabupaten Cilacap	27.767.000.000,00	25.350.873.000,00	91,30	32.961.441.000,00
17	Kabupaten Purbalingga	15.032.000.000,00	13.572.473.000,00	90,29	9.478.491.500,00
18	Kabupaten Banjarnegara	16.847.000.000,00	16.193.248.000,00	96,12	14.817.984.897,00
19	Kabupaten Magelang	14.717.000.000,00	10.689.403.000,00	72,63	12.730.533.000,00
20	Kabupaten Temanggung	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	83,54	11.118.713.002,00
21	Kabupaten Wonosobo	62.432.000.000,00	46.025.605.000,00	73,72	48.748.237.700,00
22	Kabupaten Purworejo	37.586.000.000,00	33.355.013.808,00	88,74	17.326.281.918,00
23	Kabupaten Kebumen	19.127.000.000,00	17.991.610.589,00	94,06	9.936.200.000,00
24	Kabupaten Klaten	17.397.000.000,00	14.804.313.000,00	85,10	32.443.497.000,00
25	Kabupaten Boyolali	33.688.451.000,00	33.294.381.000,00	98,83	35.305.000.000,00
26	Kabupaten Sragen	29.368.000.000,00	27.090.585.441,00	92,25	40.046.042.120,00
27	Kabupaten Sukoharjo	14.662.000.000,00	1.154.709.000,00	7,88	12.830.754.996,00
28	Kabupaten Karanganyar	8.418.000.000,00	6.676.848.000,00	79,32	7.406.223.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	59.217.000.000,00	56.811.970.000,00	95,94	62.730.932.000,00
30	Kota Semarang	34.706.177.000,00	26.781.465.445,00	77,17	15.421.023.899,00
31	Kota Pekalongan	11.914.000.000,00	11.794.000.000,00	98,99	19.136.152.045,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
32	Kota Surakarta	32.553.000.000,00	30.761.773.579,00	94,50	29.158.287.000,00
33	Kota Salatiga	7.812.000.000,00	7.576.755.000,00	96,99	5.672.784.000,00
34	Kota Tegal	19.602.000.000,00	15.936.712.428,00	81,30	21.800.284.936,00
35	Kota Magelang	8.462.589.000,00	4.312.568.000,00	50,96	8.665.271.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>981.881.906.000,00</b>	<b>845.543.195.241,00</b>	<b>86,11</b>	<b>1.050.456.112.049,00</b>

**5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Rp1.168.083.636.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.168.083.636.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.361.431.049.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Kabupaten Semarang	61.924.683.000,00	61.924.683.000,00	100,00	47.951.202.000,00
2	Kabupaten Kendal	38.910.000.000,00	38.910.000.000,00	100,00	35.639.600.000,00
3	Kabupaten Demak	27.896.000.000,00	27.896.000.000,00	100,00	30.041.880.000,00
4	Kabupaten Grobogan	64.995.000.000,00	64.995.000.000,00	100,00	59.915.000.000,00
5	Kabupaten Pati	152.800.000.000,00	152.645.000.000,00	99,90	197.718.905.000,00
6	Kabupaten Kudus	13.965.000.000,00	12.310.000.000,00	88,15	17.904.617.000,00
7	Kabupaten Jepara	50.870.000.000,00	50.870.000.000,00	100,00	46.118.000.000,00
8	Kabupaten Rembang	34.905.000.000,00	34.705.000.000,00	99,43	71.933.988.000,00
9	Kabupaten Blora	47.270.000.000,00	47.270.000.000,00	100,00	35.858.200.000,00
10	Kabupaten Pekalongan	22.322.884.000,00	20.428.884.000,00	91,52	30.785.922.000,00
11	Kabupaten Batang	29.780.886.000,00	28.665.886.000,00	96,26	27.895.000.000,00
12	Kabupaten Pemalang	43.904.000.000,00	44.489.000.000,00	101,33	31.635.000.000,00
13	Kabupaten Tegal	13.705.000.000,00	12.255.000.000,00	89,42	15.320.000.000,00
14	Kabupaten Brebes	59.960.000.000,00	59.960.000.000,00	100,00	70.750.000.000,00
15	Kabupaten Banyumas	48.645.000.000,00	47.895.000.000,00	98,46	44.758.785.000,00
16	Kabupaten Cilacap	31.438.183.000,00	31.438.183.000,00	100,00	40.385.000.000,00
17	Kabupaten Purbalingga	32.220.000.000,00	31.995.000.000,00	99,30	23.605.000.000,00
18	Kabupaten Banjarnegara	19.380.000.000,00	19.330.000.000,00	99,74	28.522.925.000,00
19	Kabupaten Magelang	35.625.000.000,00	35.425.000.000,00	99,44	36.729.478.000,00
20	Kabupaten Temanggung	23.056.000.000,00	22.031.000.000,00	95,55	49.859.010.000,00
21	Kabupaten Wonosobo	62.180.000.000,00	60.180.000.000,00	96,78	35.085.000.000,00
22	Kabupaten Purworejo	27.045.000.000,00	27.045.000.000,00	100,00	32.256.400.000,00
23	Kabupaten Kebumen	38.325.000.000,00	37.375.000.000,00	97,52	33.485.000.000,00
24	Kabupaten Klaten	65.205.000.000,00	60.445.000.000,00	92,70	76.029.000.000,00
25	Kabupaten Boyolali	23.685.000.000,00	23.665.000.000,00	99,92	99.070.623.000,00
26	Kabupaten Sragen	25.095.000.000,00	25.025.000.000,00	99,72	39.765.000.000,00
27	Kabupaten Sukoharjo	25.800.000.000,00	25.310.000.000,00	98,10	23.390.417.000,00



NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
28	Kabupaten Karanganyar	36.235.000.000,00	34.135.000.000,00	94,20	30.147.097.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	30.545.000.000,00	29.465.000.000,00	96,46	48.875.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.187.687.636.000,00</b>	<b>1.168.083.636.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>1.361.431.049.000,00</b>

#### 5.1.2.4.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

**Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.767.399.599,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-	-	-	6.117.759.467,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	-	-	-	2.888.910.400,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	-	-	2.219.211.200,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	-	1.412.821.333,00
5	Partai Golongan Karya	-	-	-	2.111.070.933,00
6	Partai Demokrat	-	-	-	1.404.595.733,00
7	Partai Amanat Nasional	-	-	-	1.279.374.400,00
8	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	1.388.504.400,00
9	Partai Nasional Demokrat	-	-	-	945.151.733,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.767.399.599,00</b>

Pada tahun anggaran 2020 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengalami penyesuaian nomenklatur dan diklasifikasikan pada komponen Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### 5.1.2.4.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya

**Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 14.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	-	-	-	7.000.000.000
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	7.000.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.000.000.000,00</b>

#### 5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT)

**(Rp258.004.415.843,00)**

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara Total Pendapatan Daerah dikurangi Total Belanja dan Transfer dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila Total Pendapatan Daerah lebih besar daripada



Total Belanja dan Transfer serta Defisit apabila sebaliknya, dengan perhitungan sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan	26.255.251.903.000.00	25.393.735.934.148.00	96.72	25.859.780.137.936.00
2	Belanja dan transfer	27.374.409.350.000.00	25.651.740.349.991.00	93.71	26.151.062.842.457.00
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.119.157.447.000.00)</b>	<b>(258.004.415.843.00)</b>	-	<b>(291.282.704.521.00)</b>

#### 5.1.4 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan perhitungan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	1.119.157.447.000,00	1.119.348.228.370,00	100,02	1.630.776.601.765,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	220.336.450.544,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.119.157.447.000,00</b>	<b>1.119.348.228.370,00</b>	<b>100,02</b>	<b>1.410.440.151.221,00</b>

##### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

**Rp1.119.348.228.370,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.119.348.228.370,00 atau 100,02% dari anggaran Rp1.119.157.447.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.630.776.601.765,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penggunaan SiLPA	1.119.157.447.000.00	1.119.095.687.470.00	99.99	1.612.602.481.841.00
2	Penerimaan Kembali Piutang	-	252.540.900.00	-	-
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	140.403.868.00
4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	18.033.716.056.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.119.157.447.000.00</b>	<b>1.119.348.228.370.00</b>	<b>100.02</b>	<b>1.630.776.601.765.00</b>

##### 5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

**Rp1.119.095.687.470.00**

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.119.095.687.470.00 atau 99,99% dari anggaran Rp1.119.157.447.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.612.602.481.841,00.



#### 5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Piutang

**Rp252.540.900,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	74.375.000,00	-	-
2	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	13.000.000,00	-	-
3	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	15.165.900,00	-	-
4	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan & Keswan)	-	150.000.000,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>252.540.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

**Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp140.403.868,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengembalian Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	-	-	77.218.090,00
2	Pengembalian Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	-	-	54.019.167,00
3	Pengembalian Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	-	-	9.166.611,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.403.868,00</b>

Pada tahun anggaran 2020 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya mengalami penyesuaian nomenklatur dan diklasifikasikan pada komponen Penerimaan Kembali Piutang.

#### 5.1.4.1.4 Pinjaman Dalam Negeri

**Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp18.033.716.056,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pembiayaan dari Sektor Perbankan - RSUD Moewardi	-	-	-	18.033.716.056,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.033.716.056,00</b>

#### 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

**Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 220.336.450.544,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020	%	2019
----	--------	------	---	------



		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	180.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	40.336.450.544,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.336.450.544,00</b>

#### 5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp180.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	PT. Bank Jateng	-	-	-	160.000.000.000,00
2	BPR-BKK	-	-	-	20.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.000.000.000,00</b>

#### 5.1.4.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp40.336.450.544,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020		%	2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - RSUD Moewardi	-	-	-	40.336.450.544,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.336.450.544,00</b>

#### 5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 SiLPA tersebut dalam bentuk sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	2020	
		Anggaran	Realisasi
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	-	362.643.956.586,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	18.040.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	102.386.000,00
4	Kas di Bendahara BLUD	-	437.713.567.521,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	-	60.865.862.420,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>861.343.812.527,00</b>



Penjelasan SiLPA tahun 2020 dimaksud termasuk di dalamnya:

### Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	-	18.040.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>18.040.000,00</b>

### Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	-	13.530.000,00
2	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	17.710.000,00
3	Dinas Perhubungan	-	55.828.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.900.000,00
5	Dinas LH & Kehutanan	-	1.108.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	12.310.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>102.386.000,00</b>

### Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	
		Anggaran	Realisasi
1	RSUD Dr Moewardi	-	248.049.452.853,00
2	RSUD Dr Margono	-	114.544.210.359,00
3	RSUD Tugurejo	-	35.873.049.679,00
4	RSUD Kelet Donorejo	-	3.793.186.779,00
5	RSJD Dr Amino	-	14.225.344.280,00
6	RSJD Surakarta	-	10.861.505.755,00
7	RSJD Klaten	-	10.366.817.816,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>437.713.567.521,00</b>

Jumlah SiLPA tahun 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 termasuk di dalamnya :

(Dalam Rupiah)

#### 1. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

Sisa Dana tahun sebelumnya	2.103.857.874,00
Transfer Pusat	350.564.240.958,00
Realisasi Penyerapan	349.997.337.160,00
<b>Saldo Akhir DAK (Fisik) per 31 Desember 2020</b>	<b>2.670.761.672,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:



a) DAK Fisik Reguler		
- Sisa Dana tahun sebelumnya		2.103.857.874,00
- Transfer Pusat		68.899.319.309,00
- Realisasi Penyerapan		68.766.263.511,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>		<b>2.236.913.672,00</b>
b) DAK Fisik Penugasan		
- Sisa Dana tahun sebelumnya		-
- Transfer Pusat		273.481.846.649,00
- Realisasi Penyerapan		273.048.048.649,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>		<b>433.798.000,00</b>
c) DAK Fisik Cadangan		
- Sisa Dana tahun sebelumnya		-
- Transfer Pusat		8.183.075.000,00
- Realisasi Penyerapan		8.183.025.000,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>		<b>50.000,00</b>
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020		
- Sisa Dana tahun sebelumnya		121.774.427.080,00
- Transfer Pusat		6.983.232.690.794,00
- Realisasi Penyerapan		6.997.992.142.046,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2020</b>		<b>107.014.975.828,00</b>
3. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau		
Sisa DBH CT s.d TA 2019 (i)	:	8.086.957.790,00
Transfer DBH CT TA 2020 (ii)	:	220.298.759.554,00
Ketersediaan DBH CT di Kasda TA 2020 (iii = i+ii)	:	228.385.717.344,00
Realisasi Penggunaan DBH CT TA 2020 (iv)	:	200.322.287.097,00
<b>Sisa DBH CT s.d TA 2020 (v = iii-iv)</b>	:	<b>28.063.430.247,00</b>





## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

**Rp1.119.157.446.700,54**

Saldo anggaran lebih awal tahun 2020 sebesar Rp1.119.157.446.700,54 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019.

Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	837.445.123.013,00	1.443.326.975.483,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	261.907.860,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	113.306.841,00	638.962.028,00
4	Kas di BLUD	171.762.980.362,34	126.687.867.419,34
5	Kas di Bendahara Sekolah	109.836.036.484,20	41.686.769.051,20
<b>Jumlah</b>		<b>1.119.157.446.700,54</b>	<b>1.612.602.481.841,54</b>

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

**Rp1.119.095.687.470,00**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.119.095.687.470,00 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

**Rp861.343.812.527,00**

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp861.343.812.527,00 terdiri:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan Asli daerah	13.668.282.278.855,00	14.437.914.236.398,00
2	Pendapatan Transfer	11.702.101.655.293,00	11.398.681.901.538,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	23.352.000.000,00	23.184.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.393.735.934.148,00</b>	<b>25.859.780.137.936,00</b>
1	Belanja Operasi	16.223.988.285.131,00	16.354.554.423.473,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-Laporan Perubahan SAL  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
2	Belanja Modal	996.994.505.160,00	2.099.719.124.860,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.783.884.978.571,00	2.662.431.206,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	6.646.872.581.129,00	7.694.126.862.918,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.651.740.349.991,00</b>	<b>26.151.062.842.457,00</b>
1	Penerimaan Pembiayaan	1.119.348.228.370,00	1.630.776.601.765,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	220.336.450.544,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.119.348.228.370,00</b>	<b>1.410.440.151.221,00</b>
	<b>SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan</b>	<b>861.343.812.527,00</b>	<b>1.119.157.446.700,00</b>

**5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp(61,759.230,54)**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp(61.759.230,54) dikarenakan koreksi pada Kas Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.841.387,00 dan Kas Bendahara Sekolah sebesar Rp35.917.843,00 serta koreksi Saldo Anggaran Lebih Tahun Lalu Rp0,54

**5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp861.343.812.527,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 berasal dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Realisasi Pendapatan	25.393.735.934.148,00	25.859.780.137.936,54
2	Realisasi Belanja	25.651.740.349.991,00	26.151.062.842.457,00
3	Penerimaan Pembiayaan	1.119.348.228.370,00	1.630.776.601.765,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	220.336.450.544,00
	<b>SILPA</b>	<b>861.343.812.527,00</b>	<b>1.119.157.446.700,54</b>

Saldo ini terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
	- Giro di bank Jateng	362.643.956.586,00	237.445.123.013,00
	Setara Kas BUD		
	- Bank Jateng	-	300.000.000.000,00
	- Bank BNI	-	25.000.000.000,00
	- Bank BRI	-	275.000.000.000,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yg Blm disetor ke RKUD)		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	43.735.515,00
	- Dinas Kesehatan	-	15.402.754,00
	- Dinas Perhubungan	55.828.000,00	41.957.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-Laporan Perubahan SAL  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	1.900.000,00	12.185.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya	13.530.000,00	-
- Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	17.710.000,00	-
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.108.000,00	-
- Dinas Perikanan dan kelautan	12.310.400,00	-
3 Kas di Bendahara Penerimaan (Jasa Giro)		
- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-	26.572,00
4 Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)		
- Dinas Kesehatan	18.040.000,00	-
5 Kas di BLUD		
<b>Rekening Giro Kas Bendahara BLUD</b>		
- RSUD Dr Moewardi Surakarta	152.850.834.929,00	4.814.710.421,00
- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	12.911.179.211,00	38.466.249.625,34
- RSJD Dr Amino Gondohutomo	13.684.316.348,00	14.396.828.914,00
- RSUD Tugurejo	35.829.271.229,00	14.458.697.665,00
- RSUD Kelet Donorejo	3.771.238.010,00	4.815.694.283,00
- RSJD Surakarta	10.828.524.041,00	4.616.355.415,00
- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	2.857.062.332,00	1.534.350.206,00
<b>Setara Kas BLUD</b>		
- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BRI)	10.000.000.000,00	-
- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BTN)	10.000.000.000,00	-
- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank Jateng)	30.000.000.000,00	-
- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Muamalat)	35.000.000.000,00	-
- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Mandiri)	10.000.000.000,00	-
- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	65.000.000.000,00	55.000.000.000,00
- RSUD Dr Margono Sukardjo (BRI)	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo (Bank Mandiri)	-	500.000.000,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00
<b>Kas di Bendahara Penerimaan BLUD</b>		
- RSUD Dr Moewardi Surakarta	198.617.924,00	108.145.506,00
- RSUD Dr Margono Sukardjo	133.031.148,00	4.508.373,00
- RSJD Dr Amino Gondohutomo	41.027.932,00	6.721.237,00
- RSJD Tugurejo	43.778.450,00	-
- RSUD Kelet Donorejo	21.948.769,00	13.679.345,00
- RSJD Surakarta	32.981.714,00	21.938.179,00
- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	9.755.484,00	5.101.193,00
5 Kas di Bendahara Sekolah	60.865.862.020,00	109.836.036.484,20
<b>Jumlah</b>	<b>861.343.812.527,00</b>	<b>1.119.157.446.700,54</b>



### 5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan uraian sebagai berikut:

#### 5.3.1 Aset Rp37.222.304.291.653,23

Total Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.222.304.291.653,23 turun sebesar (Rp277.892.463.727,30) atau (0,74%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp37.500.196.755.380,51. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Aset Lancar	3.316.755.368.542,49	3.530.658.995.976,98
2 Investasi Jangka Panjang	6.424.346.793.977,35	6.528.222.362.598,47
3 Aset Tetap	25.972.626.841.373,76	25.923.132.969.503,85
4 Aset Lainnya	1.508.575.287.759,63	1.518.182.427.301,21
<b>Jumlah</b>	<b>37.222.304.291.653,23</b>	<b>37.500.196.755.380,51</b>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar Rp 3.316.755.368.542,49

Aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.316.755.368.542,49 turun sebesar (Rp213.909.627.434,49) atau (6,06%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.530.658.995.976,98 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Kas dan Setara Kas	864.937.343.735,87	1.128.298.517.539,89
2 Piutang Pendapatan	2.352.763.174.585,21	2.717.005.215.750,18
3 Penyisihan Piutang	(418.683.863.540,78)	(534.658.906.975,86)
3 Beban Dibayar Dimuka	6.144.929.018,16	5.816.587.172,88
4 Persediaan	511.593.784.744,03	214.197.582.489,89
<b>Jumlah</b>	<b>3.316.755.368.542,49</b>	<b>3.530.658.995.976,98</b>

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Rp864.937.343.735,87

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp864.937.343.735,87 turun sebesar (Rp263.361.173.804,03) atau (23,34%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.128.298.517.539,89 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Kas di Kas Daerah	362.643.956.586,00	237.445.123.013,00
2 Kas di Bendahara Penerimaan	120.536.400,00	113.640.454,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	18.040.000,00	150.789.514,00
4 Kas di Bendahara BLUD	438.382.355.570,87	172.892.456.500,90
5 Kas di Bendahara Sekolah	61.115.855.179,00	117.696.508.057,99
6 Kas Lainnya	2.656.600.000,00	-
7 Setara Kas di Kas Daerah	-	600.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>864.937.343.735,87</b>	<b>1.128.298.517.539,89</b>

#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

**Rp362.643.956.586,00**

Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp362.643.956.586,00 naik Rp125.199.703.483,00 atau 52,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp237.444.253.103,00 dengan rincian:

- a. Saldo Kas Umum Daerah merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah pada PT Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1.034.01504.7, sebesar:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1. Kas di Rekening Kas Umum Daerah (BUD)	362.643.956.586,00	237.444.253.103,00
Jumlah	362.643.956.586,00	237.444.253.103,00

- b. Saldo Kas Umum Daerah berupa Jasa Giro Bendahara SKPD yang belum disetor (SiLPA) sebesar:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	146.780,00
2 Sekretariat Dewan	-	723.130,00
Jumlah	-	869.910,00

#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

**Rp120.536.400,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp120.536.400,00 naik sebesar Rp6.895.946,00 atau 6,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp113.640.454,00. Saldo tahun 2020 merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dan tidak termasuk saldo kas di bendahara penerimaan BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

**Kas di Bendahara Penerimaan (SiLPA)**

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	43.735.515,00



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

2	Dinas Kesehatan	-	15.402.754,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	17.710.000,00	-
4	Dinas Perhubungan	55.828.000,00	41.957.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.900.000,00	12.185.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.530.000,00	-
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.108.000,00	-
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.310.400,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>102.386.400,00</b>	<b>113.280.269,00</b>

**Kas di Bendahara Penerimaan-Uang Titipan (Non SiLPA)**

		2020	2019
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	333.613,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>333.613,00</b>

**Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Sewa Rumah Dinas(Non SiLPA)**

		2020	2019
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.150.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>18.150.000,00</b>	<b>-</b>

**Kas di Bendahara Penerimaan - Jasa Giro Rek Penerimaan (SiLPA)**

		2020	2019
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	26.572,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>26.572,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.150.000,00 bukan termasuk SiLPA karena merupakan pembayaran sewa rumah dinas untuk tahun 2021 dan belum dapat disetorkan karena jam operasional Bank yang telah tutup.

**5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp18.040.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.040.000,00 turun sebesar (Rp132.749.514,00) atau (88,04%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp150.789.514,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari kas di bendahara pengeluaran (SiLPA) dan Non SiLPA dengan rincian sebagai berikut:

**a. Kas di Bendahara Pengeluaran–(SiLPA)**

Saldo Kas pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 merupakan sisa TU yang belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA:

*(Dalam Rupiah)*

		2020	2019
1	Dinas Kesehatan	18.040.000,00	-



	2020	2019
Jumlah	18.040.000,00	-

**b. Bend Pengeluaran - Pajak yang belum disetor (Non SiLPA)**

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.091.428,00
2 Dinas Kesehatan	-	831.000,00
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	13.840,00
4 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	81.818,00
5 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.509.263,00
6 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	369.364,00
7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	906.400,00
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.758.641,00
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	94.500,00
10 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.500.000,00
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	97.272,00
12 Sekretariat Daerah	-	2.747.157,00
13 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	721.634,00
Jumlah	-	14.722.317,00

**c. Bend Pengeluaran - Kewajiban Pada Pihak Lain**

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	135.977.197,00
2 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	90.000,00
Jumlah	-	136.067.197,00

**5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD**

**Rp438.382.355.570,87**

Total Saldo Kas BLUD terdiri dari Kas yang berada di rekening BLUD, kas di bendahara BLUD, uang titipan pasien dan Setara Kas berupa deposito BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp438.382.355.570,87 naik sebesar Rp265.489.899.069,97 atau 153,56% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp172.892.456.500,90 merupakan bagian dari SiLPA yang tidak disetor ke rekening kas daerah dan untuk operasional RSUD/RSJD, sedangkan uang muka titipan pasien yang berada di bendahara BLUD bukan merupakan bagian dari SiLPA, sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	248.602.237.253,00	5.609.714.237,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	114.604.741.108,87	120.220.866.048,90
3 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	14.225.344.280,00	15.407.559.929,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	35.928.522.579,00	14.647.197.665,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.793.186.779,00	4.829.373.628,00
6 RSJD Surakarta	10.861.505.755,00	4.638.293.594,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.366.817.816,00	7.539.451.399,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019
Jumlah	438.382.355.570,87	172.892.456.500,90

Total Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp438.382.355.570,87 berada di:

a. Kas BLUD

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	152.850.834.929,00	4.814.710.421,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	12.911.179.210,87	38.466.249.624,90
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	13.684.316.348,00	14.396.828.914,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	35.829.271.229,00	14.458.697.665,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.771.238.010,00	4.815.694.283,00
6 RSJD Surakarta	10.828.524.041,00	4.616.355.415,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.857.062.332,00	1.534.350.206,00
Jumlah	232.732.426.099,87	83.102.886.528,90

b. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (SiLPA) Bagian dr Kas BLUD

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	198.617.924,00	108.145.506,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	133.031.148,00	4.508.373,00
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	41.027.932,00	6.721.237,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	43.778.450,00	-
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	21.948.769,00	13.679.345,00
6 RSJD Surakarta	32.981.714,00	21.938.179,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	9.755.484,00	5.101.193,00
Jumlah	481.141.421,00	160.093.833,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan - UM Titipan Pasien (Non SiLPA) Bagian dr Kas BLUD

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	552.784.400,00	686.858.310,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	60.530.750,00	250.108.051,00
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	-
4 RSUD Tugurejo Semarang	55.472.900,00	188.500.000,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6 RSJD Surakarta	-	-
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-
Jumlah	668.788.050,00	1.125.466.361,00

d. Setara Kas BLUD

	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
	2020	2019
1 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	101.500.000.000,00	81.500.000.000,00
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	95.000.000.000,00	-
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	500.000.000,00	1.000.000.000,00
4 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00
Jumlah	204.500.000.000,00	88.500.000.000,00





*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

Saldo Setara Kas BLUD sebesar Rp204.500.000.000,00 berada di:

*(Dalam Rupiah)*

SKPD	BANK	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai	
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Bank Jateng	A288744	22/07/2020	22.191.781,00	30.000.000.000,00	
	Mandiri	1380204678986	20/05/2020	9.794.521,00	10.000.000.000,00	
	BTN	SY101413	30/09/2020	1.575.342,00	10.000.000.000,00	
	BRI	129701001095400	17/06/2020	14.383.562,00	10.000.000.000,00	
	Muamalat		5210082827	30/09/2020	54.649.487,00	10.000.000.000,00
			5210082407	20/05/2020	45.205.479,00	25.000.000.000,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	Bank Jateng	A251160	06/08/2018	54.794.521,00	20.000.000.000,00	
		A251161	06/08/2018	54.794.521,00	20.000.000.000,00	
	BNI	A295508	08/04/2020	63.013.699,00	25.000.000.000,00	
		0572488	01/07/2016	46.232.877,00	15.000.000.000,00	
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	Mandiri	0572487	01/07/2016	20.034.247,00	6.500.000.000,00	
		BRI	DD610483	12/04/2019	9.760.274,00	5.000.000.000,00
		DD00664527	08/04/2020	23.630.137,00	10.000.000.000,00	
4 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank Jateng	A288617	02/09/2020	15.989.726,00	3.500.000.000,00	
		A281070	26/10/2020	3.424.658,00	4.000.000.000,00	
Jumlah				440.639.213,00	204.500.000.000,00	

**e. Kas di Bendahara Penerimaan - bunga Jamkesmas (Non SiLPA)**

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	4.009.778,00
<b>Jumlah</b>	-	<b>4.009.778,00</b>

**5.3.1.1.1.5 Kas Di Bendahara Sekolah**

**Rp61.115.855.179,00**

Saldo Kas di Bendahara Sekolah per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.115.855.179,00 turun sebesar (Rp56.580.652.878,99) atau (48,07%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp117.696.508.057,99 merupakan saldo Kas di bendahara BOS dan BOP pada SMAN, SMKN dan SLBN dilingkungan Provinsi Jawa Tengah.

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.115.855.179,00	117.696.508.057,99
<b>Jumlah</b>	<b>61.115.855.179,00</b>	<b>117.696.508.057,99</b>

Rincian Saldo Kas Sekolah per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.115.855.179,00 terdiri dari :

- Saldo BOS dan BOP (SiLPA) pada rekening bank maupun tunai beserta bunga/jasa giro bendahara sekolah sebesar Rp60.865.862.020,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Saldo Kas BOS	45.581.596.041,00	105.492.865.396,00
2	Saldo Kas BOP	15.284.265.979,00	4.343.171.088,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.865.862.020,00</b>	<b>109.836.036.484,00</b>

- Saldo Kas di Bendahara sekolah berupa pajak yang belum disetor (Non SiLPA) sebesar Rp249.993.159,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020
1	Utang Pajak BOS	148.434.456,00
2	Utang Pajak BOP	101.558.703,00
<b>Jumlah</b>		<b>249.993.159,00</b>

#### 5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

**Rp2.656.600.000,00**

Total Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.656.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	555.600.000,00	-
2	SKPKD	2.101.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.656.600.000,00</b>	-

- Kas lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dana Satgas *Covid-19* pada Bank Jateng dengan nomor rekening 1.057.00945.9 yang berasal dari sumbangan masyarakat/donatur per 31 Desember 2020 sebesar Rp555.600.000,00.
- Kas lainnya pada SKPKD merupakan Sisa dana Bantuan Sosial Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK/SLB tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.101.000.000,00. Pada tanggal 5 Januari 2021 terdapat penyaluran dana BSM Tahun 2020 ke rekening siswa sebesar Rp273.000.000,00. Sehingga sisa dana BSM sebesar Rp1.828.000.000,00 telah disetorkan ke rekening Bank Jateng pada tanggal 26 Februari 2021

#### 5.3.1.1.1.7 Setara Kas di Kas Daerah

**Rp0,00**

Setara Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp600.000.000.000,00) atau (100%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp600.000.000.000,00. Saldo Setara Kas merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah berupa deposito dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Bank Jateng	-	300.000.000.000,00
2 Bank BNI	-	25.000.000.000,00
3 Bank BRI	-	275.000.000.000,00
	-	<b>600.000.000.000,00</b>

#### 5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

**Rp2.352.763.174.585,21**

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.352.763.174.585,21 turun sebesar (Rp364.242.041.164,97) atau (13,41%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.717.005.215.750,18. Saldo piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang untuk memperhitungkan potensi piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan diharapkan lebih mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

	2020	2019
1 Piutang Pajak	2.050.129.305.282,38	2.013.969.651.921,38
2 Piutang Retribusi	977.885.351,00	4.125.039.260,00
3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	157.475.313.164,83	509.032.903.662,80
4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	128.148.979.363,00	184.304.523.061,00
5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	12.269.762,00	1.102.158.762,00
6 Piutang Pendapatan Lainnya	16.019.421.662,00	4.470.939.083,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.352.763.174.585,21</b>	<b>2.717.005.215.750,18</b>

Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya piutang atas sisa pengembalian uang muka penghentian dan pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua Permai (berdasarkan SPK Nomor 027.2/GDG0,00IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015) atas pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp1.962.929.100,00. Penghentian pekerjaan tersebut dilakukan karena hingga tanggal 23 Desember 2015 PT Sinar Intan Papua Permai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan progres yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2015.

Atas permasalahan tersebut, RSUD Tugurejo sudah menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Tengah untuk mengupayakan pengembalian sisa jaminan uang muka ke Kas Daerah dengan tindakan sebagai berikut:

- Surat Tagihan kepada PT Asuransi Recapital sebanyak 7 (tujuh) kali
- Surat Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 6 (enam) kali



- c. Pertemuan mediasi di OJK Perwakilan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 dan 2 Februari 2018.
- d. Surat permohonan penjelasan lebih lanjut kepada Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan Kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukkan produk *Surety Bond Non Konstruksi*

Gugatan atas putus kontrak yang diajukan oleh PT Sinar Intan Papua Permai (SIPP) telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65.PK/TUN/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor 159.PK/TUN/2018 tanggal 2 November 2018, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor putusan 281 K/KPDT/2020 dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sinar Intan Papua Permai Nomor 281.K/Pdt/2020 tanggal 18 Februari 2020. Implikasi dari penolakan gugatan atas putus kontrak ini mengharuskan PT Asuransi Recapital selaku penjamin uang muka pekerjaan untuk mengembalikan uang muka. Namun, sampai saat ini PT Asuransi Recapital belum mencairkan sisa jaminan uang muka dimaksud.

Terhadap hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah lebih lanjut antara lain:

- a. 21 Januari 2019 Surat dari RSUD Tugurejo Kepada DEPUTI Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI perihal: Permohonan penjelasan lebih lanjut tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukan produk Surety Bond Non Kontruksi
- b. 11 Februari 2019 Surat Kementerian Keuangan RI No.S-184/PB/2019 tentang Penjelasan PT Asuransi Recapital dari Daftar Perusahaan Asuransi Umum yg dapat memasarkan Produk Surety Bond Non Kontruksi
- c. 15 Februari 2019 Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-226/NB.21/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penyampaian Informasi Terkini Terkait PT Asuransi Recapital
- d. 06 Maret 2019 Surat Tembusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.W.12.U/686/Pdt.04/03/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding.
- e. 25 September 2020 Surat Permohonan Pendampingan Kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



**5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak**

**Rp2.050.129.305.282,38**

Piutang pajak timbul akibat adanya Pendapatan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak terdiri dari PKB, PBBKB, BBNKB, APT dan Pajak Rokok yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.050.129.305.282,38 naik sebesar Rp36.159.653.361,00 atau 1,80% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.013.969.651.921,38 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Pajak PKB	2.049.759.279.013,38	2.013.833.416.344,38
2	Pajak PBBKB	-	-
3	Pajak BBNKB	-	-
4	Pajak Air Permukaan Tanah	370.026.269,00	136.235.577,00
5	Pajak Rokok	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.050.129.305.282,38</b>	<b>2.013.969.651.921,38</b>

Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2020				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7)
1	Pajak PKB	2.013.833.416.344,38	5.161.173.837.091,00	34.159.910.656,00	5.152.222.340.695,00	7.185.544.383,00	2.049.759.279.013,38
2	Pajak Air Permukaan	136.235.577,00	370.026.269,00	-	136.235.577,00	-	370.026.269,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.013.969.651.921,38</b>	<b>5.161.543.863.360,00</b>	<b>34.159.910.656,00</b>	<b>5.152.358.576.272,00</b>	<b>7.185.544.383,00</b>	<b>2.050.129.305.282,38</b>

Penghapusan piutang pajak pada Tahun 2020 sesuai SK Gubernur No.973/298/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp572.686.694.395,00 telah dikeluarkan dari perhitungan piutang dan dicatat sebagai *ekstracomptable* piutang pajak.

**5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi**

**Rp977.885.351,00**

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp977.885.351,00 turun sebesar (Rp3.147.153.909,00) atau (76,29%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.125.039.260,00 dengan rincian saldo sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	928.658.751,00	4.038.878.660,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	49.226.600,00	86.160.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>977.885.351,00</b>	<b>4.125.039.260,00</b>

Penambahan dan pengurangan piutang retribusi Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2020				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7)
	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>4.125.039.260,00</b>	<b>945.843.751,00</b>	-	<b>4.092.997.660,00</b>	-	<b>977.885.351,00</b>
1	Dinas Perhubungan	27.019.000,00	17.185.000,00	-	27.019.000,00	-	17.185.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.038.878.660,00	928.658.751,00	-	4.038.878.660,00	-	928.658.751,00
3	Dinas Koperasi	27.100.000,00	-	-	27.100.000,00	-	-
4	BPKAD	32.041.600,00	-	-	-	-	32.041.600,00

**a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Asuransi Kesehatan Rp928.658.751,00**

Saldo sebesar Rp928.658.751,00 merupakan hak atas klaim jaminan kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima oleh Balai Kesehatan sedangkan Piutang Askes rumah sakit direklasifikasi ke Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Dinas Kesehatan	928.658.751,00	4.038.878.660,00
	<b>Jumlah</b>	<b>928.658.751,00</b>	<b>4.038.878.660,00</b>

**b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Jasa Usaha Rp49.226.600,00**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp49.226.600,00 merupakan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Dinas Perhubungan	17.185.000,00	27.019.000,00
2	Dinas Koperasi dan UMKM	-	27.100.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.226.600,00</b>	<b>86.160.600,00</b>

**5.3.1.1.2.3. Piutang Lain - lain PAD Yang Sah Rp157.475.313.164,83**

Piutang lain-lain PAD Yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp157.475.313.164,83 turun sebesar (Rp351.557.590.497,97) atau (69,06%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp509.032.903.662,80 terdiri dari:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Piutang Bunga Deposito	293.688.356,53	1.535.636.986,10
2	Piutang Denda keterlambatan	-	1.549.742.501,00
3	Piutang Denda Retribusi	-	-
4	Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.043.382.630,70	762.041.303,00
4	Piutang Pendapatan BLUD	156.138.242.177,60	505.185.482.872,70
<b>Jumlah</b>		<b>157.475.313.164,83</b>	<b>509.032.903.662,80</b>

Penambahan dan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah diuraikan pada tabel berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2020				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7)
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>509.032.903.662,80</b>	<b>536.055.572.482,98</b>	<b>28.599.555.538,00</b>	<b>903.328.326.596,11</b>	<b>12.884.391.923,25</b>	<b>157.475.313.164,42</b>
1	SKPKD	1.217.397.260,27	-	-	1.217.397.260,27	-	-
2	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata	370.051.571,00	-	98	-	-	370.051.669,00
3	RSUD Moewardi	308.465.731.566,00	39.675.599.143,70	14.681.237.229,00	317.592.820.757,00	687.291.532,00	44.542.455.649,70
4	RSUD Margono	110.031.263.202,39	335.289.148.947,72	-	375.106.205.871,23	166.844.694,25	70.047.361.584,63
5	RSUD Tugurejo	50.160.905.890,60	115.609.501.797,00	9.345.573.027,00	142.878.931.628,00	12.030.255.697,00	20.206.793.389,60
6	RSUD Kelet	9.473.249.062,34	1.390.245.030,00	2.331.667.000,00	9.425.905.837,00	-	3.769.255.255,34
7	RSJD Amino	13.907.244.836,59	33.152.873.933,00	1.559.293.800,00	42.052.164.253,00	-	6.567.248.316,59
8	RSJD Solo	7.718.623.305,00	5.890.143.298,00	96.327.400,00	7.028.735.355,00	-	6.676.358.648,00
9	RSJD Soedjarwadi	7.688.436.968,60	5.048.060.333,56	585.456.984,00	8.026.165.634,60	-	5.295.788.651,56

**5.3.1.1.2.3.1. Piutang Bunga Deposito**

**Rp293.688.356,53**

Saldo sebesar Rp293.688.356,53 merupakan hak dari bunga deposito yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	SKPKD	-	1.217.397.260,27
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	272.260.273,97	310.787.671,23
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.013.699,00	3.178.082,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	19.414.383,56	4.273.972,60
<b>Jumlah</b>		<b>293.688.356,53</b>	<b>1.535.636.986,10</b>

**5.3.1.1.2.3.2. Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

**Rp1.043.382.630,70**

Saldo sebesar Rp1.043.382.630,70 merupakan piutang per 31 Desember 2020 atas retribusi sewa lahan dan ruangan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	370.051.669,00	370.051.669,00
2	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan)	222.550.171,70	118.490.000,00
3	RSUD Tugurejo	450.780.790,00	272.872.815,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL)	-	626.917,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.043.382.630,70</b>	<b>762.041.303,00</b>



**5.3.1.1.2.3.3. Piutang Pendapatan BLUD**

**Rp156.138.242.177,60**

Saldo sebesar Rp156.138.242.177,60 merupakan piutang pasien BLUD dan piutang jasa pelayanan BLUD per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

**Piutang Pasien BLUD**

	2020	2019
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.491.871.454,00	24.319.025.473,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	8.017.314.833,91	26.734.917.026,41
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	962.029.927,00	7.284.784.436,60
4 RSUD Tugurejo Semarang	2.705.448.471,60	9.354.749.841,60
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	137.053.155,34	1.289.818.027,34
6 RSJD Surakarta	714.604.092,00	3.293.737.646,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	207.141.855,00	134.670.468,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.235.463.788,85</b>	<b>72.411.702.918,95</b>

**Piutang Jasa Pelayanan BLUD**

	2020	2019
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	38.828.034.024,00	284.028.216.093,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	61.757.786.476,75	81.435.816.003,75
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	5.603.204.691,00	6.619.282.318,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	17.050.564.128,00	40.533.283.234,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.632.202.100,00	8.183.431.035,00
6 RSJD Surakarta	5.961.754.556,00	4.424.885.659,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.069.232.413,00	7.548.865.611,00
<b>Jumlah</b>	<b>137.902.778.388,75</b>	<b>432.773.779.953,75</b>

**5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

**Rp128.148.979.363,00**

Saldo sebesar Rp128.148.979.363,00 merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021 atas penetapan kurang salur atas bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil migas sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 SKPKD	128.148.979.363,00	184.304.523.061,00
<b>Jumlah</b>	<b>128.148.979.363,00</b>	<b>184.304.523.061,00</b>

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp128.148.979.363,00 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2020				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7)
	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>184.304.523.061,00</b>	<b>128.148.979.363,00</b>	<b>-</b>	<b>184.304.523.061,00</b>	<b>-</b>	<b>128.148.979.363,00</b>
1	DBH Pajak PBB	40.947.360.293,00	14.396.191.074,00		40.947.360.293,00		14.396.191.074,00
2	DBH Pajak PPh 21	127.638.662.162,00	96.677.581.630,00		127.638.662.162,00		96.677.581.630,00





NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2020				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
3	DBH Cukai dan Tembakau	6.423.841.554,00	17.075.206.659,00		6.423.841.554,00		17.075.206.659,00
4	DBH Kehutanan	3.640.428.967,00			3.640.428.967,00		-
5	DBH Minerba	38.396.756,00			38.396.756,00		-
6	DBH Panas Bumi	370.565.569,00			370.565.569,00		-
7	DBH Minyak dan Gas Bumi	5.245.267.760,00			5.245.267.760,00		-

**5.3.1.1.2.5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp12.269.762,00**

Saldo sebesar Rp12.269.762,00 merupakan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Retribusi dari Pemerintah Daerah Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

	2020	2019
1 SKPKD	12.269.762,00	1.102.158.762,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.269.762,00</b>	<b>1.102.158.762,00</b>

**5.3.1.1.2.6. Piutang Pendapatan Lainnya Rp16.019.421.662,00**

Saldo piutang pendapatan lainnya sebesar Rp16.019.421.662,00 terdiri dari Piutang Dana Talangan dan Piutang Tempat Pelelangan Ikan per tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Piutang Pasien Rumah Sakit BLUD	-	-
2 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD	-	-
3 Piutang Dana Talangan	365.636.365,00	365.636.365,00
4 Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
5 Piutang Dana Bergulir	11.548.482.579,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.019.421.662,00</b>	<b>4.470.939.083,00</b>

**5.3.1.1.2.6.1. Piutang Dana Talangan Rp365.636.365,00**

Saldo sebesar Rp365.636.365,00 merupakan hak atas dana talangan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

	2020	2019
1 Kabupaten Cilacap	365.636.365,00	365.636.365,00
<b>Jumlah</b>	<b>365.636.365,00</b>	<b>365.636.365,00</b>

**5.3.1.1.2.6.2. Piutang Tempat Pelelangan Ikan Rp4.105.302.718,00**

Saldo sebesar Rp4.105.302.718,00 merupakan hak atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2020 dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sejak 1 Januari 2010 kewenangan pengelolaan TPI telah diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota



(Dalam rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.105.302.718,00</b>	<b>4.105.302.718,00</b>

#### 5.3.1.1.2.6.3. Piutang Lainnya

**Rp11.548.482.579,00**

Saldo sebesar Rp11.548.482.579,00 merupakan hak atas saldo dana bergulir yang sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum dikembalikan ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
1 Biro Perekonomian-UMKM	1.710.392.264,00	-
2 Dinas Koperasi dan UKM	1.788.027.705,00	-
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.403.855.800,00	-
4 Dinas Ketahanan Pangan	48.700.000,00	-
5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.084.833.401,00	-
6 Dinas Kehutanan	2.882.500.000,00	-
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.630.173.409,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.548.482.579,00</b>	-

#### 5.3.1.1.3. Penyisihan Piutang

**(Rp418.683.863.540,78)**

Saldo Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar **(Rp418.683.863.540,78)** turun sebesar (Rp115.975.043.435,07) atau (21,69%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp534.658.906.975,86). Penyisihan piutang merupakan penyisihan atas piutang pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Penyisihan Piutang Pajak	388.631.417.415,03	510.706.522.497,59
2 Penyisihan Piutang Retribusi	20.750.018,76	50.578.018,30
3 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	14.012.274.445,00	16.633.799.958,64
4 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	2.791.556.624,52
5 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	5.510.793,81
6 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	16.019.421.662,00	4.470.939.083,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.683.863.540,78</b>	<b>534.658.906.975,86</b>

#### 5.3.1.1.3.1. Penyisihan Piutang Pajak

**(Rp388.631.417.415,03)**

Penyisihan piutang atas pajak per 31 Desember 2020 sebesar (Rp388.631.417.415,03) turun sebesar (Rp122.075.105.082,56) atau (23,90%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp510.706.522.497,59) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Piutang PKB	388.629.567.283,68	510.705.841.319,70
2 Piutang BBNKB	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
3 Piutang PBBKB	-	-
4 Piutang Pajak Air Permukaan Tanah	1.850.131,35	681.177,89
5 Piutang Pajak Rokok	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>388.631.417.415,03</b>	<b>510.706.522.497,59</b>

Rincian penyisihan piutang pajak Tahun 2020 berdasarkan umur piutang disajikan pada tabel berikut.

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
1	Pajak PKB	388.629.567.283,68	4.571.828.653,58	45.909.758.879,60	338.147.979.750,50	-	388.629.567.283,68
2	Pajak Air Permukaan	1.850.131,35	1.850.131,35	-	-	-	1.850.131,35
	<b>Jumlah</b>	<b>388.631.417.415,03</b>	<b>4.573.678.784,93</b>	<b>45.909.758.879,60</b>	<b>338.147.979.750,50</b>	-	<b>388.631.417.415,03</b>

### 5.3.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Retribusi

**(Rp20.750.018,76)**

Penyisihan piutang atas retribusi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp20.750.018,76) mengalami penurunan sebesar (Rp29.834.612,55) atau (58,97%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp50.578.018,30) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.643.293,76	20.194.393,30
2 Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.106.725,00	30.383.625,00
	<b>20.750.018,76</b>	<b>50.578.018,30</b>

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>20.750.018,76</b>	<b>4.729.218,76</b>	-	<b>16.020.800,00</b>	-	<b>20.750.018,76</b>
1	Dinas Perhubungan	85.925,00	85.925,00	-	-	-	85.925,00
2	Dinas Kesehatan	4.643.293,76	4.643.293,76	-	-	-	4.643.293,76
3	BPKAD	16.020.800,00	-	-	16.020.800,00	-	16.020.800,00

#### a. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Kesehatan	4.643.293,76	20.194.393,30
	<b>4.643.293,76</b>	<b>20.194.393,30</b>



**b. Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Dinas Perhubungan	85.925,00	812.825,00
2	Dinas Koperasi dan UMKM	-	13.550.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.020.800,00	16.020.800,00
		<b>16.106.725,00</b>	<b>30.383.625,00</b>

**5.3.1.1.3.3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**

**(Rp14.012.274.445,00)**

Saldo sebesar (Rp14.012.274.445,00) merupakan saldo penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Penyisihan Piutang Bunga Deposito	2.207.442,64	7.678.184,50
2	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan	-	7.748.712,51
3	Penyisihan Piutang Denda Retribusi	-	-
4	Penyisihan Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	390.350.506,35	372.564.089,63
5	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	13.619.716.496,01	16.245.808.972,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.012.274.445,00</b>	<b>16.633.799.958,64</b>

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>14.012.274.445,00</b>	<b>699.741.992,19</b>	<b>257.900.652,25</b>	<b>1.893.276.464,07</b>	<b>11.161.355.336,49</b>	<b>14.012.274.445,00</b>
1	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata	370.051.669,00	-	-	-	370.051.669,00	370.051.669,00
2	RSUD Moewardi	3.731.204.083,82	198.377.995,72	86.762.720,60	553.165.932,50	2.892.897.435,00	3.731.204.083,82
3	RSUD Margono	5.745.274.072,97	316.631.870,54	66.059.633,90	697.808.569,63	4.664.773.998,90	5.745.274.072,97
4	RSUD Tugurejo	2.105.729.517,72	84.632.772,02	88.376.012,10	463.758.132,00	1.468.962.601,60	2.105.729.517,72
5	RSUD Kelet	101.640.240,78	18.375.953,90	944.280,45	2.301.664,44	80.018.341,99	101.640.240,78
6	RSJD Amino	1.074.555.587,48	26.318.359,48	14.848.603,00	121.701.834,00	911.686.791,00	1.074.555.587,48
7	RSJD Solo	680.979.662,95	29.932.353,05	325.824,90	35.908.216,00	614.813.269,00	680.979.662,95
8	RSJD Soedjarwadi	202.839.610,28	25.472.687,48	583.577,30	18.632.115,50	158.151.230,00	202.839.610,28

**Penyisihan Piutang Bunga Deposito**

		2020	2019
1	SKPKD	-	6.086.986,30
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.361.301,37	1.553.938,36



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	10.068,50	15.889,98
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	97.071,92	21.369,86
5	RSUD Dr Moewardi Surakarta	739.000,86	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.207.442,65</b>	<b>7.678.184,50</b>

Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan

	2020	2019
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	7.748.712,51
	<b>Jumlah</b>	<b>7.748.712,51</b>

Penyisihan Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

	2020	2019
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	370.051.669,00
2	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan)	373.750,00
3	RSUD Tugurejo (Parkir dan Ruangan)	18.867.843,95
4	RSUD Kelet Donorojo (Lahan)	987.943,40
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL)	-
6	RSJD Surakarta	69.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>390.350.506,35</b>

Penyisihan Piutang Pasien BLUD

	2020	2019
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	3.533.801.388,14
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	5.043.897.900,08
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	668.812.796,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	1.404.214.761,18
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	82.491.286,88
6	RSJD Surakarta	651.101.590,61
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	177.396.375,91
	<b>Jumlah</b>	<b>11.561.716.098,80</b>

Penyisihan Piutang Jasa Pelayanan BLUD

	2020	2019
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	196.289.944,82
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	700.014.871,52
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	405.732.723,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	682.646.912,55
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	18.161.010,50
6	RSJD Surakarta	29.808.772,78
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	25.346.162,06
	<b>Jumlah</b>	<b>2.058.000.397,23</b>

**5.3.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Rp(0,00)**

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah pusat – dana perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp0,00).

	2020	2019
1	SKPKD	Rp2.791.556.624,52

(Dalam rupiah)



Jumlah - Rp2.791.556.624,52

Rincian Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

	(Dalam rupiah)	
	2020	2019
1 DBH Pajak PBB	-	1.800.838.617,24
2 DBH Pajak PPh 21	-	638.193.310,81
3 DBH Cukai dan Tembakau	-	32.119.207,77
4 DBH Kehutanan	-	272.786.037,21
5 DBH Minerba	-	3.115.566,79
6 DBH Panas Bumi	-	18.277.545,90
6 DBH Minyak dan Gas Bumi	-	26.226.338,80
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.791.556.624,52</b>

#### 5.3.1.1.3.5. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Rp0,00)

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp0,00).

*(Dalam rupiah)*

	(Dalam rupiah)	
	2020	2019
1 SKPKD	-	5.510.793,81,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>5.510.793,81,00</b>

#### 5.3.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Rp4.470.939.083,00)

Penyisihan piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp4.470.939.083,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

1	Penyisihan Piutang Lainnya	365.636.365,00	365.636.365,00
2	Penyisihan Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
3	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	11.548.482.579,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>16.019.421.662,00</b>	<b>4.470.939.083,00</b>

Rincian penyisihan piutang berdasarkan umur piutang

*(Dalam Rupiah)*

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang UnAudited	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	<b>Piutang Pendapatan Lainnya</b>						
1	Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718,00	-	-	-	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
2	Piutang Dana Talangan kpd Kab Cilacap	365.636.365,00	-	-	-	365.636.365,00	365.636.365,00
3	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	11.548.482.579,00	-	-	-	11.548.482.579,00	11.548.482.579,00



**a. Penyisihan Piutang Dana Talangan**

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	Kabupaten Cilacap	365.636.365,00	365.636.365,00
	<b>Jumlah</b>	<b>365.636.365,00</b>	<b>365.636.365,00</b>

**b. Penyisihan Piutang Tempat Pelelangan Ikan**

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.105.302.718,00</b>	<b>4.105.302.718,00</b>

**c. Penyisihan Piutang Lainnya**

		<i>(Dalam Rupiah)</i>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	Biro Perekonomian-UMKM		
	- menunggak 3-5 tahun	-	-
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.710.392.264,00	
2	Dinas Koperasi dan UMKM		
	- menunggak 3-5 tahun	-	-
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.788.027.705,00	
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.403.855.800,00	
4	Dinas Ketahanan Pangan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	48.700.000,00	
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	- menunggak 2-3 tahun	-	-
	- menunggak lebih dari 5 tahun	2.084.833.401,00	
5	Dinas Kehutanan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	2.882.500.000,00	
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	- menunggak lebih dari 5 tahun	1.630.173.409,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>11.548.482.579,00</b>	<b>-</b>

**5.3.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka**

**Rp6.144.929.018,16**

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.144.929.018,16 naik sebesar Rp328.341.845,28 atau 5,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.816.587.172,88. Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2020 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2020 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa belanja Asuransi Barang Milik Daerah dan Belanja Sewa masa pertanggungjawaban berlaku sampai Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	186.066.314,46	328.387.185,66
2 Dinas Kesehatan	437.400.035,82	505.077.570,50
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	517.491.080,02	512.258.981,75
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	396.681.451,71	431.609.220,76
5 RSUD Tugurejo Semarang	69.999.886,83	69.572.762,98
6 RSJD Surakarta	14.216.542,38	12.723.954,80
7 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	55.984.051,47	-
8 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	-	-
9 Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	180.743.994,41	140.164.754,10
10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87.650.507,38	63.074.005,33
11 Satuan Polisi Pamong Praja	93.611.902,58	65.493.231,42
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.745.476,61	18.401.061,00
13 Dinas Sosial	135.866.286,36	118.743.442,96
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148.749.155,48	136.065.518,98
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	101.225.768,71	95.345.741,11
16 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	25.798.767,13	22.065.273,98
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138.901.110,29	222.855.425,82
18 Dinas Ketahanan Pangan	83.207.715,73	65.503.499,91
19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.404.731,49	73.189.836,52
20 Dinas Perhubungan	217.174.808,22	210.089.497,92
21 Dinas Koperasi dan UKM	664.923.712,75	63.199.038,24
22 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
23 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	269.861.998,00	331.117.100,39
24 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.807.453,64	34.572.292,33
25 Dinas Kelautan dan Perikanan	91.543.111,34	132.921.135,62
26 Dinas Pertanian dan Perkebunan	235.011.059,00	181.037.904,21
26 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.989.333,33	29.538.993,45
27 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.549.021,79	149.411.971,61
28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	167.089.135,99	184.797.015,52
29 Sekretariat Daerah	366.418.698,56	395.785.447,42
30 Sekretariat DPRD	262.388.737,64	234.327.418,03
31 Inspektorat	112.813.216,33	92.080.288,45
32 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	610.143.573,86	599.320.765,02
33 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	185.356.625,08	184.868.747,32
34 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.025.562,83	10.292.183,05
35 Badan Penghubung	95.088.190,93	102.695.906,71
<b>Jumlah</b>	<b>6.144.929.018,16</b>	<b>5.816.587.172,88</b>

### 5.3.1.1.5. Persediaan

**Rp511.593.784.744,03**

Saldo persediaan sebesar Rp511.593.784.744,03 naik sebesar Rp297.396.202.254,14 atau 138,84% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp214.197.582.489,89. Persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2020 berupa barang habis pakai yang terdiri dari persediaan bahan, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan barang untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga, serta persediaan natura dan pakan. Pengelompokan jenis





persediaan barang habis pakai sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
1 Persediaan Bahan	24.813.481.935,62	16.352.919.631,71
2 Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	314.545.817.640,66	64.494.463.785,88
3 Persediaan Obat-Obat	164.480.971.880,25	128.046.839.162,57
4 Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan	738.350.000,00	738.350.000,00
5 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	68.206.700,00	-
6 Persediaan Natura dan Pakan	6.946.956.587,50	4.565.009.909,73
<b>Jumlah</b>	<b>511.593.784.744,03</b>	<b>214.197.582.489,89</b>

#### 5.3.1.1.5.1. Persediaan Bahan

**Rp24.813.481.935,62**

Saldo sebesar Rp24.813.481.935,62 merupakan persediaan bahan antara lain bahan kimia, bahan laboratorium, bahan bibit, bahan penelitian, dan lain-lain pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.279.200,00	-
2 Dinas Kesehatan	1.526.606.576,00	3.087.472.184,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	6.316.697.924,48	1.725.905.939,78
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.836.699.615,00	1.229.715.747,10
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.294.998.905,00	463.249.806,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	125.951.130,86	61.189.588,83
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	243.166.398,28	1.176.000,00
8 RSJD Surakarta	-	-
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	191.478.825,00	132.777.650,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.878.183.833,00	2.362.247.236,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	411.732.525,00	980.955.775,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	-	-
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	369.023.550,00	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	560.319.855,00	655.424.326,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
21 Dinas Ketahanan Pangan	6.150.000,00	-
22 Dinas Perhubungan	-	-
23 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
25 Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.136.331.507,00	701.980.007,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.559.955.257,00	316.068.027,00
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.304.230.834,00	4.601.529.345,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.676.000,00	33.228.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33 SKPKD	-	-
34 Sekretariat Daerah	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42 Badan Penghubung	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>24.813.481.935,62</b>	<b>16.352.919.631,71</b>

**5.3.1.1.5.2. Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**

**Rp314.545.817.640,66**

Saldo sebesar Rp314.545.817.640,66 merupakan persediaan alat tulis kantor, benda pos, dokumen, alat listrik, dan lain-lain pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	18.302.420.498,43	18.278.360.265,00
2 Dinas Kesehatan	188.449.606.741,00	4.941.327.736,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	17.850.815.704,05	17.508.602.064,53
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	7.915.972.056,00	6.381.150.664,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.449.012.797,00	2.134.242.247,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	4.903.806.319,18	3.535.504.050,43
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.387.221.901,63	346.614.991,75
8 RSJD Surakarta	319.958.977,00	274.165.187,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.524.152.221,37	2.397.369.675,37
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	98.817.625,00	116.835.992,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	861.000,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	750.000,00	3.785.000,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	17.717.476,00	26.218.115,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.066.500,00	20.822.100,00
15 Dinas Sosial	13.970.000,00	9.690.500,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.337.598.672,00	64.143.000,00
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.208.650,00	77.169.200,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.976.500,00	3.387.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.098.200,00	49.779.850,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.496.500,00	13.482.000,00
21 Dinas Ketahanan Pangan	20.025.113,00	13.671.000,00
22 Dinas Perhubungan	492.561.745,00	474.230.040,00
23 Dinas Koperasi dan UKM	5.387.200,00	24.953.012,00
24 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.825.000,00	7.784.400,00
25 Dinas Komunikasi dan Informasi	631.000,00	841.000,00
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	381.967.550,00	5.541.400,00
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	76.923.441,00	16.956.000,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	11.406.917,80
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	202.522.700,00	50.210.800,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	378.540.790,00	161.840.200,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.935.700,00	4.089.000,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	117.104.483,00	200.678.912,00
33 SKPKD	55.883.894.441,00	-
34 Sekretariat Daerah	15.356.000,00	67.367.950,00
35 Sekretariat DPRD	14.305.000,00	48.092.500,00
36 Inspektorat	3.411.100,00	8.396.600,00
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.586.625,00	44.910.890,00
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.578.495.604,00	6.428.359.921,00
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85.376.500,00	58.693.000,00
40 Badan Kepegawaian Daerah	347.419.810,00	378.996.905,00
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	197.806.000,00	295.634.900,00
42 Badan Penghubung	22.074.500,00	8.297.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>314.545.817.640,66</b>	<b>64.494.463.785,88</b>

### 5.3.1.1.5.3. Persediaan Obat-obatan

**Rp164.480.971.880,25**

Saldo sebesar Rp164.480.971.880,25 Persediaan obat-obatan pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-
2 Dinas Kesehatan	87.243.583.400,00	61.556.366.491,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	26.414.178.975,99	31.419.197.571,04
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	38.255.421.152,95	14.652.136.870,58
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.459.823.365,00	2.129.231.607,30
6 RSUD Tugurejo Semarang	3.844.938.774,65	2.598.312.508,89
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.599.775.533,87	10.577.322.294,26
8 RSJD Surakarta	2.326.856.122,00	2.807.441.183,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.152.630.895,79	1.175.400.469,50
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	7.362.494,00	7.288.340,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	29.511.000,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
21 Dinas Ketahanan Pangan	-	-
22 Dinas Perhubungan	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019
23 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
25 Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	7.606.000,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	94.490.471,00	705.835.400,00
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	79.580.844,00	309.170.570,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.887.561,00	15.783.201,00
33 Sekretariat Daerah	442.290,00	3.256.756,00
34 Sekretariat DPRD	-	-
35 Inspektorat	-	-
36 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
37 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
38 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
39 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	52.978.900,00
41 Badan Penghubung	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>164.480.971.880,25</b>	<b>128.046.839.162,57</b>

**5.3.1.1.5.4. Persediaan Barang Untuk Dijual/diserahkan** **Rp738.350.000,00**

Saldo sebesar Rp738.350.000,00 merupakan Persediaan Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga pada SKPD di Provinsi Jawa Tengah yang belum diserahkan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	738.350.000,00	738.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>738.350.000,00</b>	<b>738.350.000,00</b>

**5.3.1.1.5.5. Persediaan untuk Tujuan Strategis untuk berjaga-jaga** **Rp68.206.700,00**

Saldo sebesar Rp68.206.700,00 merupakan persediaan untuk tujuan strategi untuk berjaga-jaga sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.846.700,00	-
2 SKPKD	31.360.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>68.206.700,00</b>	<b>-</b>



**5.3.1.1.5.6. Persediaan Natura dan Pakan**

**Rp6.946.956.587,50**

Saldo sebesar Rp6.946.956.587,50 merupakan persediaan bahan pangan/ makanan pokok, makanan dan minuman serta pakan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	-
2 Dinas Kesehatan	1.159.096.977,00	83.641.550,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	59.299.190,00	121.750.496,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	185.389.691,00	90.635.535,00
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	210.838.985,00	508.003.210,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	58.884.758,50	73.435.456,70
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	38.888.368,00	121.460.527,03
8 RSJD Surakarta	19.507.850,00	20.688.475,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	51.785.118,00	114.833.330,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15 Dinas Sosial	-	-
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	730.653.900,00	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
21 Dinas Ketahanan Pangan	2.262.932.950,00	2.123.824.000,00
22 Dinas Perhubungan	-	-
23 Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
25 Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	47.010.000,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.100.595.800,00	1.259.727.330,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33 SKPKD	69.083.000,00	-
34 Sekretariat Daerah	-	-
35 Sekretariat DPRD	-	-
36 Inspektorat	-	-
37 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40 Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42 Badan Penghubung	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.946.956.587,50</b>	<b>4.565.009.909,73</b>

Persediaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam neraca tidak termasuk persediaan yang kadaluarsa per 31 Desember 2020 berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp1.040.187.837,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp423.801.810,00 pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih menunggu proses pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak  
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai  
di Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah  
per 31 desember 2020

No	Rumah Sakit Daerah	Obat/Reagen	Alkes Habis Pakai
1	RSUD Moewardi	117.622.859,00	58.742.273,00
2	RSUD Margono Sukarjo	44.421.794,00	68.623.247,00
3	RSUD Tugurejo	17.513.369,00	52.273.632,00
4	RSUD Kelet	-	-
5	RSJD Amino Gondohutomo	3.370.174,00	-
6	RSJD Surakarta	49.427.713,00	-
7	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	11.806.749,00	-
	<b>Total</b>	<b>244.162.658,00</b>	<b>179.639.152,00</b>

- Sebesar Rp616.386.027,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang masih menunggu proses pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak  
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai  
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
per 31 desember 2020

No	Balai Kesehatan	Obat/Reagen	Alkes Habis Pakai
1	Balai Kesehatan Masyarakat Pati	76.234.964,00	-
2	Balai Kesehatan Masyarakat Magelang	255.616.188,00	-
3	Balai Kesehatan Masyarakat Ambarawa	16.505.360,00	-
4	Balai Kesehatan Indera Masyarakat	185.042.388,00	-
5	Balai Kesehatan Masyarakat Semarang	24.553.227,00	58.433.900,00
	<b>Total</b>	<b>557.952.127,00</b>	<b>58.433.900,00</b>



Jumlah persediaan yang tercatat sudah termasuk persediaan per tanggal neraca hasil dari hibah dan belanja tidak terduga atas penanganan Covid-19 yang terdapat pada:

No	SKPD	Hibah	BTT
1	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>162.956.380.414,00</b>	<b>55.883.356.601,00</b>
	- Alat/Bahan Kegiatan Kantor	148.821.629.714,00	55.883.356.601,00
	- Obat-obatan	13.058.361.700,00	-
	- Natura & Pangan	1.076.389.000,00	-
2	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>5.882.074.142,00</b>	<b>100.980.840,00</b>
	- Alat/Bahan Kegiatan Kantor	5.316.343.142,00	537.840,00
	- Natura & Pangan	565.731.000,00	69.083.000,00
	- Persediaan berjaga-jaga	-	31.360.000,00
	<b>Total</b>	<b>168.838.454.556,00</b>	<b>55.984.337.441,00</b>

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

**Rp6.424.346.793.977,35**

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.424.346.793.977,35 turun sebesar (Rp103.875.568.621,12) atau (1,59%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.528.222.362.598,47 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Investasi Non Permanen	-	-
2 Investasi Permanen	6.424.346.793.977,35	6.528.222.362.598,47
<b>Jumlah</b>	<b>6.424.346.793.977,35</b>	<b>6.528.222.362.598,47</b>

#### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

**Rp0,00**

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang terdiri dari investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dan investasi non permanen lainnya diragukan tertagih, dengan rincian saldo sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Dana Bergulir	-	11.801.023.479,00
2 Penyisihan Investasi Non Permanen	-	(11.801.023.479,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### 5.3.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lain - Dana Bergulir

**Rp0,00**

Saldo sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp11.801.023.479,00) atau (100,00%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.801.023.479,00 merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian saldo sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Biro Perekonomian-UMKM	-	1.723.392.264,00
2 Dinas Koperasi dan UKM	-	1.862.402.705,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.403.855.800,00
4 Dinas Ketahanan Pangan	-	48.700.000,00
5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	2.234.833.401,00
6 Dinas Kehutanan	-	2.882.500.000,00
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.645.339.309,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>11.801.023.479,00</b>

#### 5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen – Diragukan Tertagih Rp0,00

Saldo sebesar (Rp0,00) turun sebesar (Rp11.801.023.479,00) atau (100,00%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp11.801.023.479,00) merupakan saldo Investasi Non Permanen–Diragukan Tertagih yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020. Kebijakan pencadangan ini sesuai dengan kebijakan Cadangan Piutang Tidak Tertagih pada Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Biro Perekonomian-UMKM		
- menunggak 3-5 tahun	-	-
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	1.723.392.264,00
2 Dinas Koperasi dan UMKM		
- menunggak 3-5 tahun	-	-
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	1.862.402.705,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	1.403.855.800,00
4 Dinas Ketahanan Pangan		
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	48.700.000,00
4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
- menunggak 2-3 tahun	-	-
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	2.234.833.401,00
5 Dinas Kehutanan		
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	2.882.500.000,00
6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
- menunggak lebih dari 5 tahun	-	1.645.339.309,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>11.801.023.479,00</b>

#### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen Rp6.424.346.793.977,35

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.424.246.793.977,35 turun sebesar (Rp103.875.568.621,12) atau (1,59%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.528.222.362.598,47, Investasi Permanen pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah dan negara.





**5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah**

**Rp6.424.346.793.977,35**

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.424.246.793.977,35 turun sebesar (Rp103.875.568.621,12) atau (1,59%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.528.222.362.598,47, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2019	Mutasi	2020
1 PT Bank Jateng	3.946.566.548.479,81	(101.153.526.393,08)	3.845.413.022.086,73
2 PD BPR BKK & BKK	685.016.624.958,74	4.725.106.368,27	689.741.731.327,01
3 PD BKK Jateng	115.591.871.121,10	17.507.443.344,95	133.099.314.466,05
4 PT. Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	-	19.960.000.000,00
5 PT. PRPP	40.083.765.112,35	(2.457.033.190,34)	37.626.731.922,01
6 PDAB Tirta Utama	118.460.984.916,00	4.025.000.783,00	122.485.985.699,00
7 Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah	189.050.107.988,00	(8.016.321.805,00)	181.033.786.183,00
8 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	108.246.923.244,26	9.335.984.412,81	117.582.907.657,07
9 PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.050.465.724.838,05	(16.587.582.655,49)	1.033.878.142.182,56
10 PT. Jateng Petro Energi	98.678.939.003,95	(16.801.551.768,95)	81.877.387.235,00
11 PT. Jamkrida	156.100.872.936,21	5.546.912.282,71	161.647.785.218,92
12 PD. BKK Pringsurat	0,00	0,00	0,00
13 PD. BKK Klaten	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.528.222.362.598,47</b>	<b>(103.875.568.621,12)</b>	<b>6.424.346.793.977,35</b>

Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai dengan menggunakan metode ekuitas:

(Dalam Rupiah)

NO	BUMD	% Kepemilikan	Investasi Pemanen 2019	Inventasi Permanen 2020
<b>A.</b>	<b>Equity Method</b>			
1	PT BANK JATENG	47,69%	3.946.566.548.479,81	3.845.413.022.086,73
2	PD CMJT	100,00%	189.050.107.988,00	181.033.786.183,00
3	PT SPJT	99,93%	1.050.465.724.838,05	1.033.878.142.182,56
4	PT JPEN	100,00%	98.678.939.003,95	81.877.387.235,00
5	PT JAMKRIDA JATENG	95,27%	156.100.872.936,21	161.647.785.218,92
6	PDAB TIRTA UTAMA	100,00%	118.460.984.916,00	122.485.985.699,00
7	PT KIW	40,39%	108.246.923.244,26	117.582.907.657,07
8	PT PRPP JATENG	78,50%	40.083.765.112,35	37.626.731.922,01
9	PD BPR BKK & BKK	50,11%	685.016.624.958,74	689.741.731.327,01
10	PT BKK JATENG	48,33%	115.591.871.121,10	133.099.314.466,05
11	PD BKK PRINGSURAT	42,35%	-	-
12	PD BKK KLATEN	64,40%	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>6.508.262.362.598,47</b>	<b>6.404.386.793.977,35</b>



Dengan menggunakan metode biaya (*Cost Method*) penyertaan modal kepada BUMD maupun non BUMD disajikan sebagai berikut:

**B. Cost Method**

1	PT ASKRIDA	100%	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
	<b>Jumlah B</b>	100%	<b>19.960.000.000,00</b>	<b>19.960.000.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>6.528.222.362.598,47</b>	<b>6.424.346.793.977,35</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan Akta Pendirian PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Nomor 29 tanggal 8 Oktober 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn) dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 terbagi atas 100.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,00. Dari modal dasar dimaksud telah disetorkan atau ditempatkan sebesar 25% atau sejumlah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00.

Sumber modal disetor Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp25.000.000.000,00 berasal dari pengalihan saham Pemerintah Provinsi Jateng pada PT SPHC sebesar Rp10.223.766.000,00 atau setara sebanyak 10.200 lembar saham dan sebesar Rp14.776.234.000,00 atas pengalihan ekuitas dari PT Sarana Patra Hulu Cepu yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat RUPS LB PT SPHC Nomor 68 dan RUPS LB PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Nomor 69 tanggal 12 November 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn).

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah diantaranya adalah PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan pada RUPS-LB tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa RUPS menyetujui Penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN) menjadi PT BKK JAWA TENGAH.

Terhitung sejak tidak diikutkannya konsolidasi, maka PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam proses untuk likuidasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PD BKK PRINGSURAT

- a. Berhenti Operasional dikarenakan tidak mempunyai likuiditas
- b. Performa keuangan berhenti per 29 Juni 2019 (audited)
- c. Nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan keuangan per 29 Juni 2019 sebesar (Rp119.703.975.952,00)



b. PD BKK KLATEN

- a. Beroperasional secara terbatas dan fokus untuk proses likuidasi serta menjaga kepercayaan nasabah;
- b. Secara bertahap mengurangi jumlah pegawai dan beroreintasi pada efisiensi biaya dan menjaga posisi likuiditas.
- c. Performa keuangan masih tercatat periodik dan tiap tahun dilakukan audit.
- d. Nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.063.731.395,34)

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, pada tanggal 16 Maret 2021 telah diundangkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, namun belum diundangkan Pergub untuk petunjuk pelaksanaannya. Klausul pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dituangkan dalam pasal 76A.

**5.3.1.3 Aset Tetap**

**Rp25.972.626.841.373,76**

Saldo sebesar Rp25.972.626.841.373,76 naik sebesar Rp49.493.871.869,90 atau 0,19% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.923.132.969.503,85 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Tanah	13.483.227.890.359,00	13.406.200.502.383,00
2 Peralatan dan Mesin	6.808.241.676.514,00	6.090.153.048.313,00
3 Gedung dan Bangunan	7.563.815.353.072,00	7.293.735.532.176,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.192.168.636.636,00	10.034.656.353.308,00
5 Aset Tetap Lainnya	1.365.494.887.464,00	1.259.157.541.674,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan	737.058.609.225,00	623.448.710.934,00
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.177.380.211.896,24)	(12.784.218.719.284,15)
<b>Jumlah</b>	<b>25.972.626.841.373,76</b>	<b>25.923.132.969.503,85</b>

Saldo Aset Tetap sebesar Rp25.972.626.841.373,76 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset tetap Lainnya serta Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp40.150.007.053.270,00 dan Penyusutan Aset tetap sebesar (Rp14.177.380.211.898,24 Rincian aset tetap sebelum penyusutan sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

No	Jenis	2020	2019
1	TANAH	13.483.227.890.359,00	13.406.200.502.383,00
2	PERALATAN DAN MESIN	6.808.241.676.514,00	6.090.153.048.313,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.563.815.353.072,00	7.293.735.532.176,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	10.192.168.636.636,00	10.034.656.353.308,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5	ASET TETAP LAINNYA	1.365.494.887.464,00	1.259.157.541.674,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	737.058.609.225,00	623.448.710.934,00
	JUMLAH	40.150.007.053.270,00	38.707.351.688.788,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	38.707.351.688.788,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	1.076.970.590.637,00
Belanja Hutang	52.286.508,00
Belanja Tak Terduga	35.487.989.860,00
Belanja Barang/Jasa	33.305.376.938,00
Hibah	329.731.131.553,00
Mutasi Masuk	295.040.796.038,00
Mutasi Masuk BTT	35.487.989.860,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	152.691.818.333,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	426.865.524.828,00
Koreksi	107.552.957.027,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.493.186.461.582,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	9.826.713.001,00
Mutasi Keluar	295.040.796.038,00
Mutasi Keluar BTT	35.487.989.860,00
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	152.691.818.333,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	497.013.116.533,00
Koreksi Hutang	48.592.500,00
Koreksi Belanja Modal	18.708.322.649,00
Koreksi Pencatatan	41.713.748.186,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.050.531.097.100,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>40.150.007.053.270,00</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2020
- Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2020 masih ada penerimaan hibah sehubungan adanya pelimpahan kewenangan beberapa urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru diserahkan di tahun 2019.



- d. Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- e. Mutasi Masuk BTT adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020 sebagai akibat dari belanja tidak langsung atas covid 19.
- f. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- g. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- h. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- a. Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- b. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- c. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- d. Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
- f. Mutasi Keluar BTT adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020 sebagai akibat dari belanja tidak langsung atas covid 19.
- g. Koreksi Hutang adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap atas hutang suatu aset.
- h. Koreksi Belanja Modal adalah salah catat atau pengurangan nilai aset tetap atas penggunaan belanja modal menjadi kegiatan lain.
- i. Koreksi Pencatatan adalah salah catat atau pengurangan nilai aset tetap.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

**Rp13.483.227.890.359,00**

Saldo Aset Tanah pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.483.227.890.359,00 naik sebesar Rp77.027.387.976,00 atau 0,57% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.406.200.502.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.923.840.082.236,00	1.920.304.675.909,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
2	DINAS KESEHATAN	61.324.740.000,00	61.324.740.000,00
3	RSUD DR. MOEWARDI	97.037.750.000,00	97.037.750.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	45.948.850.675,00	45.948.850.675,00
6	RSUD KELET DONOROJO	656.775.000.000,00	656.775.000.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	90.572.000.000,00	90.572.000.000,00
8	RSJD SURAKARTA	50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	14.192.500.000,00	14.192.500.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.471.666.495.610,00	2.457.413.594.424,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.295.759.065.291,00	5.367.287.476.299,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.413.941.740,00	17.413.941.740,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.786.143.000,00	11.786.143.000,00
15	DINAS SOSIAL	135.203.297.940,00	135.029.437.940,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	90.352.753.000,00	90.352.753.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	834.078.750,00	834.078.750,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	71.398.650.000,00	19.473.150.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	599.040.000,00	599.040.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.849.500.000,00	7.849.500.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	171.213.249.453,00	169.901.249.453,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.286.500.000,00	7.764.500.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	71.777.201.000,00	71.777.201.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	169.159.491.160,00	123.748.824.110,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	833.690.287.531,00	834.111.537.531,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	397.428.682.004,00	292.703.818.454,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.493.720.000,00	3.493.720.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.444.664.587,00	22.444.664.587,00
33	SKPKD	10.821.023.800,00	89.051.152.929,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	166.597.560.000,00	166.611.640.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	12.678.250.000,00	12.678.250.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	120.185.000.000,00	120.185.000.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	108.850.722.582,00	108.866.662.582,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	71.532.500.000,00	70.152.500.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.427.650.000,00	6.427.650.000,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00



No	SKPD	2020	2019
42	BADAN PENGHUBUNG	7.015.000.000,00	7.015.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.483.227.890.359,00</b>	<b>13.406.200.502.383,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	13.406.200.502.383,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	14.338.900.293,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	52.330.000,00
Hibah	49.594.083.377,00
Mutasi Masuk	183.052.273.330,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.456.624.550,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	417.711.300.000,00
Koreksi	17.652.527.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>683.858.038.550,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	
Mutasi Keluar	183.052.273.330,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	1.857.691.607,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	418.026.605.637,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	3.894.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>606.830.650.574,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>13.483.227.890.359,00</b>

Penjelasan mutasi aset tanah sebagai berikut :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp14.338.900.293,00 bersumber dari pengadaan Tahun 2020 yang menambah aset tetap tanah sesuai dengan nilai belanja modal tanah dalam realisasi LRA.
- Penambahan dari belanja non modal (barang/jasa) sebesar Rp52.330.000,00 bersumber dari belanja barang/jasa yang masuk kategori kapitalisasi atas nilai aset tetap tanah pada SKPD (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 1)



- c. Penambahan dari hibah sebesar Rp49.594.083.377,00 bersumber dari hibah pemerintah Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 1)
- d. Penambahan dari mutasi masuk sebesar Rp183.052.273.330,00 bersumber dari aset tetap tanah yang dipindahkan penggunaannya/pengelolaannya dari SKPD lain atau pengelola barang daerah (SKPKD) (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 1-6)
- e. Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.456.624.550,00 bersumber dari aset tetap Gedung dan bangunan yang dindahkan pencatatannya ke aset tetap Tanah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 6)
- f. Penambahan dari reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp417.711.300.000,00 bersumber dari reklasifikasi pencatatan aset lainnya berupa aset-aset kemitraan dengan pihak ketiga yang telah berakhir masa kerjasamanya, sehingga dicatat kembali ke aset tetap tanah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 6-7).
- g. Penambahan dari koreksi sebesar Rp17.652.527.000,00 bersumber dari hasil inventarisasi yang dilakukan SKPD (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 7-8).
- h. Pengurangan dari mutasi keluar sebesar Rp183.052.273.330,00 bersumber dari aset tetap tanah yang dipindahkan penggunaannya/pengelolaannya kepada SKPD lain atau pengelola barang daerah (SKPKD) (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 8-15)
- i. Pengurangan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.857.691.607,00 bersumber dari pengadaan belanja modal tanah namun setelah diidentifikasi, bukan termasuk kategori aset tetap tanah sehingga dipindahkan pencatatannya ke kategori aset tetap yang lain (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 15)
- j. Pengurangan dari reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp418.026.605.637,00 bersumber dari aset tetap tanah yang dipindahkan ke aset lainnya dikarenakan tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 15-24)
- k. Penambahan dari koreksi sebesar Rp3.894.080.000,00 bersumber dari kesalahan pencatatan yang dilakukan SKPD (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 8)

Saldo aset tanah sebesar Rp13.483.227.890.359,00 termasuk didalamnya:

- a. Tanah jalan akses Bandara A. Yani Semarang pada Dinas Bina Marga seluas 11.888 m<sup>2</sup> senilai Rp4.160.800.000,00. Tanah tersebut merupakan pembebasan tanah milik PT PRPP pada tahun 2008. Berdasarkan surat klaim PT PRPP nomor 33/DIR/PRPP/E/IV/13 perihal Kepastian Kekurangan Pembayaran Aset Tanah PT.PRPP Jateng bahwa total luas tanah yang digunakan untuk jalan akses Bandara A. Yani Semarang seluas 42.730 m<sup>2</sup> sehingga masih terdapat kekurangan





pembayaran seluas 30.852 m<sup>2</sup>. Dinas Bina Marga belum dapat melakukan pencatatan atas tanah seluas 30.852 m<sup>2</sup> dan belum dapat mengakui hutang sebesar nilai tanah tersebut karena sampai akhir Mei 2018 PT PRPP belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Selain itu atas seluruh tanah PRPP sebelumnya terdapat sengketa dengan PT PT. Indo Perkasa Usahatama (PT IPU). Terhadap sengketa tersebut telah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Januari 2019 yang memenangkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti Putusan PK tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan telah diterbitkan 8 Sertifikat Pengganti HPL Kawasan PRPP oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 6 Agustus 2019. Berdasarkan Sertifikat HPL dimaksud, PT PRPP telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat HGB di atas HPL Kawasan PRPP untuk bagian tanah yang dikelola oleh PT PRPP seluas ± 40 Hektar yang saat ini masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 69.890 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) bagian dari tanah Hak Pengelolaan Nomor 24 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas keseluruhan 171.260 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh meter persegi);
  - Tanah seluas 333.810 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) bagian dari tanah Hak Pengelolaan Nomor 25 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas keseluruhan 553.336 m<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi).
- b. Aset Tanah di Jalan Pleburan Nomor 5 Semarang yang tercatat di KIB Sekretariat Daerah sebesar Rp37.019.000,00 saat ini dalam kondisi tidak dimanfaatkan karena masih dalam sengketa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/PK/TUN/2006 tanggal 4 Mei 2007 menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan jual beli aset tanah tersebut. Putusan tersebut belum dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan aset tanah tersebut.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dapat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dengan pertimbangan mengingat aset daerah tersebut telah tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi daerah maupun Negara untuk pelepasan/penjualan aset daerah wajib mempedomani ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah, yaitu:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Guna memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada BPK terhadap pelaksanaan Putusan PK tersebut.

- c. Aset tanah di kawasan PRPP yang dikerjasamakan dan tercatat pada DPPAD digugat oleh PT IPU melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 September 2014, dengan tergugat Gubernur Jawa Tengah, Yayasan PRPP, PT PRPP, BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan Kota Semarang. Atas Gugatan tersebut, PT IPU meminta tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp789.181.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp873.213.350.000,00.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 790 PK/PDT/2018 tanggal 23 Januari 2019 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pengelolaan HPL di Kawasan PRPP merujuk kembali pada Perjanjian antara PT PRPP dengan PT IPU Nomor 03/YAY/Tahun 1987 tanggal 7 Mei 1987 dan perubahannya Nomor 03/YAY/XI/91 tanggal 25 Nopember 1991.

#### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

**Rp6.808.241.676.514,00**

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.808.241.676.514,00 naik sebesar Rp718.088.628.201,00 atau 11,79% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.090.153.048.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.3.1.3.2.1 Alat-alat Berat

**Rp323.846.905.640,00**

Saldo Aset Alat Berat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp323.846.905.640,00 naik sebesar Rp7.339.348.090,00 atau 2,32% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp316.507.521.550,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.837.471.218,00	15.348.562.002,00
2	DINAS KESEHATAN	7.088.657.774,00	7.065.766.550,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	18.992.339.070,00	18.349.464.070,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	26.043.127.104,00	23.909.127.104,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	8.855.784.989,00	8.732.584.989,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.366.243.889,00	3.366.243.889,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	6.504.376.000,00	6.471.276.000,00
8	RSJD SURAKARTA	2.773.025.000,00	2.773.025.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.542.120.715,00	1.542.120.715,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	120.385.493.186,00	120.385.493.186,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	24.374.491.615,00	23.964.591.615,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	526.280.900,00	526.280.900,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	640.150.000,00	640.150.000,00
15	DINAS SOSIAL	1.451.251.798,00	1.256.251.798,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.979.907.500,00	2.972.653.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	316.916.998,00	316.916.998,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	637.400.000,00	637.400.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	550.297.768,00	550.297.768,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.258.167.018,00	1.258.167.018,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	1.954.691.741,00	1.884.721.741,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.709.449.500,00	1.567.224.500,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.355.770.000,00	1.355.770.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	630.867.250,00	810.867.250,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.817.568.000,00	3.001.745.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.065.823.260,00	4.065.823.260,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.802.402.090,00	3.802.402.090,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	7.407.341.026,00	7.231.528.526,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	671.120.762,00	571.202.262,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.450.563.000,00	3.280.586.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.402.022.918,00	6.316.666.768,00
33	SKPKD	665.315.500,00	665.315.500,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	13.011.083.251,00	13.011.083.251,00
35	SEKRETARIAT DPRD	1.410.045.100,00	1.410.045.100,00
36	INSPEKTORAT	169.042.000,00	169.042.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.934.650.500,00	2.934.650.500,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	16.969.681.260,00	17.056.881.260,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.729.455.360,00	3.729.455.360,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	810.245.000,00	810.245.000,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.567.467.580,00	2.567.467.580,00
42	BADAN PENGHUBUNG	188.798.000,00	198.426.000,00
	Jumlah	323.846.905.640,00	316.507.521.550,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Berat pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal

316.507.521.550,00



**Penambahan**

Belanja Modal	3.194.683.986,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	63.667.000,00
Hibah	767.210.000,00
Mutasi Masuk	888.790.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	3.853.030.374,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	142.225.000,00
Koreksi	10.076.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.919.683.210,00</b>

**Berkurang**

Ekstrakontabel	9.385.770,00
Mutasi Keluar	888.790.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	319.517.450,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	193.805.000,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	168.800.900,00
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.580.299.120,00</b>

**Grand Total**

**323.846.905.640,00**

**5.3.1.3.2.2 Alat Angkut**

**Rp555.236.609.862,00**

Saldo Alat Angkut pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp555.236.609.862,00 naik sebesar Rp35.975.810.848,00 atau 6,933% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp519.260.799.014,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	106.786.582.467,00	93.776.332.021,00
2	DINAS KESEHATAN	16.130.717.418,00	14.530.144.268,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	8.039.598.756,00	7.954.838.756,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	8.724.911.263,00	8.213.861.263,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	4.839.030.303,00	4.541.928.553,00
6	RSUD KELET DONOROJO	6.730.623.544,00	6.484.003.544,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	4.968.989.750,00	4.927.864.750,00
8	RSJD SURAKARTA	6.777.396.823,00	6.574.396.823,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	4.743.360.132,00	3.930.156.623,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	15.180.450.497,00	15.016.950.497,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN	8.035.860.616,00	8.242.503.616,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
	PENATAAN RUANG		
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.156.418.720,00	4.156.418.720,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.133.303.947,00	5.133.303.947,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
15	DINAS SOSIAL	16.188.168.048,00	15.565.409.317,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	15.839.511.543,00	14.435.761.543,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.847.576.292,00	10.488.088.115,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.744.674.268,00	2.744.674.268,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.238.676.585,00	17.695.361.310,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.905.937.514,00	6.517.231.514,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.922.028.223,00	2.922.028.223,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	30.533.434.421,00	30.371.734.421,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.773.334.673,00	7.272.614.673,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.731.000.626,00	2.731.000.626,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.924.162.144,00	3.555.562.144,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.011.829.151,00	3.821.227.489,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.383.636.345,00	5.383.636.345,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.274.581.783,00	18.679.981.783,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	13.585.730.692,00	13.384.730.692,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.163.080.643,00	3.944.830.643,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.206.766.478,00	6.719.766.478,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.698.961.245,00	5.685.873.245,00
33	SKPKD	14.652.772.242,00	12.075.804.369,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	61.350.162.558,00	65.384.255.278,00
35	SEKRETARIAT DPRD	26.317.108.257,00	18.982.318.257,00
36	INSPEKTORAT	4.205.343.456,00	2.805.343.456,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.821.063.793,00	5.821.063.793,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	35.254.848.366,00	33.740.215.336,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.646.358.918,00	6.404.328.918,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.660.554.721,00	3.005.533.268,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.633.029.838,00	2.633.029.838,00
42	BADAN PENGHUBUNG	9.390.374.403,00	9.922.031.891,00
	JUMLAH	555.236.609.862,00	519.260.799.014,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Angkut pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	519.260.799.014,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	26.939.429.778,00
Belanja Hutang	
Belanja Tak Terduga	
Belanja Barang/Jasa	43.950.000,00
Hibah	13.258.280.376,00
Mutasi Masuk	21.306.704.520,00
Mutasi Masuk BTT	



Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.254.297.500,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	2.037.811.677,00
Koreksi	2.902.134.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>67.742.608.801,00</b>

**Berkurang**

Ekstrakontabel	500.000,00
Mutasi Keluar	21.306.704.520,00
Mutasi Keluar BTT	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	2.236.334.345,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	8.199.419.088,00
Koreksi Hutang	
Koreksi Belanja Modal	
Koreksi Pencatatan	23.840.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.766.797.953,00</b>

**Grand Total** **555.236.609.862,00**

**5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur**

**Rp366.973.371.934,00**

Saldo Aset Alat Bengkel dan Ukur pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp366.973.371.934,00 naik sebesar Rp48.596.083.504,00 atau 15,26% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp318.377.288.430,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	314.594.989.563,00	269.343.422.459,00
2	DINAS KESEHATAN	1.806.013.400,00	134.500.900,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	1.844.927.493,00	1.660.161.868,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.704.329.559,00	1.526.063.559,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	557.012.044,00	547.512.044,00
6	RSUD KELET DONOROJO	564.889.750,00	564.889.750,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	47.923.000,00	24.963.000,00
8	RSJD SURAKARTA	541.986.140,00	541.986.140,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	800.530.875,00	117.964.500,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	87.205.000,00	87.205.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	2.438.923.002,00	2.438.923.002,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	442.299.050,00	433.134.050,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	386.822.400,00	374.850.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.597.089.890,00	3.597.089.890,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.212.256.377,00	4.212.256.377,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	46.700.000,00	44.200.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.999.033.200,00	4.894.333.200,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.050.000,00	21.050.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	45.300.000,00	45.300.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.056.129.956,00	2.056.129.956,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.113.103.295,00	1.113.103.295,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3.032.320.300,00	3.032.320.300,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	746.936.106,00	719.397.606,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.299.023.150,00	7.017.175.150,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.627.870.884,00	13.503.226.884,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	131.476.000,00	98.898.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	71.400.000,00	71.400.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	133.850.000,00	133.850.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	12.331.500,00	12.331.500,00
42	BADAN PENGHUBUNG	9.650.000,00	9.650.000,00
	JUMLAH	366.973.371.934,00	318.377.288.430,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Bengkel dan Ukur pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	318.377.288.430,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	42.331.649.612,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	11.972.400,00
Belanja Barang/Jasa	829.974.220,00
Hibah	6.366.054.173,00
Mutasi Masuk	6.108.156.501,00
Mutasi Masuk BTT	11.972.400,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	550.867.625,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	149.196.921,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.359.843.852,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	227.749.253,00
Mutasi Keluar	6.108.156.501,00



Mutasi Keluar BTT	11.972.400,00
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	319.497.600,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	78.044.908,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	950.000,00
Koreksi Pencatatan	1.017.389.686,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.763.760.348,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>366.973.371.934,00</b>

**5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian** **Rp62.160.877.024,00**

Saldo Alat Pertanian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp62.160.877.024,00 naik sebesar Rp3.845.233.469,00 atau 6,59% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.315.643.555,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.370.571.660,00	12.791.878.883,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	38.207.500,00	36.810.500,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	292.492.795,00	292.492.795,00
6	RSUD KELET DONOROJO	126.640.630,00	125.925.630,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	7.330.060,00	7.330.060,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	38.000.000,00	38.000.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	38.485.000,00	35.985.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.103.239.925,00	2.103.239.925,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	540.589.500,00	540.589.500,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.307.669.070,00	1.307.669.070,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	-
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.221.068.500,00	1.221.068.500,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	32.179.152.330,00	30.983.548.538,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	8.813.600.054,00	8.756.025.154,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.750.000,00	31.000.000,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	28.280.000,00	28.280.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	15.800.000,00	15.800.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	62.160.877.024,00	58.315.643.555,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Pertanian pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	58.315.643.555,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	3.742.436.888,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	96.565.860,00
Hibah	995.569.045,00
Mutasi Masuk	214.320.553,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	12.647.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	125.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.186.539.346,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	35.281.900,00
Mutasi Keluar	214.320.553,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	1.091.703.424,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-



Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.341.305.877,00</b>

**Grand Total** **62.160.877.024,00**  
**5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga** **Rp1.489.628.149.044,00**

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.489.628.149.044,00 naik sebesar Rp187.589.067.264,00 atau 14,41% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.302.039.081.780,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	813.031.911.549,00	663.491.401.823,00
2	DINAS KESEHATAN	34.660.401.994,00	33.375.974.174,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	45.110.693.463,00	43.462.687.463,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	50.164.532.648,00	39.543.297.464,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	32.966.873.235,00	32.868.790.352,00
6	RSUD KELET DONOROJO	13.891.366.520,00	12.814.673.900,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	17.119.041.533,00	15.632.001.983,00
8	RSJD SURAKARTA	26.010.900.574,00	26.046.644.062,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	14.090.517.422,00	12.633.119.758,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	3.101.766.300,00	2.751.441.300,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	8.493.029.711,00	8.493.029.711,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.077.766.512,00	2.870.709.512,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.517.109.774,00	2.370.149.774,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.829.841.602,00	2.682.896.602,00
15	DINAS SOSIAL	22.801.200.669,00	21.396.828.156,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	5.008.318.558,00	4.826.672.558,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.614.106.603,00	13.299.586.603,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.973.835.163,00	1.891.918.300,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14.896.984.526,00	14.277.838.426,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.241.815.449,00	4.121.722.449,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.341.253.947,00	5.219.864.947,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	7.632.213.047,00	6.545.274.047,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.913.455.629,00	5.538.105.629,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.701.124.002,00	7.984.195.002,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.001.888.500,00	3.484.870.772,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	20.211.041.185,00	19.705.706.185,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13.296.552.198,00	12.991.936.198,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.475.852.601,00	8.289.719.355,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	17.795.430.175,00	16.129.997.135,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.489.418.753,00	6.797.900.903,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13.035.573.344,00	11.044.277.854,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.191.271.503,00	18.941.224.103,00
33	SKPKD	4.910.394.010,00	4.910.394.010,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	46.703.773.028,00	46.236.947.028,00
35	SEKRETARIAT DPRD	41.252.286.107,00	36.258.207.527,00
36	INSPEKTORAT	4.668.798.900,00	4.300.673.900,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.731.342.331,00	7.762.803.831,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	64.538.031.236,00	63.478.231.236,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26.749.992.299,00	26.803.267.299,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.658.804.591,00	6.547.760.736,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	18.381.469.546,00	17.663.786.647,00
42	BADAN PENGHUBUNG	6.346.168.307,00	6.552.553.066,00
	JUMLAH	1.489.628.149.044,00	1.302.039.081.780,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.302.039.081.780,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	163.674.996.933,00
Belanja Hutang	1.965.008,00
Belanja Tak Terduga	928.135.682,00
Belanja Barang/Jasa	6.134.730.487,00
Hibah	13.256.861.778,00
Mutasi Masuk	15.972.736.181,00
Mutasi Masuk BTT	928.135.682,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	13.024.033.657,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	11.125.000,00
Koreksi	4.337.089.465,00
<b>Jumlah</b>	<b>218.269.809.873,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	7.891.950.345,00
Mutasi Keluar	15.972.736.181,00
Mutasi Keluar BTT	928.135.682,00
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	4.123.585.653,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	1.646.604.288,00
Koreksi Hutang	
Koreksi Belanja Modal	4.800.000,00
Koreksi Pencatatan	112.930.460,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.680.742.609,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1.489.628.149.044,00</b>



5.3.1.3.2.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Rp250.033.985.129,00

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp250.033.985.129,00 naik sebesar Rp24.256.272.879,00 atau 10,74% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.777.712.250,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	140.645.026.447,00	122.883.069.008,00
2	DINAS KESEHATAN	4.987.294.001,00	4.751.352.001,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	4.221.231.223,00	3.903.573.223,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	3.734.587.686,00	2.918.803.300,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	3.735.808.695,00	3.290.385.645,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.626.350.188,00	1.622.550.188,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.170.140.455,00	1.135.040.455,00
8	RSJD SURAKARTA	1.000.657.637,00	979.319.137,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	382.223.700,00	365.929.700,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	451.586.000,00	408.593.500,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	1.859.604.650,00	2.269.504.650,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	600.255.496,00	552.988.496,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	641.190.000,00	542.290.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	681.425.000,00	577.925.000,00
15	DINAS SOSIAL	556.077.784,00	556.077.784,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.677.272.949,00	1.677.272.949,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.834.305.085,00	1.817.205.085,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	314.030.000,00	300.130.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.345.474.416,00	3.228.009.416,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	701.860.000,00	677.470.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.675.950.383,00	1.616.351.383,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	2.262.206.176,00	2.235.383.626,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.526.486.361,00	4.446.180.361,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.213.607.500,00	1.121.174.500,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	751.013.320,00	781.090.466,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.352.827.678,00	2.352.827.678,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.687.166.256,00	4.687.166.256,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.711.664.550,00	1.703.674.550,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	4.141.264.710,00	3.931.580.710,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	561.280.700,00	561.280.700,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.171.591.128,00	3.951.893.128,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.350.194.035,00	1.343.294.035,00
33	SKPKD	108.911.000,00	108.911.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	22.857.545.263,00	22.668.495.263,00
35	SEKRETARIAT DPRD	3.910.037.402,00	3.656.885.402,00
36	INSPEKTORAT	883.495.665,00	883.495.665,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.355.914.806,00	1.327.264.806,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	6.236.405.458,00	6.026.855.458,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.705.132.757,00	2.675.267.757,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	371.475.856,00	347.017.156,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.641.581.848,00	3.517.931.848,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.391.830.865,00	1.376.200.965,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>250.033.985.129,00</b>	<b>225.777.712.250,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Studio dan Komunikasi pada Tahun 2020 sebagai berikut

Saldo Awal	225.777.712.250,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	22.602.544.410,00
Belanja Hutang	1.729.000,00
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	489.150.650,00
Hibah	2.096.401.578,00
Mutasi Masuk	1.258.156.285,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	2.746.446.236,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	79.071.904,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.273.500.063,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	214.977.703,00
Mutasi Keluar	1.258.156.285,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	3.271.444.550,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	215.443.646,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	42.486.000,00
Koreksi Pencatatan	14.719.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.017.227.184,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>250.033.985.129,00</b>

**5.3.1.3.2.7 Alat-Alat Kedokteran**

**Rp1.800.226.364.205,00**

Saldo Alat Kedokteran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.800.226.364.205,00 naik sebesar Rp142.388.328.317,00 atau 8,59% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.657.838.035.888,00, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.586.936.663,00	7.114.815.873,00
2	DINAS KESEHATAN	47.753.520.931,00	44.223.827.597,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	593.812.270.802,00	527.756.293.672,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	519.811.027.291,00	491.103.962.179,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	307.122.207.525,00	283.766.592.909,00
6	RSUD KELET DONOROJO	140.548.251.780,00	135.800.877.850,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	66.668.010.102,00	57.334.800.267,00
8	RSJD SURAKARTA	51.002.170.549,00	48.932.804.846,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	60.898.355.101,00	59.239.991.126,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & CIPTAKARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	932.702.321,00	822.597.429,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	541.292.525,00	541.292.525,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	-
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.875.000,00	1.875.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	20.100.000,00	9.600.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	7.100.000,00	7.100.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	425.587.000,00	256.913.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.500.000,00	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	119.460.000,00	76.660.000,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	103.690.000,00	103.690.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	294.215.000,00	294.215.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	150.065.000,00	44.700.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	216.001.615,00	216.001.615,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	205.025.000,00	189.425.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	JUMLAH	1.800.226.364.205,00	1.657.838.035.888,00



Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Kedokteran pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.657.838.035.888,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	112.030.066.098,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	3.755.000.054,00
Belanja Barang/Jasa	2.454.543.859,00
Hibah	28.389.662.751,00
Mutasi Masuk	766.635.967,00
Mutasi Masuk BTT	3.755.000.054,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.020.774.584,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	504.539.000,00
Koreksi	1.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.677.572.367,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	79.068.047,00
Mutasi Keluar	766.635.967,00
Mutasi Keluar BTT	3.755.000.054,00
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	3.001.517.576,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	2.667.640.588,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	19.381.818,00
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.289.244.050,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1.800.226.364.205,00</b>

#### 5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium

**Rp539.720.358.425,00**

Saldo Alat Laboratorium pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp539.720.358.425,00 naik sebesar Rp69.655.186.379,00 atau 14,82% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp470.065.172.046,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	336.867.142.094,00	299.208.039.590,00
2	DINAS KESEHATAN	33.384.776.135,00	20.858.183.514,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	21.272.539.181,00	15.453.096.852,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	8.392.384.624,00	1.126.210.198,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	21.921.657.564,00	21.784.345.284,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.878.900.888,00	1.839.025.888,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	3.554.708.075,00	3.075.664.184,00
8	RSJD SURAKARTA	2.289.290.076,00	2.286.365.076,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	3.058.577.144,00	3.054.827.144,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	7.958.821.395,00	7.957.221.395,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	2.431.618.155,00	2.431.618.155,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	100.035.000,00	93.035.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.876.396.543,00	7.890.914.043,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15.269.067.395,00	15.239.697.395,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.889.615.922,00	5.693.493.598,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	163.343.000,00	163.343.000,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	198.650.000,00	-
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	90.230.000,00	90.230.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.353.321.584,00	8.305.248.330,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	9.062.629.415,00	8.988.379.415,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	15.596.916.713,00	15.033.934.213,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.073.131.800,00	4.847.490.300,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27.246.036.122,00	23.874.226.872,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	122.022.000,00	122.022.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	91.250.000,00	91.250.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	527.297.600,00	507.310.600,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	JUMLAH	539.720.358.425,00	470.065.172.046,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Laboratorium pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	470.065.172.046,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	29.061.261.855,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	30.365.489.724,00
Belanja Barang/Jasa	1.425.913.270,00





Hibah	14.544.866.401,00
Mutasi Masuk	2.716.748.146,00
Mutasi Masuk BTT	30.365.489.724,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.713.075.675,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	2.123.225.078,00
<b>Jumlah</b>	<b>112.316.069.873,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	349.779.039,00
Mutasi Keluar	2.716.748.146,00
Mutasi Keluar BTT	30.365.489.724,00
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	601.888.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	8.025.006.685,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	387.760.000,00
Koreksi Pencatatan	214.211.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.660.883.494,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>539.720.358.425,00</b>

#### 5.3.1.3.2.9 Alat-Alat Persenjataan

**Rp6.609.303.107,00**

Saldo Alat Persenjataan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.609.303.107,00 naik sebesar Rp167.574.550,00 atau 2,60% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.441.728.557,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.967.793.274,00	2.801.214.724,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	187.829.055,00	187.829.055,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	6.175.000,00	6.175.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.953.500,00	5.953.500,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	179.710.000,00	179.710.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.546.222.003,00	1.545.226.003,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	144.900.000,00	144.900.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	31.204.725,00	31.204.725,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	-
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	-
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	175.600.000,00	175.600.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	52.000.000,00	52.000.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.734.000,00	14.734.000,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.265.031.550,00	1.265.031.550,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	8.500.000,00	8.500.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.650.000,00	23.650.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	6.609.303.107,00	6.441.728.557,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Persenjataan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	6.441.728.557,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	225.958.550,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	996.000,00
Hibah	-
Mutasi Masuk	10.150.000,00



Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	10.580.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>247.684.550,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	11.540.000,00
Mutasi Keluar	10.150.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	13.350.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	38.770.000,00
Koreksi Pencatatan	6.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>80.110.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>6.609.303.107,00</b>

#### 5.3.1.3.2.10 Alat Komputer

**Rp1.274.266.988.203,00**

Saldo Alat Komputer pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.274.266.988.203,00 naik sebesar Rp185.099.281.130,00 atau 16,99% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.089.167.707.073,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	942.581.737.740,00	789.123.914.194,00
2	DINAS KESEHATAN	13.268.215.382,00	12.164.180.822,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	17.142.141.196,00	16.300.791.196,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	21.059.395.983,00	18.892.602.283,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	5.221.811.146,00	4.927.876.146,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.219.711.993,00	3.206.633.433,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	3.984.851.250,00	3.694.851.250,00
8	RSJD SURAKARTA	5.114.238.286,00	4.992.821.522,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	3.058.219.752,00	2.938.605.652,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	3.635.497.715,00	3.194.967.715,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.532.422.840,00	5.532.422.840,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.542.857.489,00	1.376.119.489,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.729.901.470,00	1.729.901.470,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.281.468.690,00	1.184.868.690,00
15	DINAS SOSIAL	6.295.573.650,00	5.876.021.150,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.194.535.738,00	2.194.535.738,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.673.278.145,00	5.568.628.145,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	873.756.300,00	857.368.300,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.099.762.433,00	8.659.292.433,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.361.264.500,00	1.746.389.800,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.240.037.347,00	3.031.238.347,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	5.429.639.131,00	5.326.909.131,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.209.994.180,00	42.829.698.080,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.322.882.714,00	4.227.092.714,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.487.555.011,00	3.694.326.440,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4.468.240.706,00	4.468.240.706,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.344.176.326,00	5.286.376.326,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.492.371.999,00	3.485.371.999,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	6.000.489.176,00	5.504.895.176,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.965.030.275,00	1.530.734.025,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.472.296.029,00	5.567.327.609,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.330.891.007,00	7.014.562.007,00
33	SKPKD	344.055.995,00	344.055.995,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	16.991.520.881,00	15.303.839.661,00
35	SEKRETARIAT DPRD	8.884.910.999,00	8.466.304.999,00
36	INSPEKTORAT	2.145.748.418,00	2.016.323.418,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.856.655.821,00	4.421.060.021,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	52.153.017.801,00	50.984.794.469,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.111.410.838,00	8.779.077.838,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.880.480.397,00	6.485.304.890,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4.814.460.387,00	4.701.828.387,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.450.481.067,00	1.535.552.567,00
	JUMLAH	1.274.266.988.203,00	1.089.167.707.073,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Komputer pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.089.167.707.073,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	160.252.351.092,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	3.911.038.707,00
Hibah	22.671.099.114,00
Mutasi Masuk	11.469.738.411,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	2.110.478.790,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	1.805.146.252,00
<b>Jumlah</b>	<b>202.219.852.366,00</b>



<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	252.478.199,00
Mutasi Keluar	11.469.738.411,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	3.085.540.600,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	2.145.624.026,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	167.190.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.120.571.236,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1.274.266.988.203,00</b>

**5.3.1.3.2.11 Alat-Alat Eksplorasi** **Rp291.935.822,00**

Saldo Alat Eksplorasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp291.935.822,00 naik sebesar Rp82.051.200,00 atau 39,09% dibandingkan 31 Desember 2019 sebesar Rp209.884.622,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	271.565.822,00	194.134.622,00
2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.370.000,00	15.750.000,00
	Jumlah	291.935.822,00	209.884.622,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Eksplorasi pada Tahun 2020 sebagai berikut

Saldo Awal	209.884.622,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	77.036.500,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	600.000,00
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	4.620.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>82.256.500,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	205.300,00
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-



Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>205.300,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>291.935.822,00</b>

**5.3.1.3.2.12 Alat-Alat Pengeboran** **Rp131.415.000,00**

Saldo Alat Pengeboran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp131.415.000,00 naik sebesar 102.935.000,00 atau 361,43% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.480.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	131.415.000,00	28.480.000,00
	Jumlah	131.415.000,00	28.480.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Pengeboran pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	28.480.000,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	102.935.000,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	88.935.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>191.870.000,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	88.935.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>88.935.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>131.415.000,00</b>



**5.3.1.3.2.13 Alat-Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian**

**Rp554.207.150,00**

Saldo Alat-Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp554.207.150,00 naik sebesar Rp366.671.700,00 atau 193,95% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp188.535.450,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	475.833.950,00	188.535.450,00
2	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	78.373.200,00	-
	Jumlah	554.207.150,00	188.535.450,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	188.535.450,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	254.098.500,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	1.850.000,00
Hibah	-
Mutasi Masuk	47.950.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	78.373.200,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	31.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>413.621.700,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	47.950.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>47.950.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>554.207.150,00</b>



**5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi**

**Rp21.180.000,00**

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.180.000,00 tetap tidak ada kenaikan atau penurunan dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.180.000,00	21.180.000,00
	Jumlah	21.180.000,00	21.180.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Bantu Eksplorasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	21.180.000,00
<b>Penambahan</b>	-
Belanja Modal	-
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	-
<b>Berkurang</b>	-
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	-
<b>Grand Total</b>	<b>21.180.000,00</b>





**5.3.1.3.2.15 Alat-Alat Keselamatan Kerja**

**Rp3.180.438.119,00**

Saldo Alat-alat Keselamatan Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.180.438.119,00 naik sebesar Rp971.170.050,00 atau 43,96% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.209.268.069,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.100.468.119,00	2.160.692.069,00
2	RSJD SURAKARTA	48.576.000,00	48.576.000,00
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31.394.000,00	-
	Jumlah	3.180.438.119,00	2.209.268.069,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Keselamatan Kerja pada Tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo Awal	2.209.268.069,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	897.284.200,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	42.771.850,00
Hibah	1.100.000,00
Mutasi Masuk	66.150.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	35.234.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.042.540.050,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	5.220.000,00
Mutasi Keluar	66.150.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>71.370.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>3.180.438.119,00</b>



**5.3.1.3.2.16 Alat-Alat Peraga**

**Rp94.752.358.690,00**

Saldo Alat-alat Peraga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.752.358.690,00 naik sebesar Rp8.286.317.203,00 atau 9,58% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp86.466.041.487,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	94.591.358.290,00	86.309.441.087,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	109.000.000,00	109.000.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	-	-
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	26.664.000,00	22.264.000,00
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	23.000.000,00	23.000.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.336.400,00	2.336.400,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	-
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	-
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	-
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	94.752.358.690,00	86.466.041.487,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peraga pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	86.466.041.487,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	4.721.011.078,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	165.957.236,00
Hibah	2.103.758.174,00
Mutasi Masuk	184.832.700,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	599.488.845,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	918.261.053,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.693.309.086,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	34.544.183,00
Mutasi Keluar	184.832.700,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	187.615.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>406.991.883,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>94.752.358.690,00</b>



**5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi**

**Rp1.769.402.087,00**

Saldo Alat Komputer pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.769.402.087,00 naik sebesar Rp503.283.347,00 atau 39,75% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.266.118.740,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.469.954.087,00	1.107.670.740,00
2	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	95.000.000,00	95.000.000,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	66.500.000,00	18.500.000,00
4	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	93.000.000,00	-
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	44.948.000,00	44.948.000,00
	Jumlah	1.769.402.087,00	1.266.118.740,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peralatan Proses/Produksi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.266.118.740,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	332.723.100,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	28.250.247,00
Mutasi Masuk	9.300.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	141.000.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	2.310.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>513.583.347,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	1.000.000,00
Mutasi Keluar	9.300.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.300.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1.769.402.087,00</b>



**5.3.1.3.2.18 Rambu-rambu**

**Rp20.412.740.032,00**

Saldo Alat Rambu-rambu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.412.740.032,00 naik sebesar Rp249.716.000,00 atau 1,24% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.163.024.032,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	170.397.250,00	129.932.250,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	20.138.387.782,00	19.941.844.782,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55.937.000,00	55.937.000,00
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.000.000,00	-
5	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.708.000,00	-
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	35.310.000,00	35.310.000,00
	Jumlah	20.412.740.032,00	20.163.024.032,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Rambu-Rambu pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	20.163.024.032,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	37.300.000,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	9.605.000,00
Hibah	-
Mutasi Masuk	700.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	203.251.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>250.856.000,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	440.000,00
Mutasi Keluar	700.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>20.412.740.032,00</b>



**5.3.1.3.2.19 Peralatan Olah Raga**

**Rp18.425.087.041,00**

Saldo Alat Peralatan Olah Raga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.425.087.041,00 naik sebesar Rp2.615.261.271,00 atau 16,54% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.809.825.770,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.907.064.612,00	11.456.503.341,00
2	DINAS KESEHATAN	81.729.600,00	81.729.600,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	20.079.600,00	20.079.600,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	10.625.000,00	10.625.000,00
6	RSUD KELET DONOROJO	227.588.719,00	227.588.719,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	86.900.000,00	-
8	RSJD SURAKARTA	20.880.000,00	20.880.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	8.800.000,00	5.500.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.000.000,00	2.000.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.100.000,00	10.100.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.550.000,00	27.550.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	71.050.000,00	71.050.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	1.000.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.300.000,00	9.300.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.006.000,00	3.006.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	8.601.440,00	8.601.440,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	80.975.000,00	80.975.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.935.671.000,00	1.861.171.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.484.000,00	200.484.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	25.263.350,00	25.263.350,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	23.750.000,00	23.750.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	72.210.000,00	72.210.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	203.656.250,00	203.656.250,00
33	SKPKD	13.985.000,00	13.985.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	195.053.000,00	195.053.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
35	SEKRETARIAT DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	694.752.000,00	694.752.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	166.152.750,00	166.152.750,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	273.959.720,00	273.959.720,00
42	BADAN PENGHUBUNG	22.900.000,00	22.900.000,00
	Jumlah	18.425.087.041,00	15.809.825.770,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Olahraga pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	15.809.825.770,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	2.283.525.271,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	174.025.000,00
Hibah	206.225.000,00
Mutasi Masuk	227.563.750,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	6.836.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.898.175.021,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	55.350.000,00
Mutasi Keluar	227.563.750,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>282.913.750,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>18.425.087.041,00</b>

**5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

**Rp7.563.815.353.072,00**

Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.563.815.353.072,00 naik sebesar Rp270.079.820.896,00 atau 3,70%



dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.293.735.532.176,00, dengan rincian sebagai berikut:

### 5.3.1.3.3.1 Gedung

**Rp7.431.299.168.047,00**

Saldo Gedung pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.431.299.168.047,00 naik sebesar Rp264.976.281.232,00 atau 3,70% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.166.322.886.815,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.344.425.747.106,00	4.160.442.812.480,00
2	DINAS KESEHATAN	102.309.052.712,00	101.087.940.662,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	314.856.487.162,00	302.349.231.108,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	270.037.793.054,00	244.364.388.242,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	136.882.267.564,00	136.618.326.564,00
6	RSUD KELET DONOROJO	90.423.101.873,00	89.647.671.873,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	79.559.852.643,00	79.208.738.643,00
8	RSJD SURAKARTA	39.139.376.152,00	39.139.376.152,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	48.156.968.426,00	46.387.971.926,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	21.788.515.366,00	19.213.729.366,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	20.628.425.000,00	20.639.100.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.620.119.060,00	10.177.034.550,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.452.315.000,00	18.452.315.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.060.845.708,00	6.030.845.708,00
15	DINAS SOSIAL	189.549.650.431,00	189.549.650.431,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	8.615.569.968,00	8.523.869.968,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	56.660.544.130,00	53.425.462.980,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.634.804.145,00	19.634.804.145,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	40.446.948.762,00	39.985.087.362,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.896.467.519,00	12.707.697.987,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.652.534.037,00	10.652.534.037,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	106.870.484.367,00	102.755.408.384,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.442.697.874,00	5.442.697.874,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	35.991.381.473,00	34.126.217.209,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.462.600.585,00	7.462.600.585,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	225.274.749.104,00	218.908.357.368,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	22.719.853.147,00	22.697.708.947,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	90.311.112.761,00	76.912.204.661,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	132.221.139.540,00	131.256.733.970,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	85.233.867.063,00	81.307.784.288,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	40.337.470.672,00	40.118.220.672,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	81.986.602.368,00	84.655.825.551,00





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
33	SKPKD	185.173.755.018,00	192.304.751.158,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	101.552.275.379,00	97.073.998.670,00
35	SEKRETARIAT DPRD	31.837.965.999,00	31.287.775.665,00
36	INSPEKTORAT	13.125.575.450,00	12.508.329.700,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	20.069.377.002,00	19.991.012.002,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	240.129.715.167,00	235.758.918.667,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86.320.950.049,00	86.266.467.049,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.701.526.902,00	8.701.526.902,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	55.686.729.385,00	55.495.805.385,00
42	BADAN PENGHUBUNG	13.051.952.924,00	13.051.952.924,00
	JUMLAH	7.431.299.168.047,00	7.166.322.886.815,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	7.166.322.886.815,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	195.913.522.357,00
Belanja Hutang	48.592.500,00
Belanja Tak Terduga	427.392.000,00
Belanja Barang/Jasa	16.291.220.349,00
Hibah	131.587.462.930,00
Mutasi Masuk	50.267.568.694,00
Mutasi Masuk BTT	427.392.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	4.967.462.910,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	6.458.524.151,00
Koreksi	50.251.803.016,00
<b>Jumlah</b>	<b>456.640.940.907,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	541.644.262,00
Mutasi Keluar	50.267.568.694,00
Mutasi Keluar BTT	427.392.000,00
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	94.708.859.969,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	15.778.017.340,00
Koreksi Hutang	48.592.500,00
Koreksi Belanja Modal	17.278.793.911,00
Koreksi Pencatatan	12.613.790.999,00
<b>Jumlah</b>	<b>191.664.659.675,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>7.431.299.168.047,00</b>



### 5.3.1.3.3.2 Monumen

**Rp22.325.125.450,00**

Saldo Aset Monumen pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.325.125.450,00 naik sebesar Rp1.619.087.400,00 atau 7,82% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.706.038.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.650.314.394,00	10.235.079.994,00
2	DINAS KESEHATAN	144.162.000,00	144.162.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	223.611.000,00	223.611.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	814.052.600,00	814.052.600,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	1.500.000,00	1.500.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	286.009.000,00	286.009.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	32.619.000,00	32.619.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	70.000.000,00	70.000.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	371.780.000,00	371.780.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.653.127.820,00	3.457.129.820,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	-
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.800.000,00	7.800.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
35	SEKRETARIAT DPRD	3.167.456.996,00	2.159.601.996,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	846.935.000,00	846.935.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	2.055.757.640,00	2.055.757.640,00
	Jumlah	22.325.125.450,00	20.706.038.050,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Monumen pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	20.706.038.050,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	109.748.000,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	195.998.000,00
Hibah	312.194.400,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.007.855.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.625.795.400,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	6.708.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.708.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>22.325.125.450,00</b>
<b>5.3.1.3.3.3 Menara</b>	<b>Rp6.567.537.617,00</b>

Saldo Aset Menara pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.567.537.617,00 naik sebesar Rp6.472.537.617,00 atau 1,47% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.472.537.617,00, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.608.546.630,00	1.513.546.630,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	-	-
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	153.000.000,00	153.000.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	-	-
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14.889.000,00	14.889.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	535.357.815,00	535.357.815,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	57.678.000,00	57.678.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	675.893.315,00	675.893.315,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3.486.502.857,00	3.486.502.857,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	1.170.000,00	1.170.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	34.500.000,00	34.500.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-



No	SKPD	2020	2019
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	6.567.537.617,00	6.472.537.617,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Menara pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	6.472.537.617,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	-
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	124.989.000,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>124.989.000,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	29.989.000,00
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>29.989.000,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>6.567.537.617,00</b>

**5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti** **Rp103.623.521.958,00**

Saldo Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.623.521.958,00 naik sebesar Rp3.389.452.264,00 atau 3,38% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.234.069.694,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42.979.998.898,00	39.967.232.259,00
2	DINAS KESEHATAN	4.970.666.040,00	4.970.666.040,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	709.981.000,00	709.981.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	508.200.000,00	508.200.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	423.613.269,00	423.613.269,00
6	RSUD KELET DONOROJO	4.467.220.000,00	4.467.220.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	175.858.000,00	175.858.000,00
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.283.020.081,00	1.157.030.081,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	139.508.000,00	723.130.375,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	101.650.000,00	101.650.000,00
15	DINAS SOSIAL	1.561.874.500,00	1.561.874.500,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	558.577.300,00	558.577.300,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	587.222.000,00	587.222.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	367.060.000,00	367.060.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	238.316.000,00	229.630.000,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	90.006.000,00	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	110.020.000,00	110.020.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.989.540.591,00	1.743.645.591,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	342.880.670,00	342.880.670,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.370.727.496,00	3.044.778.496,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	12.654.062.112,00	13.037.448.112,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.483.593.957,00	4.283.794.957,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	443.665.500,00	443.665.500,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	1.921.069.800,00	1.921.069.800,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	244.463.000,00	184.865.000,00
36	INSPEKTORAT	14.310.000,00	14.310.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	94.220.000,00	94.220.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.792.711.410,00	1.504.940.410,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.288.016.184,00	15.288.016.184,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	103.623.521.958,00	100.234.069.694,00



Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo Awal	100.234.069.694,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	1.612.304.500,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	314.546.000,00
Hibah	2.144.533.979,00
Mutasi Masuk	383.386.000,00
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	414.705.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	816.542.160,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.686.017.639,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	60.810.000,00
Mutasi Keluar	383.386.000,00
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	1.039.117.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	583.622.375,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	229.630.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.296.565.375,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>103.623.521.958,00</b>

**5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp10.192.168.636.636,00**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.192.168.636.636,00 naik sebesar Rp157.512.283.328,00 atau 1,57% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.034.656.353.308,00, dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.3.4.1. Jalan dan Jembatan Rp8.721.649.098.601,00**

Saldo Jalan dan Jembatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.721.649.098.601,00 naik sebesar Rp146.305.183.967,00 atau 1,71% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.575.343.914.634,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.986.070.226,00	16.986.070.226,00
2	DINAS KESEHATAN	117.825.000,00	117.825.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	952.451.000,00	952.451.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	121.968.158,00	121.968.158,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.792.813.625,00	3.792.813.625,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2.895.101.000,00	2.895.101.000,00
8	RSJD SURAKARTA	2.053.018.611,00	2.053.018.611,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	96.997.000,00	96.997.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	8.580.703.558.763,00	8.472.800.893.096,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	52.859.000,00	52.859.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.806.199.500,00	6.806.199.500,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	26.490.311.880,00	25.762.470.880,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.141.159.418,00	817.042.818,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	41.428.915.200,00	3.928.772.500,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5.125.486.500,00	5.125.486.500,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.293.436.250,00	3.443.018.250,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	387.415.000,00	387.415.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	JUMLAH	8.721.649.098.601,00	8.575.343.914.634,00





Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap jalan dan jembatan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	8.575.343.914.634,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	156.056.067.646,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	35.981.912.700,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	417.527.824,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	23.224.693.683,00
<b>Jumlah</b>	<b>215.680.201.853,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	15.738.920.450,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	33.389.316.376,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	20.246.781.060,00
<b>Jumlah</b>	<b>69.375.017.886,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>8.721.649.098.601,00</b>

#### 5.3.1.3.4.2. Bangunan Air/Irigasi

**Rp1.238.923.417.375,00**

Saldo Bangunan Air/Irigasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.238.923.417.375,00 naik sebesar Rp1.201.832.753,00 atau 0,10% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.237.721.584.622,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.109.108.389,00	14.448.026.189,00
2	DINAS KESEHATAN	746.910.500,00	746.910.500,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2.341.903.415,00	2.224.866.415,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	175.000.000,00	175.000.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.346.355.625,00	1.346.355.625,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
6	RSUD KELET DONOROJO	4.019.596.500,00	4.019.596.500,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	98.529.000,00	98.529.000,00
8	RSJD SURAKARTA	100.621.000,00	100.621.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.180.539.500,00	1.180.539.500,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	145.607.147.933,00	145.607.147.933,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	898.192.641.852,00	902.419.425.324,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	159.200.000,00	159.200.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	2.686.311.069,00	2.686.311.069,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	89.000.000,00	89.000.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.317.600,00	4.317.600,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.960.164.654,00	3.960.164.654,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	164.387.000,00	164.387.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	15.158.134.030,00	15.158.134.030,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	223.370.000,00	223.370.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	85.794.000,00	85.794.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.042.601.091,00	1.042.601.091,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	190.275.000,00	190.275.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	103.918.743.414,00	100.511.983.964,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	16.834.170.119,00	16.567.675.744,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.902.392.900,00	1.902.392.900,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.125.332.784,00	21.148.089.584,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	1.173.201.000,00	1.173.201.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	184.250.000,00	184.250.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.150.000,00	10.150.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	93.269.000,00	93.269.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	1.238.923.417.375,00	1.237.721.584.622,00



Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Bangunan Air pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.237.721.584.622,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	4.698.895.278,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	98.477.500,00
Hibah	3.678.579.450,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	117.037.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.592.989.228,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	6.826.714.875,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	564.441.600,00
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.391.156.475,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1.238.923.417.375,00</b>

#### 5.3.1.3.4.3.Instalasi

**Rp131.765.309.535,00**

Saldo Instalasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp131.765.309.535,00 naik sebesar Rp3.780.149.414,00 atau 2,95% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.985.160.121,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.010.180.995,00	12.450.351.795,00
2	DINAS KESEHATAN	3.868.562.664,00	3.697.115.800,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.623.543.200,00	2.337.062.200,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	15.810.341.535,00	15.520.702.735,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	23.498.906.495,00	23.460.406.495,00
6	RSUD KELET DONOROJO	3.263.622.965,00	3.263.622.965,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2.065.260.000,00	1.900.260.000,00
8	RSJD SURAKARTA	3.345.218.391,00	3.345.218.391,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	4.395.161.749,00	4.395.161.749,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA	137.554.120,00	137.554.120,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
	KARYA		
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	664.938.567,00	501.669.567,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	111.870.000,00	111.870.000,00
15	DINAS SOSIAL	25.000.000,00	25.000.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	91.433.000,00	91.433.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	743.895.492,00	664.890.192,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.253.926.013,00	1.253.926.013,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	25.900.000,00	25.900.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	17.898.252.585,00	17.898.252.585,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	361.662.000,00	349.662.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	225.454.455,00	225.454.455,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.859.951.000,00	1.859.951.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	319.957.086,00	319.957.086,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.904.439.225,00	2.889.459.975,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	26.192.202.457,00	26.192.202.457,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.751.450,00	50.751.450,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.979.538.600,00	1.979.538.600,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	780.444.500,00	780.444.500,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	233.186.880,00	233.186.880,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	416.219.083,00	416.219.083,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	799.998.000,00	799.998.000,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	762.275.550,00	762.275.550,00
42	BADAN PENGHUBUNG	45.661.478,00	45.661.478,00
	Jumlah	131.765.309.535,00	127.985.160.121,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Instalasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	127.985.160.121,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	2.501.967.400,00



Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	117.500.000,00
Hibah	214.140.000,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.464.355.964,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	82.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.379.963.364,00</b>

**Berkurang**

Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	269.319.700,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	225.005.000,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	105.489.250,00
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>599.813.950,00</b>

**Grand Total** **131.765.309.535,00**

**5.3.1.3.4.4. Jaringan** **Rp99.830.811.125,00**

Saldo Aset Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.830.811.125,00 naik sebesar Rp6.225.117.194,00 atau 6,66% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.605.693.931,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.013.091.192,00	18.204.515.276,00
2	DINAS KESEHATAN	1.135.375.128,00	1.025.618.050,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	279.000.000,00	279.000.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	4.211.762.949,00	4.211.762.949,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	2.633.664.219,00	2.633.664.219,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.369.161.390,00	1.369.161.390,00
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	17.774.664,00	17.774.664,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	82.834.000,00	82.834.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	107.706.800,00	107.706.800,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.547.760.100,00	1.547.760.100,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	98.208.800,00	98.208.800,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	30.700.485.076,00	27.876.998.076,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	113.983.400,00	113.983.400,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.744.873,00	5.744.873,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	613.286.177,00	613.286.177,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	16.700.000,00	16.700.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	846.162.987,00	461.532.987,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.238.625.000,00	1.238.625.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.144.341.400,00	1.094.391.500,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	31.407.235.400,00	31.308.655.100,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	242.056.700,00	291.919.700,00
33	SKPKD	179.871.120,00	179.871.120,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	617.647.750,00	617.647.750,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.400.000,00	12.400.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	195.932.000,00	195.932.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	99.830.811.125,00	93.605.693.931,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Jaringan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	93.605.693.931,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	18.290.501.116,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	215.431.000,00
Hibah	575.940.500,00



Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	159.706.978,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	4.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.246.079.594,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	12.971.099.400,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	49.863.000,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.020.962.400,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>99.830.811.125,00</b>

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya** **Rp1.365.494.887.464,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.365.494.887.464,00 naik sebesar Rp106.337.345.790,00 atau 8,45% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.259.157.541.674,00, dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.3.5.1. Buku Perpustakaan** **Rp1.324.257.505.688,00**

Saldo Buku Perpustakaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.324.257.505.688,00 naik sebesar Rp110.443.729.436,00 atau 9,10% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.213.813.776.252,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.302.690.551.523,00	1.192.395.577.187,00
2	DINAS KESEHATAN	157.110.500,00	152.321.050,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	408.382.790,00	398.498.790,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	195.908.140,00	195.908.140,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	293.244.831,00	290.669.831,00
6	RSUD KELET DONOROJO	337.390.600,00	337.390.600,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	37.495.350,00	37.495.350,00
8	RSJD SURAKARTA	15.632.230,00	15.632.230,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	65.827.830,00	65.827.830,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	279.267.300,00	279.267.300,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	86.412.066,00	86.412.066,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	146.883.900,00	124.129.400,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.500.000,00	25.500.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	80.619.400,00	80.619.400,00
15	DINAS SOSIAL	482.999.800,00	449.299.800,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	55.083.955,00	55.083.955,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	162.022.092,00	156.471.092,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	52.930.000,00	52.930.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	884.799.165,00	879.370.165,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	103.501.200,00	103.501.200,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	108.800.000,00	108.800.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	26.090.000,00	26.090.000,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	268.112.525,00	268.112.525,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	135.443.600,00	135.443.600,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	237.609.500,00	237.609.500,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.699.633.079,00	12.699.633.079,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	512.347.698,00	512.347.698,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	217.562.081,00	205.818.631,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	129.624.250,00	129.624.250,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	320.956.000,00	316.956.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	234.252.390,00	204.752.390,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.394.872.620,00	1.384.969.620,00
35	SEKRETARIAT DPRD	348.689.983,00	348.689.983,00
36	INSPEKTORAT	19.073.000,00	17.132.300,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	379.089.950,00	372.104.950,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	55.984.000,00	55.984.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85.887.890,00	85.887.890,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	35.073.100,00	35.073.100,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	486.841.350,00	486.841.350,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	1.324.257.505.688,00	1.213.813.776.252,00





Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Buku Perpustakaan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.213.813.776.252,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	108.728.316.786,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	87.159.450,00
Hibah	169.572.150,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	1.958.719.155,00
<b>Jumlah</b>	<b>110.943.767.541,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	96.649.170,00
Koreksi Pencatatan	403.388.935,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.038.105,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1.324.257.505.688,00</b>

**5.3.1.3.5.2. Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan Rp36.650.353.623,00**

Saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.650.353.623,00 turun sebesar Rp1.427.088.229,00 atau 4,05% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.223.265.394,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.095.823.622,00	26.768.649.692,00
2	DINAS KESEHATAN	105.951.000,00	105.951.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	38.409.000,00	38.409.000,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	236.978.500,00	236.978.500,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	99.730.500,00	99.730.500,00
6	RSUD KELET DONOROJO	501.733.666,00	501.733.666,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	423.235.750,00	423.235.750,00
8	RSJD SURAKARTA	67.630.000,00	67.630.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	139.795.000,00	111.795.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	150.635,00	150.635,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	170.000,00	170.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	500.219.500,00	500.219.500,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	680.504.300,00	680.504.300,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	750.000,00	750.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	78.258.500,00	78.258.500,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.215.000,00	22.215.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	499.086.000,00	421.922.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	450.000,00	450.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	171.000,00	171.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	387.710.000,00	387.710.000,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	96.218.000,00	96.218.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.038.571,00	10.038.571,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	58.667.000,00	33.167.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	80.581.000,00	80.581.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	102.258.236,00	102.258.236,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	211.606.342,00	211.606.342,00
35	SEKRETARIAT DPRD	498.273.000,00	498.273.000,00
36	INSPEKTORAT	2.000.000,00	2.000.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24.600.000,00	24.600.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	418.395.000,00	418.395.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	94.237.290,00	94.237.290,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.390.000,00	4.390.000,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	164.956.250,00	164.956.250,00
42	BADAN PENGHUBUNG	3.005.160.961,00	3.035.910.662,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.650.353.623,00</b>	<b>35.223.265.394,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Corak Budaya pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	35.223.265.394,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	1.297.112.500,00
Belanja Hutang	



Belanja Tak Terduga	
Belanja Barang/Jasa	41.000.000,00
Hibah	38.236.430,00
Mutasi Masuk	
Mutasi Masuk BTT	
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	86.364.000,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	
Koreksi	
<b>Jumlah</b>	<b>1.462.712.930,00</b>

#### **Berkurang**

Ekstrakontabel	
Mutasi Keluar	
Mutasi Keluar BTT	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	4.875.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	30.749.701,00
Koreksi Hutang	
Koreksi Belanja Modal	
Koreksi Pencatatan	
<b>Jumlah</b>	<b>35.624.701,00</b>

**Grand Total** **36.650.353.623,00**

#### **5.3.1.3.5.3. Hewan Ternak** **Rp3.271.704.480,00**

Saldo Hewan Ternak pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.271.704.480,00 turun sebesar Rp5.752.573.875,00 atau (63,75%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.024.278.355,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	168.207.560,00	162.432.560,00
2	DINAS KESEHATAN	3.300.000,00	3.300.000,00
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.500.000,00	9.500.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	164.572.000,00	164.572.000,00
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.926.124.920,00	8.684.473.795,00
	Jumlah	3.271.704.480,00	9.024.278.355,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Hewan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	9.024.278.355,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	30.575.000,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-



Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>30.575.000,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontabel	24.800.000,00
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	5.758.348.875,00
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.783.148.875,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>3.271.704.480,00</b>

**5.3.1.3.5.4. Biota Perairan** **Rp1.109.200,00**

Saldo Biota Perairan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.109.200,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.109.200,00	1.109.200,00
	Jumlah	1.109.200,00	1.109.200,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Biota Perairan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	1.109.200,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	-
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-



Koreksi -  
**Jumlah -**

**Berkurang**

Ekstrakontabel -  
Mutasi Keluar -  
Mutasi Keluar BTT -  
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap -  
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -  
Koreksi Hutang -  
Koreksi Belanja Modal -  
Koreksi Pencatatan -  
**Jumlah -**

**Grand Total 1.109.200,00**

**5.3.1.3.5.5. Tanaman Rp1.214.207.973,00**

Saldo Tanaman pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.214.207.973,00 naik sebesar Rp147.475.500,00 atau 13,82% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.066.732.473,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	802.688.140,00	655.212.640,00
2	DINAS KESEHATAN	34.650.000,00	34.650.000,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	295.101.633,00	295.101.633,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	39.465.000,00	39.465.000,00
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	42.303.200,00	42.303.200,00
	Jumlah	1.214.207.973,00	1.066.732.473,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Tanaman pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Saldo Awal 1.066.732.473,00  
**Penambahan**  
Belanja Modal 100.100.000,00  
Belanja Hutang -  
Belanja Tak Terduga -  
Belanja Barang/Jasa 46.375.500,00  
Hibah 1.000.000,00  
Mutasi Masuk -  
Mutasi Masuk BTT -  
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap -  
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya -  
Koreksi -



**Jumlah** **147.475.500,00**

**Berkurang**

Ekstrakontabel -  
Mutasi Keluar -  
Mutasi Keluar BTT -  
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap -  
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -  
Koreksi Hutang -  
Koreksi Belanja Modal -  
Koreksi Pencatatan -  
**Jumlah** -

**Grand Total** **1.214.207.973,00**

**5.3.1.3.5.6. Barang Koleksi/ Non Budaya** **Rp16.500.000,00**

Saldo Barang Koleksi/ Non Budaya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.500.000,00 tidak ada kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.500.000,00	16.500.000,00
	Jumlah	16.500.000,00	16.500.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Barang Koleksi Non Budaya pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal 16.500.000,00

**Penambahan**

Belanja Modal -  
Belanja Hutang -  
Belanja Tak Terduga -  
Belanja Barang/Jasa -  
Hibah -  
Mutasi Masuk -  
Mutasi Masuk BTT -  
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap -  
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya -  
Koreksi -  
**Jumlah** -



**Berkurang**

Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	-

**Grand Total** **16.500.000,00**

**5.3.1.3.5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi** **Rp83.506.500,00**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp83.506.500,00 naik sebesar Rp71.626.500,00 atau 602,92% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.880.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	11.880.000,00	11.880.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	71.626.500,00	-
	Jumlah	83.506.500,00	11.880.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Aset Tetap Renovasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	11.880.000,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	531.286.910,00
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	71.626.500,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
<b>Jumlah</b>	<b>602.913.410,00</b>



**Berkurang**

Ekstrakontabel	-
Mutasi Keluar	-
Mutasi Keluar BTT	-
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	531.286.910,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Pencatatan	-
<b>Jumlah</b>	<b>531.286.910,00</b>

**Grand Total**

**83.506.500,00**

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

**Rp737.058.609.225,00**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp737.058.609.225,00 naik sebesar Rp113.609.898.291,00 atau 18,22% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp623.448.710.934,00. Konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan konstruksi bangunan dan perencanaan pembangunan aset tetap gedung dan bangunan pada SKPD yang sampai 31 Desember 2020 belum dapat diselesaikan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28.397.526.659,00	26.282.212.369,00
2	DINAS KESEHATAN	2.346.105.183,00	1.227.404.963,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	99.496.182.548,00	33.019.275.748,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	391.820.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	12.960.553.620,00	12.850.729.620,00
6	RSUD KELET DONOROJO	-	-
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	195.870.000,00	-
8	RSJD SURAKARTA	23.565.614.903,00	23.565.614.903,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	59.140.123.607,00	24.790.375.313,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	9.253.254.048,00	2.579.936.373,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	749.565.400,00	70.086.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	-	-
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN	-	-





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
	ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	67.534.000,00	48.834.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48.621.100,00	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	2.354.373.747,00	863.115.600,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	72.915.700,00	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	495.612.957.245,00	495.733.952.245,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	133.276.000,00	133.276.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	567.849.200,00	326.801.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	64.305.600,00	15.245.600,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	329.850.550,00	197.600.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	178.646.915,00	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	1.122.658.200,00	1.122.658.200,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.925.000,00	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	31.262.000,00	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	96.305.000,00	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	229.773.000,00	229.773.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	19.560.000,00	-
	Jumlah	737.058.609.225,00	623.448.710.934,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	623.448.710.934,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	-
Belanja Hutang	-
Belanja Tak Terduga	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	623.148.000,00
Mutasi Masuk	-
Mutasi Masuk BTT	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	115.216.168.121,00
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Koreksi	1.025.309.540,00



**Jumlah** **116.864.625.661,00**

**Berkurang**

Ekstrakontabel -

Mutasi Keluar -

Mutasi Keluar BTT -

Reklasifikasi Keluar ke aset tetap 485.231.224,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya -

Koreksi Hutang -

Koreksi Belanja Modal -

Koreksi Pencatatan 2.769.496.146,00

**Jumlah** **3.254.727.370,00**

**Grand Total** **737.058.609.225,00**

Rincian penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Induk	10.340.600,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paket 3 (Tiga) Kab. Boyolali (SMAN 2 Boyolali, SMAN 1 Ampel), Kab. Wonogiri (SMAN 1 Baturetno)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Induk	15.655.600,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Induk
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	48.794.000,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SLBN SEMARANG, SLBN UNGARAN (R.BINA DIRI, RKB)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	69.115.200,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMAN 1 AMBARAWA, SMAN 2 UNGARAN, SMAN 1 GETASAN (RKB, JAMBAN)
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	60.288.800,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMAN 1 BERGAS, SMAN 1 BRINGIN, SMAN 2 UNGARAN, SMAN 1 SURUH, SMAN 1 AMBARAWA, SMAN 1 TUNTANG (RKB, REHAB RUANG, REHAB JAMBAN)
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	88.341.800,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMAN 1 2 SEMARANG DAN SMA 1 SEMARANG (RKB DAN REHAB JAMBAN)
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	65.932.000,00	DED PERENCANAAN PENGADAAN JAMBAN SMKN 1 BAWEN, SMKN 1 BANCAK, SMKN 1 TENGARAN, SMKN 1 JAMBU, SMKN 1 KALIWUNGU, SMKN 1 PABELAN, SMKN SATU ATAP TUNTANG
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	39.793.600,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMKN 10 SEMARANG, SMKN JATENG
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	91.342.500,00	DED PERENCANAAN REHAB RUANG KELAS SMKN 1 SMG, SMKN 3 SMG, SMKN 4 SMG, SMKN 8 SMG, SMKN 5 SMG, DAN SMK JATENG
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	51.497.600,00	DED PERENCANAAN PENGADAAN JAMBAN SMKN 3 SMG, SMKN 4 SMG, SMKN 6 SMG, SMKN 10 SMG, SMKN 11 SMG, SMKN 1 PRINGAPUS, SMKN H. MOENADI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	39.816.000,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMKN H. MOENADI DAN SMKN 1 ATAP TUNTANG
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	39.869.600,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMKN 1 BANCAK DAN SMKN 1 JAMBU
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	59.914.400,00	DED PEMBANGUNAN RKB SMKN 1 BAWEN



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas I	16.169.600,00	DED PERENCANAAN PENYELESAIAN AULA SMAN 13 SEMARANG
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 13 Kota Semarang	121.000.000,00	Pembangunan Aula Tahap I (Pembangunan Pondasi dan Pembelian material)
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	11.373.600,00	Perencanaan Pembangunan Rehab Gedung
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	10.624.000,00	Perencanaan Pembangunan Rehab Gedung
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	12.878.400,00	Perencanaan Pembangunan Rehab Gedung
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	10.592.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang kelas baru
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	16.690.400,00	Perencanaan Pembangunan Ruang kelas baru
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	10.332.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang kelas baru
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas III	4.243.200,00	Pembangunan Toilet/ Jamban SMKN 2 Kudus (1 Ruang)
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Purwodadi	1.153.725.000,00	Pembangunan Ruang kelas baru
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Wirosari	623.148.000,00	Pembangunan masjid
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Cepu	243.125.000,00	Pembangunan Ruang kelas baru
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas V	35.720.000,00	Pembangunan Gedung Kantor
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas V	14.960.200,00	Perencanaan Pembangunan Lab Komputer SMAN 2 Salatiga
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas V	17.782.400,00	DED Perencanaan Pembangunan Jamban dan Sanitasi SMKN Juwangi SMKN Klego
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas V	17.732.800,00	DED/Perencanaan Pembangunan RPS SMKN Musuk
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas V	19.606.400,00	Perencanaan Pembangunan RKB SMAN 1 Prambanan
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Nogosari	613.980.000,00	Ruang Penunjang Guru
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Polan Harjo	2.500.000.000,00	Renovasi gedung sekolah
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	15.136.000,00	Perencanaan Rehab gedung slbn colomadu dan slbn cangkan (paket konsolidasi) kab Karanganyar
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	8.712.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN Sragen (paket konsolidasi) Kab Sragen
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	19.360.000,00	Perencanaan Pembangunan RKB SLBN Wonogiri 2 RK, dan SLBN Purwantoro 4 RK (paket konsolidasi) kab Wonogiri
41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	7.897.600,00	Perencanaan Rehab gedung SLBN Sragen (paket konsolidasi) kab sragen
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	13.600.000,00	Perencanaan Rehab gedung SLBN Wonogiri dan SLBN Purwantoro (paket konsolidasi) Kab Wonogiri
43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	9.200.000,00	Perencanaan Pembangunan Jamban SLBN Wonogiri dan SLBN Purwantoro di Kabupaten Wonogiri
44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	19.200.000,00	Perencanaan Paket konsolidasi Rehab gedung, SMAN 1 Jatisrono, SMAN 1 Wuryantoro, SMAN 1 Purwantoro (Paket Konsolidasi) di Kab Wonogiri
45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	19.953.600,00	Perencanaan Rehab Gedung SMAN 1 Plupuh, SMAN 1 Sukodono dan SMAN 1 Sambungmacan
46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	15.160.000,00	Perencanaan Rehab Gedung SMAN Jumapolo dan SMAN Colomadu Kabupaten Karanganyar
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	14.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jamban SMAN 1 Slogohimo, SMAN 1 Jatisrono, SMAN 1 Purwantoro (Paket Konsolidasi)
48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	9.200.000,00	Perencanaan Paket Konsolidasi Pembangunan jamban Pembangunan Jamban SMAN Gondangrejo, SMA N Jumapolo (Paket Konsolidasi) Kab.Karanganyar
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	19.956.000,00	Perencanaan Pembangunan Jamban SMAN 1 Sumberlawang, SMAN 1



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VI	7.172.000,00	Sukodono, SMAN 1 Gemolong Kabupaten Sragen
				Perencanaan Pembangunan Jamban SLBN Sragen Kabupaten Sragen
51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VII	14.792.800,00	Perencanaan Kegiatan Sarpras SMK untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK
52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VII	17.896.120,00	Kegiatan Sarpras SMK untuk Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA SMKN 7 Surakarta
53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VII	19.574.240,00	Perencanaan Kegiatan Sarpras SMA untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA
54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VII	15.968.040,00	Perencanaan Kegiatan Sarpras SMA untuk Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN1 Polokarto Sukoharjo
55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 3 Surakarta	1.875.017.000,00	Gedung Permanen
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 8 Surakarta	3.592.291.500,00	Hibah Kota Surakarta Tahun 2013
57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	39.195.000,00	DED Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan RKB Pembangunan Jamban Paket 1 Pembangunan RKB SMA N 1 Magelang 1 ruang, SMA N 2 Magelang 1 Ruang, Pembangunan Jamban SMA N 1 Magelang 1 Paket
58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	27.588.000,00	DED Perencanaan RKB Rehab gedung dan pembangunan jamban Paket 2 Pembangunan RKB SMA N 1 Muntilan 1 Ruang, SMA N 1 Kota Mungkid 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 1 Ngluwar 1 Ruang, Pembangunan Jamban SMA N 1 Candi Mulyo 1 Paket
59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	58.982.000,00	DED Perencanaan RKB dan rehab Gedung Paket 3 Pembangunan RKB SMA N 1 Purworejo 1 Ruang, Pembangunan RKB SMA N 3 Purworejo 1 ruang, Pembangunan RKB SMA N 10 Purworejo 1 Ruang dan rehab ruang gedung SMA N 2 Purworejo 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 4 Purworejo 1 ruang Rehab Ruang gedung SMA N 5 Purworejo 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 7 Purworejo 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 8 Purworejo 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 9 Purworejo 1 Ruang.
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	24.763.000,00	DED Jasa Konsultasi Perencanaan RKB dan Rehab Ruang Gedung Paket 4 Pembangunan RKB SMA N 1 Temanggung 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung paket 4 pembangunan RKB SMA N 1 Temanggung 1 ruang, rehab ruang gedung SMA N 2 Temanggung 1 ruang, Rehab ruang gedung SMA N 1 Parakan 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 1 Pringsurat 1 Ruang.
61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	74.162.000,00	DED Perencanaan Pembangunan RKB Rehab Gedung, Pembangunan Jamban SMK Kota Magelang dan Kab. Magelang Paket 1 Konsolidasi (Pembangunan RKB SMK N 1 Salam 3 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Kota Magelang 3 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 2 Kota Magelang 2 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 3 Kota Magelang 3 Ruang, Pembangunan Jamban SMK N 1 Kota Magelang
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	73.678.000,00	DED Perencanaan Pembangunan Gedung RKB, Rehab Gedung dan Pembangunan Jamban SMK di Kab. Magelang dan Kab. Purworejo Paket 2 Konsolidasi, Pembangunan RKB SMK N 1 Ngablak Kab. Magelang 1 Ruang, Pembangunan RKB SMK N 1 Windusari Kab. Magelang 2 Ruang, Pembangunan RKB SMK N 4 Purworejo 2 Ruang,



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
				Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Salam Kab.Magelang 2 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Ngablak Kab.Magelang 3 Ruang.
63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	78.993.200,00	DED Perencanaan Rehab Gedung dan Pembangunan Jamban SMK di Kab.Purworejo, Paket 3 Konsolidasi Rehab Ruang Gedung SMK N 3 Purworejo 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 4 Purworejo 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 6 Purworejo 2 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 8 Purworejo 1 Ruang, Pembangunan Jamban SMK N 3 Purworejo 5 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 8 Purworejo 5 Paket,
64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	48.640.000,00	DED Perencanaan Jasa Konsultasi Pembangunan RKB,Rehab Gedung dan Pembangunan Jamban SMK di Kab.Temanggung, Kota Magelang dan Kab.Magelang, Paket 4 Konsolidasi Pembangunan RKB SMK N Pringsurat 3 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Temanggung 1 Ruang, Rehab Gedung SMK N 2 Temanggung 1 ruang,Rehab ruang gedung SMK N Tembarak 1 Ruang, Rehab Gedung SMK N Bansari 1 Ruang,Pembangunan Jamban SMK N Pringsurat 1 Paket, Pembangunan Jamban SMK N 2 Temanggung 1 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 3 Magelang 1 paket, Pembangunan Jamban SMK N Ngablak 1 Paket.
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	67.540.000,00	DED Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan jamban Paket 5 SMK di Kab.Temanggung dan Purworejo. Pembangunan Jamban SMK N Jumo 4 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 1 Temanggung 4 Paket, Pembangunan Jamban SMK N Tembarak 3 Paket,Pembangunan Jamban SMK N Bansari 2 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 4 Purworejo 1 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 6 Purworejo 1 Paket.
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas VIII	34.694.000,00	DED Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan RKB,Rehab Ruang Gedung dan Pembangunan Jamban. RKB SLB N Kota Magelang ,Rehab Ruang Gedung SLB N Purworejo, Pembangunan RKB dan Jamban SLB N Temanggung
67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	14.365.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	4.802.500,00	Perencanaan pengembangan sekolah
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	4.760.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	5.270.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	5.066.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	13.974.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	14.271.500,00	Perencanaan pengembangan sekolah
74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	5.270.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	5.270.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	4.862.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah
77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas IX	5.270.000,00	Perencanaan pengembangan sekolah



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Punggelan	1.058.498.500,00	Pembangunan Ruang Praktek siswa, Ruang Kelas Baru
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Puring	1.900.000.000,00	Pembangunan Ruang Praktek siswa, Ruang Kelas Baru
80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas X	19.956.000,00	Perencanaan Rehab Ruang kelas SMKN Binangun, SMKN 1 Kawunganten, SMKN Kawunganten, SMKN 1 Karangpucungdan SMKN 1 Wanareja di Kab. Cilacap
81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Patikraja	1.206.000.000,00	Pembangunan masjid allih fungsi dari Ruang Multimedia dan Laboratorium Fisika
82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Wangon	293.399.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru
83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Wangon	9.265.230,00	Pembangunan Koperasi
84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Wangon	261.530.000,00	Gedung serbaguna
85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sumpiuh	293.398.950,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru
86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sumpiuh	9.265.230,00	Pembangunan Fondasi Gedung
87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Purwokerto	214.406.925,00	Laboratorium AKL 1 lantai 2 Gedung I
88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Purwokerto	440.098.425,00	Ruang Teori Gedung I
89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Purwokerto	6.770.745,00	Laboratorium PBs lantai 1 Gedung I
90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Purwokerto	13.897.845,00	Ruang Teori Gedung I lantai 1
91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Purwokerto	38.351.000,00	Ruang Teori Gedung I lantai 2
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Purwokerto	1.696.703.714,00	Pembangunan Masjid
93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	12.220.000,00	Perencanaan Pembangunan Lab. Komputer TIK SMK Negeri Kab. Brebes
94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	4.200.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Jamban/Toilet SLBN Brebes
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	8.720.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SLBN Brebes
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	12.360.000,00	Perencanaan Ruang Jamban/Toilet untuk 3 SMK negeri 1 Kota Tegal
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	18.080.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Kab. Brebes
98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	18.000.000,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN 2 Songgom Kab. Brebes
99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XI	4.520.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN 2 Songgom
100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Larangan	100.000.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru
101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Larangan	272.350.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru
102	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Larangan	171.600.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru
103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sirampog	171.600.000,00	Pembangunan 1 Lokol Ruang Kelas
104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sirampog	272.350.000,00	Pembangunan Laboratorium IPA (Fisika)
105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Sirampog	100.000.000,00	Pembangunan Masjid
106	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tanjung	480.000.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) , dan penambahan Beberapa Ruangan Fasilitas Pendidikan ( R.Lab Komputer, R.Lab Bahasa, dan DLL
107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Tanjung	505.335.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru
108	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	9.640.400,00	Perencanaan (1 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Kab. Pemalang )
109	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	9.754.800,00	Perencanaan (1 Kegiatan Rehab Gedung Kantor (Paket Konsolidasi SMK Kab. Tegal )
110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	19.830.800,00	Perencanaan (1 Kegiatan Pembangunan Lab. Komputer (Paket Konsolidasi SMK Kab. Pemalang )
111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	16.442.800,00	Perencanaan (1 Kegiatan Rehab Gedung Kantor (Paket Konsolidasi SMK Kab. Pekalongan )



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
112	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	19.984.800,00	Perencanaan (1 Kegiatan Pembangunan Lab. Komputer (Paket Konsolidasi SMK Kab. Tegal )
113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	19.588.800,00	Perencanaan (2 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Kab. Tegal )
114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	3.984.000,00	Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Kab. Tegal SMA N 1 Kramat
115	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	7.880.000,00	Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Kab. Pemalang SMA N 1 Belik
116	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	5.808.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB N 2 Pemalang (Pemenuhan Sarpras SLB )
117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XII	5.808.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB N Slawi (Pemenuhan Sarpras SLB )
118	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Moga	58.944.020,00	Pengembangan Gedung sekolah
119	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Petarukan	550.000.000,00	Pembangunan Aula
120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Pemalang	136.500.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
121	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Slawi	167.790.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
122	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Slawi	501.790.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Slawi	171.600.000,00	Pengedakan 1 Lokal (R. HALL tengah)
124	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Slawi	255.000.000,00	Pembangunan Masjid
125	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Slawi	70.000.000,00	Gudang Komputer atas
126	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Bumijawa	890.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Bumijawa	160.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMK Negeri 1 Bumijawa	525.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 1 Kedungwuni	1.083.140.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	29.880.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
131	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	32.400.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	39.860.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
133	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	58.388.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
134	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	59.112.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
135	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	58.640.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
136	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	58.600.000,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	59.782.400,00	Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah
138	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	9.600.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru
139	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	5.760.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru
140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Cabang Dinas XIII	14.400.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru
141	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Pekalongan	1.111.800.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
142	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMA Negeri 2 Sukorejo	90.337.675,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
143	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Taman Budaya Jawa Tengah	2.870.000,00	Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pintu Gerbang
144	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Taman Budaya Jawa Tengah	726.900,00	Pembayaran 15% Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang
145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Taman Budaya Jawa Tengah	4.119.100,00	Pembayaran 85% Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
146	Dinas Kesehatan	Induk	97.757.000,00	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Kanker Kota Magelang
147	Dinas Kesehatan	Induk	491.447.000,00	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Pekalongan
148	Dinas Kesehatan	Balai Kesehatan Indra Masyarakat	529.496.220,00	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Mata
149	Dinas Kesehatan	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	1.227.404.963,00	Pembangunan Gedung Pengujian Alat Kesehatan
150	RSUD Dr Moewardi Surakarta	Induk	228.194.400,00	Perencanaan Tempat ParkirMotor
151	RSUD Dr Moewardi Surakarta	Induk	98.307.295.848,00	Pembangunan Gedung Rumah Sakit
152	RSUD Dr Moewardi Surakarta	Induk	383.984.300,00	Pembangunan Rumah Dinas
153	RSUD Dr Moewardi Surakarta	Induk	576.708.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Critical Center
154	RSUD Tugurejo	Induk	12.850.729.620,00	Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit
155	RSUD Tugurejo	Induk	52.613.000,00	Perencanaan Pembangunan IBS
156	RSUD Tugurejo	Induk	57.211.000,00	Perencanaan Pembangunan Ruang Lab
157	RSJD Amino Gondohutomo	Induk	195.870.000,00	Pembangunan RAMP Jalur Evakuasi Pasien dan Petugas Medis
158	RSJD Surakarta	Induk	23.517.324.903,00	Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 Lantai
159	RSJD Surakarta	Induk	48.290.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Pneumatic Tube System
160	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Induk	3.861.128.810,00	PEMBANGUNAN MASJID AGUNG MAGELANG
161	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Induk	97.872.500,00	Perencanaan Pembangunan JL MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG
162	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Induk	4.630.624.177,00	Perencanaan Pembangunan JL MENTRI SUPENO NO 9 SEMARANG
163	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Induk	27.685.165.963,00	JDU SPAM REGIONAL KEBUREJO TAHAP I DAN II
164	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Induk	74.760.400,00	INSTALASI PLTS GEDUNG KANTOR
165	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal	390.267.000,00	DED JEMBATAN CIRAJA RUAS BUMIAYU – SALEM
166	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal	97.506.908,00	FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Kali Pedes )
167	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan	170.339.878,00	Perencanaan Jembatan Jagung RUAS JALAN KEBONAGUNG – KESESI
168	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan	97.506.908,00	FS/UKL/UPL ( FS FO Wiradesa )
169	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	169.700.000,00	DED FS FO BUNTU - KROYA ( RUAS JALAN BUNTU - KROYA - SLARANG )
170	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	275.715.000,00	DED JEMBATAN K. SERAYU KLAMPOK NO. 24.150.006 RUAS KLAMPOK – PURBALINGGA
171	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	247.851.000,00	DED JEMBATAN K. KLAWING NO. 24.150.001 RUAS KLAMPOK – PURBALINGGA
172	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	242.746.000,00	DED JEMBATAN CIKAWUNG NO. 24.153.015
173	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	529.519.173,00	DED FO Buntu - Kroya – Slarang
174	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	97.479.408,00	FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Klawing )
175	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	5.698.645.400,00	DED PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS LEMAHBAN - KALORAN TANJAKAN DS. DUREN
176	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	48.895.000,00	DED PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS LEMAHBAN - KALORAN TANJAKAN DS. DUREN





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
177	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	231.759.000,00	DED JEMBATAN BLANDONGAN NO 24.190.011 KM SMG 43+090
178	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	302.352.000,00	DED UKL UPL PLY OVER MRANGGEN
179	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	107.294.445,00	DED Perbaikan ( Ruas Sukorejo - Boja - Cangkiran )
180	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	57.759.704,00	DED Jembatan Damar ( Weleri - Patean )
181	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	145.879.408,00	DED Jembatan Blorong A dan Jembatan Blorong B ( Cangkiran-Boja-Sukorejo )
182	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	97.534.408,00	FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jalan Sukorejo-Boja-Cangkiran )
183	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	131.015.255,00	DED Jembatan Cabean ( Semarang - Godong )
184	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	78.609.153,00	DED Jembatan Setu ( Semarang - Godong )
185	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	149.859.054,00	DED Jembatan Rowosari ( Semarang - Godong )
186	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	41.090.386,00	DED Jembatan Pare ( Semarang - Godong )
187	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	43.507.468,00	DED Jembatan Gogodalem ( Semarang - Godong )
188	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	87.243.750,00	DED JATENG VALLEY
189	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	30.087.177,00	PERENCANAAN PENGADAAN TANAH KUJON
190	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	48.680.000,00	DED UNTUK PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS PURWOREJO - SIBOLONG LOKASI IRUNG PETRUK
191	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	5.539.651.525,00	Perencanaan Jembatan Progo Tempuran
192	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	37.364.490,00	DED Jembatan Silekor ( Kutoarjo-Ketawang )
193	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	22.418.694,00	DED Jembatan Kedung ( Kutoarjo-Ketawang )
194	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	110.954.408,00	DED Jembatan Pakis ( Pati-Tayu )
195	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	99.349.408,00	DED Jembatan Getaan ( Jl. Sopyonyo Pati )
196	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	108.754.408,00	DED Jembatan Suwatu ( Pati-Tayu )
197	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	62.131.941,00	DED Jembatan Mlonggo ( Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati )
198	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	46.892.031,00	DED Jembatan Tunggul ( Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati )
199	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	56.270.436,00	DED Jembatan Tayu ( Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati )
200	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	253.158.000,00	DED JEMBATAN LUSI RUAS NO. 24.215.017.0.01 RUAS PURWODADI – WIROSARI
201	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	5.438.043.100,00	DED JEMBATAN GANEFO NO. 24.215.017.0.01 RUAS GALEH - NGRAMPAL
202	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	201.506.113,00	Perencanaan Jembatan Kaliwatu



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
203	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	208.785.850,00	Perencanaan Jembatan Japan
204	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	226.848.338,00	Perencanaan Jembatan Tuntang Tempuran
205	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	96.764.408,00	FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Blandongan )
206	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	97.506.908,00	FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Ganefo ( Sragen )
207	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	299.530.000,00	DED UKL UPL PLY OVER PURWOSARI
208	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	96.599.408,00	FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Dengkeng )
209	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	79.765.435,00	DED Jembatan Bonyokan ( Karangwuni-Cawas-Jentir )
210	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	89.433.973,00	DED Jembatan Dengkeng ( Karangwuni-Cawas-Jentir )
211	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	176.611.000,00	DD Perkuatan Tebing Kali Erang
212	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	105.864.000,00	DD Normalisasi Muara Kali Sono
213	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	219.014.000,00	DD Sungai Sragi Baru
214	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	362.935.000,00	Perkuatan Tebing Sungai Breml / Meduri / Kota/Kab. Pekalongan
215	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	205.449.335,00	DD Sungai Kemiri
216	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	205.449.335,00	DD Kali Bacin
217	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	304.412.500,00	DD pengamanan pantai kabupaten brebes
218	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	304.412.500,00	DD Pengamanan Pantai Kota Tegal
219	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	102.666.200,00	Geoteknik Dan Topografi Kali Keruh
220	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	102.550.700,00	DD Groundsill Jembatan Kali Keruh Desa Plompong Kabupaten Brebes
221	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	339.743.000,00	Perkuatan Tebing Sungai Breml / Meduri / Kota/Kab. Pekalongan
222	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	376.362.335,00	DD Sungai Gangsa
223	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	740.406.300,00	DED Bendung Gerak Sungai Loji
224	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	992.401.184,00	DD Penanganan Pantai Timur Semarang/Demak
225	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	1.084.353.351,00	Study Basic Waduk Bodri
226	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	150.264.333,00	Perencanaan Embung Plumbon Kota Semarang
227	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	166.605.333,00	Perencanaan Embung Rejosari Kab. Demak
228	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	166.605.333,00	Perencanaan Long Storage Pidodo Kab. Demak



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
229	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	166.605.333,00	Perencanaan Long Storage Tempuran Kab. Demak
230	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	101.800.500,00	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal
231	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	101.723.220,00	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal
232	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	149.032.333,00	Perencanaan Long Storage Waru Kab. Rembang
233	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	172.612.250,00	Perencanaan Embung Tirto Sworo (Telaga Simpar) Kab. Wonogiri
234	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	172.612.250,00	Perencanaan Embung Guwotirto ( Telaga Jambu ) Kab. Wonogiri
235	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	172.612.250,00	Perencanaan Embung Bangkan Kab. Wonogiri
236	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	168.091.667,00	Perencanaan Embung Kedokan (Telaga Tlahab) Kab. Wonogiri
237	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	168.091.667,00	Perencanaan Emung Selur Kab. Wonogiri
238	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	168.091.667,00	Perencanaan Embung Salam Kab. Wonogiri
239	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	150.393.333,00	Perencanaan Embung Guworejo Kab. Sragen
240	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	168.003.667,00	Perencanaan Embung Godang Kab. Wonogiri
241	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	168.003.667,00	Perencanaan Embung Bogor Kab. Wonogiri
242	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	168.003.667,00	Perencanaan Embung Joho Kab. Wonogiri
243	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	503.181.838,00	DD Di Tingal Kab. Temanggung
244	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	149.046.000,00	Perencanaan Embung Geblok Kab. Temanggung
245	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	149.966.000,00	Perencanaan Embung Piasa Kulon Kab. Banyumas
246	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	149.277.000,00	Perencanaan Long Storage Kali Sokaya Kab. Purbalingga
247	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Induk	70.086.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor
248	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Induk	640.337.000,00	Perencanaan Tugu Batas Jateng-Jatim Girimoyo Wonogiri
249	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Induk	39.142.400,00	Perencanaan Rusunawa Kota Semarang
250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Induk	48.834.000,00	Perencanaan Renovasi Gedung Induk
251	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Cabang Dinas Blora	18.700.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor
252	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Induk	48.621.100,00	Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop Gedung Induk
253	Dinas Perhubungan	Induk	161.642.465,00	Pembebasan Tanah
254	Dinas Perhubungan	Induk	162.284.465,00	Pembebasan Tanah
255	Dinas Perhubungan	Induk	40.944.000,00	Perencanaan Pembangunan Dermaga Kalikuto kendal
256	Dinas Perhubungan	Induk	55.546.250,00	Perencanaan Pembangunan Dermaga Rowosari Kendal



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
257	Dinas Perhubungan	Induk	55.746.250,00	Perencanaan Pembangunan Dermaga Jatipurwo kendal
258	Dinas Perhubungan	Induk	593.511.000,00	Perencanaan Pembangunan Dermaga Karimunjawa
259	Dinas Perhubungan	Induk	45.680.000,00	Perencanaan Pembangunan Dermaga Kalikuto kendal
260	Dinas Perhubungan	Terminal Gagak Rimang	115.823.650,00	Pengembangan Terminal
261	Dinas Perhubungan	Terminal Jatisono	58.684.050,00	Pengembangan Terminal
262	Dinas Perhubungan	Terminal Pracimantoro	115.955.650,00	Pengembangan Terminal
263	Dinas Perhubungan	Terminal Penggung	214.883.650,00	Pengembangan Terminal
264	Dinas Perhubungan	Terminal Kutoarjo	215.213.650,00	Pengembangan Terminal
265	Dinas Perhubungan	Terminal Banjarnegara	115.823.650,00	Pengembangan Terminal
266	Dinas Perhubungan	Terminal Banyuputih	58.684.050,00	Pengembangan Terminal
267	Dinas Perhubungan	Balai Transportasi Jawa Tengah	200.008.093,00	Pembangunan Shelter
268	Dinas Perhubungan	Balai Transportasi Jawa Tengah	143.942.874,00	Pembangunan Shelter
269	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Induk	72.915.700,00	DED Pembangkit Listrik Tenaga Surya
270	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Induk	755.700.000,00	DED Pembangunan Asrama Atlit Jatidiri
271	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Induk	452.796.721.125,00	Pembangunan Stadion Utama GOR Jatidiri
272	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Induk	42.060.536.120,00	DED Pembangunan GOR Jatidiri
273	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Induk	133.276.000,00	Pembangunan Diorama Perpustakaan Daerah
274	Dinas Kelautan dan Perikanan	Induk	76.781.000,00	Perencanaan Solar Sel Atap Gedung
275	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Tegalsari	99.835.000,00	Perencanaan Dermaga
276	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Klidanglor	29.020.000,00	Perencanaan Rehab Kantor
277	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Klidanglor	15.500.000,00	Perencanaan Rehab Kios
278	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Klidanglor	7.300.000,00	Perencanaan Pembuatan Tiang Pancang Kapal
279	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Bajomulyo	16.640.000,00	Perencanaan Rehab Kantor
280	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Tasikagung	11.920.000,00	Perencanaan Penataan Kawasan
281	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Lohgending	19.316.000,00	Perencanaan Pembuatan Gapura dan Pos Jaga
282	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Lohgending	49.935.000,00	Perencanaan Pembuatan Turap
283	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Asemdayong	91.320.000,00	Perencanaan Dermaga
284	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Karimunjawa	23.840.000,00	Perencanaan Rehab Wisma Bahari
285	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPI Larangan	100.250.000,00	Perencanaan Gedung Kantor
286	Dinas Kelautan dan Perikanan	PPP Larangan	14.795.000,00	Perencanaan Mess
287	Dinas Kelautan dan Perikanan	LPKIL Randudongkal	11.397.200,00	Perencanaan Hatchery
288	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kebun Benih Padi Banyubiru	13.629.000,00	Perbaikan Lantai Jemur
289	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kebun Benih TPH Masaran	9.482.000,00	Perencanaan Gudang Alat dan Mesin Pertanian
290	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kebun Benih TPH Kledung	25.949.000,00	Perencanaan Screen House Kebun
291	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kebun Benih TPH Baturaden	15.245.600,00	Perencanaan Pembangunan laboratorium kultur jaringan
292	Dinas Peternakan dan Keswan	Induk	82.500.550,00	Perencanaan Pembangunan Integrated Farming
293	Dinas Peternakan dan Keswan	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu	99.100.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung
294	Dinas Peternakan dan Keswan	Taman Ternak Aneka Ternak Balekambang Surakarta	49.750.000,00	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Hewan



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

No	SKPD	UPT	Nilai	Jenis Pembangunan
295	Dinas Peternakan dan Keswan	Balai Veteriner Boyolali	98.500.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung
296	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	Induk	25.000.000,00	Perencanaan Peninggian Halaman Kantor Induk
297	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	Cabang Dinas Wilayah Kendeng Selatan	73.022.500,00	Perencanaan Pembangunan Rooftop
298	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	38.290.415,00	Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir kantor
299	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	42.334.000,00	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas di Banjarmegara
300	Sekretariat DPRD	Induk	1.122.658.000,00	Pembangunan Gedung DPRD
301	BAPPEDA	Induk	23.925.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor
302	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Induk	31.262.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor
303	Badan Kepegawaian Daerah	Induk	96.305.000,00	Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor
304	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Induk	229.773.000,00	Perencanaan Pengembangan Komplek Diklat
305	Badan Penghubung	Induk	19.560.000,00	Renovasi Bangunan TMII
	<b>JUMLAH</b>		<b>737.058.609.225,00</b>	

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

**(Rp14.177.380.211.896,24)**

Saldo Akumulasi Penyusutan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp14.177.380.211.896,24) naik sebesar (Rp1.393.161.492.612,10) atau 10,90% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp12.784.218.719.284,15). Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Aset Tetap	2020	2019
1	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	226.286.023.782,49	199.547.524.873,06
2	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	419.277.163.137,15	377.070.093.948,91
3	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	241.416.830.278,50	211.522.133.768,70
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	54.246.517.015,75	49.295.425.391,00
5	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1.145.916.875.293,67	1.007.138.432.701,13
6	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	201.666.700.209,30	182.478.421.141,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.512.433.054.262,80	1.333.449.536.942,20
8	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	360.964.005.782,39	317.664.281.032,20
9	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	6.064.254.909,50	5.714.426.833,00
10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	983.214.833.561,75	809.805.361.633,25
11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	116.174.531,00	73.288.048,80
12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	15.989.500,00	2.848.000,00
13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	67.140.465,01	17.235.676,66
14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	4.236.000,00	2.118.000,00
15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	1.991.362.494,20	1.237.322.075,60
16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	26.216.518.484,80	16.359.144.005,30
17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	489.823.084,63	269.616.573,75
18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	14.206.765.959,21	12.028.135.266,04
19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	15.063.869.452,75	13.481.849.311,00
20	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	1.974.733.025.456,77	1.822.316.476.998,84
21	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	3.265.590.242,12	2.707.172.631,99
22	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	1.057.910.809,20	926.578.716,09
23	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15.830.865.121,79	13.667.941.222,46
24	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	6.595.572.105.821,28	6.088.562.074.985,11



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

25	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	330.819.996.803,25	280.199.176.539,97
26	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	28.811.683.244,82	24.285.902.071,58
27	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	16.129.613.420,11	13.472.916.792,51
28	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	1.501.282.772,00	923.284.104,00
	JUMLAH	14.177.380.211.896,24	12.784.218.719.284,15

a. **Alat Besar**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.726.017.750,64	10.167.283.380,75
2	DINAS KESEHATAN	5.145.556.378,00	4.466.841.660,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	11.902.487.016,71	10.046.923.038,66
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	19.171.573.678,00	16.592.556.345,76
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	7.126.693.315,25	6.334.483.299,63
6	RSUD KELET DONOROJO	2.954.301.701,50	2.748.330.607,75
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	3.346.906.625,00	2.602.806.000,00
8	RSJD SURAKARTA	1.724.765.625,00	1.499.651.250,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	928.688.590,00	805.136.465,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	80.175.774.558,88	70.595.509.758,82
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	17.289.908.657,50	15.785.140.496,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	131.570.225,00	65.785.112,50
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	480.112.500,00	400.093.750,00
15	DINAS SOSIAL	1.170.308.199,50	846.914.162,25
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.653.815.175,00	2.513.401.937,50
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	273.281.998,00	251.464.498,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	636.275.000,00	635.900.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	440.151.317,00	405.714.596,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.170.569.393,00	1.082.971.768,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	1.614.664.910,25	1.567.124.455,13
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	716.302.062,50	420.109.125,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	736.726.250,00	567.255.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	159.973.062,50	261.114.656,25
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.245.474.500,00	1.985.742.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.872.973.260,00	3.776.548.260,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.224.835.027,50	1.912.672.415,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5.065.165.654,13	4.538.273.847,25
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	355.489.499,50	304.584.462,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.621.972.800,00	2.285.082.850,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.020.085.418,00	5.424.133.518,00
33	SKPKD	665.315.500,00	665.315.500,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	8.114.333.354,38	6.846.388.088,38
35	SEKRETARIAT DPRD	1.155.320.100,00	1.086.832.600,00
36	INSPEKTORAT	169.042.000,00	169.042.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.865.683.250,00	2.796.716.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	13.970.922.102,25	12.428.318.401,92
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.566.776.985,00	2.310.755.360,01
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	591.318.500,00	490.968.000,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.920.978.217,50	1.677.474.207,50
42	BADAN PENGHUBUNG	183.913.625,00	186.166.000,00
	Jumlah	226.286.023.782,49	199.547.524.873,06

**b. Alat Angkutan**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.578.215.806,64	66.930.597.876,52
2	DINAS KESEHATAN	8.969.449.420,25	7.280.338.374,26
3	RSUD Dr. MOEWARDI	6.523.609.631,00	6.229.041.756,01
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	6.416.502.862,50	5.635.727.462,26
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	3.986.289.928,00	3.586.679.568,63
6	RSUD KELET DONOROJO	5.388.474.849,75	4.916.522.504,88
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	4.039.113.750,00	3.732.506.500,00
8	RSJD SURAKARTA	4.652.320.798,00	4.047.664.580,13
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	2.788.201.180,75	2.566.518.428,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	9.467.599.047,00	7.895.783.597,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	6.004.844.790,13	5.571.289.089,15
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.940.729.470,00	3.805.657.220,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.096.273.634,26	3.723.947.821,50
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.393.546.525,00	2.123.973.025,00
15	DINAS SOSIAL	13.624.431.423,00	12.359.984.342,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	13.140.511.105,50	12.303.391.605,50
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.474.891.624,50	4.245.633.087,50
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.335.858.505,50	2.116.530.118,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	18.142.270.367,88	14.618.036.402,06
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.726.366.139,00	6.149.128.326,50
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.646.127.660,50	2.430.693.098,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	28.457.965.202,25	27.566.356.258,50
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.862.539.110,50	6.068.989.298,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.516.585.169,50	2.378.463.691,25
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.953.055.705,25	2.656.995.664,02
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.294.796.632,13	3.065.923.826,25
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.547.254.657,50	4.119.811.907,50
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.818.617.370,50	9.939.129.070,50
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	9.746.385.278,38	8.523.650.586,38
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.915.697.299,88	3.320.301.496,25
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.053.963.853,00	4.307.894.040,50
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.213.523.897,08	4.079.805.145,00
33	SKPKD	14.578.021.190,00	11.865.766.390,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	49.172.289.644,01	49.553.870.835,25
35	SEKRETARIAT DPRD	15.243.843.757,00	12.683.584.725,75
36	INSPEKTORAT	2.656.544.956,00	2.256.718.206,01



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.827.635.963,38	3.213.487.252,50
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	25.312.663.492,88	22.754.492.249,85
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.680.733.848,00	4.709.640.275,50
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.296.965.193,50	2.431.245.018,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.230.441.025,50	1.966.688.463,00
42	BADAN PENGHUBUNG	7.562.011.371,75	7.337.634.766,00
	JUMLAH	419.277.163.137,15	377.070.093.948,91

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	197.835.237.574,20	171.530.099.038,00
2	DINAS KESEHATAN	404.212.860,00	46.420.180,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	1.147.206.693,00	970.773.568,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.475.735.951,00	1.378.282.450,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	506.257.506,00	482.451.874,30
6	RSUD KELET DONOROJO	384.423.400,00	299.974.750,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	21.824.000,00	14.615.000,00
8	RSJD SURAKARTA	235.340.156,00	133.509.828,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	202.178.587,50	45.928.650,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	46.789.500,00	33.873.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	1.875.130.499,80	1.437.606.399,40
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	392.305.550,00	375.454.050,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	349.747.240,00	335.400.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.374.473.290,00	3.260.854.730,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.187.981.377,00	4.174.921.877,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	44.700.000,00	44.200.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.746.892.200,00	4.620.843.060,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.050.000,00	21.050.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	22.650.000,00	18.120.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	956.718.606,50	693.098.171,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	840.428.932,50	741.393.303,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.790.166.300,00	2.544.930.800,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	525.851.226,00	435.468.786,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.486.482.880,00	6.120.696.990,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.239.083.149,00	11.480.999.814,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	103.320.200,00	98.898.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
36	INSPEKTORAT	71.400.000,00	57.120.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	117.330.000,00	115.265.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4.542.600,00	3.309.450,00
42	BADAN PENGHUBUNG	7.370.000,00	6.575.000,00
	JUMLAH	241.416.830.278,50	211.522.133.768,70

**d. Alat Pertanian**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.007.046.593,25	11.723.519.999,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	31.959.750,00	29.010.500,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	292.492.795,00	292.492.795,00
6	RSUD KELET DONOROJO	126.104.380,00	125.925.630,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	5.889.030,00	4.921.015,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	38.000.000,00	38.000.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	36.610.000,00	35.985.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.103.239.925,00	2.103.239.925,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	421.042.000,00	313.632.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.057.758.052,50	807.847.035,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	-
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.109.776.375,00	869.955.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	29.640.910.486,00	27.956.249.413,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.298.420.129,00	4.919.567.079,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	33.187.500,00	31.000.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	28.280.000,00	28.280.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	15.800.000,00	15.800.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
Jumlah		54.246.517.015,75	49.295.425.391,00

**e. Alat Kantor dan Rumah Tangga**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	572.444.354.876,87	481.903.744.784,73
2	DINAS KESEHATAN	31.052.106.771,40	28.828.184.619,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	39.782.795.562,60	36.389.270.338,20
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	37.869.677.816,80	33.197.082.453,20
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	30.688.260.083,80	29.433.339.661,80
6	RSUD KELET DONOROJO	12.130.726.702,40	11.217.771.391,40
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	12.844.393.782,60	10.947.292.792,20
8	RSJD SURAKARTA	19.688.713.674,60	17.079.664.794,80
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	11.920.547.192,60	10.854.401.608,60
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.338.417.600,00	2.016.862.500,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	7.649.114.551,80	6.855.714.892,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.694.134.912,00	2.540.733.408,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.082.879.574,00	1.812.135.319,20
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.617.644.602,00	2.439.442.102,00
15	DINAS SOSIAL	18.335.253.549,00	15.767.892.871,20
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	4.438.548.665,60	4.179.860.630,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.322.263.309,60	11.715.591.285,80
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.755.648.963,00	1.605.900.100,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12.752.750.850,80	11.611.626.193,40
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.066.825.329,00	4.003.482.014,20
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.040.585.147,00	4.853.384.843,80
22	DINAS PERHUBUNGAN	5.748.102.960,80	4.940.418.519,20
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.990.477.556,20	4.486.572.280,20
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.992.823.470,40	6.295.535.282,40
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.447.114.620,00	2.792.371.030,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	12.637.361.612,80	9.937.061.948,80
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.616.838.036,60	12.319.111.615,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.595.371.601,00	6.034.951.110,20
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	15.953.840.983,00	15.061.405.345,80



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5.549.991.242,00	4.697.136.256,20
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.751.548.174,20	8.454.502.161,60
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.306.841.367,80	17.870.977.784,40
33	SKPKD	4.910.394.010,00	4.834.796.134,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	39.610.163.609,00	35.667.461.159,00
35	SEKRETARIAT DPRD	33.815.182.043,00	30.881.402.127,00
36	INSPEKTORAT	3.929.937.400,00	3.527.573.150,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.066.336.206,60	6.473.727.888,20
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	57.043.024.930,40	53.603.528.964,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.990.533.739,00	23.881.208.027,40
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.105.236.816,40	4.433.722.670,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	16.722.092.796,60	15.877.405.041,40
42	BADAN PENGHUBUNG	5.618.018.600,40	5.814.185.602,80
	JUMLAH	1.145.916.875.293,67	1.007.138.432.701,13

**f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	110.432.670.309,00	99.524.832.776,80
2	DINAS KESEHATAN	4.138.515.949,00	3.786.299.903,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.867.423.723,00	3.515.714.793,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.732.686.937,20	1.030.893.980,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	3.256.742.700,10	3.113.090.647,80
6	RSUD KELET DONOROJO	1.571.398.878,00	1.550.679.068,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	955.975.655,00	872.597.555,00
8	RSJD SURAKARTA	972.983.237,00	957.963.337,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	346.899.250,00	319.036.800,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	361.151.000,00	322.003.500,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	1.569.811.150,00	1.447.247.050,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	525.861.896,00	492.248.496,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	493.370.000,00	439.010.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	498.625.000,00	433.641.000,00
15	DINAS SOSIAL	533.757.784,00	526.297.784,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.569.469.749,00	1.526.216.549,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.567.553.085,00	1.439.322.331,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	302.910.000,00	298.930.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.948.791.296,00	2.704.814.736,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	654.825.200,00	640.272.800,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.503.528.663,00	1.429.065.223,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	2.005.645.536,00	1.843.216.426,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.048.019.031,00	2.934.992.997,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.026.649.900,00	946.190.700,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	619.627.270,00	583.187.156,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2.028.868.178,00	1.897.125.878,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.353.545.098,40	3.673.531.620,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.322.898.230,00	1.120.350.420,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3.818.420.710,00	3.598.307.250,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	461.866.100,00	416.177.400,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.537.596.048,00	3.218.156.888,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.083.702.724,60	938.131.331,60
33	SKPKD	108.911.000,00	108.911.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	19.625.916.703,00	18.339.779.223,00
35	SEKRETARIAT DPRD	3.030.825.802,00	2.642.577.802,00
36	INSPEKTORAT	734.205.665,00	634.118.165,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.332.994.806,00	1.324.578.606,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	5.485.448.478,00	5.131.869.134,80
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.402.270.157,00	2.239.442.701,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	316.120.776,00	323.597.156,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.169.735.010,00	2.862.637.112,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.348.481.525,00	1.331.363.845,00
	JUMLAH	201.666.700.209,30	182.478.421.141,00

**g. Alat Kedokteran**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.810.966.100,20	5.320.560.428,60
2	DINAS KESEHATAN	38.205.015.899,60	34.685.369.573,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	514.850.641.141,60	448.229.010.738,40
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	438.180.017.908,80	386.006.047.853,80
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	254.184.635.084,40	229.464.789.267,00
6	RSUD KELET DONOROJO	111.975.114.239,00	98.501.059.297,20
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	48.406.075.673,00	41.767.493.115,20
8	RSJD SURAKARTA	39.861.221.267,00	33.209.308.882,40
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	57.568.452.245,00	54.190.328.004,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	793.138.321,00	639.445.429,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	540.692.525,00	540.084.481,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	-
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.925.000,00	750.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.940.000,00	1.920.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	7.100.000,00	7.100.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	211.371.800,00	143.099.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	500.000,00	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	85.220.000,00	76.660.000,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	103.690.000,00	103.690.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	289.595.000,00	284.975.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	45.289.000,00	8.940.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	116.284.058,20	83.044.872,60
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	190.169.000,00	185.861.000,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	JUMLAH	1.512.433.054.262,80	1.333.449.536.942,20

#### h. Alat Laboratorium

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	226.196.227.016,85	200.235.310.487,05
2	DINAS KESEHATAN	19.098.850.022,65	16.381.256.220,45
3	RSUD Dr. MOEWARDI	12.806.783.492,77	11.161.147.988,92
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.817.516.473,68	838.249.563,07
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	16.880.339.103,48	14.971.581.638,78
6	RSUD KELET DONOROJO	1.754.116.071,75	1.701.537.880,50
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2.759.918.505,38	2.520.217.066,80
8	RSJD SURAKARTA	1.450.073.610,13	1.247.140.567,57
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.734.114.993,50	1.433.470.377,38
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	6.535.357.645,00	6.069.428.645,04
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	1.733.255.215,21	1.488.405.627,91
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	72.311.500,00	63.755.750,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.209.603.996,69	6.604.512.039,80
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	11.012.991.275,79	9.465.834.901,48
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.509.997.705,16	5.305.016.248,01
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	163.343.000,00	163.343.000,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	24.831.250,00	-
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	90.230.000,00	90.230.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.682.534.592,51	5.947.527.592,08



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	8.647.102.513,13	7.687.036.036,49
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.174.377.443,00	7.508.142.612,17
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.637.352.387,50	3.369.180.166,66
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.305.330.326,51	12.761.940.688,74
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	95.472.000,00	86.622.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	12.166.666,70	6.083.333,30
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	509.808.975,00	507.310.600,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	JUMLAH	360.964.005.782,39	317.664.281.032,20

**i. Alat Persenjataan**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.631.074.576,50	2.413.164.250,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	187.829.055,00	187.829.055,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	6.175.000,00	6.175.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.953.500,00	5.953.500,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	138.410.000,00	130.150.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	-	-
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.453.225.003,00	1.410.249.753,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	125.392.500,00	104.935.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	31.204.725,00	31.204.725,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	-
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	131.700.000,00	87.800.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	43.500.000,00	35.000.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.734.000,00	14.734.000,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.265.031.550,00	1.259.331.550,00
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	6.375.000,00	4.250.000,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.650.000,00	23.650.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	6.064.254.909,50	5.714.426.833,00

**j. Alat Komputer**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	717.133.851.606,75	583.652.827.250,25
2	DINAS KESEHATAN	11.701.288.673,25	11.006.695.322,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	14.771.270.446,00	12.798.657.611,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	16.710.130.257,50	13.667.271.756,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	4.741.036.721,00	4.431.439.606,00
6	RSUD KELET DONOROJO	2.905.642.160,50	2.519.940.804,25
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	3.490.991.250,00	3.194.623.250,00
8	RSJD SURAKARTA	4.076.887.867,50	3.516.038.353,75
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	2.548.673.677,00	2.239.458.339,50
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.756.392.040,00	2.273.810.115,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	5.132.587.090,00	4.679.395.215,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.287.897.739,00	1.137.111.989,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.562.060.985,00	1.434.099.492,50
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.085.608.690,00	966.238.690,00
15	DINAS SOSIAL	5.087.894.980,00	4.151.787.790,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.998.511.315,00	1.865.549.603,50
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.337.647.895,00	5.098.270.895,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	797.789.800,00	760.796.050,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.156.391.075,75	7.561.893.641,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.843.746.225,00	1.652.553.800,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.820.662.347,00	2.549.371.722,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	5.142.663.310,50	4.688.186.581,50



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34.751.777.255,00	22.144.229.421,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.035.746.594,00	3.824.593.747,75
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.191.848.768,00	2.908.857.009,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3.678.366.911,00	3.131.660.558,50
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.923.537.151,00	4.585.302.765,25
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.172.355.491,50	2.910.983.237,75
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5.435.973.776,00	5.121.418.926,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.351.586.675,00	1.007.438.406,25
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.090.685.714,00	4.350.001.686,25
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.801.212.157,00	5.898.274.845,50
33	SKPKD	344.055.995,00	344.055.995,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	13.009.699.956,00	10.898.884.521,00
35	SEKRETARIAT DPRD	7.313.643.999,00	6.268.961.249,00
36	INSPEKTORAT	1.900.949.668,00	1.714.569.668,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.255.230.016,00	3.950.418.651,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	43.807.606.154,50	37.346.342.886,75
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.331.277.588,00	6.576.756.088,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.914.547.387,00	5.426.155.340,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4.445.586.387,00	4.161.668.137,00
42	BADAN PENGHUBUNG	1.369.519.767,00	1.388.770.617,00
	JUMLAH	983.214.833.561,75	809.805.361.633,25

#### k. Alat Eksplorasi

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	108.950.531,00	70.138.048,80
2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.224.000,00	3.150.000,00
	Jumlah	116.174.531,00	73.288.048,80

#### l. Alat Pengeboran

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.989.500,00	2.848.000,00
	Jumlah	15.989.500,00	2.848.000,00

#### m. Alat-alat Pemurnian

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59.303.145,01	17.235.676,66
2	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	7.837.320,00	-
	Jumlah	67.140.465,01	17.235.676,66





**n. Alat Eksplorasi**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.236.000,00	2.118.000,00
	Jumlah	4.236.000,00	2.118.000,00

**o. Alat Keselamatan Kerja**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.965.653.294,20	1.227.606.875,60
2	RSJD SURAKARTA	19.430.400,00	9.715.200,00
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.278.800,00	-
	Jumlah	1.991.362.494,20	1.237.322.075,60

**p. Alat Peraga**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26.166.124.764,80	16.322.550.325,30
2	RSUD Dr. MOEWARDI	21.800.000,00	10.900.000,00
3	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	4.892.800,00	2.226.400,00
4	DINAS SOSIAL	23.000.000,00	23.000.000,00
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	700.920,00	467.280,00
	Jumlah	26.216.518.484,80	16.359.144.005,30

**q. Alat Proses Produksi**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	425.842.584,63	242.879.573,75
2	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	23.750.000,00	11.875.000,00
3	RSUD TUGUREJO SEMARANG	11.750.000,00	3.625.000,00
4	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	11.625.000,00	-
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	16.855.500,00	11.237.000,00
	Jumlah	489.823.084,63	269.616.573,75

**r. Alat Rambu rambu**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40.201.337,50	18.901.681,25
2	DINAS PERHUBUNGAN	14.128.180.121,71	11.983.843.459,79
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.968.500,00	20.976.375,00
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	750.000,00	-
5	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	838.500,00	-
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.827.500,00	4.413.750,00
	Jumlah	14.206.765.959,21	12.028.135.266,04



s. **Alat Olah Raga**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.067.865.448,75	9.817.568.894,50
2	DINAS KESEHATAN	81.729.600,00	80.592.100,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	12.139.800,00	8.169.900,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	10.125.000,00	9.875.000,00
6	RSUD KELET DONOROJO	227.588.719,00	227.588.719,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	21.725.000,00	-
8	RSJD SURAKARTA	20.880.000,00	20.880.000,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	6.325.000,00	5.500.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	2.000.000,00	2.000.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.050.000,00	2.525.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.775.000,00	6.887.500,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	71.050.000,00	71.050.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.000.000,00	1.000.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.300.000,00	9.300.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.006.000,00	3.006.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	8.601.440,00	8.601.440,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	40.487.500,00	20.243.750,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.803.014.750,00	1.725.933.500,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.484.000,00	200.484.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	25.263.350,00	25.263.350,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	23.750.000,00	23.750.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	72.210.000,00	72.210.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	203.656.250,00	203.656.250,00
33	SKPKD	13.985.000,00	13.985.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	195.053.000,00	195.053.000,00
35	SEKRETARIAT DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	446.623.500,00	272.935.500,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	160.321.375,00	157.405.687,50



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	273.959.720,00	253.484.720,00
42	BADAN PENGHUBUNG	22.900.000,00	22.900.000,00
Jumlah		15.063.869.452,75	13.481.849.311,00

t. Gedung

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.089.875.791.326,24	1.001.367.164.569,43
2	DINAS KESEHATAN	20.930.301.417,56	18.898.743.206,59
3	RSUD Dr. MOEWARDI	57.247.046.363,61	51.374.537.517,36
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	55.681.031.308,04	50.191.572.749,10
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	28.782.824.113,26	26.078.256.073,71
6	RSUD KELET DONOROJO	15.704.126.453,74	13.921.013.473,03
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	12.648.100.350,36	11.051.862.677,17
8	RSJD SURAKARTA	12.958.373.455,49	12.165.323.949,36
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	13.622.673.693,74	11.491.542.742,91
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	11.475.568.768,31	10.990.037.880,21
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	9.178.564.655,05	8.834.921.925,13
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.903.085.617,82	2.691.255.701,44
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.940.832.230,86	3.568.742.929,10
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.001.019.906,05	1.881.228.893,03
15	DINAS SOSIAL	81.786.253.997,68	77.917.717.422,34
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.513.344.821,91	1.340.415.978,20
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.274.316.118,15	15.653.128.438,60
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.638.606.488,60	8.245.910.405,70
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.942.979.005,00	9.072.287.357,81
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.734.669.448,82	2.473.673.233,26
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.229.989.488,29	3.017.142.377,59
22	DINAS PERHUBUNGAN	30.766.226.596,64	27.693.561.019,76
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.926.099.314,36	2.768.271.367,51
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.473.274.211,40	10.240.929.386,75
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.206.453.433,92	2.998.980.155,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	23.655.030.905,29	18.972.242.457,28
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.678.372.356,16	10.204.543.560,57
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.469.754.202,47	20.855.628.696,41
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	46.501.043.605,98	43.801.409.118,31
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.260.183.189,16	18.354.495.143,05
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.773.638.282,92	6.990.729.098,86
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23.146.356.937,34	22.593.984.602,59
33	SKPKD	73.577.233.974,18	72.840.279.359,99
34	SEKRETARIAT DAERAH	50.737.285.122,81	48.722.428.433,81
35	SEKRETARIAT DPRD	16.661.260.733,41	15.975.073.422,30
36	INSPEKTORAT	5.769.985.269,38	5.422.205.070,32
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.257.955.352,00	11.693.701.072,43
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	63.416.342.876,76	58.537.751.710,63
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42.859.622.368,00	41.446.268.601,27



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.992.587.537,16	3.812.149.523,61
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	30.665.405.647,82	29.610.324.870,30
42	BADAN PENGHUBUNG	6.869.414.511,03	6.555.040.827,02
	JUMLAH	1.974.733.025.456,77	1.822.316.476.998,84

**u. Monumen**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.553.688.273,80	1.304.953.384,71
2	DINAS KESEHATAN	17.299.440,00	14.416.200,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	23.207.100,00	17.888.880,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	113.967.364,00	97.686.312,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	540.000,00	510.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	59.032.020,00	53.311.840,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	13.699.980,00	13.047.600,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.000.000,00	18.200.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	73.523.000,00	59.416.000,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	280.018.285,60	203.035.769,20
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	-
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.652.000,00	2.496.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	429.718.439,52	303.020.159,68
36	INSPEKTORAT	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	101.632.200,00	84.693.500,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	575.612.139,20	534.496.986,40
	Jumlah	3.265.590.242,12	2.707.172.631,99

v. Bangunan Menara

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	246.818.882,00	214.674.167,00
2	DINAS KESEHATAN	-	-
3	RSUD Dr. MOEWARDI	-	-
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	-	-
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	-	-
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	12.240.000,00	9.180.000,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	-	-
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.786.680,00	1.488.900,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	45.218.472,60	34.511.316,30
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	5.767.800,00	4.614.240,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.361.953,40	102.844.087,10
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	627.260.621,20	557.523.005,69
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	1.076.400,00	1.053.000,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.380.000,00	690.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	-
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	1.057.910.809,20	926.578.716,09

**w. Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.178.609.619,20	5.137.217.224,93
2	DINAS KESEHATAN	698.372.245,60	598.958.924,80
3	RSUD Dr. MOEWARDI	168.273.080,00	154.073.460,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	152.460.000,00	142.296.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	69.851.517,66	61.379.252,28
6	RSUD KELET DONOROJO	736.812.168,00	648.590.250,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	28.137.280,00	24.620.120,00
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	408.519.582,18	387.759.656,93
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	-	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	19.531.120,00	180.299.767,50
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.561.000,00	32.528.000,00
15	DINAS SOSIAL	179.083.110,61	147.938.355,30
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	101.224.978,00	90.335.637,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	91.253.960,00	79.509.520,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	58.619.200,00	51.278.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	24.469.222,22	17.938.333,33
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.800.120,00	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.202.400,00	11.002.000,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	126.254.790,19	86.688.480,17



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	77.901.832,17	70.770.096,51
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	410.367.184,64	261.369.283,52
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.420.436.742,83	2.175.359.167,40
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	668.019.360,23	578.759.251,85
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	17.746.620,00	8.873.310,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	215.312.744,00	176.891.348,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	49.706.948,00	43.651.272,00
36	INSPEKTORAT	2.575.800,00	2.289.600,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	22.612.800,00	20.728.400,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	165.455.807,60	129.641.156,96
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.154.239.049,66	1.848.478.725,98
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	535.454.839,00	498.716.628,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	15.830.865.121,79	13.667.941.222,46

**x. Jalan dan Jembatan**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.079.796.901,00	10.001.736.973,60
2	DINAS KESEHATAN	117.825.000,00	117.825.000,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	38.098.040,00	19.049.020,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	-	-
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	60.032.542,12	58.592.178,96
6	RSUD KELET DONOROJO	2.732.198.625,00	2.446.102.375,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	2.106.782.600,00	1.844.426.500,00
8	RSJD SURAKARTA	1.376.730.761,00	1.184.194.211,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	87.297.300,00	77.597.600,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	6.504.161.720.693,88	6.019.864.649.203,84
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	52.859.000,00	52.859.000,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.879.705.646,00	3.254.333.070,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	16.004.689.580,28	14.313.800.195,51
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	2020	2019
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	316.280.769,00	225.102.987,20
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.418.912.018,00	1.678.537.000,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3.070.180.900,00	2.677.838.800,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.550.480.025,00	1.251.052.800,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	387.415.000,00	387.415.000,00
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.230.473.450,00	2.206.336.100,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	JUMLAH	6.595.572.105.821,28	6.088.562.074.985,11

y. **Bangunan Air**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.771.165.226,74	3.330.215.697,45
2	DINAS KESEHATAN	153.257.090,00	135.102.133,33
3	RSUD Dr. MOEWARDI	334.572.280,83	283.714.809,16
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	175.000.000,00	175.000.000,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	225.964.002,50	194.537.800,00
6	RSUD KELET DONOROJO	995.891.990,01	888.703.883,32
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	32.843.000,00	29.558.700,00
8	RSJD SURAKARTA	38.768.375,00	35.577.850,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	238.345.937,50	202.913.766,67
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	40.106.332.185,85	37.195.396.170,72
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	247.914.921.405,42	208.926.922.314,89
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.613.333,33	5.306.666,67
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
15	DINAS SOSIAL	1.189.733.839,44	1.131.362.935,05
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	35.600.000,00	33.375.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.029.760,00	3.885.840,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	902.146.735,24	638.973.268,76
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.022.000,00	97.876.500,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	3.463.930.149,60	3.092.733.505,80





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	49.884.930,00	44.741.675,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.018.600,00	17.158.800,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	92.153.819,72	53.185.942,43
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	78.657.258,06	72.825.806,45
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.973.499.061,70	16.838.790.948,93
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	3.262.127.383,34	2.872.249.566,26
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	239.153.030,00	183.585.053,13
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.796.581.300,65	3.168.976.497,61
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	578.977.749,99	519.426.191,67
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	12.283.333,33	6.141.666,67
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.537.500,00	2.283.750,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	20.985.525,00	18.653.800,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	330.819.996.803,25	280.199.176.539,97

**z. Instalasi**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.267.491.167,02	2.747.583.671,17
2	DINAS KESEHATAN	931.184.261,60	804.846.163,32
3	RSUD Dr. MOEWARDI	1.151.058.350,00	606.707.780,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	3.977.686.599,57	3.579.875.134,33
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	4.907.015.097,39	4.250.426.426,77
6	RSUD KELET DONOROJO	940.716.064,95	824.152.491,80
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	773.027.000,00	394.898.000,00
8	RSJD SURAKARTA	1.012.587.048,38	902.336.103,18
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.028.812.619,30	897.186.380,51
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	27.510.824,00	24.071.971,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	140.765.667,14	123.876.921,32
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.726.333,33	48.830.666,67
15	DINAS SOSIAL	21.000.000,00	20.666.666,67
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	22.858.250,00	20.572.425,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	156.480.247,90	134.411.002,90
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	440.230.967,85	404.521.977,52
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.633.333,33	7.770.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	3.010.276.171,28	2.560.855.181,86
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	74.630.633,34	65.037.416,66
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	38.795.142,50	31.279.994,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	621.912.491,67	564.639.030,56
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	82.071.271,78	72.584.944,61
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	438.236.835,22	335.436.572,07
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.109.965.210,97	3.415.943.066,37
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.131.757,50	11.284.065,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	582.617.315,00	534.167.912,51
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	186.486.271,25	165.518.565,63
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	74.109.086,67	67.710.746,80
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	145.620.313,73	133.862.256,90
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	339.892.500,00	319.892.550,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	192.917.545,00	173.860.656,25
42	BADAN PENGHUBUNG	42.236.867,15	41.095.330,20
	Jumlah	28.811.683.244,82	24.285.902.071,58

aa. Jaringan

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.416.560.362,41	3.857.758.330,78
2	DINAS KESEHATAN	203.649.970,94	173.927.069,57
3	RSUD Dr. MOEWARDI	19.755.958,33	11.611.916,67
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	617.582.422,65	493.018.954,15
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	-	-
6	RSUD KELET DONOROJO	531.212.721,05	473.962.600,84
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	309.909.877,50	271.472.602,00
8	RSJD SURAKARTA	-	-
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	-	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	1.777.466,40	1.333.099,80
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
15	DINAS SOSIAL	29.530.966,67	26.769.833,33
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	36.132.260,00	33.021.506,67
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	276.941.589,16	230.286.428,34
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	33.976.448,33	31.500.395,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	2.626.455.227,36	1.851.856.754,67
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.123.340,00	12.273.755,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.585.192,85	2.441.571,03
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	90.424.129,13	75.071.593,30
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.855.000,00	10.437.500,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	177.642.573,72	60.050.974,13
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	169.603.541,68	138.435.833,34
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	226.168.947,50	190.155.995,84
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.017.200.133,12	5.231.559.634,39
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	81.974.886,67	88.026.719,16
33	SKPKD	22.483.890,00	17.987.112,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	-	-
36	INSPEKTORAT	-	-
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	186.997.156,25	170.321.262,50
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.133.333,39	3.720.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	20.936.025,00	15.915.350,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	Jumlah	16.129.613.420,11	13.472.916.792,51

**bb. Aset Tetap lainnya**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.272.310.172,00	820.864.204,00
2	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	8.352.000,00	2.376.000,00
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.087.800,00	100.043.900,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15.432.800,00	-
5	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5.100.000,00	-
	Jumlah	1.501.282.772,00	923.284.104,00

**5.3.1.3.8 Aset Ektrakomptable**

**Rp329.009.881.861,00**

Ektrakomptable merupakan aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. Sesuai Peraturan



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah barang ekstrakomptabel untuk jenis aset peralatan dan mesin nilainya dibawah lima ratus ribu rupiah dan untuk aset bangunan dan gedung nilainya dibawah dua puluh juta rupiah. Saldo ekstrakomptable pada SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp329.009.881.861,00 naik sebesar Rp11.279.373.744,00 atau 3,55% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp317.730.508.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Akhir 2019 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2020
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	276.833.980.434,00	10.628.340.551,00	396.599.519,00	287.065.721.466,00
2	DINAS KESEHATAN	2.582.396.437,00	31.275.105,00	-	2.613.671.542,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2.088.967.655,00	31.920.000,00	-	2.120.887.655,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.666.693.879,00	-	-	1.666.693.879,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.144.353.401,00	-	-	1.144.353.401,00
6	RSUD KELET DONOROJO	252.512.142,00	-	-	252.512.142,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	805.944.397,00	55.334.491,00	-	861.278.888,00
8	RSJD SURAKARTA	1.097.963.702,00	17.835.001,00	-	1.115.798.703,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	531.447.150,00	2.340.000,00	-	533.787.150,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	769.407.905,00	64.950.000,00	-	834.357.905,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	580.642.408,00	-	-	580.642.408,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	244.664.000,00	30.000.000,00	-	274.664.000,00
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	79.997.000,00	450.000,00	-	80.447.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	319.616.101,00	-	-	319.616.101,00
15	DINAS SOSIAL	3.996.476.689,00	36.894.000,00	297.000,00	4.033.073.689,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	554.926.569,00	-	-	554.926.569,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.189.912.277,00	68.150.000,00	20.350.000,00	2.237.712.277,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	134.319.400,00	350.000,00	-	134.669.400,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.258.648.139,00	65.060.000,00	15.000.000,00	1.308.708.139,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	221.799.752,00	-	-	221.799.752,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo Akhir 2019 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2020
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	210.340.022,00	-	-	210.340.022,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	1.048.799.391,00	4.000.000,00	-	1.052.799.391,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	203.246.964,00	6.000.000,00	-	209.246.964,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	655.402.910,00	4.763.000,00	297.000,00	659.868.910,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	196.971.643,00	550.000,00	-	197.521.643,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	852.065.400,00	63.583.334,00	-	915.648.734,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	404.434.728,00	-	-	404.434.728,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	513.473.129,00	66.369.500,00	-	579.842.629,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.737.697.286,00	271.312.362,00	-	2.009.009.648,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.937.915.305,00	1.080.000,00	-	2.938.995.305,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	502.445.250,00	62.220.440,00	-	564.665.690,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.015.836.779,00	18.542.000,00	-	1.034.378.779,00
33	SKPKD	583.791.073,00	-	-	583.791.073,00
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.529.560.128,00	17.873.813,00	-	1.547.433.941,00
35	SEKRETARIAT DPRD	695.452.499,00	-	-	695.452.499,00
36	INSPEKTORAT	127.448.759,00	-	-	127.448.759,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	98.531.759,00	-	-	98.531.759,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2.836.514.947,00	219.501.770,00	113.443.770,00	2.942.572.947,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.982.469.640,00	6.600.000,00	8.303.334,00	1.980.766.306,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	315.912.463,00	-	-	315.912.463,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1.599.821.423,00	-	-	1.599.821.423,00
42	BADAN PENGHUBUNG	327.707.182,00	58.369.000,00	-	386.076.182,00
	Jumlah	317.730.508.117,00	317.730.508.117,00	11.833.664.367,00	554.290.623,00

### 5.3.1.5 Aset Lainnya

**Rp1.508.575.287.759,63**

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp1.508.575.287.759,63 turun sebesar (Rp9.607.139.541,58) atau (0,63%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.518.182.427.301,21 dengan rincian sebagai berikut:



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

*(Dalam Rupiah)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1 Sewa	64.416.799.324,00	46.243.902.024,00
2 Kerjasama Pemanfaatan	8.523.543.840,00	307.275.698.000,00
3 Pinjam Pakai	30.065.463.092,00	11.874.138.500,00
4 Aset Tak Berwujud	29.639.574.573,00	25.144.597.365,00
5 Aset Lain-Lain	1.739.648.408.125,00	1.495.704.179.713,00
6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Sewa)	(2.954.812.816,16)	(34.029.786,80)
7 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Kerjasama Pemanfaatan)	(9.553.752,00)	-
8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Pinjam Pakai)	(3.937.209.856,75)	(1.252.417.120,00)
9 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(21.983.069.404,75)	(17.749.362.824,63)
10 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	(334.833.855.364,71)	(349.024.278.569,36)
<b>Jumlah</b>	<b>1.508.575.287.759,63</b>	<b>1.518.182.427.301,21</b>

**5.3.1.5 Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga** **Rp96.104.229.831,09**

Saldo sebesar Rp96.104.229.831,09 turun (Rp268.003.061.786,11) atau (73,61%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp364.107.291.617,20 merupakan aset yang disewakan, dikerjasamakan dan pinjam pakai dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sewa	64.416.799.324,00	46.243.902.024,00
Kerjasama Pemanfaatan	8.523.543.840,00	307.275.698.000,00
Pinjam Pakai	30.065.463.092,00	11.874.138.500,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(6.901.576.424,91)	(1.286.446.906,80)
<b>Jumlah</b>	<b>96.104.229.831,09</b>	<b>364.107.291.617,20</b>

Adapun penjelasan aset kemitraan dengan pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

**5.3.1.5.1.1 Sewa** **Rp64.416.799.324,00**

Saldo sebesar Rp64.416.799.324,00 naik Rp18.172.897.300,00 atau (39,30%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.243.902.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1 SKPKD	58.288.563.456,00	44.634.480.156,00
2 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	4.479.874.000,00	-
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	214.421.868,00	214.421.868,00
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	38.940.000,00	-
	<b>64.416.799.324,00</b>	<b>46.243.902.024,00</b>

Rincian Aset yang disewakan sebagai berikut :

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum	Aset Tetap Tanah	KELURAHAN KEBULEN KECAMATAN	1.701.000.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN DESA DOROREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN	149.066.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN	164.688.000,00
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK KELURAHAN MANAHAN	328.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA	1.575.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA GIRIMULYO KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO DESA KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	6.480.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	64.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA KRAGILAN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	56.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA SAREN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	60.800.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA GIRIMULYO KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO	181.840.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA KARANG MANGU KEC.BATURADEN PURWOKERTO	152.000.000,00
2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Aset Tetap Tanah	Jl. Pramuka 145, Desa Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto, Kab Banyumas	1.395.000.000,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Aset Tetap Tanah	Jl. Setiabudi 128	15.940.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl.Papandayan Selatan 3 jl pemuda no. 19 A dan B. RT 04/RW	4.340.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	22 Kel mulyoharjo kec Pernalang Kab Pernalang	3.360.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Komplek Perum Sidorejo, Jl. Jambewangi, Desa Sidorejo lor, Kec. Kota Salatiga, Kota Salatiga	383.750.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Sindoro No. 9, Wonosobo	142.200.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Bakti No. 9 Kudus	10.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	PERUMAHAN SILAMAT NO.5 DAN 6 RT 01/12 Ds. Ngringgo Kecamatan Jaten Kab. Karangayar	62.600.000,00
4	SKPKD	Aset Tetap Tanah	DUSUN NGRUMBUL SAWIT 07/01 KEL SROYO Kecamatan Jaten Kab. Karangayar	9.960.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Penjawi Dk. Randukuning Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati	6.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Mahesa IA/76 Pedurungan, Semarang	1.887.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN DS.NGLOROG KAB. SRAGEN	163.535.625,00
		Aset Tetap Tanah	JL. USMAN JANATIN RT.005/009	4.950.000,00
		Aset Tetap Tanah		1.688.684.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
			KEL.TANJUNGMAS	
		Aset Tetap Tanah	Jl Kartini No. 108 Kelurahan Salatiga	711.776.000,00
		Aset Tetap Tanah	Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati	3.510.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Lawu Km 16, Desa Tegal Gede Kec Karanganyar Kab Karanganyar	490.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Pamularsih No. 58, Semarang	2.000.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl.JEND.Sudirman No. 52, RT 01/01 Desa Puri, Kec. Pati, Kab. Pati KODE POS 59113	4.745.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl Soekarno Hatta no 224, desa Pegulon, kec Kendal Kab Kendal	583.905.000,00
		Aset Tetap Tanah	Desa Kretek Kab Wonosobo	71.800.000,00
		Aset Tetap Tanah	Desa Suruh Kecamatan Suruh Kab. Semarang	986.250.000,00
		Aset Tetap Tanah	Desa Tragung Kec.Kandeman Kab. Batang	1.579.077.500,00
		Aset Tetap Tanah	Tanah Jl. Tentara Pelajar No. 7 Kel. Kemirirejo Kota Magelang	17.297.656,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Tanjung No 11. A Semarang	1.636.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	Ds. Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas	15.709.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Raya Surakarta - Sragen Ds. Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar	1.890.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Raya Pati-Kudus Ds Bumirejo Kec Margorejo Kab Pati	2.317.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	Dk. Sadon Ds. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar	110.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Jend. Sudirman Ds. Puri Kec. Pati Kab. Pati	1.935.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Raya Buntu - Sumpiuh Ds. Pagelarang Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	178.668.750,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta Ds. Purwodadi Kec. Tambak Kab. Banyumas	144.665.625,00
		Aset Tetap Tanah	JL. GINTUNGAN, KEL. Bandungan, KEC. Ambarawa	1.200.000.000,00
			Total	57.726.934.156,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN		40.500.000,00
6	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN		214.421.868,00
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN		23.000.000,00
8	SKPKD	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		30.488.000,00





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
		KANTOR PERMANEN		
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		28.520.000,00
		KANTOR PERMANEN		
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		440.000.000,00
		KANTOR PERMANEN		
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		540.730.000,00
		KANTOR PERMANEN		
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		1.574.417.500,00
		KANTOR PERMANEN		
		BANGUNAN GEDUNG.LAIN- LAIN		30.200.000,00
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		70.012.000,00
		TEMPAT IBADAH PERMANEN		
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG		74.564.000,00
		TEMPAT IBADAH PERMANEN		
		BANGUNAN		
		GEDUNG.BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA PERMANEN		72.000.000,00
		BANGUNAN		
		GEDUNG.GEDUNG POS JAGA PERMANEN		58.481.000,00
		BANGUNAN		
		GEDUNG.GEDUNG POS JAGA PERMANEN		52.403.000,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN		322.500.000,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN		210.000.000,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN		1.323.589.900,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN		1.323.517.900,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN		122.800.000,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN		20.000.000,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN		100.000.000,00
		BANGUNAN GEDUNG.RUMAH		14.220.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
		NEGARA GOLONGAN III TIPE A		
		PERMANEN		
		BANGUNAN GEDUNG.SARANA		3.500.000,00
		PELENGKAP PERMANEN		
		Total		6.689.865.168,00
		<b>Jumlah</b>		<b>64.416.799.324,00</b>

**5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan**

**Rp8.523.543.840,00**

Saldo sebesar Rp8.523.543.840,00 turun Rp298.752.154.160,00 atau (97,23%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp307.275.698.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 SKPKD	3.736.845.840,00	302.489.000.000,00
2 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.944.850.000,00	2.944.850.000,00
3 Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.841.848.000,00	1.841.848.000,00
	<b>8.523.543.840,00</b>	<b>307.275.698.000,00</b>

**Rincian Aset Dikerjakamakan sebagai berikut :**

*(Dalam Rupiah)*

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
		Aset Tetap Tanah	Kadilangu, Demak Kota, Demak	220.600.000,00
		Aset Tetap Tanah	Bintoro, Kec. Demak Kota, Demak	223.000.000,00
1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Aset Tetap Tanah	Desa Krikilan Kec. Kalijambe Sragen	1.368.750.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA KRIKILAN KEC. KALIJANBE KAB. SRAGEN	1.132.500.000,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Aset Tetap Tanah	DS CLERING KEC. KELING KAB. JEPARA	1.841.848.000,00
3	SKPKD	Aset Tetap Tanah	Jl Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes	3.705.000.000,00
		<b>Total</b>		<b>8.491.698.000,00</b>
		BANGUNAN		
4	SKPKD	GEDUNG.BANGUNAN		31.845.840,00
		GEDUNG KANTOR PERMANEN		
		<b>Total</b>		<b>31.845.840,00</b>
		<b>Jumlah</b>		<b>8.523.543.840,00</b>

**5.3.1.5.1.3 Pinjam Pakai**

**Rp30.065.463.092,00**

Saldo sebesar Rp30.065.463.092,00 naik Rp18.191.324.592,00 atau (153,20%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.874.138.500,00 dengan rincian sebagai berikut :



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

*(Dalam Rupiah)*

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	SKPKD	20.206.175.004,00	6.176.715.500,00
2	Dinas PU Bina Marga dan Keciaptakaryaan	2.046.600.000,00	2.046.600.000,00
3	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	211.648.338,00	-
4	Sekretariat Daerah	3.950.216.750,00	-
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	758.166.000,00	758.166.000,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.054.522.088,00	2.892.657.000,00
		<b>34.227.328.180,00</b>	<b>11.874.138.500,00</b>

**Rincian Aset Pinjam sebagai berikut :**

*(Dalam Rupiah)*

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	31.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	60.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	66.000.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Aset Tetap Tanah	KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	96.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	DESA ADINUSO KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG	57.850.000,00
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KOTA KENDAL KABUPATEN KENDAL	75.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KOTA KENDAL KABUPATEN KENDAL	128.000.000,00
		Aset Tetap Tanah	KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS	1.532.250.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl.Papandayan Selatan 1	3.367.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl.Papandayan Selatan 7	3.367.500.000,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Sembilang No. 1,RT 07/10 KEL Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal	33.250.000,00
2	SKPKD	Aset Tetap Tanah	Jl. Meranti Timur Dalam IV No. 3, Banyumanik, Semarang,	2.728.704,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Meranti Timur Dalam IV No. 6, Banyumanik, Semarang,	8.676.800,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Pamularsih No. 10, Semarang	70.259.500,00
		Aset Tetap Tanah	Jl. Letjen Suprpto No. 5 Surakarta	81.750.000,00
		Aset Tetap Tanah	Desa Sambilawan KEC TRANGKIL RT 01/01 Kab. Pati	7.100.000,00





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
		ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT		53.206.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL		9.974.250,00
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON		520.000.000,00



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

No.	SKPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Nilai
		ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH )		483.357.000,00
		ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH )		635.000.000,00
		ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH )		1.059.300.000,00
		ALAT KOMPUTER.SERVER		195.000.000,00
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON		211.648.338,00
6	Sekretariat Daerah	ALAT ANGKUTAN.SEDAN		658.000.000,00
		ALAT ANGKUTAN.SEDAN		855.000.000,00
		ALAT ANGKUTAN.JEEP		403.000.000,00
		ALAT ANGKUTAN.JEEP		414.678.000,00
		ALAT ANGKUTAN.JEEP		439.084.250,00
		ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON		520.000.000,00
		ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON		306.386.000,00
		ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON		354.068.500,00
		Total		7.054.522.088,00
		<b>Jumlah</b>		<b>30.065.463.092,00</b>

**5.3.1.5.1.4 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Rp6.901.576.424,91)**

Saldo sebesar (Rp6.901.576.424,91) merupakan akumulasi penyusutan atas kemitraan dengan pihak ketiga naik sebesar Rp5.615.129.518,11 atau 436,48% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.286.446.906,80, dengan rincian sebagai berikut :

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

*(Dalam Rupiah)*

No	SKPD	2020	2019
1	SKPKD	2.872.742.192,00	12.587.600,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	35.640.000,00	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.730.624,16	21.442.186,80
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	20.700.000,00	-
	Jumlah	2.954.812.816,16	34.029.786,80

b. Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan

No	SKPD	2020	2019
1	SKPKD	9.553.752,00	-
	JUMLAH	9.553.752,00	-



c. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Pinjam Pakai

(Dalam Rupiah)

N o	SKPD	2020	2019
1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	211.648.338,00	-
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	414.990.300,00	311.242.725,00
4	SKPKD	-	29.465.520,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	2.012.905.218,75	-
6	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.297.666.000,00	911.708.875,00
	JUMLAH	3.937.209.856,75	1.252.417.120,00

**5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud**

**Rp7.656.505.168,25**

Saldo sebesar Rp7.656.505.168,25 merupakan saldo Aset Tak Berwujud di SKPD naik sebesar Rp261.270.627,88 atau 3,53% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.395.234.540,37 merupakan lisensi, aplikasi atau software yang digunakan untuk aktivitas operasional SKPD per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Lisensi dan Franchise	18.700.000,00	5.000.000,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	29.620.874.573,00	25.139.597.365,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(21.983.069.404,75)	(17.749.362.824,63)
Jumlah	<b>7.656.505.168,25</b>	<b>7.395.234.540,37</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tak berwujud sebelum amortisasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	25.144.597.365,00
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	1.082.117.500,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	1.307.854.000,00
Hibah	368.629.800,00
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari ATB	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Tetap	768.989.908,00
Koreksi	1.085.918.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.613.509.708,00</b>
<b>Berkurang</b>	
Mutasi Keluar	-



Reklasifikasi Keluar ke ATB	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap	-
Penghapusan	-
Koreksi Hutang	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi	118.532.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>118.532.500,00</b>

**Grand Total** **29.639.574.573,00**

**5.3.1.5.2.1 Lisensi dan Franchise** **Rp18.700.000,00**

Saldo sebesar Rp18.700.000,00 naik sebesar Rp13.700.000,00 atau 274,00% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.700.000,00	-
2	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	5.000.000	5.000.000,00
	Jumlah	18.700.000,00	5.000.000,00

**5.3.1.5.2.2 Aset Tak Berwujud Lainnya** **Rp29.620.874.573,00**

Saldo sebesar Rp29.620.874.573,00 naik sebesar Rp4.481.277.208,00 atau 17,83% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.139.597.365,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.514.924.199,00	1.686.825.991,00
2	DINAS KESEHATAN	2.100.277.200,00	1.420.822.200,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.520.631.378,00	3.290.626.378,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	1.291.554.233,00	1.291.554.233,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.320.090.000,00	1.320.090.000,00
6	RSUD KELET DONOROJO	2.114.121.000,00	2.064.621.000,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	1.497.000.000,00	1.443.600.000,00
8	RSJD SURAKARTA	2.665.081.409,00	2.665.081.409,00
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.439.542.169,00	1.444.542.169,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	128.805.000,00	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	189.500.000,00	189.500.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.700.000,00	39.700.000,00
15	DINAS SOSIAL	519.580.500,00	494.700.500,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	597.840.000,00	597.840.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	191.445.000,00	191.445.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	29.500.000,00	-
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	195.580.000,00	195.580.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	124.949.000,00	124.949.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	43.457.500,00	43.457.500,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.731.466.000,00	1.608.921.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	227.161.000,00	131.602.000,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	849.478.000,00	474.592.500,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	859.085.000,00	343.042.500,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	140.950.000,00	140.950.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.081.344.220,00	1.081.344.220,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	39.500.000,00	39.500.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	556.500.900,00	461.500.900,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	488.733.000,00	189.150.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	72.284.750,00	62.284.750,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	304.804.000,00	-
36	INSPEKTORAT	393.850.865,00	97.480.865,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	479.757.000,00	479.757.000,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	501.362.000,00	501.362.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	926.045.000,00	578.200.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	151.539.500,00	151.539.500,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	293.434.750,00	293.434.750,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
	JUMLAH	29.620.874.573,00	25.139.597.365,00

**5.3.1.5.2.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp21.983.069.404,75)**

Saldo sebesar (Rp21.983.069.404,75) naik sebesar (Rp4.233.706.580,12) atau 23,85% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp17.749.362.824,63), dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.789.149.932,60	1.431.152.050,80
2	DINAS KESEHATAN	1.638.845.200,00	1.158.683.200,00
3	RSUD Dr. MOEWARDI	3.340.627.378,00	3.295.626.378,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	735.402.539,80	477.091.693,20
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	1.280.890.000,00	1.241.690.000,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.872.857.666,67	1.660.849.533,33
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	928.560.000,00	678.280.000,00
8	RSJD SURAKARTA	1.308.653.563,60	785.264.281,80
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.186.975.720,75	944.809.272,50
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	25.761.000,00	-
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	75.800.000,00	37.900.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39.700.000,00	39.700.000,00
15	DINAS SOSIAL	475.321.700,00	431.801.100,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	309.854.000,00	190.286.000,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	191.445.000,00	191.445.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	11.800.000,00	-
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	195.580.000,00	195.580.000,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.544.200,00	55.554.400,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	34.766.000,00	26.074.500,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.151.755.400,00	804.196.200,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	76.790.600,00	31.358.400,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	737.072.400,00	463.092.500,00
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	277.461.500,00	112.722.500,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	112.760.000,00	84.570.000,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.081.344.220,00	1.081.344.220,00
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	31.600.000,00	23.700.000,00
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	307.186.360,00	193.486.180,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	301.796.533,33	155.320.000,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55.557.900,00	41.100.950,00
33	SKPKD	-	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	SEKRETARIAT DPRD	102.180.800,00	-
36	INSPEKTORAT	156.754.865,00	97.480.865,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	444.456.175,00	414.067.350,00



No.	SKPD	2020	2019
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	461.662.000,00	421.962.000,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	717.182.500,00	538.200.000,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	151.539.500,00	151.539.500,00
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	293.434.750,00	293.434.750,00
42	BADAN PENGHUBUNG	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.983.069.404,75</b>	<b>17.749.362.824,63</b>

### 5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

**Rp1.404.814.552.760,29**

Saldo sebesar Rp1.404.814.552.760,29 naik sebesar Rp258.134.651.616,65 atau 22,51%, dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.146.679.901.134,64 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
Aset Lain-Lain (Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta)	134.016.173,00	175.136.390,00
Aset Lain-Lain	1.739.514.391.952,00	1.495.529.043.323,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(334.833.855.364,71)	(349.024.278.569,36)
<b>Aset Lain-Lain Netto</b>	<b>1.404.814.552.760,29</b>	<b>1.146.679.901.143,64</b>

#### 5.3.1.5.3.1 Aset Lain-Lain

**Rp1.739.648.408.125,00**

Saldo sebesar Rp1.739.648.408.125,00 merupakan saldo aset lain-lain, naik sebesar Rp243.944.228.412,00 atau 16,31% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.495.704.179.713,00. merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dan aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima Barangnya serta Aset Lain-Lain Berupa sisa uang titipan RSUD Moewardi Surakarta, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
Aset Lain-Lain (Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta)	134.016.173,00	175.136.390,00
<b>Jumlah</b>	<b>134.016.173,00</b>	<b>175.136.390,00</b>

Di dalam aset lain-lain terdapat Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta sebesar Rp134.016.173,00. yang merupakan sisa uang titipan pasien yang masih disimpan oleh bendahara RSUD Dr Moewardi Surakarta.

##### b. Aset Lain-Lain Barang Rusak Berat

*(Dalam Rupiah)*

	2019	2020
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	49.027.299.451,00	47.769.063.149,00
2 Dinas Kesehatan	15.496.924.393,00	7.530.456.322,00
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	11.396.538.375,00	11.396.538.375,00
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	97.559.890.327,00	108.055.508.067,00



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

	2019	2020
5 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	12.111.290.657,00	6.260.860.052,00
6 RSUD Tugurejo Semarang	1.474.679.299,00	11.032.590.660,00
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	5.718.860.052,00	1.474.679.299,00
8 RSJD Surakarta	4.456.828.101,00	4.152.112.501,00
9 RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.684.124.410,00	1.684.124.410,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.046.545.068.117,00	1.013.305.333.741,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	36.656.805.678,00	8.532.736.869,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	
13 Satuan Polisi Pamong Praja	619.423.794,00	619.423.794,00
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.636.490.316,00	3.636.490.316,00
15 Dinas Sosial	3.987.248.160,00	4.056.673.660,00
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.066.162.544,00	7.935.532.721,00
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	9.734.000,00	20.659.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.202.714.041,00	3.202.714.041,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.611.294.000,00	-
21 Dinas Ketahanan Pangan	-	-
22 Dinas Perhubungan	11.095.596.502,00	11.095.596.502,00
23 Dinas Koperasi dan UKM	2.642.879.674,00	658.081.049,00
24 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	658.081.049,00	1.220.798.888,00
25 Dinas Komunikasi dan Informasi	853.380.847,00	2.895.104.674,00
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.218.646.884,00	11.218.646.884,00
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	10.758.615.353,00	10.820.175.353,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.117.053.707,00	8.117.053.707,00
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32.280.907.102,00	26.372.976.227,00
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.747.413.588,00	3.747.413.588,00
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.013.321.626,00	9.873.898.926,00
33 Sekretariat Daerah	321.686.828.241,00	16.210.844.983,00
34 Sekretariat DPRD	-	718.338.033,00
35 Inspektorat	975.548.033,00	538.523.024,00
36 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	538.523.024,00	1.880.693.183,00
37 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.880.693.183,00	6.553.631.591,00
38 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.553.631.591,00	8.496.844.542,00
39 Badan Kepegawaian Daerah	1.616.910.726,00	
40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	587.862.118,00	3.882.132.305,00
41 Badan Penghubung	3.882.132.305,00	574.289.447,00
42 SKPKD	646.961.860,00	128.490.474.616,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.739.514.391.952,00</b>	<b>1.495.529.043.323,00</b>

5.3.1.5.3.2 **Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

**(Rp334.833.855.364,71)**

Saldo sebesar (Rp334.833.855.364,71) merupakan saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	SKPD	2020	2019
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	36.708.394.756,55	35.412.389.786,31



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	2020	2019
2	DINAS KESEHATAN	5.898.202.946,72	4.902.394.437,84
3	RSUD Dr. MOEWARDI	2.373.106.815,00	2.373.106.815,00
4	RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	97.426.664.517,00	107.922.282.257,00
5	RSUD TUGUREJO SEMARANG	12.105.966.657,00	11.027.266.660,00
6	RSUD KELET DONOROJO	1.449.935.049,00	1.449.935.049,00
7	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	5.718.860.052,00	6.260.860.052,00
8	RSJD SURAKARTA	3.111.858.369,50	2.807.142.769,50
9	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	1.684.124.410,00	1.684.124.410,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	51.947.398.879,77	43.013.780.264,93
11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	4.748.677.162,50	4.707.133.869,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	604.369.794,00	604.369.794,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.631.904.316,00	3.631.904.316,00
15	DINAS SOSIAL	3.843.840.759,00	3.955.906.259,00
16	SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.001.451.510,66	7.909.424.187,66
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.734.000,00	20.659.000,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.187.529.041,00	3.187.529.041,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.611.294.000,00	-
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	DINAS PERHUBUNGAN	8.917.249.002,64	8.917.249.002,64
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.641.402.774,00	2.858.071.524,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	658.081.049,00	658.081.049,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	853.380.847,00	1.215.650.983,20
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	10.292.083.962,40	10.279.547.351,20
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.389.977.715,69	7.428.507.715,69
29	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	7.624.823.415,33	7.624.823.415,33
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	17.291.691.533,29	17.261.775.133,29
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.730.673.588,00	3.730.673.588,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.097.578.304,83	9.712.708.895,00
33	SKPKD	486.258.500,70	459.258.500,70
34	SEKRETARIAT DAERAH	-	16.209.222.243,00
35	SEKRETARIAT DPRD	943.396.783,00	718.338.033,00
36	INSPEKTORAT	509.888.974,00	509.888.974,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,	1.807.038.183,00	1.807.038.183,00



No	SKPD	2020	2019
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	6.547.335.538,00	6.547.335.538,00
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.573.099.619,13	6.424.127.313,07
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	587.862.118,00	-
41	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.882.132.305,00	3.882.132.305,00
42	BADAN PENGHUBUNG	438.559.292,00	411.611.030,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>334.833.855.364,71</b>	<b>349.024.278.569,36</b>

### 5.3.2 Kewajiban

**Rp824.663.799.218,45**

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp824.663.799.218,45 naik sebesar Rp425.466.084.354,19 atau 106,58% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp399.197.714.864,26. Rincian Kewajiban sebesar Rp824.663.799.218,45 adalah sebagai berikut:

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

**Rp824.663.799.218,45**

Total Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp824.663.799.218,45 naik sebesar Rp425.466.084.354,19 atau 106,58% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp399.197.714.864,26 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

	2020	2019
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	249.993.159,00	7.875.193.890,99
2 Utang Bunga	-	-
3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
4 Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya	37.083.532.402,45	41.394.313.112,02
5 Utang Belanja	199.503.881.707,00	206.823.614.940,25
6 Utang Jangka Pendek Lainnya	587.826.391.950,00	143.104.592.921,00
<b>Jumlah</b>	<b>824.663.799.218,45</b>	<b>399.197.714.864,26</b>

##### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

**Rp249.993.159,00**

Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 desember 2020 sebesar Rp249.993.159,00 turun sebesar (Rp7.625.200.731,99) atau (96,83%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.875.193.890,99. Utang perhitungan pihak ketiga merupakan setoran pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum disetorkan ke rekening Kas Umum Negara, atas setoran tersebut telah disetorkan pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

	2020	2019
Utang Pajak		
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249.993.159,00	7.861.563.001,99
2 Dinas Kesehatan	-	831.000,00



3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	13.840,00
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	81.818,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.509.263,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	369.364,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	906.400,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	3.758.641,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	94.500,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.500.000,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	97.272,00
12	Sekretariat Daerah	-	2.747.157,00
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	721.634,00
<b>Jumlah</b>		<b>249.993.159,00</b>	<b>7.875.193.890,99</b>

#### 5.3.2.1.2. Pendapatan Dibayar Dimuka

**Rp37.083.532.402,45**

Saldo pendapatan dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.083.532.402,45 turun sebesar (Rp4.310.780.709,57) atau (10,41%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.394.313.112,02 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

	2020	2019
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya		
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	658.701.066,67	824.149.976,00
2 RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto	240.620.985,21	510.877.307,02
3 RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
4 RSUD Tugurejo Semarang	66.472.900,00	225.900.000,00
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.077.625,57	26.591.666,00
6 Dinas Koperasi dan UMKM	-	-
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	18.150.000,00	-
8 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	36.066.667.825,00	39.806.460.550,00
9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.842.000,00	333.613,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.083.532.402,45</b>	<b>41.394.313.112,02</b>

#### 5.3.2.1.3. Utang Belanja

**Rp199.503.881.707,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.503.881.707,00 turun sebesar (Rp7.319.733.233,25) atau (3,54%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp206.832.614.940,25 merupakan kewajiban belanja SKPD pada periode bersangkutan, tetapi belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Utang Belanja Pegawai	90.554.531.168,00	2.903.248.997,00
2 Utang Belanja Barang dan Jasa	108.672.656.531,00	203.871.773.443,25



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3	Utang Belanja Modal	3.694.008,00	48.592.500,00
4	Utang Belanja Lainnya	273.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>199.503.881.707,00</b>	<b>206.823.614.940,25</b>

#### 5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

**Rp90.554.531.168,00**

Saldo Rp90.554.531.168,00 merupakan kewajiban belanja pegawai yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

	2020	2019	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.902.909.220,00	135.977.197,00
2	RSUD Moewardi Surakarta	625.600.000,00	42.000.000,00
3	RSUD Margono Soekarjo	2.888.991.948,00	2.693.756.800,00
4	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	91.180.000	9.575.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo	45.850.000,00	19.850.000,00
6	RSJD Surakarta	-	2.000.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	90.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.554.531.168,00</b>	<b>2.903.248.997,00</b>

#### 5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang Jasa

**Rp108.672.656.531,00**

Saldo Rp108.672.656.531,00 merupakan kewajiban belanja barang dan jasa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

	2020	2019	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	
2	Dinas Kesehatan	844.297.334,00	1.618.984.675,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	45.836.348.001,00	142.487.334.792,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	45.176.348.916,00	48.017.360.731,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.993.130.087,00	543.346.012,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	7.823.615.654,00	1.172.700.327,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.253.505.243,00	3.546.949.926,25
8	RSJD Surakarta	1.892.485.084,00	3.182.789.420,00
9	RSJD RM Soedjarwadi Klaten	2.852.926.212,00	3.302.307.560,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>108.672.656.531,00</b>	<b>203.871.773.443,25</b>

#### 5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal

**Rp3.694.008,00**

Saldo Rp3.694.008,00 merupakan kewajiban belanja modal yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019	
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	48.592.500,00





2	RSJ Surakarta	3.694.008,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.694.008,00</b>	<b>48.592.500,00</b>

**5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Lainnya** **Rp273.000.000,00**

Saldo Rp273.000.000,00 merupakan kewajiban belanja penyaluran dana BSM Tahun 2020 ke rekening siswa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

**5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya** **Rp587.826.391.950,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp587.826.391.950,00 naik sebesar Rp444.721.799.029,00 atau 310,77% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp143.104.592.921,00 merupakan kewajiban kepada kabupaten/kota maupun pihak ketiga, tetapi belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam rupiah)*

	2020	2019	
1	Utang Transfer	586.175.926.577,00	142.929.456.531,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.650.465.373,00	175.136.390,00
	<b>Jumlah</b>	<b>587.826.391.950,00</b>	<b>143.104.592.921,00</b>

**5.3.2.1.4.1 Utang Transfer** **Rp586.175.926.577,00**

Saldo Rp586.175.926.577,00 merupakan kewajiban belanja transfer yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

	2020	2019	
1	Utang transfer pajak daerah	586.118.188.577,00	142.871.718.531,00
2	Utang transfer retribusi daerah	57.738.000,00	57.738.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>586.175.926.577,00</b>	<b>142.929.456.531,00</b>

Rincian Utang transfer pajak daerah sebesar Rp Rp586.175.926.577,00 sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

	2020	2019	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	263.276.093.828,00	81.034.266.929,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	111.395.751.306,00	53.620.627.388,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	210.080.276.724,00	7.911.277.809,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	1.366.066.719,00	305.546.405,00
5	Pajak Rokok	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>586.118.188.577,00</b>	<b>142.871.718.531,00</b>



## Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota

(Dalam rupiah)

NO	Kabupaten/Kota	2020	2019
1	SEMARANG	20.329.827.372,00	9.286.624.070,00
2	KENDAL	16.089.692.556,00	3.396.380.420,00
3	DEMAK	18.210.868.637,00	5.413.572.045,00
4	GROBOGAN	18.006.594.466,00	5.541.685.271,00
5	PATI	22.685.130.317,00	4.916.518.450,00
6	KUDUS	17.100.862.284,00	3.911.891.065,00
7	JEPARA	18.988.068.355,00	4.595.957.461,00
8	REMBANG	12.177.721.170,00	2.409.776.601,00
9	BLORA	11.703.083.375,00	2.792.077.164,00
10	PEKALONGAN	10.785.494.355,00	2.599.446.594,00
11	BATANG	12.060.342.158,00	2.241.489.548,00
12	PEMALANG	16.099.755.860,00	3.468.386.942,00
13	TEGAL	17.537.774.722,00	3.581.062.772,00
14	BREBES	20.268.279.105,00	4.668.430.213,00
15	BANYUMAS	24.217.340.689,00	5.525.641.646,00
16	CILACAP	24.535.479.696,00	5.758.882.053,00
17	PURBALINGGA	11.676.129.796,00	2.678.832.318,00
18	BANJARNEGARA	11.002.218.871,00	2.561.566.847,00
19	MAGELANG	17.710.292.553,00	3.741.444.830,00
20	TEMANGGUNG	11.002.013.459,00	2.232.845.657,00
21	WONOSOBO	9.859.893.353,00	2.432.252.811,00
22	PURWOREJO	10.760.355.454,00	2.441.813.902,00
23	KEBUMEN	14.715.007.496,00	3.344.694.766,00
24	KLATEN	21.805.978.475,00	5.011.184.824,00
25	BOYOLALI	15.037.181.115,00	3.199.782.275,00
26	SRAGEN	18.086.398.598,00	3.714.961.615,00
27	SUKOHARDJO	18.253.417.692,00	3.518.435.247,00
28	KARANGANYAR	17.130.205.220,00	3.556.953.517,00
29	WONOGIRI	13.916.383.672,00	3.201.513.303,00
30	SEMARANG	67.763.718.247,00	18.909.723.578,00
31	PEKALONGAN	7.576.378.061,00	1.751.349.406,00
32	SURAKARTA	19.600.449.923,00	5.220.673.959,00
33	SALATIGA	6.512.348.294,00	1.690.885.392,00
34	TEGAL	6.538.053.105,00	2.408.634.359,00
35	MAGELANG	6.375.450.076,00	1.146.347.610,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>586.118.188.577,00</b>	<b>586.118.188.577,00</b>

## Utang Bagi Hasil Retribusi Kpd Kab/Kota

	2020	2019
1 Kapal Cepat Kartini I kepada Kabupaten Jepara	57.738.000,00	57.738.000,00



Jumlah

57.738.000,00

57.738.000,00

#### 5.3.2.1.4.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

**Rp1.650.465.373,00**

Saldo Rp1.650.465.373,00 merupakan kelebihan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat Rp1.516.449.200,00 dan sisa uang titipan pasien RSUD Dr Moewardi Surakarta yang masih ada di bendahara sebesar Rp134.016.173,00.

#### Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah di Jalan Durian Raya Banyumanik Kota Semarang yang tercatat pada KIB PSDA digugat diajukan oleh Yosef Soewarto dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Obyek sengketa tersebut adalah : Tanah SHM Nomor 5334/Srondol Wetan seluas 2.257 m<sup>2</sup>; tanah SHM Nomor 5335/Srondol Wetan seluas 762 m<sup>2</sup>; dan tanah SHM Nomor 5336/Srondol Wetan seluas 1.500 m<sup>2</sup> dengan nilai keseluruhan Rp 99.271.315,-.

Gugatan pertama diputus oleh PN Semarang dengan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan gugatan balik (rekonpensi) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikabulkan sebagian. Penggugat mengajukan Banding dan diputus berdasarkan Putusan PT Semarang Nomor 521/PDT/2016/PT.Smg tanggal 26 Januari 2017 yang intinya menguatkan Putusan PN Semarang. Terhadap Putusan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi dan diputus berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1627 K/PDT/2017 tanggal 13 September 2017 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat mengajukan gugatan kedua melalui PN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 375/Pdt.G/2018/PN.Smg tanggal 30 Juli 2018 yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT Semarang Nomor 630/PDT/2019/PT.Smg tanggal 6 Pebruari 2020 yang intinya menguatkan putusan PN Semarang. Terhadap Putusan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 sehingga saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.



- b. Barang Milik Daerah berupa bangunan dan tanah seluas 5.450 m<sup>2</sup> senilai Rp2.725.000.000,- di Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang terdaftar Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh Sdr. Puanah dengan alas hak Letter C Tahun 1963. Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 Nopember 2016 yang intinya mengabulkan gugatan Sdr. Puanah untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 40/B/2016/PT.TUN.Sby tanggal 8 Mei 2017 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dapat melaksanakan putusan dimaksud untuk mencoret dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang hak lama, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak terhadap tanah yang telah dibatalkan sertifikatnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempertimbangkan untuk mencoret Aset tersebut dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah permohonan kembali hak atas tanah dimaksud tidak dikabulkan oleh BPN.
- c. Aset Tanah Batusari Mranggen Demak yang tercatat pada KIB DPPAD digugat oleh Ang Budi Santoso dkk melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Februari 2015, dengan tergugat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, PT Perum Perumnas, CV Megah Perkasa Utama dan TVRI Jawa Tengah. Obyek sengketa adalah tanah bekas Hak Erpacht seluas ± 423.000 m<sup>2</sup> senilai Rp 104.675.000.000,-. Atas Gugatan tersebut, Ang Budi Santoso dkk meminta Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp635.602.000,00 dan immateriil sebesar



Rp250.000.000,00. Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan putusan No 75/Pdt.G/2015/Pn. Smg dengan amar putusan menyatakan Gugatan para penggugat tidak diterima (gugatan kurang pihak). Ang Budi Santoso saat ini telah mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Smg yang diputus tgl 20 April 2018 yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Banding.

Pada tanggal 14 Mei 2018, PT Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 57/PDT/2018 yang intinya menguatkan Putusan PN Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 822 K/PDT/2019 tanggal 10 April 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Nopember 2019 yang intinya menolak gugatan Para Penggugat. Terhadap Putusan tersebut, pada tanggal 7 Pebruari 2020 Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali. Saat ini masih menunggu proses pemeriksaan di Mahkamah Agung

- d. Barang Milik Daerah berupa bangunan SMA Negeri 1 Tegal dan tanah seluas 6.890 m<sup>2</sup> senilai Rp 2.219.562.000,- di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok atas nama Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya mengabulkan gugatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 24/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2018 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 414 K/TUN/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun Pemerintah Provinsi Jawa



Tengah belum dapat melaksanakan putusan dimaksud untuk mencoret dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Tegal sebagai pihak lain dalam perkara ini masih dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga masih terdapat kemungkinan sertifikat tersebut dinyatakan sah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang hak lama, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak terhadap tanah yang telah dibatalkan sertifikatnya.

- e. Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa 6 rumah dinas dan tanah seluas 3.215 m<sup>2</sup> senilai Rp 21.720.000.000,- di Jalan Alibasah Sentot, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digugat oleh Purwo Eko Utomo dkk (bekas pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah).

### 5.3.3. Ekuitas

**Rp36.397.640.492.434,77**

Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.397.640.492.434,77 turun sebesar (Rp703.358.548.081,50) atau (1,90%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp37.100.999.040.516,25



#### 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL **Rp(417.421.893.335,80)**

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Pendapatan	22.857.781.266.070,60	27.678.191.696.878,96	(4.820.410.430.808,36)	(17,42)
2	Beban	23.411.329.516.736,86	26.036.705.375.002,73	(2.625.375.858.265,87)	(10,08)
	<b>Surplus/(Defisit) Operasional</b>	<b>(553.548.250.666,26)</b>	<b>1.641.486.321.876,23</b>	<b>(2.195.034.572.542,47)</b>	(133,72)
3	Kegiatan Non Operasional	137.206.357.330,46	531.782.100.963,56	(394.575.743.633,10)	(74,20)
	<b>Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>(416.341.893.335,80)</b>	<b>2.173.268.422.839,79</b>	<b>(2.589.610.316.175,59)</b>	(119,16)
4	Pos Luar Biasa	(1.080.000.000,00)	(2.662.431.206,00)	1.582.431.206,00	(59,44)
	<b>Surplus/(Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>(417.421.893.335,80)</b>	<b>2.170.605.991.633,79</b>	<b>(2.588.027.884.969,59)</b>	(119,23)

#### 5.4.1. PENDAPATAN LO **Rp22.857.781.266.070,60**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Asli daerah - LO	13.662.942.506.730,10	15.334.723.089.517,76	(1.671.780.582.787,66)	(10,90)
2 Pendapatan Transfer - LO	8.093.350.514.256,00	11.624.998.898.944,00	(3.531.648.384.688,00)	(30,38)
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	1.101.488.245.084,50	718.469.708.417,20	383.018.536.667,30	53,31
<b>Jumlah</b>	<b>22.857.781.266.070,60</b>	<b>27.678.191.696.878,96</b>	<b>(4.820.410.430.808,36)</b>	<b>(17,42)</b>

Pendapatan – LO disajikan sebesar Rp22.857.781.266.070,60 sedangkan Pendapatan – LRA disajikan sebesar Rp25.393.735.934.148,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(2.535.954.668.077,40) dikarenakan Pendapatan – LRA disajikan secara *cash basis* sedangkan Pendapatan – LO disajikan secara *accrual basis*. Rincian Pendapatan – LO diuraikan sebagai berikut:

**Total Pendapatan-LRA : Rp25.393.735.934.148,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp2.341.214.692.006,21
- Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp 40.268.513.138,02
- Penambahan Pendapatan : Rp1.427.900.944.099,09

Total Penambahan : Rp 3.809.384.149.243,32



#### Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang	: Rp 2.717.005.215.750,18
➤ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	: Rp 36.369.752.352,45
➤ Saldo Koreksi Piutang	: Rp 173.009.750.240,09
➤ Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan	: Rp 1.516.448.200,00
➤ BOS kepada sekolah milik Kab/Kota	: Rp 3.417.433.640.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan	: Rp 4.009.778,00
<b>Total Pengurangan</b>	<b>: Rp 6.345.338.817.320,72</b>

**Total Pendapatan-LO : Rp22.857.781.266.070,60**

Penambahan Pendapatan sebesar Rp1.427.900.944.099,09, dirinci sebagai berikut :

1. Selisih Pendapatan karena metode penghitungan nilai penyertaan modal pada Badan usaha Milik Daerah dengan metode ekuitas sebesar Rp349.764.699.014,59
2. Hibah aset disajikan sebesar Rp284.587.085.525,88 dan hibah lainnya sebesar Rp793.549.159.558,62.

Pengurangan Pendapatan sebesar Rp4.009.778,00 merupakan bunga Jamkesda di Bendahara Penerimaan RSJD Dr Amino yang sudah diakui pada Pendapatan LO tahun 2019.

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Rp13.662.942.506.730,10**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp13.662.942.506.730,10, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(Dalam Rupiah)</i>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Kenaikan/Penurunan</b>	<b>Tren %</b>
1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	11.152.098.389.593,00	12.471.297.635.691,70	(1.319.199.246.098,67)	(10,58)
2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	90.105.125.790,00	116.043.550.661,00	(25.938.424.871,00)	(22,35)
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	879.855.728.151,59	810.429.005.511,90	69.426.722.639,69	8,57
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	1.540.883.263.195,51	1.936.952.897.653,16	(396.069.634.457,65)	(20,45)
<b>Jumlah</b>	<b>13.662.942.506.730,10</b>	<b>15.334.723.089.517,76</b>	<b>(1.671.780.582.787,66)</b>	<b>(10,90)</b>

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan sebesar Rp13.662.942.506.730,10 sedangkan Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan sebesar Rp13.668.282.278.855,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(5.339.772.124,90) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :





**Total Pendapatan-LRA : Rp13.668.282.278.855,00**

Penambahan

➤ Saldo Akhir Piutang	: Rp2.208.582.503.798,21
➤ Saldo Awal Pendapatan diterima di muka	: Rp 40.268.513.138,02
➤ Koreksi karena perbedaan metode perhitungan	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	: Rp 349.764.699.014,59
Total Penambahan	: Rp2.598.615.715.950,82

Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang	: Rp 2.527.127.594.844,18
➤ Koreksi Kurang Piutang	: Rp 40.454.131.101,09
➤ Saldo Akhir Pendapatan diterima di muka	: Rp 36.369.752.352,45
➤ Koreksi atas Kas di RSDJ Amino	: Rp 4.009.778,00
Total Pengurangan	: Rp 2.603.955.488.075,72

**Total Pendapatan-LO : Rp13.662.942.506.730,10**

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.152.098.389.593,00**

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen.

Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan rusak berat, kendaraan hilang, wajib pajak menutup usaha, wajib pajak meninggal, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajib pajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.



Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar **Rp11.152.098.389.593,00** dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	4.592.226.935.421,00	5.038.730.680.597,63	(446.503.745.176,63)	(8,86)
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	2.228.465.305.800,00	3.414.320.120.325,00	(1.185.854.814.525,00)	(34,73)
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	1.719.403.821.612,00	1.925.488.927.109,00	(206.085.105.497,00)	(10,70)
4 Pajak Air Permukaan - LO	16.289.954.953,00	14.160.435.979,00	2.129.518.974,00	15,04
5 Pajak Rokok - LO	2.595.712.371.807,00	2.078.597.471.681,07	517.114.900.126,93	24,88
<b>Jumlah</b>	<b>11.152.098.389.593,00</b>	<b>12.471.297.635.691,70</b>	<b>(1.319.199.246.098,70)</b>	<b>(10,58)</b>

Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan sebesar Rp11.152.098.389.593,00, sedangkan Pendapatan Pajak Daerah – LRA disajikan sebesar Rp11.139.173.309.780,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp12.925.079.813,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA : Rp 11.139.173.309.780,00**

Penambahan

➤ Saldo Akhir Piutang	: Rp2.050.129.305.282,38
➤ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	: Rp 39.806.460.550,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>: Rp 2.089.935.765.832,38</b>

Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang	: Rp 2.013.969.651.921,38
➤ Koreksi Kurang Piutang	: Rp 26.974.366.273,00
➤ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	: Rp 36.066.667.825,00
<b>Total Pengurangan</b>	<b>: Rp 2.077.010.686.019,38</b>

**Total Pendapatan-LO : Rp 11.152.098.389.593,00**

**5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp90.105.125.790,00**

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp90.105.125.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	16.009.094.458,00	22.508.018.361,00	(6.498.923.903,00)	(28,87)
2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	296.950.000,00	423.250.000,00	(126.300.000,00)	(29,84)
3 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	313.600.000,00	866.250.000,00	(552.650.000,00)	(63,80)
4 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	44.007.126.424,00	59.189.215.989,00	(15.182.089.565,00)	(25,65)
5 Retribusi Tempat Pelelangan - LO	479.788.100,00	244.651.125,00	235.136.975,00	96,11
6 Retribusi Terminal - LO	731.126.000,00	1.418.700.000,00	(687.574.000,00)	(48,47)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LO  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
7 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	1.679.542.500,00	8.193.290.120,00	(6.513.747.620,00)	(79,50)
8 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	-	-	-	-
9 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	19.331.358.908,00	18.605.538.006,00	725.820.902,00	3,90
10 Retribusi Izin Trayek - LO	900.425.000,00	400.950.000,00	499.475.000,00	124,57
11 Retribusi Izin Perikanan - LO	4.467.729.900,00	3.359.574.260,00	1.108.155.640,00	32,99
12 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	1.888.384.500,00	834.112.800,00	1.054.271.700,00	126,39
<b>Jumlah</b>	<b>90.105.125.790,00</b>	<b>116.043.550.661,00</b>	<b>(25.938.424.871,00)</b>	<b>(22,35)</b>

Pendapatan Retribusi – LO disajikan sebesar Rp90.105.125.790,00 sedangkan Pendapatan Retribusi-LRA disajikan sebesar Rp93.279.121.699,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(3.173.995.909,00) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

<b>Total Pendapatan-LRA</b>	<b>: Rp 93.279.121.699,00</b>
Penambahan	
➤ Saldo Akhir Piutang	: Rp 977.885.351,00
Total Penambahan	: Rp 977.885.351,00
Pengurangan	
➤ Saldo Awal Piutang	: Rp4.125.039.260,00
➤ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	: Rp 26.842.000,00
Total Pengurangan	: Rp 4.151.881.260,00
<b>Total Pendapatan-LO</b>	<b>: Rp 90.105.125.790,00</b>

**5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp879.855.728.151,59**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan diterima oleh PPKD pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp879.855.728.151,59 merupakan pendapatan deviden dari penyertaan modal BUMD dan selisih nilai metode ekuitas dan metode cost yang digunakan dalam perhitungan penyertaan modal, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah - LO	535.190.726,00	12.196.724.288,00	(11.661.533.562,00)	(95,61)
2 Bagian Laba pada PT. Bank Jateng - LO	641.802.073.483,23	529.263.943.472,31	112.538.130.010,92	21,26
3 Bagian Laba pada BPR - BKK - LO	126.916.191.466,89	124.578.494.580,88	2.337.696.886,01	1,88
4 Bagian Laba PDAB Tirta Utama - LO	12.386.990.068,00	9.890.237.855,00	2.496.752.213,00	25,24
5 Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LO	9.377.279.576,92	13.469.616.546,41	(4.092.336.969,49)	(30,38)
6 Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO	3.003.617.427,00	6.724.559.080,00	(3.720.941.653,00)	(55,33)
7 Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah - LO	15.987.793.664,24	43.133.475.632,04	(27.145.681.967,80)	(62,93)
8 Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu - LO	55.113.042.488,00	57.559.660.612,49	(2.446.618.124,49)	(4,25)
9 Bagian Laba PT. Jamkrida - LO	14.733.549.251,31	11.930.302.165,45	2.803.247.085,86	23,50
10 Bagian Laba PT. PRPP Jateng	-	1.681.991.279,32	(1.681.991.279,32)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>879.855.728.151,59</b>	<b>810.429.005.511,90</b>	<b>69.426.722.639,69</b>	<b>8,57</b>



Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO disajikan sebesar Rp879.855.728.151,59 sedangkan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA sebesar Rp530.091.029.137,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp349.764.699.014,59 dikarenakan adanya koreksi metode penghitungan penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

#### 5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah **Rp1.540.883.263.195,51**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diterima oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.540.883.263.195,51 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.005.694.120,00	1.525.672.065,00	(519.977.945,00)	(34,08)
2 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	-	-	-	-
3 Penerimaan Jasa Giro - LO	43.049.831.808,00	45.579.010.561,00	(2.529.178.753,00)	(5,55)
4 Pendapatan Bunga - LO (SKPKD)	75.019.212.453,73	206.649.218.013,22	(131.630.005.559,49)	(63,70)
5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO (SKPKD)	-	-	-	-
6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO (SKPKD)	1.453.371.334,00	2.570.086.629,00	(1.116.715.295,00)	(43,45)
7 Pendapatan Denda Pajak - LO	58.794.221.327,00	156.599.380.154,00	(97.805.158.827,00)	(62,46)
8 Pendapatan Denda Retribusi - LO	257.926.732,00	230.890.057,00	27.036.675,00	11,71
9 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	-	-	-	-
10 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	-	-	-
11 Pendapatan dari Pengembalian - LO (SKPKD)	7.070.704.654,00	4.639.173.684,00	2.431.530.970,00	52,41
12 Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO	8.722.194.000,00	11.792.597.000,00	(3.070.403.000,00)	(26,04)
13 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	5.018.870.000,00	75.144.785.050,00	(70.125.915.050,00)	(93,32)
14 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-
15 Pendapatan BLUD - LO	1.333.274.450.307,78	1.427.039.947.144,94	(93.765.496.837,16)	(6,57)
16 Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO	7.216.786.459,00	5.182.137.295,00	2.034.649.164,00	39,26
17 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-
18 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.540.883.263.195,51</b>	<b>1.936.952.897.653,16</b>	<b>(396.069.634.457,65)</b>	<b>(20,45)</b>

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO disajikan sebesar Rp1.540.883.263.195,51 sedangkan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp1.905.738.818.239,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(364.855.555.043,49), dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA : Rp1.905.738.818.239,00**

Penambahan

➤ Saldo Akhir Piutang : Rp157.475.313.164,83

➤ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp 462.052.588,02

Total Penambahan : Rp157.937.365.752,85



Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang	: Rp 509.032.903.662,80
➤ Koreksi Piutang	: Rp 13.452.922.828,09
➤ Koreksi atas Kas di RSJD Amino	: Rp 4.009.778,00
➤ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	: Rp 303.084.527,45
Total Pengurangan	: Rp 522.792.920.796,34
<b>Total Pendapatan-LO</b>	<b>: Rp1.540.883.263.195,51</b>

Koreksi Piutang merupakan koreksi saldo awal piutang pada RS Moewardi, RS Margono, RSUD Tugurejo, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp13.452.922.828,09.

**5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER**

**Rp8.093.350.514.256,00**

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.093.350.514.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	8.025.138.059.256,00	11.561.508.319.182,00	(3.536.370.259.926,00)	(30,59)
2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	68.212.455.000,00	62.388.421.000,00	5.824.034.000,00	9,34
3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	1.102.158.762,00	(1.102.158.762,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>8.093.350.514.256,00</b>	<b>11.624.998.898.944,00</b>	<b>(3.531.648.384.688,00)</b>	<b>(30,38)</b>

Pendapatan Transfer-LO disajikan sebesar Rp8.093.350.514.256,00 sedangkan Pendapatan Transfer-LRA disajikan sebesar Rp11.702.101.655.293,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(3.608.751.141.037,00) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Pendapatan-LRA**

**: Rp11.702.101.655.293,00**

Penambahan

➤ Saldo Akhir Piutang	: Rp128.161.249.125,00
Total Penambahan	: Rp 128.161.249.125,00

Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang	: Rp 185.406.681.823,00
➤ Koreksi Kurang Piutang	: Rp 132.555.619.139,00
➤ BOS kepada sekolah milik Kab/Kota	: Rp3.417.433.640.000,00
➤ Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan	: Rp 1.516.449.200,00
Total Pengurangan	: Rp 3.736.912.390.162,00

**Total Pendapatan-LO**

**: Rp8.093.350.514.256,00**



**5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan** **Rp8.025.138.059.256,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.025.138.059.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO	665.469.823.904,00	703.125.644.064,00	(37.655.820.160,00)	(5,36)
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO	4.594.970.600,00	18.089.100.079,00	(13.494.129.479,00)	(74,60)
3 Dana Alokasi Umum - LO	3.438.709.973.000,00	3.865.871.349.000,00	(427.161.376.000,00)	(11,05)
4 Dana Alokasi Khusus - LO	3.916.363.291.752,00	6.974.422.226.039,00	(3.058.058.934.287,00)	(43,85)
<b>Jumlah</b>	<b>8.025.138.059.256,00</b>	<b>11.561.508.319.182,00</b>	<b>(3.536.370.259.926,00)</b>	<b>(30,59)</b>

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO disajikan sebesar Rp8.025.138.059.256,00 sedangkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LRA disajikan sebesar Rp11.632.787.041.293,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(3.607.648.982.037,00) dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA** **: Rp11.632.787.041.293,00**

Penambahan

➤ Saldo Akhir Piutang	: Rp 128.148.979.363,00
Total Penambahan	: Rp 128.148.979.363,00

Pengurangan

➤ Saldo Awal Piutang	: Rp 184.304.523.061,00
➤ Koreksi Kurang Piutang	: Rp 132.543.349.139,00
➤ BOS kepada sekolah milik Kab/Kota	: Rp3.417.433.640.000,00
➤ Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan	: Rp 1.516.449.200,00
Total Pengurangan	: Rp3.735.797.961.400,00

**Total Pendapatan-LO** **: Rp8.025.138.059.256,00**

Pengurangan Pendapatan-LRA disebabkan oleh:

1. Koreksi Kurang Piutang diperoleh dari selisih koreksi antara penetapan piutang berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 dan piutang yang sudah dibayarkan di 2020 sebesar Rp132.543.349.139,00;
2. Pendapatan transfer BOS kepada sekolah merupakan pendapatan Kabupaten/Kota sebesar Rp3.417.433.640.000,00; dan
3. Lebih salur dana transfer berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 sebesar Rp1.516.449.200,00.

**5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya** **Rp68.212.455.000,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.212.455.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dana Insentif Daerah	68.212.455.000,00	62.388.421.000,00	5.824.034.000,00	9,34
<b>Jumlah</b>	<b>68.212.455.000,00</b>	<b>62.388.421.000,00</b>	<b>5.824.034.000,00</b>	<b>9,34</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO disajikan sebesar Rp68.212.455.000,00 dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp68.212.455.000,00 sehingga tidak terdapat selisih.

#### 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp0,00

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 adalah pendapatan yang diterima dari Bagi Hasil Ketep Pass Kabupaten Magelang atas laba tahun 2020. Sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2006/No. 02/Perj/II/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Magelang, hasil pengelolaan objek wisata tersebut setelah dikurangi biaya operasional pengelolaan dan pajak-pajak pemerintah Provinsi mendapatkan bagi hasil sebesar 50%. Pada Tahun 2020 terdapat penutupan objek wisata karena adanya pandemi Covid 19 sehingga hasil pengelolaan objek wisata tidak dapat mencukupi biaya operasional pengelolaan dan pajak-pajak.

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Magelang - Ketep Pass - LO	-	1.102.158.762,00	(1.102.158.762,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1.102.158.762,00</b>	<b>(1.102.158.762,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp1.102.159.000,00. Selisih antara LO dan LRA dikarenakan adanya pembayaran atas piutang tahun 2019 sebesar Rp1.102.158.762,00 dan koreksi penetapan piutang sebesar Rp12.270.000,00.

#### 5.4.1.3 LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp1.101.488.245.084,50

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.101.488.245.084,50 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	1.078.136.245.084,50	695.585.708.417,20	382.550.536.667,30	55,00
2 Pendapatan Lainnya - LO	23.352.000.000	22.884.000.000,00	468.000.000,00	2,05
<b>Jumlah</b>	<b>1.101.488.245.084,50</b>	<b>718.469.708.417,20</b>	<b>383.018.536.667,30</b>	<b>53,31</b>

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan sebesar Rp1.101.488.245.084,50 sedangkan Lain-Lain



Pendapatan yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp23.352.000.000,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp1.078.136.245.084,50 merupakan penerimaan hibah aset tetap dan hibah uang untuk penanganan COVID-19 dan hibah lainnya yang dicatat secara akrual.

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

**Rp1.078.136.245.084,50**

Realisasi Pendapatan Hibah-LO pada Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp1.078.136.245.084,50, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Hibah Uang	555.600.000,00	-	555.600.000,00	100,00
2 Hibah Barang/Jasa	1.077.580.645.084,50	695.585.708.417,20	381.994.936.667,30	54,92
<b>Jumlah</b>	<b>1.078.136.245.084,50</b>	<b>695.585.708.417,20</b>	<b>382.550.536.667,30</b>	<b>55,00</b>

##### 5.4.1.3.1.1. Hibah Uang

**Rp555.600.000,00**

Realisasi hibah uang pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp555.600.000,00 merupakan hibah penanganan COVID-19 yang dikelola Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

##### 5.4.1.3.1.2. Hibah Barang / Jasa

**Rp1.077.580.645.084,50**

Realisasi Hibah Barang /Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.077.580.645.984,50 merupakan hibah aset, hibah persediaan dan makan minum dari Pemerintah Pusat/Pemda Lain/Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut.

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Hibah Persediaan	792.472.094.558,62	-	792.472.094.558,62	100,00
2 Hibah Jasa	521.465.000,00	-	521.465.000,00	100,00
3 Hibah Aset	284.587.085.525,88	695.585.708.417,20	(410.998.622.891,32)	(59,09)
<b>Jumlah</b>	<b>1.077.580.645.084,50</b>	<b>695.585.708.417,20</b>	<b>381.994.936.667,30</b>	<b>54,92</b>

##### 5.4.1.3.1.2.1 Hibah Persediaan

**Rp792.472.094.558,62**

Hibah persediaan merupakan hibah barang habis pakai berupa alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan makanan dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp792.472.094.558,62, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Kesehatan	694.600.924.182,00	-	694.600.924.182,00	100,00
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	48.177.938.243,12	-	48.177.938.243,12	100,00
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	26.040.939.953,00	-	26.040.939.953,00	100,00
4 RSUD Tugurejo Semarang	2.351.226.127,70	-	2.351.226.127,70	100,00





	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
5 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	8.606.378.185,00	-	8.606.378.185,00	100,00
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	385.691.596,00	-	385.691.596,00	100,00
7 RSJD Surakarta	453.607.892,00	-	453.607.892,00	100,00
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	162.643.499,80	-	162.643.499,80	100,00
9 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.692.744.880,00	-	11.692.744.880,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>792.472.094.558,62</b>	<b>-</b>	<b>792.472.094.558,62</b>	<b>100,00</b>

#### 5.4.1.3.1.2.2 Hibah Jasa

**Rp521.465.000,00**

Hibah jasa merupakan hibah berupa jasa catering untuk makan dan minum dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto sebesar Rp521.465.000,00.

#### 5.4.1.3.1.2.3 Hibah Aset

**Rp284.587.085.525,88**

Hibah aset sebesar Rp284.587.085.525,88 merupakan hibah berupa aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.122.148.369,88	472.690.707.578,00	(288.568.559.208,12)	(61,05)
2 Dinas Kesehatan	106.615.093,75	154.301.704.425,00	(154.195.089.331,25)	(99,93)
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	13.983.842.807,00	2.196.708.270,00	11.787.134.537,00	536,58
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.306.589.464,00	1.393.542.131,20	(86.952.667,20)	(6,24)
5 RSUD Tugurejo Semarang	2.328.321.033,00	-	2.328.321.033,00	100,00
6 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	250.000.000,00	-	250.000.000,00	100,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	193.460.000,00	262.062.500,00	(68.602.500,00)	(26,18)
8 RSJD Surakarta	534.375.000,00	71.160.000,00	463.215.000,00	650,95
9 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	17.048.355.537,00	(17.048.355.537,00)	(100,00)
10 Dinas Sosial	23.287.500,00	191.828.500,00	(168.541.000,00)	(87,86)
11 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.790.000,00	-	31.790.000,00	100,00
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67.702.250,00	-	67.702.250,00	100,00
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	5.775.969.900,00	(5.775.969.900,00)	(100,00)
14 Dinas Perhubungan	4.143.048.003,00	23.047.884.690,00	(18.904.836.687,00)	(82,02)
15 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	74.500.000,00	-	74.500.000,00	100,00
16 Dinas Kelautan dan Perikanan	76.388.076.005,25	8.160.979.960,00	68.227.096.045,25	836,02
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	3.015.586.300,00	(3.015.586.300,00)	(100,00)
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.530.000,00	356.502.450,00	(333.972.450,00)	(93,68)
19 SKPKD	-	7.066.592.426,00	(7.066.592.426,00)	(100,00)
20 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	6.123.750,00	(6.123.750,00)	(100,00)
21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.010.800.000,00	-	1.010.800.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>284.587.085.525,88</b>	<b>695.585.708.417,20</b>	<b>(410.998.622.891,32)</b>	<b>(59,09)</b>

#### 5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya

**Rp23.352.000.000,00**



Realisasi Pendapatan Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 merupakan pendapatan sumbangan dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga - LO	23.352.000.000	22.884.000.000,00	468.000.000,00	2,05
<b>Jumlah</b>	<b>23.352.000.000</b>	<b>22.884.000.000,00</b>	<b>468.000.000,00</b>	<b>2,05</b>

#### 5.4.2. BEBAN LO

**Rp23.411.329.516.736,90**

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Operasional	16.321.210.465.561,86	18.371.123.350.092,73	(2.049.912.884.530,87)	(11,16)
2 Beban Transfer	7.090.119.051.175,00	7.665.582.024.910,00	(575.462.973.735,00)	(7,51)
<b>Jumlah</b>	<b>23.411.329.516.736,86</b>	<b>26.036.705.375.002,73</b>	<b>(2.625.375.858.265,87)</b>	<b>(10,08)</b>

##### 5.4.2.1. BEBAN OPERASIONAL

**Rp16.321.210.465.561,86**

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.321.210.465.561,86 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Pegawai	6.595.517.007.629,25	6.599.099.707.459,00	(3.582.699.829,75)	(0,05)
2 Beban Persediaan	1.638.017.156.129,06	1.172.463.851.848,08	465.553.304.280,99	39,71
3 Beban Jasa	2.343.433.849.242,71	2.803.221.056.604,35	(459.787.207.361,64)	(16,40)
4 Beban Pemeliharaan	233.402.309.181,00	333.193.683.104,00	(99.791.373.923,00)	(29,95)
5 Beban Perjalanan Dinas	263.783.489.773,00	449.248.637.143,00	(185.465.147.370,00)	(41,28)
6 Beban Bunga	-	215.813.689,00	(215.813.689,00)	(100,00)
7 Beban Hibah	2.423.118.678.522,00	5.297.828.944.837,00	(2.874.710.266.315,00)	(54,26)
8 Beban Bantuan Sosial	1.433.959.432.980,00	78.378.237.645,00	1.355.581.195.335,00	1.729,54
9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.376.706.006.230,14	1.497.289.578.007,95	(120.583.571.777,81)	(8,05)
10 Beban Penyisihan Piutang	395.241.353,75	4.653.371.086,44	(4.258.129.732,69)	(91,51)
11 Beban Lainnya	12.877.294.520,95	135.530.468.668,91	(122.653.174.147,96)	(90,50)
<b>Jumlah</b>	<b>16.321.210.465.561,86</b>	<b>18.371.123.350.092,73</b>	<b>(2.049.912.884.530,87)</b>	<b>(11,16)</b>

Beban Operasional-LO sebesar Rp16.321.210.465.561,86 apabila dibandingkan dengan Belanja Operasional-LRA sebesar Rp16.223.988.285.131,00 terdapat perbedaan sebesar Rp97.222.180.430,86. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penambahan pada saldo akhir hutang, saldo awal belanja dibayar di muka, saldo awal persediaan, hibah persediaan, koreksi persediaan, koreksi penyisihan piutang, koreksi penyusutan, koreksi amortisasi, koreksi utang, kapitalisasi aset barang dan jasa, pengakuan beban ekstrakomptabel tahun berjalan, bantuan pemerintah untuk sekolah, selisih atas



perhitungan dengan metode ekuitas, pengakuan penggunaan DAU tambahan, surplus penyisihan piutang, surplus penyisihan dana bergulir, dan persediaan yang telah kadaluarsa (*expired*).

#### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

**Rp6.595.517.007.629,25**

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp6.595.517.007.629,25, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Gaji dan Tunjangan	3.007.679.943.614,00	2.893.311.985.923,00	114.367.957.691,00	3,95
2 Tambahan Penghasilan PNS	2.510.167.192.539,00	2.882.226.209.616,00	(372.059.017.077,00)	(12,91)
3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	51.502.500.000,00	47.846.500.000,00	3.656.000.000,00	7,64
4 Belanja insentif Pemungut Pajak	36.783.897.372,00	46.205.548.890,00	(9.421.651.518,00)	(20,39)
5 Honorarium PNS	71.054.859.684,00	59.755.014.371,00	11.299.845.313,00	18,91
6 Honorarium Non PNS	855.698.129.730,00	667.955.548.659,00	187.742.581.071,00	28,11
7 Beban Pegawai BOS	62.630.484.690,25	1.798.900.000,00	60.831.584.690,25	3.381,60
<b>Jumlah</b>	<b>6.595.517.007.629,25</b>	<b>6.599.099.707.459,00</b>	<b>(3.582.699.829,75)</b>	<b>(0,05)</b>

Beban Pegawai-LO disajikan sebesar Rp6.595.517.007.629,25 sedangkan Belanja Pegawai-LRA disajikan sebesar Rp6.483.761.623.794,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp111.755.383.835,25, dirinci dengan perhitungan sebagai berikut:

#### Total Belanja Pegawai-LRA

**: Rp6.483.761.623.794,00**

##### Penambahan

- Saldo Akhir Utang : Rp 90.554.531.168,00
- Koreksi Utang awal RSUD Dr.Moewardi : Rp 2.487.500,00
- Reklasifikasi BTT : Rp 14.326.055.830,00
- Reklasifikasi dari Belanja Lain : Rp 9.639.491.137,00
- Pembayaran Utang 2019 : Rp 136.067.197,25

Total Penambahan : Rp 114.658.632.832,25

##### Pengurangan

- Saldo Awal Utang : Rp 2.903.248.997,00

Total Pengurangan : Rp 2.903.248.997,00

#### Total Beban Pegawai-LO

**:Rp 6.595.517.007.629,25**

Penjelasan Pembayaran Utang 2019 merupakan pembayaran utang atas transaksi yang sudah di SPJ kan pada tahun 2019 sedangkan uangnya masih di Bendahara sebesar Rp136.067.197,25.

Rincian Beban Pegawai per SKPD sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LO  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.293.678.154.255,25	4.153.975.593.485,00	139.702.560.770,25	3,36
2	Dinas Kesehatan	93.054.731.702,00	103.924.463.310,00	(10.869.731.608,00)	(10,46)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	199.340.084.695,00	176.568.190.872,00	22.771.893.823,00	12,90
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	145.052.630.832,00	127.928.922.889,00	17.123.707.943,00	13,39
5	RSUD Tugurejo Semarang	103.873.622.448,00	94.269.580.493,00	9.604.041.955,00	10,19
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	61.338.345.219,00	57.285.946.202,00	4.052.399.017,00	7,07
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	41.153.507.630,00	33.158.289.428,00	7.995.218.202,00	24,11
8	RSJD Surakarta	64.213.376.185,00	61.678.790.958,00	2.534.585.227,00	4,11
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	43.246.580.782,00	36.647.373.113,00	6.599.207.669,00	18,01
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	92.501.080.633,00	103.833.954.898,00	(11.332.874.265,00)	(10,91)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	93.394.790.928,00	100.445.823.086,00	(7.051.032.158,00)	(7,02)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.027.723.231,00	15.178.775.926,00	(151.052.695,00)	(1,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	13.735.365.863,00	16.120.816.810,00	(2.385.450.947,00)	(14,80)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.196.109.648,00	18.641.216.703,00	(3.445.107.055,00)	(18,48)
15	Dinas Sosial	118.193.752.633,00	126.099.240.051,00	(7.905.487.418,00)	(6,27)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.570.436.000,00	11.069.829.882,00	(2.499.393.882,00)	(22,58)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	69.876.112.797,00	79.113.954.465,00	(9.237.841.668,00)	(11,68)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.819.925.696,00	16.112.090.364,00	(3.292.164.668,00)	(20,43)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	125.667.134.123,00	146.584.914.129,00	(20.917.780.006,00)	(14,27)
20	Dinas Ketahanan Pangan	16.035.216.964,00	17.173.637.740,00	(1.138.420.776,00)	(6,63)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	15.478.934.119,00	17.665.445.149,00	(2.186.511.030,00)	(12,38)
22	Dinas Perhubungan	44.553.402.208,00	49.131.151.321,00	(4.577.749.113,00)	(9,32)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.608.437.388,00	20.080.718.751,00	(1.472.281.363,00)	(7,33)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	20.937.495.829,00	22.802.646.136,00	(1.865.150.307,00)	(8,18)
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	12.843.146.899,00	13.112.199.378,00	(269.052.479,00)	(2,05)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	36.145.946.340,00	44.972.139.938,00	(8.826.193.598,00)	(19,63)
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	24.639.503.286,00	27.245.097.654,00	(2.605.594.368,00)	(9,56)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	45.931.232.862,00	52.248.843.497,00	(6.317.610.635,00)	(12,09)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	117.497.914.891,00	141.114.317.229,00	(23.616.402.338,00)	(16,74)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.453.116.186,00	38.832.324.554,00	(3.379.208.368,00)	(8,70)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29.695.300.959,00	29.862.410.722,00	(167.109.763,00)	(0,56)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.960.729.374,00	44.287.240.399,00	(6.326.511.025,00)	(14,29)
33	KDH dan Wakil KDH	21.553.175.590,00	21.746.715.361,00	(193.539.771,00)	(0,89)
34	SKPKD	14.326.055.830,00	-	14.326.055.830,00	100,00
35	DPRD	97.720.954.647,00	82.489.271.182,00	15.231.683.465,00	18,47
36	Sekretariat Daerah	89.710.867.139,00	99.140.223.631,00	(9.429.356.492,00)	(9,51)
37	Sekretariat DPRD	21.752.638.229,00	23.626.580.300,00	(1.873.942.071,00)	(7,93)
38	Inspektorat	20.149.622.172,00	20.841.544.304,00	(691.922.132,00)	(3,32)
39	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.850.921.611,00	31.435.462.391,00	(3.584.540.780,00)	(11,40)
40	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	143.336.186.878,00	171.741.777.082,00	(28.405.590.204,00)	(16,54)
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	31.095.020.825,00	32.640.475.375,00	(1.545.454.550,00)	(4,73)



	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
42 Badan Kepegawaian Daerah	23.323.784.511,00	74.900.608.040,00	(51.576.823.529,00)	(68,86)
43 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.041.255.997,00	33.215.567.101,00	(3.174.311.104,00)	(9,56)
44 Badan Penghubung	8.942.681.595,00	10.155.543.160,00	(1.212.861.565,00)	(11,94)
<b>Jumlah</b>	<b>6.595.517.007.629,25</b>	<b>6.599.099.707.459,00</b>	<b>(3.582.699.829,75)</b>	<b>(0,05)</b>

#### 5.4.2.1.2 Beban Persediaan

**Rp1.638.017.156.129,06**

Beban Persediaan-LO disajikan sebesar Rp1.638.017.156.129,06 sedangkan Belanja Persediaan-LRA disajikan sebesar Rp823.010.098.350,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp815.007.057.779,06 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Belanja Persediaan-LRA : Rp 823.010.098.350,00**

#### Penambahan

➤ Persediaan Awal	: Rp 214.197.582.489,89
➤ Utang Persediaan Akhir	: Rp 17.229.184.289,00
➤ Koreksi Persediaan	: Rp 7.680.179.472,00
➤ Hibah Persediaan	: Rp 792.472.094.558,20
➤ Reklas dari Belanja Lain	: Rp 332.218.488.220,00
➤ Surplus Perolehan Persediaan	: Rp 1.315.867.450,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>: Rp 1.365.113.396.479,09</b>

#### Pengurangan

➤ Utang Persediaan Awal	: Rp 38.512.553.956,00
➤ Persediaan Akhir	: Rp511.593.784.744,03
<b>Total Pengurangan</b>	<b>: Rp 550.106.338.700,03</b>

**Total Beban Persediaan- LO : Rp 1.638.017.156.129,06**

Beban Persediaan-LO sebesar Rp1.638.017.156.129,06 dirinci sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Habis Pakai	807.915.655.367,87	307.168.702.958,53	500.746.952.409,34	163,02
2 Beban Bahan/Material	736.208.919.461,99	770.491.840.125,99	(34.282.920.664,00)	(4,45)
3 Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	9.959.961.931,00	4.868.052.923,00	5.091.909.008,00	104,60
4 Beban Pakaian Kerja	3.219.150.088,00	5.012.965.715,00	(1.793.815.627,00)	(35,78)
5 Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	5.569.776.750,00	9.370.318.000,00	(3.800.541.250,00)	(40,56)
6 Beban Makanan Dan Minuman	73.835.146.805,20	69.788.914.783,56	4.046.232.021,64	5,80
7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-
8 Beban Hadiah Barang	1.308.545.725,00	5.763.057.342,00	(4.454.511.617,00)	(77,29)
<b>Jumlah</b>	<b>1.638.017.156.129,06</b>	<b>1.172.463.851.848,08</b>	<b>465.553.304.280,98</b>	<b>39,71</b>



Sedangkan rincian beban persediaan-LO per SKPD sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.845.189.426,57	34.638.640.884,50	(20.793.451.457,93)	(60,03)
2 Dinas Kesehatan	534.737.457.419,00	324.412.682.113,00	210.324.775.306,00	64,83
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	319.779.296.179,96	273.258.569.803,43	46.520.726.376,53	17,02
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	173.178.897.006,75	148.046.305.458,19	25.132.591.548,56	16,98
5 RSUD Tugurejo Semarang	54.658.587.112,36	51.826.377.048,38	2.832.210.063,98	5,46
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	16.292.555.202,00	14.753.584.763,21	1.538.970.438,80	10,43
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	27.404.220.711,12	18.539.776.845,96	8.864.443.865,16	47,81
8 RSJD Surakarta	10.230.468.709,00	11.264.319.868,74	(1.033.851.159,74)	(9,18)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.791.127.158,51	10.668.297.971,48	122.829.187,04	1,15
10 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	8.206.958.170,00	9.231.557.176,00	(1.024.599.006,00)	(11,10)
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	7.806.910.652,00	14.378.947.718,00	(6.572.037.066,00)	(45,71)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	749.715.700,00	3.754.966.442,00	(3.005.250.742,00)	(80,03)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	746.778.189,00	2.053.193.715,00	(1.306.415.526,00)	(63,63)
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.128.413.600,00	5.666.093.600,00	(4.537.680.000,00)	(80,08)
15 Dinas Sosial	61.268.891.700,00	58.118.633.488,00	3.150.258.212,00	5,42
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.257.462.964,00	6.610.245.880,00	6.647.217.084,00	100,56
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.077.234.282,00	5.820.936.920,00	(1.743.702.638,00)	(29,96)
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	614.420.000,00	1.268.958.500,00	(654.538.500,00)	(51,58)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.603.409.433,00	14.511.494.712,00	(8.908.085.279,00)	(61,39)
20 Dinas Ketahanan Pangan	4.213.173.899,00	5.809.335.597,00	(1.596.161.698,00)	(27,48)
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	947.809.000,00	1.745.638.250,00	(797.829.250,00)	(45,70)
22 Dinas Perhubungan	5.984.095.425,00	10.183.011.572,00	(4.198.916.147,00)	(41,23)
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.487.413.500,00	1.614.646.100,00	(127.232.600,00)	(7,88)
24 Dinas Koperasi dan UMKM	3.204.781.907,00	8.770.465.162,00	(5.565.683.255,00)	(63,46)
25 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	697.933.377,00	1.355.930.789,00	(657.997.412,00)	(48,53)
26 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.272.452.635,00	20.495.185.364,00	(14.222.732.729,00)	(69,40)
27 Badan Arsip dan Perpustakaan	1.059.215.903,00	1.801.330.550,00	(742.114.647,00)	(41,20)
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	5.298.157.142,80	14.152.043.752,20	(8.853.886.609,40)	(62,56)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.842.060.911,00	17.506.894.362,00	(5.664.833.451,00)	(32,36)
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.960.590.530,00	22.929.281.416,00	(11.968.690.886,00)	(52,20)
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.513.194.020,00	2.521.980.460,00	(1.008.786.440,00)	(40,00)
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.660.399.731,00	6.633.606.773,00	3.026.792.958,00	45,63
33 SKPKD	278.503.926.272,00	-	278.503.926.272,00	100,00
34 Sekretariat Daerah	5.042.741.246,00	11.246.532.546,00	(6.203.791.300,00)	(55,16)
35 Sekretariat DPRD	4.293.794.650,00	3.658.139.650,00	635.655.000,00	17,38
36 Inspektorat	437.394.930,00	1.229.131.791,00	(791.736.861,00)	(64,41)
37 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.786.869.790,00	2.891.033.460,00	(1.104.163.670,00)	(38,19)
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	12.160.226.744,00	13.225.710.191,00	(1.065.483.447,00)	(8,06)
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.168.963.900,00	3.866.199.960,00	(1.697.236.060,00)	(43,90)
40 Badan Kepegawaian Daerah	2.968.768.901,00	2.302.544.535,00	666.224.366,00	28,93



	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.140.957.550,00	8.787.032.360,00	(6.646.074.810,00)	(75,64)
42 Badan Penghubung	994.240.550,00	914.594.300,00	79.646.250,00	8,71
<b>Jumlah</b>	<b>1.638.017.156.129,06</b>	<b>1.172.463.851.848,08</b>	<b>465.553.304.280,98</b>	<b>39,71</b>

#### 5.4.2.1.3 Beban Jasa

**Rp2.343.433.849.242,71**

Beban Jasa disajikan sebesar Rp2.343.433.849.242,71 sedangkan Belanja Jasa-LRA disajikan sebesar Rp2.528.535.539.906,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(185.101.690.663,29) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

#### Total Belanja Jasa-LRA

**: Rp2.528.535.539.906,00**

##### Penambahan

- Belanja Dibayar Di Muka Awal : Rp 5.816.587.172,87
- Utang Jasa Akhir : Rp 90.121.073.119,08
- Hibah Jasa : Rp 521.465.000,00

Total Penambahan : Rp 96.459.125.291,95

##### Pengurangan

- Belanja Dibayar Di Muka Akhir : Rp 6.144.929.018,16
- Utang Jasa Awal : Rp164.184.829.139,75
- Koreksi Beban Jasa : Rp 5.443.013.784,85
- Reklas ke Belanja Lain : Rp 105.788.044.012,48

Total Pengurangan : Rp 281.560.815.955,24

#### Total Beban Jasa- LO

**: Rp2.343.433.849.242,71**

Beban Jasa merupakan beban jasa yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, beban jasa konsultasi, dan lain-lain yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Jasa Kantor	775.628.500.200,50	964.880.837.015,43	(189.252.336.814,93)	(19,61)
2 Beban Premi Asuransi	257.108.857.076,20	256.298.148.042,85	810.709.033,35	0,32
3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.770.675.352,27	100.679.291.812,84	(68.908.616.460,57)	(68,44)
4 Beban Sewa Sarana Mobilitas	49.156.477.104,00	46.298.738.200,00	2.857.738.904,00	6,17
5 Beban Sewa Alat Berat	210.980.000,00	457.424.200,00	(246.444.200,00)	(53,88)
6 Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	14.538.527.133,00	23.224.681.260,00	(8.686.154.127,00)	(37,40)
7 Beban Jasa Konsultasi	19.668.344.692,00	53.136.661.847,00	(33.468.317.155,00)	(62,99)
8 Beban Pengadaan Jasa Lainnya	2.435.695.000,00	9.622.949.000,00	(7.187.254.000,00)	(74,69)
9 Beban Cetak Dan Penggandaan	34.487.509.465,00	62.261.071.293,23	(27.773.561.828,23)	(44,61)
10 Beban Makanan Dan Minuman	60.708.124.434,00	162.830.321.336,00	(102.122.196.902,00)	(62,72)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LO  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
11 Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.283.297.061,00	2.088.150.000,00	195.147.061,00	9,35
12 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	6.714.753.633,00	19.032.918.388,00	(12.318.164.755,00)	(64,72)
13 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.836.550.000,00	21.948.099.000,00	(16.111.549.000,00)	(73,41)
14 Beban Barang Dana BOS	1.082.885.558.091,75	1.080.461.765.209,00	2.423.792.882,75	0,22
<b>Jumlah</b>	<b>2.343.433.849.242,71</b>	<b>2.803.221.056.604,35</b>	<b>(459.787.207.361,64)</b>	<b>(16,40)</b>

Sedangkan rincian beban jasa-LO per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.115.409.867.367,95	1.169.121.279.789,30	(53.711.412.421,35)	(4,59)
2 Dinas Kesehatan	293.297.425.099,68	274.077.758.930,23	19.219.666.169,45	7,01
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	215.582.177.532,06	350.487.393.018,24	(134.905.215.486,18)	(38,49)
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	121.380.913.888,05	141.600.983.684,11	(20.220.069.796,06)	(14,28)
3 RSUD Tugurejo Semarang	60.342.539.819,58	55.748.009.912,55	4.594.529.907,03	8,24
4 RSJD Dr. Aminu Gondohutomo Semarang	23.292.521.931,00	22.919.966.512,00	372.555.419,00	1,63
4 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	13.178.828.221,60	17.469.438.353,51	(4.290.610.131,91)	(24,56)
5 RSJD Surakarta	16.533.736.479,24	21.159.898.949,30	(4.626.162.470,06)	(21,86)
5 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	15.906.142.670,84	19.350.550.282,78	(3.444.407.611,94)	(17,80)
6 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	9.400.267.083,00	23.297.401.052,14	(13.897.133.969,14)	(59,65)
6 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	7.905.528.536,69	12.366.466.057,92	(4.460.937.521,23)	(36,07)
7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.644.950.557,95	6.099.170.371,41	(2.454.219.813,46)	(40,24)
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.365.022.156,39	27.943.035.337,50	(23.578.013.181,11)	(84,38)
8 Satuan Polisi Pamong Praja	4.617.901.146,84	8.146.025.041,45	(3.528.123.894,61)	(43,31)
8 Dinas Sosial	9.786.069.510,60	14.803.167.831,37	(5.017.098.320,77)	(33,89)
9 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.396.776.084,50	6.797.075.832,90	(3.400.299.748,40)	(50,03)
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.580.957.636,40	17.237.557.597,49	(6.656.599.961,09)	(38,62)
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.753.187.963,85	9.842.584.325,30	(5.089.396.361,45)	(51,71)
10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.944.736.320,53	15.445.198.836,69	(7.500.462.516,16)	(48,56)
11 Dinas Ketahanan Pangan	5.649.438.114,18	6.202.298.322,66	(552.860.208,48)	(8,91)
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	5.006.337.517,03	9.125.872.207,88	(4.119.534.690,85)	(45,14)
12 Dinas Perhubungan	71.042.301.624,70	53.009.159.834,59	18.033.141.790,11	34,02
12 Dinas Komunikasi dan Informatika	31.203.026.634,00	27.164.143.166,00	4.038.883.468,00	14,87
13 Dinas Koperasi dan UMKM	21.729.572.913,25	29.290.512.413,64	(7.560.939.500,39)	(25,81)
13 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	2.904.612.766,00	7.997.264.408,52	(5.092.651.642,52)	(63,68)
14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	30.620.836.234,39	75.486.342.950,72	(44.865.506.716,33)	(59,44)
14 Badan Arsip dan Perpustakaan	4.551.123.797,69	6.359.306.044,11	(1.808.182.246,42)	(28,43)
15 Dinas Kelautan dan Perikanan	5.682.126.433,28	11.043.302.260,93	(5.361.175.827,65)	(48,55)
15 Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.605.867.660,21	26.105.032.621,55	(10.499.164.961,34)	(40,22)
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.774.596.110,12	16.990.692.912,55	(9.216.096.802,43)	(54,24)
16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.718.239.860,82	13.018.804.462,38	(5.300.564.601,56)	(40,71)
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.088.406.292,53	18.344.990.376,54	(6.256.584.084,01)	(34,11)





	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
17 SKPKD	2.813.223.123,00	7.875,00	2.813.215.248,00	35.723.368,23
18 Sekretariat Daerah	41.651.996.673,86	55.146.762.087,61	(13.494.765.413,75)	(24,47)
18 Sekretariat DPRD	36.896.785.103,39	39.022.503.568,58	(2.125.718.465,19)	(5,45)
19 Inspektorat	1.952.113.600,12	3.669.399.480,46	(1.717.285.880,34)	(46,80)
19 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.771.274.377,00	13.729.222.290,00	(4.957.947.913,00)	(36,11)
20 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	56.816.981.756,16	74.488.109.495,86	(17.671.127.739,70)	(23,72)
20 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.344.982.039,24	14.670.033.490,27	(7.325.051.451,03)	(49,93)
21 Badan Kepegawaian Daerah	9.467.577.166,00	9.898.686.456,00	(431.109.290,00)	(4,36)
21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.761.953.507,22	70.772.369.445,15	(60.010.415.937,93)	(84,79)
22 Badan Penghubung	4.060.925.931,78	7.773.278.717,17	(3.712.352.785,39)	(47,76)
<b>Jumlah</b>	<b>2.343.433.849.242,71</b>	<b>2.803.221.056.604,35</b>	<b>(459.787.207.361,64)</b>	<b>(16,40)</b>

#### 5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

**Rp233.402.309.181,00**

Beban Pemeliharaan-LO disajikan sebesar Rp233.402.309.181,00 sedangkan Belanja Pemeliharaan-LRA disajikan sebesar Rp246.239.327.351,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(12.837.018.170,00) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Belanja Pemeliharaan-LRA : Rp 246.239.327.351,00**

Penambahan

➤ Utang Pemeliharaan Akhir : Rp 1.317.524.123,00

Total Penambahan : Rp 1.317.524.123,00

Pengurangan

➤ Utang Pemeliharaan Awal : Rp 1.170.890.348,00

➤ Reklas ke Belanja Lain : Rp12.983.651.945,00

Total Pengurangan : Rp 14.154.542.293,00

**Total Beban Pemeliharaan-LO : Rp 233.402.309.181,00**

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)				
	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	25,950,775,039.00	41,687,928,469.00	(15,737,153,430.00)	(37.75)
2 Beban Pemeliharaan	207,451,534,142.00	291,505,754,635.00	(84,054,220,493.00)	(28.83)
<b>Jumlah</b>	<b>233,402,309,181.00</b>	<b>333,193,683,104.00</b>	<b>(99,791,373,923.00)</b>	<b>(29.95)</b>

Sedangkan rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LO  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.678.908.185,00	25.758.155.254,00	(17.079.247.069,00)	(66,31)
2	Dinas Kesehatan	5.093.728.616,00	6.938.576.465,00	(1.844.847.849,00)	(26,59)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	27.256.062.853,00	17.660.444.916,00	9.595.617.937,00	54,33
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	33.934.997.767,00	21.463.893.992,00	12.471.103.775,00	58,10
5	RSUD Tugurejo Semarang	4.269.877.840,00	4.192.373.117,00	77.504.723,00	1,85
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	4.876.874.193,00	3.398.513.789,00	1.478.360.404,00	43,50
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.816.747.328,00	2.070.325.863,00	(253.578.535,00)	(12,25)
8	RSJD Surakarta	1.525.771.952,00	2.820.127.569,00	(1.294.355.617,00)	(45,90)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.317.934.916,00	1.783.941.518,00	533.993.398,00	29,93
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	63.991.004.900,00	91.537.707.023,00	(27.546.702.123,00)	(30,09)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	14.415.066.925,00	20.839.529.788,00	(6.424.462.863,00)	(30,83)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	402.656.450,00	572.405.825,00	(169.749.375,00)	(29,66)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	505.734.148,00	1.608.604.072,00	(1.102.869.924,00)	(68,56)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	746.855.399,00	1.357.054.646,00	(610.199.247,00)	(44,96)
15	Dinas Sosial	4.933.394.163,00	5.939.177.557,00	(1.005.783.394,00)	(16,93)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	832.536.664,00	1.448.943.870,00	(616.407.206,00)	(42,54)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.450.160.815,00	2.730.682.587,00	(1.280.521.772,00)	(46,89)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	428.844.138,00	1.078.155.205,00	(649.311.067,00)	(60,22)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.198.778.054,00	5.222.666.923,00	(2.023.888.869,00)	(38,75)
20	Dinas Ketahanan Pangan	651.382.925,00	435.801.475,00	215.581.450,00	49,47
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	458.716.941,00	1.771.804.800,00	(1.313.087.859,00)	(74,11)
22	Dinas Perhubungan	1.550.157.617,00	6.672.955.234,00	(5.122.797.617,00)	(76,77)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.987.129.325,00	1.205.814.025,00	781.315.300,00	64,80
24	Dinas Koperasi dan UMKM	820.972.097,00	1.738.370.573,00	(917.398.476,00)	(52,77)
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	407.636.264,00	842.971.548,00	(435.335.284,00)	(51,64)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.027.645.283,00	2.120.188.925,00	(1.092.543.642,00)	(51,53)
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	901.091.475,00	2.199.165.452,00	(1.298.073.977,00)	(59,03)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.050.422.530,00	3.999.818.827,00	(2.949.396.297,00)	(73,74)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.528.587.068,00	5.992.139.065,00	(4.463.551.997,00)	(74,49)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	630.579.694,00	2.101.427.974,00	(1.470.848.280,00)	(69,99)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.326.519.375,00	2.224.824.745,00	(898.305.370,00)	(40,38)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.364.556.795,00	3.242.447.448,00	(1.877.890.653,00)	(57,92)
33	SKPKD	176.474.500,00	-	176.474.500,00	100,00
34	Sekretariat Daerah	6.263.001.432,00	16.027.778.513,00	(9.764.777.081,00)	(60,92)
35	Sekretariat DPRD	6.863.093.324,00	12.066.437.325,00	(5.203.344.001,00)	(43,12)
36	Inspektorat	818.059.009,00	2.483.976.655,00	(1.665.917.646,00)	(67,07)
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	956.860.521,00	2.123.858.875,00	(1.166.998.354,00)	(54,95)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.096.916.111,00	34.121.109.200,00	(19.024.193.089,00)	(55,75)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.950.694.841,00	5.384.994.287,00	(2.434.299.446,00)	(45,21)
40	Badan Kepegawaian Daerah	1.871.122.405,00	1.398.946.410,00	472.175.995,00	33,75
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.686.995.747,00	3.879.142.951,00	(1.192.147.204,00)	(30,73)



	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
42 Badan Penghubung	1.337.758.596,00	2.738.428.818,00	(1.400.670.222,00)	(51,15)
<b>Jumlah</b>	<b>233.402.309.181,00</b>	<b>333.193.683.104,00</b>	<b>(99.791.373.923,00)</b>	<b>(29,95)</b>

#### 5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

**Rp263.783.489.773,00**

Beban Perjalanan Dinas-LO disajikan sebesar Rp263.783.489.773,00 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas-LRA disajikan sebesar Rp263.635.965.773,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp147.524.000,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Belanja Perjalanan Dinas-LRA : Rp263.635.965.773,00**

##### Penambahan

➤ Utang Perjalanan Dinas Akhir	: Rp 4.875.000,00
➤ Reklas dari Belanja Lain	: Rp146.149.000,00
Total Penambahan	: Rp 151.024.000,00

##### Pengurangan

➤ Utang Perjalanan Dinas Awal	: Rp 3.500.000,00
Total Pengurangan	: Rp 3.500.000,00

**Total Beban Perjalanan Dinas-LO : Rp263.783.489.773,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian SKPD sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>			
		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.800.935.025,00	25.747.850.214,00	(16.946.915.189,00)	(65,82)
2	Dinas Kesehatan	5.364.802.842,00	12.013.388.781,00	(6.648.585.939,00)	(55,34)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	364.711.275,00	715.461.147,00	(350.749.872,00)	(49,02)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	488.012.968,00	1.704.367.385,00	(1.216.354.417,00)	(71,37)
5	RSUD Tugurejo Semarang	329.104.779,00	368.731.386,00	(39.626.607,00)	(10,75)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	106.412.800,00	345.093.457,00	(238.680.657,00)	(69,16)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	468.460.073,00	837.763.731,00	(369.303.658,00)	(44,08)
8	RSJD Surakarta	368.969.972,00	699.156.816,00	(330.186.844,00)	(47,23)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	402.448.739,00	1.704.728.595,00	(1.302.279.856,00)	(76,39)
10	Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	2.660.809.411,00	4.381.712.640,00	(1.720.903.229,00)	(39,27)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	4.634.075.484,00	13.811.443.695,00	(9.177.368.211,00)	(66,45)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.221.372.536,00	4.672.907.299,00	(2.451.534.763,00)	(52,46)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.311.013.064,00	6.192.389.181,00	(1.881.376.117,00)	(30,38)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.545.360.168,00	6.946.976.383,00	(3.401.616.215,00)	(48,97)
15	Dinas Sosial	3.819.653.831,00	6.232.545.520,00	(2.412.891.689,00)	(38,71)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.791.838.301,00	6.048.518.155,00	(3.256.679.854,00)	(53,84)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.567.781.513,00	12.733.038.022,00	(8.165.256.509,00)	(64,13)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan- LO  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
18 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	1.295.414.840,00	3.901.007.254,00	(2.605.592.414,00)	(66,79)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.056.979.463,00	15.108.673.585,00	(9.051.694.122,00)	(59,91)
20 Dinas Ketahanan Pangan	2.332.129.318,00	2.998.687.869,00	(666.558.551,00)	(22,23)
21 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.465.009.163,00	8.195.585.170,00	(5.730.576.007,00)	(69,92)
22 Dinas Perhubungan	3.146.871.041,00	8.156.943.047,00	(5.010.072.006,00)	(61,42)
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	3.419.332.514,00	6.197.375.704,00	(2.778.043.190,00)	(44,83)
24 Dinas Koperasi dan UMKM	8.152.141.019,00	17.407.443.563,00	(9.255.302.544,00)	(53,17)
25 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.182.246.180,00	5.777.142.060,00	(4.594.895.880,00)	(79,54)
26 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.497.118.265,00	20.743.483.333,00	(16.246.365.068,00)	(78,32)
27 Badan Arsip dan Perpustakaan	904.290.060,00	3.117.992.824,00	(2.213.702.764,00)	(71,00)
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	2.918.895.733,00	7.134.032.185,00	(4.215.136.452,00)	(59,08)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.942.027.254,00	17.760.894.207,00	(7.818.866.953,00)	(44,02)
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.391.672.036,00	5.039.576.441,00	(2.647.904.405,00)	(52,54)
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.992.742.342,00	7.709.681.193,00	(2.716.938.851,00)	(35,24)
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.322.761.339,00	6.996.787.646,00	(3.674.026.307,00)	(52,51)
33 SKPKD	79.950.000,00	-	79.950.000,00	100,00
34 Sekretariat Daerah	11.526.666.711,00	41.404.792.205,00	(29.878.125.494,00)	(72,16)
35 Sekretariat DPRD	121.425.204.971,00	81.781.975.852,00	39.643.229.119,00	48,47
36 Inspektorat	4.580.372.919,00	15.189.427.087,00	(10.609.054.168,00)	(69,84)
37 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.997.103.507,00	12.993.224.901,00	(8.996.121.394,00)	(69,24)
38 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.995.632.062,00	29.287.254.668,00	(19.291.622.606,00)	(65,87)
39 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.866.681.253,00	9.653.724.171,00	(5.787.042.918,00)	(59,95)
40 Badan Kepegawaian Daerah	4.337.678.760,00	6.028.394.131,00	(1.690.715.371,00)	(28,05)
41 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	848.296.322,00	9.812.704.868,00	(8.964.408.546,00)	(91,36)
42 Badan Penghubung	860.509.920,00	1.695.760.772,00	(835.250.852,00)	(49,26)
<b>Jumlah</b>	<b>263.783.489.773,00</b>	<b>449.248.637.143,00</b>	<b>(185.465.147.370,00)</b>	<b>(41,28)</b>

#### 5.4.2.1.6 Beban Bunga

**Rp0,00**

Beban Bunga-LO merupakan Beban Bunga periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Sedangkan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 beban bunga sebesar Rp215.813.689,00 merupakan beban bunga RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Beban Bunga-LO disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan Belanja Barang (Bunga)-LRA disajikan sebesar Rp0,00. Dengan demikian tidak ada selisih antara saldo Beban Bunga-LO dan saldo Belanja Barang(Bunga)-LRA.

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	215.813.689,00	(215.813.689,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>215.813.689,00</b>	<b>(215.813.689,00)</b>	<b>(100,00)</b>



#### 5.4.2.1.7 Beban Hibah

**Rp2.423.118.678.522,00**

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.423.118.678.522,00, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.851.449.989,00	17.730.581.644,00	108.120.868.345,00	609,80
2 Dinas Kesehatan	-	19.328.827.000,00	(19.328.827.000,00)	(100,00)
3 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	5.975.856.300,00	8.528.873.000,00	(2.553.016.700,00)	(29,93)
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	1.785.155.000,00	(1.785.155.000,00)	(100,00)
5 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	2.188.000,00	(2.188.000,00)	(100,00)
6 Satuan Polisi Pamong Praja	-	99.937.500,00	(99.937.500,00)	(100,00)
7 Dinas Sosial	55.879.600,00	28.000.000,00	27.879.600,00	99,57
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.393.599.000,00	20.896.007.942,00	(18.502.408.942,00)	(88,55)
9 Dinas Ketahanan Pangan	2.947.485.900,00	1.620.723.500,00	1.326.762.400,00	81,86
10 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	1.640.020.700,00	(1.640.020.700,00)	(100,00)
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	194.925.000,00	-	194.925.000,00	100,00
12 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.089.074.936,00	-	1.089.074.936,00	100,00
13 Dinas Kelautan dan Perikanan	2.420.755.976,00	6.068.166.900,00	(3.647.410.924,00)	(60,11)
14 Dinas Pertanian dan Perkebunan	58.840.829.465,00	55.429.284.230,00	3.411.545.235,00	6,15
15 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.866.510.000,00	6.813.044.670,00	(4.946.534.670,00)	(72,60)
16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.513.184.502,00	1.669.140.000,00	844.044.502,00	50,57
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	523.600.000,00	362.914.000,00	160.686.000,00	44,28
18 SKPKD	2.218.445.527.854,00	5.155.826.080.751,00	(2.937.380.552.897,00)	(56,97)
<b>Jumlah</b>	<b>2.423.118.678.522,00</b>	<b>5.297.828.944.837,00</b>	<b>(2.874.710.266.315,00)</b>	<b>(54,26)</b>

Beban Hibah-LO disajikan sebesar Rp2.423.118.678.522,00 sedangkan Belanja Hibah-LRA disajikan sebesar Rp5.593.181.623.109,00. Selisih sebesar Rp(3.170.062.944.587,00) terdiri dari beban atas belanja barang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp2.071.459.142,00, beban atas belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp202.601.691.526,00, beban hibah reklas dari BTT untuk *refocusing* COVID-19 sebesar Rp42.697.544.745,00, dan beban BOS kepada Sekolah milik Kabupaten/Kota Rp(3.417.433.640.000,00).

#### 5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

**Rp1.433.959.432.980,00**

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.433.959.432.980,00, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Kesehatan	6.903.204.330,00	4.120.413.000,00	2.782.791.330,00	67,54
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.691.320.000,00	(1.691.320.000,00)	(100,00)
3 RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	10.765.000,00	(10.765.000,00)	(100,00)
4 RSJD Surakarta	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)



	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	7.482.286.000,00	-	7.482.286.000,00	100,00
6 Dinas Sosial	99.785.000,00	-	99.785.000,00	100,00
7 Dinas Ketahanan Pangan	-	2.647.200.000,00	(2.647.200.000,00)	(100,00)
8 Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata	918.587.000,00	537.501.000,00	381.086.000,00	70,90
9 Dinas Kelautan dan Perikanan	6.562.645.000,00	-	6.562.645.000,00	100,00
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.831.565.150,00	5.749.065.000,00	(1.917.499.850,00)	(33,35)
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.670.633.700,00	19.288.623.645,00	(6.617.989.945,00)	(34,31)
12 SKPKD	1.395.415.726.800,00	44.325.750.000,00	1.351.089.976.800,00	3.048,09
13 Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-	75.000.000,00	100,00
14 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	5.600.000,00	(5.600.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.433.959.432.980,00</b>	<b>78.378.237.645,00</b>	<b>1.355.581.195.335,00</b>	<b>1.729,54</b>

Beban Bantuan Sosial-LO disajikan sebesar Rp1.433.959.432.980,00 sedangkan Belanja Bantuan Sosial-LRA disajikan sebesar Rp42.407.250.000,00. Selisih sebesar Rp1.391.552.182.980,00 merupakan beban dari belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp38.543.706.180,00, beban Bantuan Sosial dari reklas BTT untuk *refocusing* COVID-19 sebesar Rp1.352.735.476.800,00, dan beban atas utang belanja Bantuan Sosial sebesar Rp273.000.000,00.

#### 5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.376.706.006.230,14

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi Beban pada tahun 2020 sebesar Rp1.376.706.006.230,14 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Penyusutan Aset Tetap	1.368.801.158.556,64	1.488.476.314.805,75	(119.675.156.249,11)	(8,04)
2 Beban Amortisasi	3.664.387.180,12	3.608.680.092,60	55.707.087,52	1,54
3 Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.240.460.493,38	5.204.583.109,60	(964.122.616,22)	(18,52)
<b>Jumlah</b>	<b>1.376.706.006.230,14</b>	<b>1.497.289.578.007,95</b>	<b>(120.583.571.777,81)</b>	<b>(8,05)</b>

#### 5.4.2.1.10.1 Beban Penyusutan Aset Tetap Rp1.368.801.158.556,64

Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.368.801.158.556,64, dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	TOTAL
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020 (a)	5.209.658.138.204,90	1.994.887.391.629,88	6.971.333.399.289,46	1.501.282.772,00	14.177.380.211.896,20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2019 (b)	4.537.157.195.221,60	1.839.618.169.569,38	6.406.520.070.389,17	923.284.104,00	12.784.218.719.284,10
<b>Mutasi Penambahan</b>					
Reklas ke Aset Lainnya	12.262.544.925,00	7.331.824.332,46	6.901.336.837,52	-	26.495.706.094,98
Reklas antar Aset Tetap	1.765.543.858,39	12.806.740,00	373.997.306,31	3.900.000,00	2.156.247.904,70
Aset Ekstrakomptabel	770.729.642,00	44.103.860,00	-	-	814.833.502,00
Mutasi Keluar	18.310.148.628,00	503.065.336,00	-	-	18.813.213.964,00



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan- LO*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

	<b>Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>TOTAL</b>
Koreksi	481.275.869,93	4.352.070.392,74	4.049.356.212,00	-	8.882.702.474,67
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>33.590.242.923,32</b>	<b>12.243.870.661,20</b>	<b>11.324.690.355,83</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>57.162.703.940,35</b>
<b><u>Mutasi Pengurangan</u></b>					
Koreksi	4.084.114.668,97	5.354.628.092,97	10.362.500,00	-	9.449.105.261,94
Mutasi Masuk	18.310.148.628,00	503.065.336,00	-	-	18.813.213.964,00
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	1.734.467.212,50	7.836.400,00	1.868.224,48	-	1.744.171.836,98
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	2.659.094.427,00	3.344.776.678,76	-	-	6.003.871.105,76
Hibah asset yang masuk di pendapatan	22.851.175.256,25	2.986.286.089,12	19.675.214.481,75	-	45.512.675.827,12
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>49.639.000.192,72</b>	<b>12.196.592.596,85</b>	<b>19.687.445.206,23</b>	<b>-</b>	<b>81.523.037.995,80</b>
<b>Jumlah Mutasi (c)</b>	<b>-16.048.757.269,40</b>	<b>47.278.064,35</b>	<b>-8.362.754.850,40</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>-24.360.334.055,45</b>
<b>Total Beban Penyusutan Aset Tetap (a-b+c)</b>	<b>656.452.185.713,90</b>	<b>155.316.500.124,85</b>	<b>556.450.574.049,89</b>	<b>581.898.668,00</b>	<b>1.368.801.158.556,64</b>

Dengan rincian Beban per SKPD sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>			
		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Kenaikan/Penurunan</b>	<b>Tren %</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	404.046.262.377,17	354.779.373.090,26	49.266.889.286,91	13,89
2	Dinas Kesehatan	14.640.129.294,28	14.135.153.463,67	504.975.830,61	3,57
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	65.001.487.444,07	67.928.695.246,29	(2.927.207.802,22)	(4,31)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	71.074.985.264,07	80.522.450.330,89	(9.447.465.066,82)	(11,73)
5	RSUD Tugurejo Semarang	36.159.932.972,30	40.773.912.136,13	(4.613.979.163,83)	(11,32)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	12.519.400.870,47	13.269.705.845,41	(750.304.974,94)	(5,65)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	18.052.311.617,68	21.732.008.294,63	(3.679.696.676,95)	(16,93)
8	RSJD Surakarta	12.401.104.019,91	14.404.386.991,30	(2.003.282.971,39)	(13,91)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.195.913.275,57	13.788.779.051,31	(5.592.865.775,74)	(40,56)
10	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	511.078.104.562,93	649.368.236.736,21	(138.290.132.173,28)	(21,30)
11	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	44.056.964.737,56	46.526.404.974,06	(2.469.440.236,50)	(5,31)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	753.012.932,88	720.638.691,58	32.374.241,30	4,49
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.317.978.928,48	1.485.589.428,48	(167.610.500,00)	(11,28)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	836.868.429,68	960.564.429,70	(123.696.000,02)	(12,88)
15	Dinas Sosial	7.339.401.073,76	7.339.736.523,68	(335.449,92)	(0,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.647.197.843,31	1.534.273.292,67	112.924.550,64	7,36
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.943.500.415,07	4.172.505.903,06	(229.005.487,99)	(5,49)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	735.962.220,40	772.806.195,40	(36.843.975,00)	(4,77)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.580.701.029,10	7.641.219.829,48	(1.060.518.800,38)	(13,88)
20	Dinas Ketahanan Pangan	1.186.834.729,17	1.270.656.293,92	(83.821.564,75)	(6,60)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	1.048.833.666,40	1.200.372.277,19	(151.538.610,79)	(12,62)
22	Dinas Perhubungan	9.771.660.384,53	9.943.574.365,94	(171.913.981,41)	(1,73)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.952.836.017,53	10.539.006.909,10	4.413.829.108,43	41,88
24	Dinas Koperasi dan UMKM	2.343.394.912,15	2.216.646.636,44	126.748.275,71	5,72



25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	1.407.446.858,22	1.587.846.760,82	(180.399.902,60)	(11,36)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.215.382.138,23	9.784.750.143,01	(569.368.004,78)	(5,82)
27	Badan Arsip dan Perpustakaan	2.576.221.954,11	2.645.148.497,77	(68.926.543,66)	(2,61)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.171.335.802,18	10.235.962.753,25	935.373.048,93	9,14
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.012.202.102,92	11.061.612.719,80	(1.049.410.616,88)	(9,49)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.660.927.387,68	7.109.664.567,25	551.262.820,43	7,75
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.987.205.514,12	6.948.876.553,08	38.328.961,04	0,55
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.832.916.145,27	7.734.060.340,64	98.855.804,63	1,28
33	SKPKD	3.932.526.582,39	4.128.382.505,18	(195.855.922,79)	(4,74)
34	Sekretariat Daerah	14.875.789.226,25	15.563.825.962,66	(688.036.736,41)	(4,42)
35	Sekretariat DPRD	8.102.436.812,52	6.592.351.591,81	1.510.085.220,71	22,91
36	Inspektorat	1.461.979.899,05	1.352.901.924,09	109.077.974,96	8,06
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.192.734.123,22	2.370.367.253,50	(177.633.130,28)	(7,49)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.592.267.568,66	21.383.276.942,09	(1.791.009.373,43)	(8,38)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.105.469.045,72	5.379.069.631,04	(273.600.585,32)	(5,09)
40	Badan Kepegawaian Daerah	2.350.897.170,55	2.209.428.110,59	141.469.059,96	6,40
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.118.254.377,97	3.656.905.833,18	(538.651.455,21)	(14,73)
42	Badan Penghubung	1.520.386.829,11	1.705.185.779,19	(184.798.950,08)	(10,84)
<b>Jumlah</b>		<b>1.368.801.158.556,64</b>	<b>1.488.476.314.805,75</b>	<b>(119.675.156.249,11)</b>	<b>(8,04)</b>

#### 5.4.2.1.10.2 Beban Amortisasi

**Rp3.664.387.180,12**

Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.664.387.180,12 didapatkan dari Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan sebesar Rp21.983.069.404,75 sedangkan Akumulasi Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp17.749.362.824,63 dengan koreksi tambah nilai amortisasi sebesar Rp569.319.400,00.

Penambahan nilai amortisasi sebesar Rp569.319.400,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Tambah Pencatatan Tahun Sebelumnya : Rp 412.019.400,00
  - Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap : Rp 161.300.000,00
  - Koreksi Kurang Pencatatan Tahun Sebelumnya : (Rp 4.000.000,00)
- Penambahan Nilai Amortisasi : Rp569.319.400,00

Rincian Beban Amortisasi per SKPD sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>			
		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	357.997.881,80	201.084.260,20	156.913.621,60	78,03
2	Dinas Kesehatan	194.462.000,00	154.267.440,00	40.194.560,00	26,06
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	45.001.000,00	525.925.010,75	(480.924.010,75)	(91,44)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	258.310.846,60	258.310.846,60	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	39.200.000,00	39.200.000,00	-	-
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	250.280.000,00	239.600.000,00	10.680.000,00	4,46
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	212.008.133,34	302.678.533,33	(90.670.399,99)	(29,96)
8	RSJD Surakarta	523.389.281,80	533.016.281,80	(9.627.000,00)	(1,81)





		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	242.166.448,25	242.166.448,25	-	-
10	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	25.761.000,00	-	25.761.000,00	100,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	37.900.000,00	37.900.000,00	-	-
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	47.520.600,00	90.407.966,67	(42.887.366,67)	(47,44)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	119.568.000,00	119.568.000,00	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.900.000,00	-	5.900.000,00	100,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	24.989.800,00	24.989.800,00	-	-
17	Dinas Perhubungan	8.691.500,00	8.691.500,00	-	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	347.559.200,00	321.784.200,00	25.775.000,00	8,01
19	Dinas Koperasi dan UMKM	45.432.200,00	26.320.400,00	19.111.800,00	72,61
20	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	86.477.100,00	73.518.000,00	12.959.100,00	17,63
21	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	164.739.000,00	68.608.500,00	96.130.500,00	140,11
22	Badan Arsip dan Perpustakaan	28.190.000,00	28.190.000,00	-	-
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.900.000,00	7.900.000,00	-	-
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	110.700.180,00	92.300.180,00	18.400.000,00	19,93
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	96.479.933,33	33.830.000,00	62.649.933,33	185,19
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.456.950,00	12.456.950,00	2.000.000,00	16,06
28	Sekretariat DPRD	60.960.800,00	-	60.960.800,00	100,00
29	Inspektorat	59.274.000,00	-	59.274.000,00	100,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.388.825,00	43.078.825,00	(12.690.000,00)	(29,46)
31	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	39.700.000,00	49.150.000,00	(9.450.000,00)	(19,23)
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	178.982.500,00	20.000.000,00	158.982.500,00	794,91
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	53.736.950,00	(53.736.950,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.664.387.180,12</b>	<b>3.608.680.092,60</b>	<b>55.707.087,52</b>	<b>1,54</b>

#### 5.4.2.1.10.3 Beban Penyusutan Aset Lainnya

**Rp4.240.460.493,38**

Beban Penyusutan Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.240.460.493,38 didapatkan dari penghitungan sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan Aset lainnya Tahun Berjalan (a) : Rp341.735.431.789,62

Akumulasi penyusutan Aset lainnya Tahun 2019 (b) : Rp350.310.725.476,16

Mutasi Tambah

➤ Reklas dari Aset Tetap : Rp26.334.406.094,98

➤ Reklas dari Aset Lainnya : Rp 7.746.316.400,20

Jumlah Mutasi Tambah Rp34.080.722.495,18

Mutasi Kurang

➤ Reklas ke Aset Tetap : Rp 6.003.871.105,76

➤ Reklas Pemanfaatan : Rp 7.746.316.400,20



➤ Penjualan Aset lainnya	: Rp27.239.021.078,14
➤ Koreksi Penilaian penyusutan	: Rp 5.907.268.091,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp46.896.476.675,10
Mutasi Netto (c)	: (Rp 12.815.754.179,92)
Beban Penyusutan Aset Lainnya (a-b-c)	: Rp 4.240.460.493,38

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.650.000,00	284.637.901,47	(276.987.901,47)	(97,31)
2 Dinas Kesehatan	995.808.508,88	67.074.862,97	928.733.645,91	1.384,62
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	8.552.860,00	(8.552.860,00)	(100,00)
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	63.923.600,00	(63.923.600,00)	(100,00)
5 RSUD Tugurejo Semarang	-	10.695.098,00	(10.695.098,00)	(100,00)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	231.100,00	(231.100,00)	(100,00)
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	12.372.125,00	(12.372.125,00)	(100,00)
8 RSJD Surakarta	-	40.821.979,50	(40.821.979,50)	(100,00)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	3.125.000,00	(3.125.000,00)	(100,00)
10 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	2.074.663.927,32	2.515.908.097,95	(441.244.170,63)	(17,54)
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	11.999.560,00	36.174.441,00	(24.174.881,00)	(66,83)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	1.420.000,00	(1.420.000,00)	(100,00)
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	24.722.000,00	(24.722.000,00)	(100,00)
15 Dinas Sosial	-	6.803.350,00	(6.803.350,00)	(100,00)
16 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	24.593.541,66	(24.593.541,66)	(100,00)
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	11.551.999,22	(11.551.999,22)	(100,00)
20 Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	-	-	-	-
22 Dinas Perhubungan	-	340.132.531,94	(340.132.531,94)	(100,00)
23 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	32.386.137,80	(32.386.137,80)	(100,00)
24 Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-	-
25 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	-	6.652.970,80	(6.652.970,80)	(100,00)
26 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.536.611,20	21.000.283,20	(8.463.672,00)	(40,30)
27 Badan Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-
28 Dinas Kelautan dan Perikanan	114.465.575,00	462.674.068,52	(348.208.493,52)	(75,26)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	249.333,33	(249.333,33)	(100,00)
30 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	584.873.858,65	(584.873.858,65)	(100,00)
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	12.902.112,50	(12.902.112,50)	(100,00)
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.352.872,07	108.986.794,00	(48.633.921,93)	(44,62)
33 SKPKD	128.875.782,80	2.219.020,02	126.656.762,78	5.707,78
34 Sekretariat Daerah	443.402.094	16.722.740,00	426.679.353,75	2.551,49
35 Sekretariat DPRD	-	-	-	-



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan- LO*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

36	Inspektorat	-	627.600,00	(627.600,00)	(100,00)
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.288.437,36	7.741.437,36	(3.453.000,00)	(44,60)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	386.417.125,00	402.632.149,20	(16.215.024,20)	(4,03)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	86.055.665,51	(86.055.665,51)	(100,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	-	6.118.450,00	(6.118.450,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>4.240.460.493,38</b>	<b>5.204.583.109,60</b>	<b>(964.122.616,22)</b>	<b>(18,52)</b>

#### 5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

**Rp395.241.353,75**

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp395.241.353,75 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

##### Penambahan

➤	Penyisihan Piutang Tahun Berjalan	: Rp 407.135.380.961,79
➤	Surplus Non Operasional	: Rp 137.388.111.193,28
	<b>Total Penambahan</b>	<b>: Rp 544.523.492.155,07</b>

##### Pengurangan

➤	Penyisihan Piutang Tahun 2019	: Rp 534.658.906.975,86
➤	Koreksi LPE	: Rp 9.469.343.825,47
	<b>Total Pengurangan</b>	<b>: Rp 544.128.250.801,32</b>

Beban Penyisihan Piutang : Rp 395.241.353,75

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

		<i>(Dalam Rupiah)</i>			
		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	4.142.652,05	(4.142.652,05)	(100,00)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	733.812.169,33	(733.812.169,33)	(100,00)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	133.641.818,19	753.718.046,19	(620.076.228,00)	(82,27)
4	RSUD Tugurejo Semarang	219.702.837,46	439.010.563,72	(219.307.726,26)	(49,95)
5	RSJD Dr. Aminogondohutomo Semarang	21.922.087,21	92.097.698,55	(70.175.611,35)	(76,20)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	11.658.335	5.824.492,30	5.833.842,70	100,16
7	RSJD Surakarta	2.482.936,52	12.807.062,93	(10.324.126,41)	(80,61)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.833.339,38	9.480.500,80	(3.647.161,42)	(38,47)
9	Dinas Perhubungan	-	700.985,00	(700.985,00)	(100,00)
10	SKPKD	-	2.601.776.915,57	(2.601.776.915,57)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>395.241.353,75</b>	<b>4.653.371.086,44</b>	<b>(4.258.129.732,69)</b>	<b>(91,51)</b>



#### 5.4.2.1.12 Beban Lain-Lain

**Rp12.877.294.520,95**

Beban Lain-Lain (LO) merupakan Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.877.294.520,95 terdiri dari Beban atas aset yang menjadi ekstrakomptabel pada tahun 2020 sebesar Rp9.011.879.499,00 dan Beban persentase kerugian pada BUMD atas penghitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas pada SKPKD sebesar Rp3.865.415.021,95.

Beban Lain-lain dirinci per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.106.345.490,00	17.925.890.295,00	(9.819.544.805,00)	(54,78)
2 Dinas Kesehatan	31.275.105,00	44.335.599,00	(13.060.494,00)	(29,46)
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	31.920.000,00	105.825.000,00	(73.905.000,00)	(69,84)
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	220.551.313,00	(220.551.313,00)	(100,00)
5 RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	54.187.691,00	83.577.396,00	(29.389.705,00)	(35,16)
7 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	10.437.865,00	(10.437.865,00)	(100,00)
8 RSJD Surakarta	17.835.001,00	147.387.208,00	(129.552.207,00)	(87,90)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.340.000,00	9.996.200,00	(7.656.200,00)	(76,59)
10 Dinas Bina Marga dan Ciptakaru	64.950.000,00	300.000,00	64.650.000,00	21.550,00
11 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	18.620.000,00	(18.620.000,00)	(100,00)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.000.000,00	1.900.000,00	28.100.000,00	1.478,95
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(100,00)
14 Dinas Sosial	36.300.000,00	84.292.000,00	(47.992.000,00)	(56,94)
15 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	72.905.000,00	(72.905.000,00)	(100,00)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.800.000,00	148.501.465,00	(100.701.465,00)	(67,81)
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65.060.000,00	264.656.500,00	(199.596.500,00)	(75,42)
18 Dinas Ketahanan Pangan	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil	350.000,00	-	350.000,00	100,00
20 Dinas Perhubungan	4.000.000,00	10.704.808,00	(6.704.808,00)	(62,63)
21 Dinas Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	23.070.000,00	(17.070.000,00)	(73,99)
22 Dinas Koperasi dan UMKM	4.763.000,00	99.656.600,00	(94.893.600,00)	(95,22)
23 Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	-	1.925.000,00	(1.925.000,00)	(100,00)
24 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	61.880.000,00	148.697.990,00	(86.817.990,00)	(58,39)
25 Badan Arsip dan Perpustakaan	-	650.000,00	(650.000,00)	(100,00)
26 Dinas Kelautan dan Perikanan	22.791.640,00	8.747.000,00	14.044.640,00	160,57
27 Dinas Pertanian dan Perkebunan	271.312.362,00	280.165.200,00	(8.852.838,00)	(3,16)
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.080.000,00	2.343.098.500,00	(2.342.018.500,00)	(99,95)
29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23.020.440,00	32.594.750,00	(9.574.310,00)	(29,37)
30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.292.000,00	57.246.000,00	(38.954.000,00)	(68,05)
31 SKPKD	3.865.415.021,95	112.975.811.982,91	(109.110.396.960,96)	(96,58)
32 Sekretariat Daerah	-	9.500.997,00	(9.500.997,00)	(100,00)
33 Inspektorat	-	39.375.000,00	(39.375.000,00)	(100,00)
34 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	398.500,00	(398.500,00)	(100,00)



	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	110.376.770,00	200.238.500,00	(89.861.730,00)	(44,88)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
37 Badan Kepegawaian Daerah	-	1.620.000,00	(1.620.000,00)	(100,00)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	153.992.000,00	(153.992.000,00)	(100,00)
39 Badan Penghubung	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.877.294.520,95</b>	<b>135.530.468.668,91</b>	<b>(122,653,174,147.96)</b>	<b>(90,50)</b>

#### 5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

**Rp7.090.119.051.175,00**

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.090.119.051.175,00, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>				
	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.076.492.219.934,00	5.219.902.856.262,00	(143.410.636.328,00)	(2,75)
2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	24.608.000,00	(24.608.000,00)	(100,00)
3 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	845.543.195.241,00	1.050.456.112.049,00	(204.912.916.808,00)	(19,51)
4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.168.083.636.000,00	1.361.431.049.000,00	(193.347.413.000,00)	(14,20)
5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	33.767.399.599,00	(33.767.399.599,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.090.119.051.175,00</b>	<b>7.665.582.024.910,00</b>	<b>(575.462.973.735,00)</b>	<b>(7,51)</b>

Beban Transfer-LO disajikan sebesar Rp7.090.119.051.175,00 sedangkan Belanja Transfer-LRA disajikan sebesar Rp6.646.872.581.129,00. Selisih LO dan LRA sebesar Rp443.246.470.046,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

**Total Belanja Transfer-LRA : Rp6.646.872.581.129,00**

Penambahan

➤ Saldo Akhir Utang Transfer : Rp586.175.926.577,00  
Total Penambahan : Rp 586.175.926.577,00

Pengurangan

➤ Saldo Awal Utang Transfer : Rp142.929.456.531,00  
Total Pengurangan : Rp 142.929.456.531,00

**Total Beban Transfer-LO : Rp7.090.119.051.175,00**

#### 5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

**Rp5.076.492.219.934,00**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.076.492.219.934,00. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak-LO disajikan sebesar Rp5.076.492.219.934,00 sedangkan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak kepada



Kabupaten/Kota-LRA disajikan sebesar Rp4.633.245.749.888,00. Selisih LO dan LRA sebesar Rp443.246.470.046,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Total Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak-LRA	: Rp4.633.245.749.888,00
Penambahan	
➤ Saldo Akhir Utang Transfer	: Rp586.118.188.577,00
Total Penambahan	: Rp 586.118.188.577,00
Pengurangan	
➤ Saldo Awal Utang Transfer	: Rp142.871.718.531,00
Total Pengurangan	: Rp 142.871.718.531,00
<b>Total Beban Transfer-LO</b>	<b>: Rp5.076.492.219.934,00</b>

#### **5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya** **Rp0,00**

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp0,00. Tidak ada selisih antara LO dan LRA, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LRA	: Rp	0,00
Penambahan		
➤ Saldo Akhir Utang Transfer	: Rp57.738.000,00	
Total Penambahan	: Rp57.738.000,00	
Pengurangan		
➤ Saldo Awal Utang Transfer	: Rp57.738.000,00	
Total Pengurangan	: Rp57.738.000,00	
<b>Total Beban Transfer-LO</b>	<b>: Rp</b>	<b>0,00</b>

#### **5.4.2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan** **Rp845.543.195.241,00** **Kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp845.543.195.241,00. Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO disajikan sebesar Rp845.543.195.241,00 sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp845.543.195.241,00, sehingga tidak ada selisih antara LO dan LRA.



**5.4.2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp1.168.083.636.000,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa yang berada di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.168.083.636.000,00. Sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa-LRA disajikan sebesar Rp1.168.083.636.000,00, sehingga tidak ada selisih antara LO dan LRA.

**5.4.2.2.1 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp0,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp0,00, sehingga tidak ada selisih antara LO dan LRA.

**5.4.3 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL Rp(553.548.250.666,26)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan	22.857.781.266.070,60	27.678.191.696.878,96	(4.820.410.430.808,36)	(17,42)
2 Beban	23.411.329.516.736,86	26.036.705.375.002,73	(2.625.375.858.265,87)	(10,08)
<b>Jumlah</b>	<b>(553.548.250.666,26)</b>	<b>1.641.486.321.876,23</b>	<b>(2.195.034.572.542,47)</b>	<b>(133,72)</b>

**5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp137.206.357.330,46**

Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp137.206.357.330,46 merupakan selisih antara surplus dan defisit non operasional Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	139.384.387.221,80	549.973.824.126,64	(410.589.436.904,84)	(74,66)
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.178.029.891,34)	(18.191.723.163,08)	16.013.693.271,74	(88,03)
<b>Jumlah</b>	<b>137.206.357.330,46</b>	<b>531.782.100.963,56</b>	<b>(394.575.743.633,10)</b>	<b>(74,20)</b>



#### 5.4.4.1 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp139.384.387.221,80

Surplus dari kegiatan Non Operasional untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp139.384.387.221,80 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
2 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	139.384.387.221,80	549.973.824.126,64	(410.589.436.904,84)	(74,66)
<b>Jumlah</b>	<b>139.384.387.221,80</b>	<b>549.973.824.126,64</b>	<b>(410.589.436.904,84)</b>	<b>(74,66)</b>

#### 5.4.4.1.1 SURPLUS DARI PENJUALAN ASET NON LANCAR Rp0,00

Tidak ada Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan untuk tahun 2019.

#### 5.4.4.1.2 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Rp139.384.387.221,80

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp139.384.387.221,80 merupakan:

1. Surplus dari Pemulihan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp137.644.249.980,06;
2. Surplus dari Pemulihan Penyusutan Aset Lainnya Rp408.718.692,20; dan
3. Surplus dari Perolehan Persediaan Rp1.331.418.549,54.

Sedangkan rincian Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Kesehatan	15.551.099,54	265.831.108,00	(250.280.008,46)	(94,15)
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.162.145,89	3.550.027.490,22	(3.517.865.344,33)	(99,09)
3 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.937.820.159,53	634.887.031,21	3.302.933.128,32	520,24
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	228.865.214,35	(228.865.214,35)	(100,00)
5 RSUD Tugurejo Semarang	-	45.615.235,00	(45.615.235,00)	(100,00)
6 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	32.037.942,15	14.596.676,24	17.441.265,92	119,49
7 RSJD Surakarta	-	44.987.692,90	(44.987.692,90)	(100,00)
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	12.113.323,48	16.942.793,11	(4.829.469,64)	(28,50)
9 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	1.869.007.066,19	(1.869.007.066,19)	(100,00)
10 Dinas PSDA dan Penataan Ruang	363.749.806,31	-	363.749.806,31	100,00
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.806.740,00	-	12.806.740,00	100,00
12 Dinas Sosial	-	7.602.000,00	(7.602.000,00)	(100,00)
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	24.635.390,50	(24.635.390,50)	(100,00)
14 Dinas Ketahanan Pangan	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
15 Dinas Perhubungan	726.900,00	4.938,90	721.961,10	14.617,85





	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
16 Dinas Koperasi dan UMKM	13.550.000,00	-	13.550.000,00	100,00
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.315.867.450,00	4.427.500,00	1.311.439.950,00	29.620,33
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1.520.000,00	(1.520.000,00)	(100,00)
19 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	318.800,00	(318.800,00)	(100,00)
20 SKPKD	252.540.900,00	160.208.878,28	92.332.021,72	57,63
21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	360.000,00	(360.000,00)	(100,00)
22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.086.986,30	-	6.086.986,30	100,00
23 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	133.389.373.768,60	543.103.961.311,75	(409.714.587.543,15)	(75,44)
<b>Jumlah</b>	<b>139.384.387.221,80</b>	<b>549.973.824.126,64</b>	<b>(410.589.436.904,84)</b>	<b>(74,66)</b>

#### 5.4.4.2 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

**Rp2.178.029.891,34**

Defisit dari kegiatan Non Operasional untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.178.029.891,34 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2.168.325.266,86	1.582.940.421,80	585.384.845,06	36,98
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	9.704.624,48	16.608.782.741,28	(16.599.078.116,80)	(99,94)
<b>Jumlah</b>	<b>2.178.029.891,34</b>	<b>18.191.723.163,08</b>	<b>(16.013.693.271,74)</b>	<b>(88,03)</b>

#### 5.4.4.2.1 DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

**Rp2.168.325.266,86**

Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.168.325.266,86 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	685.904.161,80	(685.904.161,80)	(100,00)
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	40.700.000,00	-	40.700.000,00	100,00
3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	2.382.400,00	(2.382.400,00)	(100,00)
4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	910.000,00	-	910.000,00	100,00
5 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.147.904,80	-	5.147.904,80	100,00
6 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	92.088.500,00	144.375.000,00	(52.286.500,00)	(36,22)
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	184.618.560,00	(184.618.560,00)	(100,00)
8 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	564.860.300,00	(564.860.300,00)	(100,00)
9 Sekretariat Daerah	572.740,00	-	572.740,00	100,00
10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.028.906.122,06	-	2.028.906.122,06	100,00
11 Badan Kepegawaian Daerah	-	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.168.325.266,86</b>	<b>1.582.940.421,80</b>	<b>585.384.845,06</b>	<b>36,98</b>



#### 5.4.4.2.2 DEFISIT DARI KEGIATAN

**Rp9.704.624,48**

#### NON OPERASI LAINNYA

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih perhitungan penyusutan atas reklas asset tetap untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.704.624,48 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	8.466.659.179,42	(8.466.659.179,42)	(100,00)
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	7.836.400,00	4.200.000,00	3.636.400,00	86,58
3 RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	238.026.584,00	(238.026.584,00)	(100,00)
4 RSJD Surakarta	-	20.880.000,00	(20.880.000,00)	(100,00)
5 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
6 Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	1.868.224,48	-	1.868.224,48	100,00
7 Dinas Sosial	-	78.652.000,00	(78.652.000,00)	(100,00)
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.440.005,00	(1.440.005,00)	(100,00)
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	9.300.000,00	(9.300.000,00)	(100,00)
10 Dinas Ketahanan Pangan	-	3.031.000,00	(3.031.000,00)	(100,00)
11 Dinas Perhubungan	-	5.279.232.849,86	(5.279.232.849,86)	(100,00)
12 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	8.390.550,00	(8.390.550,00)	(100,00)
13 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	1.334.833.500,00	(1.334.833.500,00)	(100,00)
14 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	150.363.000,00	(150.363.000,00)	(100,00)
15 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	31.959.850,00	(31.959.850,00)	(100,00)
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	23.750.000,00	(23.750.000,00)	(100,00)
17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	73.730.000,00	(73.730.000,00)	(100,00)
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	203.656.250,00	(203.656.250,00)	(100,00)
19 Sekretariat Daerah	-	157.052.003,00	(157.052.003,00)	(100,00)
20 Sekretariat DPRD	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
21 SKPKD	-	10.488.750,00	(10.488.750,00)	(100,00)
22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	115.125.000,00	(115.125.000,00)	(100,00)
23 Badan Kepegawaian Daerah	-	116.242.500,00	(116.242.500,00)	(100,00)
24 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	233.369.720,00	(233.369.720,00)	(100,00)
25 Badan Penghubung	-	22.900.000,00	(22.900.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>9.704.624,48</b>	<b>16.608.782.741,28</b>	<b>(16.599.078.116,80)</b>	<b>(99,94)</b>

#### 5.4.5 SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

**Rp(416.341.893.335,80)**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp(416.341.893.335,82), dengan rincian sebagai berikut :



(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(553.548.250.666,26)	1.641.486.321.876,23	(2.195.034.572.542,48)	(133,72)
2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	137.206.357.330,46	531.782.100.963,56	(394.575.743.633,10)	(74,20)
<b>Jumlah</b>	<b>(416.341.893.335,80)</b>	<b>2.173.268.422.839,79</b>	<b>(2.589.610.316.175,59)</b>	<b>(119,16)</b>

#### 5.4.6 POS LUAR BIASA

**Rp(1.080.000.000,00)**

Pos Luar Biasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.080.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
2 Beban Luar Biasa	1.080.000.000,00	2.662.431.206,00	(1.582.431.206,00)	(59,44)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.080.000.000,00)</b>	<b>2.662.431.206,00</b>	<b>1.582.431.206,00</b>	<b>(59,44)</b>

##### 5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa

**Rp0,00**

Pendapatan Luar Biasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 nihil.

##### 5.4.6.2 Beban Luar Biasa

**Rp1.080.000.000,00**

Beban Luar Biasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.080.000.000,00, sedangkan realisasi untuk tahun 2019 sebesar Rp2.662.431.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.582.431.206,00. Beban Luar Biasa tahun 2020 digunakan untuk penanganan korban terdampak bencana alam dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Beban
1	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana angin kencang di Kabupaten Cilacap	115.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Pemalang	175.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana Angin Topan/Puting Beliung di Kabupaten Blora	120.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara	180.000.000,00
5	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Grobogan	400.000.000,00
6	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana angin kencang di Kabupaten Grobogan	90.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.080.000.000,00</b>



#### 5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LO

**Rp(417.421.893.335,80)**

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp(417.421.893.335,80) dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1 Surplus/Defisit Operasional	(553.548.250.666,26)	1.641.486.321.876,23	(2.195.034.572.542,48)	(133,72)
2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	137.206.357.330,46	531.782.100.963,56	(394.575.743.633,10)	(74,20)
3 Pos Luar Biasa	(1.080.000.000,00)	(2.662.431.206,00)	1.582.431.206,00	(59,44)
<b>Jumlah</b>	<b>(417.421.893.335,80)</b>	<b>2.170.605.991.633,79</b>	<b>(2.588.027.884.969,59)</b>	<b>(119,23)</b>



## 5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2020 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2020.

### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

**Rp738.375.611.797,00**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp738.375.611.797,00, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Arus Masuk Kas	25.393.121.456.628,00	25.858.658.772.501,00
Arus Keluar Kas	24.654.745.844.831,00	24.028.572.697.323,00
	738.375.611.797,00	1.830.086.075.178,00

#### 5.5.1.1. Arus Masuk Kas

**Rp25.393.121.456.628,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.393.121.456.628,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp25.858.658.772.501,00 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1.	Pendapatan Pajak Daerah	11.139.173.309.780,00	11.951.919.535.383,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	93.279.121.699,00	114.861.058.851,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	530.091.029.137,00	512.701.993.939,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	1.905.124.340.719,00	1.857.310.282.790,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119.954,00	564.290.383.834,00
6.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016.587,00	11.677.937.800,00
7.	Dana Alokasi Umum	3.438.709.973.000,00	3.784.512.513.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	7.333.796.931.752,00	6.974.422.226.039,00
9.	Dana Penyesuaian	68.212.455.000,00	62.388.421.000,00
10.	Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.102.159.000,00	1.390.419.865,00



No	Uraian	2020	2019
11.	Pendapatan Hibah	23.352.000.000,00	23.184.000.000,00
12.	Penerimaan Lainnya	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.393.121.456.628,00</b>	<b>25.858.658.772.501,00</b>

Total arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp25.393.121.456.628,00 sedangkan total pada LRA tahun 2020 (5.1.1.1) sebesar Rp25.393.735.934.148,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp614.477.520,00. Perbedaan tersebut terjadi karena pada total arus masuk kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp614.477.520,00 (5.5.2.1).

#### 5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

**Rp11.139.173.309.780,00**

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Pajak Kendaraan Bermotor	4.579.535.646.300,00	4.618.496.197.625,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.228.465.305.800,00	3.414.320.120.325,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.719.403.821.612,00	1.925.488.927.109,00
4	Pajak Air Permukaan	16.056.164.261,00	14.320.954.591,00
5	Pajak Rokok	2.595.712.371.807,00	1.979.293.335.733,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.139.173.309.780,00</b>	<b>11.951.919.535.383,00</b>

#### 5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

**Rp93.279.121.699,00**

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.119.314.367,00	21.679.487.951,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	296.950.000,00	423.150.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	313.600.000,00	866.250.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.956.100.234,00	57.551.866.516,00
5	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal	731.126.000,00	1.420.464.000,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	479.788.100,00	244.651.125,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	1.679.542.500,00	8.193.290.120,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	5.827.626.900,00	1.635.834.473,00



No	Uraian	2020	2019
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.618.354.198,00	18.251.427.606,00
10	Retribusi Ijin Trayek	900.425.000,00	400.950.000,00
11	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	4.467.909.900,00	3.359.574.260,00
12	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	1.888.384.500,00	834.112.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.279.121.699,00</b>	<b>114.861.058.851,00</b>

**5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan Rp530.091.029.137,00**

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.300.000.000,00	6.900.000.000,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	375.777.399.480,00	375.785.087.827,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	70.890.351.223,00	64.720.183.641,00
4	Bagian Laba PDAB Slawi	5.450.000.000,00	5.165.089.945,00
5	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	-	4.369.395.306,00
6	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	3.003.617.427,00	6.724.559.080,00
7	Deviden PT. PRPP	380.000.000,00	-
8	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	30.069.580.225,00	25.532.244.618,00
9	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	31.658.604.782,00	18.887.993.402,00
10	Deviden PT. Jamkrida	6.561.476.000,00	4.617.440.120,00
<b>Jumlah</b>		<b>530.091.029.137,00</b>	<b>512.701.993.939,00</b>

**5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah Rp1.905.124.340.719,00**

Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.905.124.340.719,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp1.857.310.282.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	391,216,600.00	404,306,630.00
2	Penerimaan Jasa Giro	43,049,831,808.00	45,579,010,561.00
3	Penerimaan Bunga	76,236,609,714.00	209,219,800,205.00
4	Pendapatan Denda keterlambatan	1,453,371,334.00	2,570,086,629.00
5	Pendapatan Denda Pajak	58,794,221,327.00	156,599,380,154.00
6	Pendapatan Denda Retribusi	257,926,732.00	231,877,837.00
7	Pendapatan dari Pengembalian	7,070,704,654.00	4,639,173,684.00
8	Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	8,722,194,000.00	11,792,597,000.00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-LAK  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
9	Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5,018,870,000.00	75,144,785,050.00
10	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5,543,000.00	-
11	Penerimaan dari BLUD	1,696,912,608,091.00	1,345,947,127,745.00
12	Penerimaan Lain-Lain	6,989,661,459.00	5,182,137,295.00
13	Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah	221,582,000.00	-
<b>Jumlah</b>		<b>1,905,124,340,719.00</b>	<b>1,857,310,282,790.00</b>

**5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak**

**Rp843.392.119.954,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	50.209.290.661,00	40.987.300.000,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	589.959.276.398,00	309.094.940.713,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	203.223.552.895,00	214.208.143.121,00
<b>Jumlah</b>		<b>843.392.119.954,00</b>	<b>564.290.383.834,00</b>

**5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

**Rp16.888.016.587,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.888.016.587,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp11.677.937.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.171.078.354,00	2.391.839.400,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land Rent</i> )	-	-
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	-	-
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	953.548.771,00	-
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	12.093.116.943,00	-
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	8.754.774.600,00
7	Bagi Hasil dari Panas Bumi	648.100.727,00	506.160.200,00
8	Bagi Hasil dari Minerba	22.171.792,00	25.163.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.888.016.587,00</b>	<b>11.677.937.800,00</b>





#### 5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum

**Rp3.438.709.973.000,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.438.709.973.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp3.784.512.513.000,00.

#### 5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus

**Rp7.333.796.931.752,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.333.796.931.752,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp6.974.422.226.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
<b>1</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>350.564.240.958,00</b>	<b>267.101.813.252,00</b>
-	DAK Bidang Pendidikan	238.525.644.192,00	98.160.224.730,00
-	DAK Bidang Kesehatan	53.547.136.929,00	81.960.809.728,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	47.924.844.000,00	38.169.617.700,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	-	4.289.012.000,00
-	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.374.367.000,00	8.600.614.000,00
-	DAK Bidang Pertanian	1.180.833.087,00	13.965.000.000,00
-	DAK Bidang Kehutanan	1.202.707.750,00	16.046.291.094,00
-	DAK Bidang Pariwisata	5.808.708.000,00	3.221.409.000,00
-	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral	-	-
-	DAK Bidang Pasar	-	2.688.835.000,00
<b>2</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik</b>	<b>6.983.232.690.794,00</b>	<b>6.707.320.412.787,00</b>
-	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru	21.325.000,00	1.080.883.679.486,00
-	Bantuan Operasional Sekolah	5.918.126.510.000,00	5.610.770.120.000,00
-	Tunjangan Profesi Guru - PNSD	1.016.584.649.000,00	-
-	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	42.095.670.378,00	3.609.582.619,00
-	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	2.294.735.812,00	5.424.122.750,00
-	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	363.705.104,00	4.032.907.932,00
-	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	3.746.095.500,00	2.500.000.000,00
-	Dana Penyelenggaraan Kepariwisata	-	100.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.333.796.931.752,00</b>	<b>6.974.422.226.039,00</b>

#### 5.5.1.1.9. Dana Penyesuaian

**Rp68.212.455.000,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp68.212.455.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp62.388.421.000,00.



**5.5.1.1.10. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya** **Rp1.102.159.000,00**

Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.102.159.000,00 merupakan penerimaan kas dari Bagi Hasil Retribusi Ketep Pass dari Kabupaten Magelang dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.390.419.865,00.

**5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah** **Rp23.352.000.000,00**

Arus Kas Masuk berupa Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp23.184.000.000,00

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Hibah dari pemerintah	-	300.000.000,00
2	Sumbangan pihak ketiga jasa raharja	23.352.000.000,00	22.884.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.352.000.000,00</b>	<b>23.184.000.000,00</b>

**5.5.1.1.12. Penerimaan Lainnya** **Rp0,00**

Tidak ada Arus Kas Masuk Penerimaan Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

**5.5.1.2. Arus Keluar Kas** **Rp24.654.745.844.831,00**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.654.745.844.831,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp24.028.572.697.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Pembayaran Pegawai	6,483,761,623,794.00	6,591,844,741,578.00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	4,104,637,788,228.00	4,539,786,830,870.00
3	Pembayaran Hibah	5,593,181,623,109.00	5,155,826,080,751.00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	42,407,250,000.00	44,325,750,000.00
5	Belanja Tak Terduga	1,783,884,978,571.00	2,662,431,206.00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	4,633,245,749,888.00	5,248,472,302,270.00
7	Belanja Bantuan Keuangan	2,013,626,831,241.00	2,445,654,560,648.00
<b>Jumlah</b>		<b>24,654,745,844,831.00</b>	<b>24,028,572,697,323.00</b>

**5.5.1.2.1. Belanja Pegawai** **Rp6.483.761.623.794,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp6.591.844.741.578,00.



**5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa** **Rp4.104.637.788.228,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp4.539.786.830.870,00.

**5.5.1.2.3. Belanja Hibah** **Rp5.593.181.623.109,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00.

**5.5.1.2.4. Belanja Bantuan Sosial** **Rp42.407.250.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00.

**5.5.1.2.5. Belanja Tidak Terduga** **Rp1.783.884.978.571,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.783.884.978.571,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp2.662.431.206,00.

**5.5.1.2.6. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota** **Rp4.633.245.749.888,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.633.245.749.888,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp5.248.472.302.270,00.

**5.5.1.2.7. Belanja Bantuan Keuangan** **Rp2.013.626.831.241,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.013.626.831.241,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp2.445.654.560.648,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	845.543.195.241,00	1.050.916.112.049,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1.168.083.636.000,00	1.360.971.049.000,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	19.767.399.599,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya	-	14.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.013.626.831.241,00</b>	<b>2.445.654.560.648,00</b>



**5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan (Rp996.380.027.640,00)**

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp996.380.027.640,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar (Rp2.189.518.047.132,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Arus Masuk Kas	614.477.520,00	1.121.365.435,00
2	Arus Keluar Kas	996.994.505.160,00	2.190.639.412.567,00
		(996.380.027.640,00)	(2.189.518.047.132,00)

**5.5.2.1. Arus Masuk Kas Rp614.477.520,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp614.477.520,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.121.365.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
2.	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	238.835.520,00	525.149.111,00
3.	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	375.642.000,00	596.216.324,00
	<b>Jumlah</b>	<b>614.477.520,00</b>	<b>1.121.365.435,00</b>

**5.5.2.1.1. Pendapatan Penjualan atas Tanah Rp0,00**

Tidak terdapat arus kas masuk dari Penjualan atas tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

**5.5.2.1.2. Penjualan Peralatan dan Mesin Rp238.835.520,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp238.835.520,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp525.149.111,00.



#### 5.5.2.1.3. Penjualan Gedung dan Bangunan

**Rp375.642.000,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp375.642.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp596.216.324,00.

#### 5.5.2.2. Arus Keluar Kas

**Rp996.994.505.160,00**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp2.190.639.412.567,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1.	Belanja Tanah	14,338,900,293.00	170,898,817,539.00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	494,933,371,196.00	773,259,886,215.00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	195,773,603,473.00	539,370,887,071.00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	177,713,123,124.00	566,705,770,028.00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	113,376,388,074.00	135,116,530,714.00
6.	Belanja Aset Tidak Berwujud	859,119,000.00	5,287,521,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>996,994,505,160.00</b>	<b>2,190,639,412,567.00</b>

#### 5.5.2.2.1. Belanja Tanah

**Rp14.338.900.293,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00.

#### 5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

**Rp494.933.371.196,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp773.259.886.215,00.

#### 5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

**Rp195.773.603.473,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00.

#### 5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Rp177.713.123.124,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00.



#### 5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

**Rp113.376.388.074,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp135.116.530.714,00.

#### 5.5.2.2.6. Belanja Aset Tidak Berwujud

**Rp859.119.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tidak Berwujud periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp859.119.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 Rp5.287.521.000,00.

#### 5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

**Rp252.540.900,00**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar (Rp202.162.330.620,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

	2020	2019
1 Arus Masuk Kas	252.540.900,00	18.174.119.924,00
2 Arus Keluar Kas	-	220.336.450.544,00
	252.540.900,00	(202.162.330.620,00)

#### 5.5.3.1. Arus Masuk Kas

**Rp252.540.900,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp18.174.119.924,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Pengembalian Dana Talangan	-	-
3.	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	252.540.900,00	-
4.	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	-	140.403.868,00
5.	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	18.033.716.056,00
	<b>Jumlah</b>	<b>252.540.900,00</b>	<b>18.174.119.924,00</b>

#### 5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan

**Rp0,00**

Arus kas masuk dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Nihil dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 adalah Nihil.



#### 5.5.3.1.2. Pengembalian Dana Talangan

**Rp0,00**

Tidak ada arus kas masuk dari Pengembalian dana talangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

#### 5.5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pokok Piutang

**Rp252.540.900,00**

Arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Pokok Piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	74.375.000,00	-
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	13.000.000,00	-
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	15.165.900,00	-
4	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	150.000.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>252.540.900,00</b>	<b>-</b>

#### 5.5.3.1.4. Pengembalian Dana Bergulir

**Rp0,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pengembalian dana Bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp140.403.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	77.218.090,00
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	54.019.167,00
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	-	9.166.611,00
4	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>140.403.868,00</b>

#### 5.5.3.1.5. Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

**Rp0,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp18.033.716.056,00 pada RSUD dr. Moewardi.



### 5.5.3.2. Arus Keluar Kas

**Rp0,00**

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp220.336.450.544,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	180.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	-	40.336.450.544,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>220.336.450.544,00</b>

#### 5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

**Rp0,00**

Arus kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp180.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	PT. Bank Jateng	-	160.000.000.000,00
2	BPR-BKK	-	20.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>180.000.000.000,00</b>

#### 5.5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang

**Rp0,00**

Arus kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Utang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 adalah Rp40.336.450.544,00. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp40.336.450.544,00 merupakan pembayaran pinjaman tahun lalu sebesar Rp22.302.734.488,00 dan pembayaran pinjaman tahun ini sebesar Rp18.033.716.056,00 pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

### 5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

**(Rp68.878.789,00)**

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp68.878.789,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp192.078.519,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
1 Arus Masuk Kas	647.360.263.730,00	1.004.801.027.817,40
2 Arus Keluar Kas	647.429.142.519,00	1.004.608.949.298,40
	<b>(68.878.789,00)</b>	<b>192.078.519,00</b>





#### 5.5.4.1. Arus Masuk Kas

**Rp647.360.263.730,00**

Total arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.360.263.730,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.801.027.817,40 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	647.272.798.276,00	1.004.495.642.457,40
2.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	-	261.907.860,00
3.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	87.465.454,00	43.477.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>647.360.263.730,00</b>	<b>1.004.801.027.817,40</b>

#### 5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

**Rp647.272.798.276,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.272.798.276,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.495.642.457,40 yang terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1.	Pajak-pajak	305.896.495.529,00	730.087.482.880,20
2.	IWP	160.332.811.484,00	208.098.568.591,20
3.	Taperum	94.429.708,00	3.867.612.000,00
4.	Askes	180.949.061.555,00	62.441.978.986,00
<b>Jumlah</b>		<b>647.272.798.276,00</b>	<b>1.004.495.642.457,40</b>

#### 5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

**Tahun Anggaran Sebelumnya**

**Rp0,00**

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp261.907.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	-	4.676.360,00
2	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	-	100.500,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	-	57.131.000,00
4	KDH	-	200.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>261.907.860,00</b>



#### 5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun Anggaran Sebelumnya

**Rp87.465.454,00**

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp87.465.454,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp43.477.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Dinas Pendidikan	17.894.128,00	-
2	Dinas Kesehatan	15.402.754,00	-
3	Dinas Perhubungan	41.957.000,00	23.972.500,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.211.572,00	19.505.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>87.465.454,00</b>	<b>43.477.500,00</b>

#### 5.5.4.2. Arus Keluar Kas

**Rp647.429.142.519,00**

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.429.142.519,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.608.949.298,40 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	647.272.798.276,00	1.004.495.642.457,40
2	Kas di Bend Penerimaan Tahun Berjalan	102.386.400,00	113.306.841,00
3	Kas di Bend Pengeluaran – Sisa UUDP Tahun Berjalan	18.040.000,00	-
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	35.917.843,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>647.429.142.519,00</b>	<b>1.004.608.949.298,40</b>

#### 5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

**Rp647.272.798.276,00**

Arus kas keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.272.798.276,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.495.642.457,40 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1.	Pajak-pajak	305.896.495.529,00	730.087.482.880,20
2.	IWP	160.332.811.484,00	208.098.568.591,20
3.	Taperum	94.429.708,00	3.867.612.000,00
4.	Askes	180.949.061.555,00	62.441.978.986,00
<b>Jumlah</b>		<b>647.272.798.276,00</b>	<b>1.004.495.642.457,40</b>



**5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan** **Rp102.386.400,00**

Arus kas keluar berupa kas di Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp102.386.400,00 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp113.306.841,00.

**5.5.4.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan** **Rp18.040.000,00**

Arus kas keluar berupa pengiriman kas ke Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dipertanggungjawabkan dan disetor kembali ke Rekening Kas Daerah atau ke Kas Negara sebesar Rp18.040.000,00 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp0,00.

**5.5.4.2.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah** **Rp35.917.843,00**

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp35.917.843,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2019 pada kas Bendahara Sekolah dan untuk tahun 2019 sebesar Rp0,00.

**5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas** **(Rp257.820.753.732,00)**

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp257.820.753.732,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar (Rp561.402.224.055,00) yang berasal dari:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	738,357,901,797.00	1,830,086,075,178
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(996,380,027,640.00)	(2,189,518,047,132)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	252,540,900.00	(202,162,330,620.00)
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(51,168,789.00)	192,078,519.00
	<b>Jumlah</b>	<b>(257,820,753,732.00)</b>	<b>(561,402,224,055)</b>

**5.5.6. Saldo Akhir Kas** **Rp861.223.386.127,00**

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp861.223.386.127,00 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp1.009.208.103.374,72 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2020 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1.	Saldo Awal Kas BUD	837,445,123,013.00	1,443,326,975,483.00
2.	Saldo Awal Kas BLUD	171,762,980,362.00	127,283,351,946.72
3.	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah	109,836,036,484.00	
2.	Kenaikan/Penurunan Kas	(257,820,753,732.00)	(561,402,224,055.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>861,223,386,127.00</b>	<b>1,009,208,103,374.72</b>



### 5.5.7. Saldo Akhir Kas

**Rp864.937.343.735,87**

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Sekolah dan Kas Lainnya pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp864.937.343.735,87 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp1.128.298.517.539,99 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Kas Di Kas Daerah	861.223.386.127,00	1.009.208.103.375,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	18.040.000,00	150.789.514,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	120.536.400,00	113.640.454,00
4	Kas Di Bendahara BLUD	668.788.049,87	1.129.476.139,00
5	Kas Di Bendahara Sekolah	249.993.159,00	117.696.508.057,99
6	Kas Lainnya	2.656.600.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>864.937.343.735,87</b>	<b>1.128.298.517.539,99</b>

Dari saldo akhir kas sebesar Rp864.937.343.735,87 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.593.531.208,87. Selisih tersebut terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.150.000,00 yang merupakan uang titipan pendapatan; uang muka pasien di Rumah Sakit Rp668.788.049,87, Kas di Bendahara Sekolah karena pajak yang disetor tahun 2021 sebesar Rp249.993.159,00, dan Kas Lainnya berupa dana hibah penanganan Covid-19 sebesar Rp555.600.000,00 dan Sisa Dana Bantuan Siswa Miskin pada Rekening Penampungan BSM di Bank Jateng sebesar Rp2.101.000.000,00.



## 5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	37.100.999.040.516,25	35.912.461.766.740,40	1.188.537.273.775,80	3,31
2	Surplus/Defisit-LO	(417.421.893.335,80)	2.170.605.991.633,79	(2.588.027.884.969,59)	(119,23)
3	RK-PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	(285.936.654.745,67)	(982.068.717.857,93)	696.132.063.112,26	(70,88)
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>36.397.640.492.434,77</b>	<b>37.100.999.040.516,25</b>	<b>(703.358.548.081,53)</b>	<b>(1,90)</b>

### 5.6.1 Ekuitas Awal

**Rp37.100.999.040.516,25**

Saldo Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp37.100.999.040.516,25 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	8.098.555.752.452,35	8.076.570.118.569,16	21.985.633.883,19	0,27
2	Dinas Pendidikan	7.269.506.135.723,93	6.524.180.269.784,96	745.325.865.938,97	11,42
3	Dinas Kesehatan	259.997.636.603,04	399.491.428.086,63	(139.493.791.483,59)	(34,92)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	716.785.687.770,27	735.428.653.767,21	(18.642.965.996,94)	(2,53)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	641.891.479.065,83	613.790.069.781,62	28.101.409.284,21	4,58
6	RSUD Tugurejo Semarang	327.415.560.912,99	322.806.576.832,76	4.608.984.080,23	1,43
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	810.757.568.411,83	816.974.531.309,61	(6.216.962.896,78)	(0,76)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	223.426.910.867,24	202.697.863.968,81	20.729.046.898,43	10,23
9	RSJD Surakarta	151.293.763.684,26	126.462.534.999,93	24.831.228.684,33	19,64
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	81.947.747.764,71	87.952.518.498,09	(6.004.770.733,38)	(6,83)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	6.085.551.226.706,64	6.070.581.665.640,09	14.969.561.066,55	0,25
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	6.099.649.625.583,80	6.011.925.529.907,78	87.724.095.676,02	1,46
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	26.609.520.885,39	10.522.199.212,38	16.087.321.673,01	152,89
14	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	134.899.909.675,94	134.730.461.561,30	169.448.114,64	0,13
15	Dinas Perhubungan	328.807.050.915,93	241.332.575.412,84	87.474.475.503,09	36,25
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76.304.138.151,45	71.824.207.355,84	4.479.930.794,61	6,24
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	13.388.804.363,28	17.343.444.998,28	(3.954.640.635,00)	(22,80)
18	Dinas Sosial	262.407.239.816,82	248.112.445.127,54	14.294.794.689,28	5,76
19	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.558.883.751,28	15.232.784.606,85	(673.900.855,57)	(4,42)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	140.456.912.261,18	134.894.065.326,77	5.562.846.934,41	4,12
21	Dinas Koperasi dan UMKM	35.766.399.993,09	34.767.738.465,17	998.661.527,92	2,87
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.219.769.393,50	16.253.223.728,64	(33.454.335,14)	(0,21)



*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*  
*Catatan atas Laporan Keuangan-LPE*  
*untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019*

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
23	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	795.145.562.981,06	437.080.088.466,88	358.065.474.514,18	81,92
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.999.459.834,30	18.069.797.441,50	(70.337.607,20)	(0,39)
25	Satuan Polisi Pamong Praja	21.234.181.408,45	20.788.151.446,38	446.029.962,07	2,15
26	Sekretariat Daerah	259.777.126.433,47	261.586.280.532,18	(1.809.154.098,71)	(0,69)
27	Sekretariat DPRD	48.114.206.497,63	45.115.351.023,02	2.998.855.474,61	6,65
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.801.449.650.284,19	1.919.526.450.322,37	(118.076.800.038,18)	(6,15)
29	Inspektorat	9.173.175.518,12	9.969.301.962,67	(796.126.444,55)	(7,99)
30	Badan Penghubung	21.877.040.342,29	22.316.337.612,65	(439.297.270,36)	(1,97)
31	Badan Pengembangan SDM Daerah	157.996.738.602,60	159.438.714.391,93	(1.441.975.789,33)	(0,90)
32	Badan Kepegawaian Daerah	16.447.469.504,29	16.417.241.121,88	30.228.382,41	0,18
33	KDH dan Wakil KDH	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
34	Dinas Ketahanan Pangan	15.112.821.565,94	13.688.530.223,97	1.424.291.341,97	10,40
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Cakil	17.452.092.359,13	16.464.040.810,20	988.051.548,93	6,00
36	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	35.690.007.598,05	37.168.608.782,93	(1.478.601.184,88)	(3,98)
37	Dinas Pertanian dan Perkebunan	969.019.688.305,35	967.917.393.474,80	1.102.294.830,55	0,11
38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	407.025.709.813,35	391.389.192.538,80	15.636.517.274,55	4,00
39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	116.723.061.413,37	120.331.477.686,58	(3.608.416.273,21)	(3,00)
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	293.484.352.436,55	272.413.491.413,45	21.070.861.023,10	7,73
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	103.865.320.273,53	102.469.380.637,73	1.395.939.635,80	1,36
42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	140.699.400.158,19	138.793.775.429,69	1.905.624.728,50	1,37
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.514.250.431,63	27.443.254.478,53	9.070.995.953,10	33,05
<b>Jumlah</b>		<b>37.100.999.040.516,25</b>	<b>35.912.461.766.740,40</b>	<b>1.188.537.273.775,80</b>	<b>3,31</b>

### 5.6.2 Surplus/Defisit – LO

**(Rp417.421.893.335,80)**

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp417.421.893.335,80) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2020. dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(1.998.147.711.572,38)	(159.963.301.745,28)	(1.838.184.409.827,10)	1.149,13
2	Dinas Pendidikan	(5.792.904.133.517,97)	(5.330.385.010.458,73)	(462.519.123.059,24)	8,68
3	Dinas Kesehatan	(243.278.502.952,55)	(581.423.291.849,92)	338.144.788.897,37	(58,16)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(106.554.975.746,43)	(202.757.482.458,50)	96.202.506.712,07	(47,45)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(128.924.078.719,33)	(82.522.934.681,85)	(46.401.144.037,48)	56,23
6	RSUD Tugurejo Semarang	(114.059.999.427,00)	(99.838.650.227,78)	(14.221.349.199,22)	14,24
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(64.290.354.208,50)	(59.469.993.015,03)	(4.820.361.193,47)	8,11
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(72.154.345.121,28)	(56.335.121.258,17)	(15.819.223.863,11)	28,08
9	RSJD Surakarta	(71.331.168.554,47)	(82.448.477.312,67)	11.117.308.758,20	(13,48)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(40.954.277.177,22)	(46.895.783.632,94)	5.941.506.455,72	(12,67)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(690.053.804.281,73)	(868.135.518.451,11)	178.081.714.169,38	(20,51)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(168.714.568.656,94)	(204.139.791.941,98)	35.425.223.285,04	(17,35)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-LPE  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(30.298.910.667,83)	(32.788.301.954,99)	2.489.391.287,16	(7,59)
14	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(45.565.241.191,58)	(65.562.745.382,86)	19.997.504.191,28	(30,50)
15	Dinas Perhubungan	(120.063.431.697,23)	(103.973.481.765,43)	(16.089.949.931,80)	15,48
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	(72.011.734.578,53)	(67.187.335.542,90)	(4.824.399.035,63)	7,18
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(153.001.829.877,63)	(220.715.160.008,39)	67.713.330.130,76	(30,68)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(20.843.029.858,25)	(32.975.601.843,70)	12.132.571.985,45	(36,79)
19	Dinas Sosial	(205.454.100.611,36)	(218.534.693.787,72)	13.080.593.176,36	(5,99)
20	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(18.216.112.976,81)	(33.583.979.912,57)	15.367.866.935,76	(45,76)
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(90.285.432.956,47)	(110.386.541.115,71)	20.101.108.159,24	(18,21)
22	Dinas Koperasi dan UMKM	(56.744.550.127,64)	(81.451.759.484,08)	24.707.209.356,44	(30,33)
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(19.509.897.349,02)	(30.732.950.915,14)	11.223.053.566,12	(36,52)
24	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(89.007.395.877,82)	(173.219.989.991,32)	84.212.594.113,50	(48,62)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(25.818.629.401,07)	(61.539.663.100,20)	35.721.033.699,13	(58,05)
26	Satuan Polisi Pamong Praja	(24.805.957.716,32)	(35.204.636.515,93)	10.398.678.799,61	(29,54)
27	KDH dan Wakil KDH	(21.553.175.590,00)	(21.746.715.361,00)	193.539.771,00	(0,89)
28	DPRD	(97.720.954.647,00)	(82.489.271.182,00)	(15.231.683.465,00)	18,47
29	Sekretariat Daerah	(169.149.931.261,86)	(236.821.415.885,27)	67.671.484.623,41	(28,57)
30	Sekretariat DPRD	(198.711.163.889,91)	(165.459.613.287,39)	(33.251.550.602,52)	20,10
31	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.091.136.750.540,70	12.731.069.453.235,70	(1.639.932.702.695,00)	(12,88)
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.449.403.520,01	(63.294.406.536,82)	130.743.810.056,83	(206,56)
33	Inspektorat	(29.458.816.529,17)	(44.806.383.841,55)	15.347.567.312,38	(34,25)
34	Badan Penghubung	(17.299.588.421,89)	(23.951.534.996,36)	6.651.946.574,47	(27,77)
35	Badan Pengembangan SDM Daerah	(44.016.673.501,19)	(49.937.991.428,33)	5.921.317.927,14	(11,86)
36	Badan Kepegawaian Daerah	(43.909.028.913,55)	(95.837.430.182,59)	51.928.401.269,04	(54,18)
37	Dinas Ketahanan Pangan	(33.015.661.849,35)	(38.161.371.797,58)	5.145.709.948,23	(13,48)
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(25.430.630.206,43)	(39.729.707.654,07)	14.299.077.447,64	(35,99)
39	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(34.595.861.875,80)	(44.941.696.621,88)	10.345.834.746,08	(23,02)
40	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(210.683.376.289,13)	(258.963.972.336,68)	48.280.596.047,55	(18,64)
41	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(62.250.446.098,80)	(101.293.615.248,45)	39.043.169.149,65	(38,54)
42	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(65.454.290.646,27)	(81.266.134.642,96)	15.811.843.996,69	(19,46)
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.807.096.691,99	(84.865.513.701,90)	94.672.610.393,89	(111,56)
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(69.571.369.544,87)	(84.724.488.542,18)	15.153.118.997,31	(17,89)
	<b>Jumlah</b>	<b>(417.421.893.335,80)</b>	<b>2.170.605.991.633,79</b>	<b>(2.588.027.884.969,59)</b>	<b>(119,23)</b>

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp285.936.654.745,67)

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp285.936.654.745,67) dengan rincian sebagai berikut:



(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	2.039.240.769,90	(0,43)	2.039.240.770,33	(474.242.039.611,63)
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	184.531.390.819,75	(665.174.567.020,50)	849.705.957.840,25	(127,74)
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	(21.023.913.390,77)	(432.247.541.976,95)	411.223.628.586,18	(95,14)
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	7.679.629.671,00	4.925.490.995,08	2.754.138.675,92	55,92
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	(11.548.482.579,00)	-	(11.548.482.579,00)	-
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	11.548.482.579,00	-	11.548.482.579,00	-
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	(449.774.852.613,76)	(70.413.758.773,13)	(379.361.093.840,63)	538,76
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	44.265.036.083,00	138.831.146.375,78	(94.566.110.292,78)	(68,12)
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	1.214.748.675,98	47.234.322.432,41	(46.019.573.756,43)	(97,43)
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	(47.343.787.412,00)	(40.707.258.219,00)	(6.636.529.193,00)	16,30
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	(408.019.400,00)	(70.718.000,00)	(337.301.400,00)	476,97
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	(1.676.151.463,25)	35.535.968.814,70	(37.212.120.277,95)	(104,72)
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	2.487.500,00	2.947.500,00	(460.000,00)	(15,61)
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	(5.442.463.983,84)	15.250.016,00	(5.457.713.999,84)	(35.788,25)
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	(1,68)	(1,89)	(0,21)	11,11
<b>Jumlah</b>		<b>(285.936.654.745,67)</b>	<b>(982.068.717.857,93)</b>	<b>696.132.063.112,26</b>	<b>(70,88)</b>

### 5.6.3.1 Koreksi/Penyesuaian Kas

**Rp2.039.240.769,90**

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar Rp2.039.240.769,90 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	2.101.000.000,00	-	2.101.000.000,00	-
2	Dinas Pendidikan	(61.759.230,00)	-	(61.759.230,00)	-
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(0,10)	(0,43)	0,33	(76,75)
<b>Jumlah</b>		<b>2.039.240.769,90</b>	<b>(0,43)</b>	<b>2.039.240.770,33</b>	<b>(474.242.039.611,63)</b>

Koreksi/Penyesuaian Kas pada SKPKD sebesar Rp2.101.000.000,00 ini merupakan koreksi atas penyajian Sisa Dana Bantuan Siswa Miskin untuk siswa SMA/SMK/SLB tahun 2018 dan 2019 pada rekening Penampungan BSM di Bank Jateng.

Koreksi/Penyesuaian Kas pada Dinas Pendidikan disebabkan oleh:

1. Koreksi atas kesalahan pengakuan bunga bank sebagai komponen kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Tahun 2019 yang merupakan saldo uang pribadi bendahara untuk pembukaan rekening sebesar (Rp25.841.387,00); dan
2. Koreksi atas kesalahan pengakuan saldo kas di Bendahara Sekolah atas dana BOS dan BOP Tahun





2019 yang merupakan uang pribadi bendahara sebesar (Rp35.917.843,00).

3. Koreksi/Penyesuaian Kas pada RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp0,10) ini merupakan koreksi atas penyajian saldo awal Kas di Bendahara BLUD pada rekening Bank Mandiri.

### 5.6.3.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang

**Rp184.531.390.819,75**

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar Rp 184.531.390.819,75 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	142.886.704.457,73	(20.544.128.405,00)	163.430.832.862,73	(795,51)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(166.844.694,25)	(917.605.456,50)	750.760.762,25	(81,82)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	13.993.945.697,00	9.520.829.942,00	4.473.115.755,00	46,98
4	RSUD Tugurejo Semarang	(374.178.272,00)	(58.309.098,00)	(315.869.174,00)	541,72
5	RSJD Surakarta	-	2.360.329.299,00	(2.360.329.299,00)	(100,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	79.682.551,00	(79.682.551,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	(251.495.400,00)	251.495.400,00	(100,00)
8	Dinas Perhubungan	-	377.140,00	(377.140,00)	(100,00)
9	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	98,00	-	98,00	-
10	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.974.366.273,00	(655.364.247.593,00)	682.338.613.866,00	(104,12)
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.217.397.260,27	-	1.217.397.260,27	-
<b>Jumlah</b>		<b>184.531.390.819,75</b>	<b>(665.174.567.020,50)</b>	<b>849.705.957.840,25</b>	<b>(127,74)</b>

Penyebab Koreksi/Penyesuaian Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di SKPKD sebesar Rp142.886.704.457,73, karena:
  - Koreksi kurang ekuitas atas pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito ke BPKAD karena anggaran bunga deposito berada di BPKAD sebesar (Rp1.217.397.260,27).
  - Koreksi tambah ekuitas atas pengakuan piutang transfer pusat-dana perimbangan Tahun 2019 berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 sebesar Rp197.280.569.342,00.
  - Koreksi kurang ekuitas atas saldo piutang transfer-dana perimbangan Tahun 2019 sebesar (Rp64.737.220.203,00) berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 yang antara lain menyatakan pengakuan kurang salur dan lebih salur berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 sudah tidak berlaku.
  - Koreksi tambah ekuitas atas kurang pengakuan saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2019 sebesar Rp12.270.000,00.
  - Koreksi tambah ekuitas atas reklasifikasi dari investasi non permanen-dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar Rp11.548.482.579,00.
2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp166.844.694,25) disebabkan adanya pencatatan ganda serta kesalahan pengakuan Piutang Lainnya pada periode Tahun 2019.



3. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp13.993.945.697,00 karena kurang pengakuan piutang pasien umum dan pasien jaminan Tahun 2019 sebesar Rp14.681.237.229,00 dan lebih catat pengakuan piutang Tahun 2029 karena verifikasi oleh pihak penjamin sebesar (Rp687.291.532,00).
4. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Tugurejo Semarang sebesar (Rp374.178.272,00) karena adanya lebih pengakuan piutang BPJS disebabkan selisih klaim Piutang Tahun 2019.
5. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp98,00 karena selisih pencatatan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah dibandingkan dokumen sumbernya.
6. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp26.974.366.273,00 merupakan penyesuaian atas penetapan pajak berdasarkan tahun berkenaan sebesar Rp34.159.910.656,00 dan penghapusan pajak sebesar (Rp7.185.544.383,00).
7. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan adanya pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito dari SKPKD sebesar Rp1.217.397.260,27.

#### 5.6.3.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang

(Rp21.023.913.390,77)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp21.023.913.390,77) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(8.745.328.174,37)	102.720.642,03	(8.848.048.816,39)	(8,613,70)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	3.607.394,23	916.920.427,00	(913.313.032,77)	(99,61)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(974.898.840,30)	68.153.182,56	(1.043.052.022,86)	(1,530,45)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	54.554.987,00	(54.554.987,00)	(100,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	132.790.208,50	(132.790.208,50)	(100,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	(398.412,83)	398.412,83	(100,00)
7	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(98,00)	-	(98,00)	-
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(11.301.206.686,03)	(433.522.281.125,50)	422.221.074.439,47	(97,39)
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.086.986,30)	-	(6.086.986,30)	-
10	Dinas Perhubungan	-	(1.885,70)	1.885,70	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(21.023.913.390,77)</b>	<b>(432.247.541.976,95)</b>	<b>411.223.628.586,18</b>	<b>(95,14)</b>

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi kurang ekuitas di SKPKD berupa penyesuaian penyisihan atas pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito ke BPKAD sebesar Rp6.086.986,30 dan penghapusan Penyisihan Piutang Transfer tahun sebelumnya sebesar Rp2.797.067.418,33 berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Serta koreksi tambah ekuitas atas reklasifikasi dana



- bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar (Rp11.548.482.579,00).
2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp3.607.394,23 merupakan penyesuaian penyisihan atas penyesuaian pencatatan ganda serta kesalahan pengakuan Piutang Askes pada periode sebelumnya.
  3. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar (Rp974.898.840,30) karena penyesuaian pengakuan piutang pasien umum dan pasien jaminan Tahun 2019 yang belum diajukan dan verifikasi oleh pihak penjamin.
  4. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebesar (Rp98,00) karena penyesuaian pencatatan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah dibandingkan dokumen sumbernya.
  5. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar (Rp11.301.206.686,03) karena penyesuaian penetapan pajak berdasarkan tahun berkenaan serta adanya koreksi atas penghapusan pajak karena kadaluarsa.
  6. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp6.086.986,30) karena penyesuaian penyisihan atas pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito dari SKPKD.

#### 5.6.3.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan

**Rp7.679.629.671,00**

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp7.679.629.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Kelet/Donorejo	-	81.552.934,08	(81.552.934,08)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	-	4.079.288.461,00	(4.079.288.461,00)	(100,00)
3	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.767.429.671,00	-	5.767.429.671,00	-
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.912.200.000,00	764.649.600,00	1.147.550.400,00	150,08
<b>Jumlah</b>		<b>7.679.629.671,00</b>	<b>4.925.490.995,08</b>	<b>2.754.138.675,92</b>	<b>55,92</b>

Koreksi/penyesuaian persediaan disebabkan karena adanya saldo persediaan awal yang belum tercatat berupa Logistik pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.767.429.671,00 dan Bibit Ternak Sapi, Kambing, dan Domba pada Taman Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.912.200.000,00.

#### 5.6.3.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen

**(Rp11.548.482.579,00)**

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar (Rp11.548.482.579,00) merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.



(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(11.548.482.579,00)	-	(11.548.482.579,00)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(11.548.482.579,00)</b>	<b>-</b>	<b>(11.548.482.579,00)</b>	<b>-</b>

#### 5.6.3.6 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen **Rp11.548.482.579,00**

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp11.548.482.579,00 merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	11.548.482.579,00	-	11.548.482.579,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>11.548.482.579,00</b>	<b>-</b>	<b>11.548.482.579,00</b>	<b>-</b>

#### 5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen **(Rp449.774.852.613,76)**

Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen sebesar (Rp449.774.852.613,76) merupakan koreksi pada SKPKD atas perubahan nilai Investasi pada BUMD berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(449.774.852.613,76)	(70.413.758.773,13)	(379.361.093.840,63)	538,76
	<b>Jumlah</b>	<b>(449.774.852.613,76)</b>	<b>(70.413.758.773,13)</b>	<b>(379.361.093.840,63)</b>	<b>538,76</b>

#### 5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap **Rp44.265.036.083,00**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp44.265.036.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(196.144.404.987,00)	(5.311.718.533,22)	(190.832.686.453,78)	3.592,67
2	Dinas Pendidikan	24.712.150.705,00	112.757.658.166,00	(88.045.507.461,00)	(78,08)
3	Dinas Kesehatan	18.858.340.695,00	(1.353.902.593,00)	20.212.243.288,00	(1.492,89)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	5.890.000.866,00	58.198.299.717,00	(52.308.298.851,00)	(89,88)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	7.012.190.699,00	(556.664.280,00)	7.568.854.979,00	(1.359,68)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(556.672.965,00)	(496.326.206,00)	(60.346.759,00)	12,16
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	941.627.273,00	(131.793.521,00)	1.073.420.794,00	(814,47)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	662.924.729,00	(387.911.592,00)	1.050.836.321,00	(270,90)
9	RSJD Surakarta	688.473.485,00	(624.882.796,00)	1.313.356.281,00	(210,18)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	688.917.482,00	(286.939.150,00)	975.856.632,00	(340,09)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	4.406.249.627,00	(44.228.691.926,00)	48.634.941.553,00	(109,96)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	12.622.240.000,00	6.340.528.252,00	6.281.711.748,00	99,07
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	640.337.000,00	15.657.236.000,00	(15.016.899.000,00)	(95,91)
14	Dinas Perhubungan	359.222.000,00	10.278.031.773,00	(9.918.809.773,00)	(96,50)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-LPE  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.011.431.000,00	898.577.005,00	51.112.853.995,00	5.688,20
16	Dinas Sosial	1.997.564.136,00	1.722.299.108,00	275.265.028,00	15,98
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.942.400,00	(1.529.360.535,00)	1.589.302.935,00	(103,92)
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.699.079.500,00	(458.703.766,00)	4.157.783.266,00	(906,42)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	59.034.863,00	(4.405.352.420,00)	4.464.387.283,00	(101,34)
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(176.550.000,00)	229.831.183,00	(406.381.183,00)	(176,82)
21	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(191.973.338,00)	5.327.249.522,00	(5.519.222.860,00)	(103,60)
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(105.597.101,00)	105.597.101,00	(100,00)
23	Satuan Polisi Pamong Praja	-	(61.772.000,00)	61.772.000,00	(100,00)
24	Sekretariat Daerah	(4.317.819.011,00)	1.932.501.116,00	(6.250.320.127,00)	(323,43)
25	Sekretariat DPRD	612.668.000,00	(2.349.060.515,00)	2.961.728.515,00	(126,08)
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	418.941.362,00	(2.042.708.603,00)	2.461.649.965,00	(120,51)
27	Badan Penghubung	(803.077.791,00)	(98.719.282,00)	(704.358.509,00)	713,50
28	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	(676.345.483,00)	676.345.483,00	(100,00)
29	Badan Kepegawaian Daerah	653.971.453,00	(475.062.463,00)	1.129.033.916,00	(237,66)
30	Dinas Ketahanan Pangan	-	7.477.370.935,00	(7.477.370.935,00)	(100,00)
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	-	(136.840.022,00)	136.840.022,00	(100,00)
32	Dinas Komunikasi dan Informasi	(678.020.000,00)	(586.355.302,00)	(91.664.698,00)	15,63
33	Dinas Koperasi dan UMKM	5.210.160.000,00	(274.424.700,00)	5.484.584.700,00	(1.998,58)
34	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	57.800.000,00	100.585.574,00	(42.785.574,00)	(42,54)
35	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(949.207.600,00)	(7.374.172.735,00)	6.424.965.135,00	(87,13)
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	(261.560.000,00)	2.113.193.628,00	(2.374.753.628,00)	(112,38)
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	104.675.000.000,00	(343.000.305,00)	105.018.000.305,00	(30.617,47)
38	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	(12.243.191.057,00)	12.243.191.057,00	(100,00)
39	Inspektorat	-	(110.644.509,00)	110.644.509,00	(100,00)
40	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	(42.840.975,00)	42.840.975,00	(100,00)
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.302.582.500,00	3.130.530.731,00	(1.827.948.231,00)	(58,39)
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	103.472.000,00	(639.763.964,00)	743.235.964,00	(116,17)
<b>Jumlah</b>		<b>44.265.036.083,00</b>	<b>138.831.146.375,78</b>	<b>(94.566.110.292,78)</b>	<b>(68,12)</b>

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini antara lain disebabkan oleh penilaian Aset Tetap yang belum tercatat pada KIB dan Neraca sebesar Rp90.051.933.627,00 serta adanya pengurangan nilai aset tetap karena salah penyajian dan dobel pencatatan pada KIB sebesar (Rp45.786.897.544,00).



### 5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Rp1.214.748.675,98

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp1.214.748.675,98 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(2.373.589.323,00)	7.612.098.796,80	(9.985.688.119,80)	(131,18)
2	Dinas Pendidikan	(6.165.415.753,41)	(14.277.812.600,04)	8.112.396.846,63	(56,82)
3	Dinas Kesehatan	-	1.611.598.476,33	(1.611.598.476,33)	(100,00)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	304.200.000,00	(58.191.374.717,00)	58.495.574.717,00	(100,52)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	504.739.000,00	556.664.280,00	(51.925.280,00)	(9,33)
6	RSUD Tugurejo Semarang	556.672.965,00	486.666.556,00	70.006.409,00	14,38
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	131.793.521,00	(131.793.521,00)	(100,00)
8	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	386.824.092,00	(386.824.092,00)	(100,00)
9	RSJD Surakarta	-	621.040.297,00	(621.040.297,00)	(100,00)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	264.393.231,00	246.027.550,00	18.365.681,00	7,46
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	4.049.356.212,00	105.373.638.468,86	(101.324.282.256,86)	(96,16)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	326.430.840,00	115.589.748,00	210.841.092,00	182,40
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(12.806.740,00)	242.764.000,00	(255.570.740,00)	(105,28)
14	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	49.748.018,50	(49.748.018,50)	(100,00)
15	Dinas Perhubungan	(161.739.762,61)	(556.248.947,75)	394.509.185,14	(70,92)
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	678.020.000,00	509.083.752,00	168.936.248,00	33,18
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(53.222.520,00)	(194.718.779,00)	141.496.259,00	(72,67)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(59.034.863,00)	768.697.492,70	(827.732.355,70)	(107,68)
19	Dinas Sosial	(1.781.064.136,00)	1.133.121.462,00	(2.914.185.598,00)	(257,18)
20	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	332.527.675,00	(332.527.675,00)	(100,00)
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.759.704.662,50)	1.178.749.627,12	(2.938.454.289,62)	(249,29)
22	Dinas Koperasi dan UMKM	(212.630.000,00)	274.424.700,00	(487.054.700,00)	(177,48)
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	178.620.000,00	(177.142.264,00)	355.762.264,00	(200,83)
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	105.597.101,00	(105.597.101,00)	(100,00)
25	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	191.973.338,00	(794.522.623,50)	986.495.961,50	(124,16)
26	Satuan Polisi Pamong Praja	-	61.772.000,00	(61.772.000,00)	(100,00)
27	Sekretariat Daerah	6.341.917.495,25	(3.283.941.971,44)	9.625.859.466,69	(293,12)
28	Sekretariat DPRD	(1.191.960,00)	2.349.060.515,00	(2.350.252.475,00)	(100,05)
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	50.193.571,25	2.190.297.603,00	(2.140.104.031,75)	(97,71)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.201.250,00	(886.883.607,68)	990.084.857,68	(111,64)
31	Inspektorat	-	110.644.509,00	(110.644.509,00)	(100,00)
32	Badan Penghubung	803.077.791,00	102.558.032,00	700.519.759,00	683,05
33	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	676.345.483,00	(676.345.483,00)	(100,00)
34	Badan Kepegawaian Daerah	(592.058.273,00)	556.393.463,00	(1.148.451.736,00)	(206,41)
35	Dinas Ketahanan Pangan	-	(5.554.662.624,45)	5.554.662.624,45	(100,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Catatan atas Laporan Keuangan-LPE  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Cakil	-	136.840.022,00	(136.840.022,00)	(100,00)
37	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(14.450.000,00)	(275.567.824,00)	261.117.824,00	(94,76)
38	Dinas Pertanian dan Perkebunan	103.084.976,00	1.755.288.537,23	(1.652.203.561,23)	(94,13)
39	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	342.425.305,00	(342.425.305,00)	(100,00)
40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1.464.279.931,75	(1.464.279.931,75)	(100,00)
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.248.000,00	(694.914.588,00)	744.162.588,00	(107,09)
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(103.472.000,00)	639.551.963,98	(743.023.963,98)	(116,18)
<b>Jumlah</b>		<b>1.214.748.675,98</b>	<b>47.234.322.432,41</b>	<b>(46.019.573.756,43)</b>	<b>(97,43)</b>

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan ini disebabkan adanya Penyajian Tambah nilai Penyusutan atas aset tetap yang belum tercatat sebesar (Rp28.262.319.225,94) dan Penyesuaian Kurang nilai Penyusutan sebesar Rp29.477.067.901,92.

#### 5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya **(Rp47.343.787.412,00)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp47.343.787.412,00) disebabkan oleh adanya penyajian nilai Aset Tak Berwujud yang belum tercatat pada KIB sebesar Rp1.085.918.500,00, koreksi atas penambahan Aset Tak Berwujud yang belum tercatat sebesar Rp4.161.865.088,00, penyajian kurang karena kesalahan pencatatan pada Aset Tak Berwujud sebesar (Rp20.000.000,00), dan aset lainnya sebesar (Rp52.571.571.000,00).

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan	-	(215.745.055,00)	215.745.055,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	140.850.000,00	-	140.850.000,00	-
3	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	-	(40.273.665.489,00)	40.273.665.489,00	(100,00)
4	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(52.432.571.000,00)	-	(52.432.571.000,00)	-
5	Dinas Perhubungan	-	(288.787.675,00)	288.787.675,00	(100,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.500.000,00	-	29.500.000,00	-
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	374.885.500,00	-	374.885.500,00	-
8	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	211.648.338,00	-	211.648.338,00	-
9	Sekretariat Daerah	3.861.216.750,00	(282.650.000,00)	4.143.866.750,00	(1.466,08)
10	Sekretariat DPRD	206.100.000,00	-	206.100.000,00	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	353.590.000,00	(353.590.000,00)	(100,00)
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	299.583.000,00	-	299.583.000,00	-
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(50.000.000,00)	-	(50.000.000,00)	-
<b>Jumlah</b>		<b>(47.343.787.412,00)</b>	<b>(40.707.258.219,00)</b>	<b>(6.636.529.193,00)</b>	<b>16,30</b>



### 5.6.3.11 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi

(Rp408.019.400,00)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp408.019.400,00) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Kesehatan	(124.400.000,00)	-	(124.400.000,00)	-
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(70.718.000,00)	70.718.000,00	(100,00)
3	Dinas Sosial	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(5.900.000,00)	-	(5.900.000,00)	-
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(187.502.800,00)	-	(187.502.800,00)	-
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(3.000.000,00)	-	(3.000.000,00)	-
7	Sekretariat DPRD	(41.220.000,00)	-	(41.220.000,00)	-
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(49.996.600,00)	-	(49.996.600,00)	-
<b>Jumlah</b>		<b>(408.019.400,00)</b>	<b>(70.718.000,00)</b>	<b>(337.301.400,00)</b>	<b>476,97</b>

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi ini disebabkan karena kurang catat nilai amortisasi atas Aset Tak Berwujud sebesar Rp412.019.400,00 dan lebih catat nilai amortisasi karena penyesuaian kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp4.000.000,00.

### 5.6.3.12 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya

(Rp1.676.151.463,25)

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar (Rp1.676.151.463,25) disebabkan adanya lebih catat nilai penyusutan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan	-	25.889.406,60	25.889.406,60	100,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	-
3	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	-	35.003.260.345,80	35.003.260.345,80	100,00
4	Dinas Perhubungan	-	224.169.062,30	224.169.062,30	100,00
5	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(211.648.338,00)	-	211.648.338,00	-
6	Sekretariat Daerah	(1.480.503.125,25)	282.650.000,00	1.763.153.125,25	623,79
<b>Jumlah</b>		<b>(1.676.151.463,25)</b>	<b>35.535.968.814,70</b>	<b>(37.212.120.277,95)</b>	<b>(104,72)</b>

### 5.6.3.13 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai

Rp2.487.500,00

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai sebesar Rp2.487.500,00 merupakan koreksi atas kelebihan utang honorarium panitia pelaksana kegiatan tahun 2019 pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan rincian sebagai berikut:





(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.487.500,00	3.000.000,00	(512.500,00)	(17,08)
2	RSJD Surakarta	-	(52.500,00)	52.500,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>2.487.500,00</b>	<b>2.947.500,00</b>	<b>(460.000,00)</b>	<b>(15,61)</b>

#### 5.6.3.14 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa (Rp5.442.463.983,84)

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa sebesar (Rp5.442.463.983,84) dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(5.442.463.983,84)	1.500.016,00	(5.443.963.999,84)	(362.927,06)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	13.750.000,00	(13.750.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(5.442.463.983,84)</b>	<b>15.250.016,00</b>	<b>(5.457.713.999,84)</b>	<b>(35.788,25)</b>

Adapun penyebab terjadinya Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta tersebut karena:

1. Penambahan hutang jasa layanan karena pada penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 belum sesuai dengan pengakuan piutang BPJS pada 2019 sebesar Rp5.443.013.784,84.
2. Pengurangan nilai hutang obat-obatan karena selisih harga faktur yang dijadikan dasar untuk mencatat perhitungan utang obat-obatan Tahun Anggaran 2019 dengan dokumen pembayaran yaitu sebesar Rp549.801,00.

#### 5.6.3.15 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain (Rp1,68)

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar (Rp1,68) merupakan koreksi atas selisih koma karena pembulatan antar akun di neraca dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(0,89)	0,22	(1,11)	(504,55)
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,08	(0,11)	0,19	(172,73)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	(0,43)	0,43	(100,00)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(0,42)	(0,99)	0,57	(58)
5	SKPKD	(0,21)	(0,58)	0,37	(64,02)
5	Dinas Koperasi dan UMKM	(0,24)	-	(0,24)	-
<b>Jumlah</b>		<b>(1,68)</b>	<b>(1,89)</b>	<b>(0,21)</b>	<b>11,11</b>



**5.6.4 Ekuitas Akhir**

**Rp36.397.640.492.434,77**

Ekuitas akhir sebesar Rp36.397.640.492.434,77 dengan uraian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	36.397.640.492.434,77	37.100.999.040.516,25	(703.358.548.081,53)	(1,90)
	Jumlah	36.397.640.492.434,77	37.100.999.040.516,25	(703.358.548.081,53)	(1,90)



## BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1 GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa. Secara geografis Wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sepanjang 791,76 Km, terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Secara administratif, Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, yang mempunyai 576 kecamatan dengan 753 kelurahan dan 7.809 desa.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha dan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk BPS tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.978.759 jiwa, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 1.944.857 jiwa, diikuti Kabupaten Banyumas sebanyak 1.776.918 jiwa dan Kota Semarang sebanyak 1.653.524 jiwa, keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 121.526 jiwa selanjutnya diikuti Kota Salatiga sebanyak 192.322 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 273.825 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.113 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.260 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kota Magelang sebesar 7.578 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Pekalongan sebesar 6.800 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 478 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 533 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabupaten Purworejo sebesar 656 jiwa/km<sup>2</sup>.

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah didominasi oleh generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,31 persen, generasi milenial sebanyak 24,93 persen dan generasi X sebanyak 22,53 persen dari total populasi penduduk Jawa Tengah. Generasi-generasi ini sebagian besar termasuk dalam usia produktif yang menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi. Struktur penduduk Jawa Tengah yang bekerja menurut lapangan usaha berdasarkan data BPS tahun 2020 sebagai berikut: 1).bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 4,69 juta orang (26,28%); 2).bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,90 juta orang (21,71%); 3).bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,33 juta orang (18,54%). Pandemi Covid-19 berpengaruh lapangan pekerjaan utama, sesuai dengan data BPS tahun 2020, lapangan pekerjaan tahun 2020 dibandingkan dengan Februari 2019 tidak ada perkembangan lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, industri pengolahan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,49 persen diikuti Perdagangan Besar dan Eceran 0,25 persen dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,18



persen. Sementara tenaga kerja pada lapangan usaha yang terjadi peningkatan seperti Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 0,47 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,18 persen; serta Transportasi dan Pergudangan meningkat sebesar 0,16 persen.

## 6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman sebelum merdeka didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

### 1. Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet 1903*), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewest* (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District / Standgeemente* (Kota praja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

### 2. Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawa kecuali Vorstenkondeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik dan Ku* (Kelurahan).

### 3. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

## 6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sejak merdeka sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
7. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
8. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
9. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
12. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
13. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;



14. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2013 s/d 2018; dan
15. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2018 s/d 2023.

DPRD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 1955 sampai sekarang dipimpin 10 (sepuluh) orang, yaitu:

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2012 s/d 2019; dan
10. H. Bambang Kusriyanto. B.Sc, Tahun 2019 s/d sekarang.

#### **6.4 VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

##### **Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

”MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

“TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”

##### **Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

##### **Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;



5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel; dan
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

#### **6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;



14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.



## BAB 7 PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, diwajibkan kepada SKPD untuk menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
GANJAR PRANOWO

